

Sekapur Sirih:
Prof. Gottfried Zantke
Bremen Univeristy, Germany

Editor:
Achmad Zainal Arifin, Ph.D | Hisnuddin Lubis, MA

Bunga Rampai Sosiologi Perkotaan



BUNGA RAMPAI SOSIOLOGI PERKOTAAN

Editor: Achmad Zainal Arifin, Ph.D | Hisnuddin Lubis, MA

Penata Sampul: Lisa Aditia Putra

Penata Isi: Lisa Aditia Putra

Manggar Media

Munggur RT 06, No. 16, Srimartani Piyungan Bantul,
Yogyakarta 55792.

WA: +6282337720478

E-mail: mediamanggar@gmail.com

Website: www.manggarmedia.com

Laboratorium Sosiologi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email: isoshum@uin-suka.ac.id

Instagram: [@labsos_uinsuka](https://www.instagram.com/labsos_uinsuka)

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal,
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Website: fisib.trunojoyo.ac.id

Perpustakaan Nasional

Katalog dalam Terbitan (KDT)

BUNGA RAMPAI SOSIOLOGI PERKOTAAN

Yogyakarta: Manggar Media, 2019

xxxi + 193 hlm, 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-61802-8-5

Cetakan Pertama: Desember 2019

Kata Pengantar

Kaprodi Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

&

Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya

Universitas Trunojoyo

Alhamdulillah, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya buku “Sosiologi Perkotaan: Sebuah Bunga Rampai”. Proses penantian yang cukup panjang karena harus tertunda beberapa kali, seakan terbayar sudah. Buku ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kedatangan Prof. Gottfried Zantke, seorang *senior expert* dalam kajian arsitektur dan tata kota dari Bremen University, di Prodi Sosiologi sebagai *visiting professor* untuk program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama melalui kerjasama dengan Senior Experten Service (SES) di Jerman. Apa yang disajikan oleh Prof. Zantke selama sebulan penuh berada di Prodi Sosiologi, cukup menginspirasi para dosen dan mahasiswa yang berminat terhadap kajian Sosiologi Perkotaan. Penekanan terhadap model pendekatan socio-cultural yang masih jarang diperhatikan dengan serius oleh para pemegang kebijakan pengembangan kawasan perkotaan, menjadi masukan berharga sekaligus menjadi pintu masuk kajian sosiologi perkotaan. Beragam model kota yang ada di Jerman yang beliau hadirkan sebagai alat pembanding dengan kota-kota yang ada di Indonesia, telah memunculkan semangat buat kami un-

tuk mengajak rekan dosen dan beberapa mahasiswa yang mengambil matakuliah Sosiologi Perkotaan untuk mengadakan mini riset yang sebagian hasilnya tersaji dalam tulisan ini.

Berangkat dari serangkaian kegiatan *Seminar Series*, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Prof. Zantke kami hadirkan menjadi pengantar dalam buku ini. Perhatian yang cukup besar dari Prof. Zantke atas sering terabaikannya aspek sosial dan budaya dalam pengembangan sebuah kota, menjadi pintu masuk yang sangat menginspirasi kami untuk berani menyajikan beragam aspek sosial, budaya, ekonomi, termasuk agama kedalam perspektif pengembangan kota-kota yang ada di Indonesia. Berbagai konsep pengembangan kota yang ada di Jerman, mulai dari model kota metropolitan (industri), kota pelabuhan, maupun kota yang berbasis pada pengembangan kampus (pendidikan), menunjukkan bagaimana pendekatan sosio-kultural seharusnya menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari konsep pengembangan kawasan perkotaan. Kehadiran berbagai model ruang publik yang bisa diakses dengan mudah oleh warga kota tentu akan memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan nilai-nilai sosial-budaya masyarakatnya.

Salah satu permasalahan menarik terkait dengan pengembangan kota yang mendapat perhatian dalam buku ini, misalnya munculnya kecenderungan bagi sebagian pengembang untuk membangun kluster-kluster perumahan khusus untuk agama tertentu. Dalam konteks ini jelas bahwa aspek sosial-budaya sedikit banyak akan terabaikan atau sengaja diabaikan karena disadari atau tidak, model pengembangan semacam ini akan memunculkan segregasi di masyarakat yang berpotensi untuk memunculkan berbagai masalah sosial. Selain itu, wacana seputar kehidupan politik terkait bagaimana elit pemerintah harus menjaring aspirasi warga terkait pengembangan kawasan, pengembangan kampoeng cyber, green-city, dan pembentukan kawasan-kawasan ekonomi kecil-menengah, juga menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan perkotaan.

Terakhir, kontribusi dari rekan-rekan di Prodi Sosiologi, Universitas Trunojoyo, sebagai wujud kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya dan menghasilkan satu buku tentang Perempuan Madura, seputar isu-isu perkotaan yang muncul di sekitar wilayah Surabaya dan Pulau

Madura, tentu saja akan memberi warna tersendiri bagi pengkayaan diskursus studi perkotaan di buku ini. Kami berharap, buku bunga rampai ini bisa menjadi sumbangsih kecil yang mengisi kekosongan wacana terkait isu-isu sosial-budaya yang memang sudah seharusnya diperhatikan secara serius oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan dalam proyek pengembangan kawasan perkotaan di Indonesia.

Yogyakarta, 13 Desember 2019

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Sekapur Sirih	
Sociocultural Approach in Urban Development	ix
<i>Prof. Gottfried Zantke Bremen Univeristy, Germany</i>	
Menuju Revolusi 4.0: Dinamika Digitalisasi di <i>Kampoeng Cyber</i> <i>Erte Tiga Enam (36) Taman Yogyakarta</i>	1
<i>Dr. Muryanti, MA</i>	
Demokrasi Akar Rumput Di Masyarakat Perkotaan Yogyakarta (Studi Musyawarah Pembangunan Desa Catur Tunggal, Depok, Sleman)	23
<i>Mochammad Rindho Nugroho & Ahmad-Norma Permata, Ph.D</i>	
Upaya Atasi Permasalahan Kota Melalui Konsep Gc-Sep “<i>Green City</i> <i>and Smart Educational Park</i>”	51
<i>Moh. Hamzah Fansuri & Hisnuddin Lubis</i>	
Car Free Day Sebagai Arena Rekolonialisasi Ruang Publik (Studi Terhadap Car Free Day di Taman Bungkul Kota Surabaya)	61
<i>Mohammad Afifuddin</i>	

Perumahan Syar'i: Segregasi dan Tantangan Merawat Identitas Masyarakat Rurban	75
<i>Achmad Zainal Arifin, Ph.D</i>	
Rona Religius Masyarakat Muslim Perkotaan: Menuju Inklusivisme Dalam Sikap Keagamaan	89
<i>UI Ardaninggar Luhtitiant, S.Sos., M.A</i>	
Upaya Meningkatkan Daya Hidup Perkotaan Pada Komunitas Jogja Muslimah Preneur Community Dengan Perspektif Teori Modal Pierre Bourdieu	115
<i>Irfi Rezqia</i>	
Strategi Bertahan Hidup Komunitas Ledhok Timoho	125
<i>Istianah</i>	
Religiusitas Instrumental: Potret Keberislaman Masyarakat Muslim Kota	133
<i>Lisa Aditia Putra</i>	
Ekonomi <i>Enclave</i> Pedagang Sate Madura Dalam Mempertahankan Hidup di Perkotaan	143
<i>Rohmah</i>	
Pendidikan Politik Fatayat dan Nasyyatul Aisyiah Dalam Pusaran Politik Perkotaan	155
<i>Titik Wardiyah Amini</i>	
Masyarakat Kampung Kreatif di Dago Pojok Bandung	169
<i>Tri Muryani</i>	
Perjuangan Kelompok Marjinal Malioboro	179
<i>Wahdania</i>	

Sekapur Sirih

Prof. Gottfried Zantke

Bremen Univeristy, Germany

Sociocultural Approach in Urban Development¹

Whenever I visit a city for the first time I have a habit. In order to really arrive in that city, to get a feeling for where I am, I take a bus or a tram or a metro to the city center - in most European countries that is the market plac, here for example my home town, Bremen or here Lviv in Ukraine, where I had my last job for the Senior Expert Service. I did the same when I came to Makassar six years ago. This is not my first time in Indonesia. Six years ago I came as senior expert to the architectural department of Alauddin Islamic University in Makassar in order to assist them to reform their architectural study.

When I arrived in Makassar, I realized there was no public transport except Pete-Pete, but in the beginning that was too difficult to understand for a foreigner. As a planner, i need a map of the bus or metro-lines, then I get an orientation and my mental map of the city begins to exist. So I took a taxi and told the driver “ To the city center please”. He looked at me and said “ What address, please, Sir?” so I added “ Just somewhere downtown, where the shops and restaurants are”. “You mean a mall, a shopping centre, Panakukkan Mall?” “No, not a mall, the place, where people meet, spend their time outdoors, go in the evenings.” He shrugged his shoulders, frowned “ Maybe Losari?” I did

[1] Tulisan ini merupakan salinan dari kuliah Prof. Zantke yang diberikan di Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, dalam kapasitas beliau sebagai fellow professor pada pada program Senior Expert Service, pada tanggal 3 Oktober 2017.

not know Makassar then, so I said “ Ok. then, Losari”. I did not know what Losari meant. Losari is part of Makassar’s waterfront, the only pedestrian area of Makassar, and in fact the only attractive meeting place for the public. There are some street food stalls, a sort of square where you can hear small groups or single musicians make music, where you can see youngsters do skateboarding or bike acrobatics. I was lucky to have found the only social place with some urbanity in the whole of Makassar, a city with 1.8 million inhabitants!

So, where else did young people spend their free time then, where did their social activities take place? I could not believe it - they meet in the huge shopping malls of Makassar. Yes, there you can find every kind of restaurants, cinemas, even a temporary ice skating ring (ice ring) and of course shops, shops, stores. These places are totally commercial. Coming from the north of Europe I thought in the beginning “ Oh, of course, it is because of the heat! These malls are climatized - maybe it is an illusion that you can have social life in streets, squares and other urban areas like in Europe, because the climate is against it.” Fortunately I saw other cities in Indonesia later, and Yogyakarta and Solo are good examples, where there is social life in the city on streets, squares, parks. Not so in Makassar! When young people meet there is always the appeal of their environment: “Consume, buy!” It is incredible but that city simply has sold its cores of urbanity, its identity to investors. Nevertheless I cannot deny that in Makassar shopping malls are an important part of the socio cultural infrastructure. I very much liked the students and lecturers and my work at my university, so for me it was worth while to have gone to Makassar. I even came back a second time one year later. But after that I had no desire to see Makassar again! And I do not recommend the city if friends ask me where to go in Indonesia. I can well imagine that a lot of people in Makassar feel like that. It is not their city. What a contrast to Yogyakarta! If you mention in Germany, you go to Indonesia, the smile and say “Ah, Bali!” So I tell them that Java is much more representative for Indonesia, then they smile and say “ Jakarta.” and then I say “Rather Yogyakarta!”

I do not say there is no sociocultural life in Makassar at all. You cannot live without. One example: The German Goethe Institut is an institution which represents German culture in foreign countries, in In-

Indonesia its location is Jakarta. This institute staged a festival of German films in different big Indonesian cities. In Makassar they did it in the big Multiplex cinema in Panakkukan Mall in cooperation with a local film club. This was a group of people interested in cinema. They asked me to comment on some of these films at one of their regular meetings. So I got to know this noncommercial self organized cultural institution, open to everybody, for practical reasons especially for their neighbourhood. They had found a former restaurant where they could meet and show films. There was no support from the local authorities - on the contrary, they had to overcome obstacles like building regulations, licenses etc.

My experience is that sociocultural activities very often happen in spite, not because of urban planning or activities of local authorities! If they succeed, the experience of self organization and overcoming problems with authorities is even more fruitful, leaves them independent and makes them stronger than institutions created by the administration! Another example: I love the tropical fruit in Indonesia, many of which are unknown in Germany. Sirsak, Mangosteen or Durian are not available there, so my breakfast in Makassar consisted of fruit. I could have bought those in the shopping malls. At Carrefour's you could find most of them. Instead I went shopping to Toddopulli Market, a large old bazaar with narrow lanes, provisional sunshade and makeshift stalls. I loved the atmosphere of twilight, the wide variety of stall arrangement, the improvisation talent of the shopkeepers. Obviously the customers liked it too. But city government did not like it and next to the slightly chaotic, improvised, crowded, narrow market they were building a well organized, clean, sterile new market with all the appropriate infrastructure. Shopkeepers did not want it because it meant high rents for the stalls, strictly regulated ways of presentation, a lot of rules and regulations and, first of all, loss of their tradition. Customers did not want it either, but I bet, today Toddopulli's Old Market with its vitality and originality is gone and instead there is one of the stereotype markets like everywhere else. Instead of regarding traditional places like that as assets within the urban framework, authorities often unfortunately do not want imagination and fantasy because they are beyond official control.

At UIN Alauddin there is an architectural department, where architects and planners are educated. How would they design a market?

What are their objectives? Would the result of their planning be something like the old or rather the new Toddopulli Market? As a planner with the task to design a market you have a program, a set of criteria, parameters like the average size of a stall, the necessary width of a passageway, the number of toilets, parking spaces etc. And the result of a planning process will look like that and optimally like this, which is an expensive market hall in Munic. Where does atmosphere fit in this scheme, where character, where peoples wishes - customers' and shopkeepers'? What do you think, which market do people identify with? Which one is their market? Which makes them feel at home in their city?

When I went to university and even now city planning still is regarded as a technical disciplin, which in the first place has to do with drawing, maybe building scale models. The planning department in city government is dominated by architects and engineers, technicians dealing with the physical environment. Very slowly, due to increasing social problems in cities inspite of better economic conditions administrations begin to realize that physical plans are only one and not the most important part of urban planning. A market like Toddopullis Old Market certainly is part of the socioculture of that quarter if not the city's! How can we save this quality of cities, how define conditions favourable to their emerging?

Another example: The Architectural Department of UIN worked on a Slum Clearance Project in the old harbour area if Makassar. I admit, living conditions were difficult there, houses were small, the technical infrastructure was inadequate, part of the houses were derelict. The council had built a subsidized housing estate next to this "slum" in order to replace demolished substandard dwellings by orderly proper tenements. The architecture did not look too bad from the distance . But looking at it closely the impression was much more negative and we understood that people were not keen to move in. Here you see the council housing and these are some impressions of the "slum". Do you understand why people wanted to stay in their small dwellings? The council houses look neglected, the way inhabitants live there seems proof of their social status, their lack of responsibility and self-organization. But I think it is not the reason of the bad state the estate is in

but on the contrary - the behavior of the people is the result of their housing. They are the same kind of people who grow flowers in front of their small dwellings in the existing settlement. They were forced to move to the “nice, modern” council houses when their old houses were demolished and they never identified with those blocks, did not feel at home there and therefore did not care for them (Council houses). I experienced the same story in Soweto, the 3 million “slum” settlement in South Africa (Soweto). Next to the small huts and makeshift houses with their tin roofs there were two blocks of proper council housing - uninhabited! The less people own the more important is their tenure of social activities in their neighbourhood. In Soweto e.g. that were illegal bars, small huts, where they could drink home brewed beer. Outside somebody was watching and as soon as police was seen, this man started to sing and immediately pots with beer vanished and people inside were singing and moving to their traditional music. This was not forbidden, police had no reason to interfere as music and dances in fact were also are part of their - accepted - socio culture!

The solution for the Slum clearance Project in Makassar started with the establishment of ample participation of the inhabitants in the planning process. The big advantage there was the land ownership. The land was property of the ports authority, so there was no imminent speculation. Had it been an investor the process had gone differently. But in Makassar investors were not interested to solve problems of this kind. They could develop their exclusive housing estates at the outskirts of Makassar, on virgin agricultural land where there were rice paddies until then. Wise planners would have defined this as a green belt elsewhere. These new estates are isolated, there is no public transport. This does not seem a problem because inhabitants are well off, everybody has a private car. The neighbourhoods are gated, exclusive instead of integrative. And the only culture of “Citraland” are these Disneyland like sculptures, witness of the bad taste of the developers rather than the socio culture of the inhabitants. How likely is it that there will be socio-cultural development in this estate? How responsible is a zoning which allows this sort of development in isolated places, consuming valuable open space and agricultural land and creating a lot of additional individual traffic in a city which is suffocated by traffic already now? It

is not the scarcity of land which forces Makassar to allow this sort of development. There are vast areas of very low density, plots empty or with undesirable land use like scrap yards in the centre of Makassar. Of course it is more difficult to develop these than simply to consume virgin land at the outskirts. People in Makassar blamed speculation of landowners, Chinese as they presumed. But you only can sell agricultural land with a big profit if zoning allows to build houses there. And it is not the responsibility of landowners to devise master plans - it is the job of city government!

My own city Bremen adopted a different strategy. City government there established a department which collected and published all information about vacant lots, and assisted landowners in selling and interested citizens in buying those lots, adapted building regulations if necessary. The result was that the demand for new residential land dropped considerably. A side effect was that the cityscape improved - vacant lots are seldom a pleasant sight - and first of all that the new homeowners were integrated in existing communities with intact social structure, the absence of which often leads to severe social problems in new settlements. Even former “bunkers” shelters against bombs in world war 2 are listed in this information system. This is an example of a bunker converted into a dwelling - you have to get used to concrete walls of 1 m thickness, but then you could not afford a location like this otherwise!

The temptation is great for architects and urban planners to create new environments, where they can see their imagination come true. After 40 years of planning experience I have lost a lot of illusions, have seen more large scale urban projects fail than succeed - and the emphasis is on “large scale”, because most of the small scale projects were a success. Large scale projects are always developed by investors, small scale projects often allow private people to build their individual house. If you are dealing with socio culture in urban development you cannot ignore the The United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III) and its New Urban Agenda. A year ago this conference took place in Quito, Equador, but the most important policy paper on Sociocultural urban frameworks was created not far from here in Surabaya in Summer 2016. I will come back

on that policy paper again and again, because I do not know a better program for cities to meet the challenges of the future. In the context I am speaking about I want to quote from this policy paper: “ Contrary to current modes of urban development premised on homogenized and universalized models of efficiency and economic rationality, the New Urban Agenda must emphasize place-based urban development that is rooted in and shaped by the people and communities that inhabit it.” Place based, rooted and shaped by people and communities that inhabit it! Existing people and communities. How can that happen in new towns, huge new estates?

I have to admit that there is a big difference between the German and the Indonesian society - the German population is no longer growing whereas the Indonesian is, so the demand for housing is much bigger here. Exploding cities certainly cannot be relieved without larger housing projects. But I try to plead for a moderate increase of densities in existing quarters with low densities and for small extensions of cities rather than new towns in the open landscape. It is very difficult to encourage socio cultural development in big housing estates where everybody is new, nobody has known his neighbor. Even if you are a good willing planner you can fail. In the Seventies of last century my office was in charge of the coordination and supervision of a new estate. Because the land belonged to the city and it was an attractive location we could ask the city to include a condition in the terms of sale new estate that the investor had to build a community room in every block of about 50 flats free of charge. Our idea was that this could be a place where the inhabitants could celebrate birthdays or weddings, have parties or small concerts - whatever social activity you could imagine. When the building was finished the investor came and asked: “Who is in charge of the key? Who takes responsibility for this room?” Very basic questions. We thought the caretaker would be the person but the housing company did not want the responsibility. It took five years until there was a sort of club and the chairman of this club took over the charge of the key!

Optional: My best experience as an architect with my own office was a small estate of 42 family homes individually designed but on basis of three prototypes and a system of common elements. The difference to

investor housing estates built to be sold to yet unknown customers was that my clients were a group of young families who had formed a club in order to get land on leasehold base which is a very rare form of property in Germany. But as a group they could push the administration to give them this leasehold land. In turn the city council wanted that these houses should have a high density which you cannot achieve with single detached houses but you have to build terrace-houses or clusters. My office was commissioned by the council to design the master plan. Had the client been an investor this were an easy task because we then had to fulfil the program of the investor with a bit of freedom for design. But in this case we had 42 single clients for whom we tried to optimize the houses for but which had to be constructed close together. In order to know, what type of family they were and which were their expectations, wishes and last not least their budget we developed a questionnaire and had separate conversations with each family. It turned out that many had impractical ideas, so we had to discuss those. In the end it turned out that we basically had to design three types of houses with a lot of options. We found out that they had difficulties to visualize these houses from a two dimensional plan. So, we built models, scale 1:50, where you could remove the roof and also lift the different stories. So, you could distinguish every single room, you have to keep in mind that then there were no computers, not to mention CAD computer aided design. We had no virtual but physical models. Participation means you have to make your partner understand what he has to decide. There were a lot of common subjects to discuss like “we understand that those roof windows are attractive and are good for the lighting but how do we clean them in 4m height?” In the end they formed a committee for discussing these things. The majority were women, because they knew much more about living in a house than men.

We architect learned a lot in those discussions. Another committee had to accompany our negotiations with the building firms. They wanted a fixed price, and the cheapest way was to get a price for each type of house, but then one price for the whole lot of houses. It turned out that the best offer in total had the relatively highest prices for the smallest type of houses. This meant that a very good overall result was not so good for the economically weakest people. Had we chosen this,

the poorer had subsidized the good price for the better off. Nobody had seen these prices but the small committee elected to accompany the negotiations. The result was that the building firm changed its offer, not in the total end price but suddenly the smallest houses were as cheap as in the best offer for those regarding all tenders. The members of this committee agreed. Now they were people familiar with figures and calculations, because they were professionals, which meant they were opting for the bigger and more expensive housing types. Their decision meant, they had to pay more for their houses to enable those with the smaller houses to pay less! The change of the offer stayed a secret until now for more than forty years, so nobody could take any pride for his generosity. This shows the spirit of that settler's club, and these 42 families were no longer strangers to each other when they moved in. They were and still are a community.

This model was new and unknown before and the media reported about it. Meanwhile it sometimes happens again. More frequent are societies for building a house together without having an investor. Instead an architect organizes the process supported by an elected head of the society. There are different models of this sort of building, sometimes seniors like me who do not want to live lonely, sometimes different generations, sometimes with more, sometimes less shared rooms, kitchens, swimming pools and, quite essential, services like cleaning, medical care etc.

I have told you some stories, given some examples instead of presenting an overall strategy or general instructions how to include socio cultural aspects in urban development. There are certainly spatial and technical aspects, which can be hostile or more favorable for a successful socio culture. Even a non-professional can tell that you will find more sociocultural activities in an Italian town with small pedestrianized streets than in an American city separated by expressways (Los Angeles). We shall have a look later at Dutch or Danish cities where the formation of socio culture was supported by city planning and public buildings.

But development of sociocultural activities is less administrative but more grassroot work, to identify beginning activities and encourage and support them. The most important stakeholders are not the coun-

cil but citizens. We should analyze the role of sociocultural activities in existing neighborhoods and cities and what conclusions we can draw for the attempt to establish these in new developments.

Surabaya Papers

I was very glad when I read the request of your university for an expert to strengthen the sociocultural aspect of urban development in your teaching. In forty years of practice as an urban planner I have realized the importance of this aspect in planning and city government. Maybe it is a favour of my age that I have witnessed many shifts of views on urban planning. Until the mid of the last century urban planning was regarded as an aesthetic discipline performed by architects. When I was in university the only degree I could take for urban planning was that in architecture. Urban planning was just one subject among others. Fortunately this was different in London where the Architectural Association School of architecture already then offered a specialized post-graduate study in urban and town planning which incorporated other disciplines like economy, sociology. That was quite advanced then and I was lucky to complete my studies there. Today there is no question about urban planning being a study on its own rights with a lot of sciences being incorporated.

To realize that urban planning was regarded as a fine art once you do not have to go back so far as to the European Renaissance, this is Palmanova in Italy, or to the world-famous architect Le Corbusier with his Cité Radieuse, the radiant city - this was his 1925 plan for modernizing Paris. Lucio Costa conceived his plan for Brasilia 1956, where he took the form of a bird or an aeroplane and planned the capital of Brazil like that - unfortunately it was built and does not work! Neither did this design for artificial islands in Dubai constructed only some years ago - lacking circulation made the waterfront for these million dollar houses deteriorate fast. This design was only driven by speculation, no culture included! The next phase in urban planning was the mere technical view on cities - a good example is the "car dependant city", where just one technical aspect of a city was optimized at the cost of others. Awareness of problems with cities of this kind was roused namely by two books, which had a deep impact on planners "The Death and Life

of Great American Cities” by Jane Jacobs published in 1961 and “The Inhospitability of our Cities. A Deliberate Provocation” by the German sociologist Alexander Mitscherlich published in 1965, both still worth reading today.

My first big project as a planner was the supervision and coordination of a satellite city near Bonn, the former capital of Germany. Mitscherlich and Jane Jacobs had claimed that the garden suburbs with their low density lead to isolation of the inhabitants. The answer of the planners was the slogan “urbanity by density” which of course was very much welcomed by investors who could maximize their profits by concentrating as many flats as possible on the housing land. When I started my job it had turned out that the very dense housing quarters had even more problems - especially because there was little infrastructure. New estates were developed at the periphery of cities whereas shops, restaurants, cinemas and other services were concentrated in the city centres.

This was the time when architects and engineers started to understand that their role was but one in a concert of a lot of different professionals. Another insight was that it was presumption that architects could define the needs of later inhabitants. Instead we had to hear them, organize participation. Fortunately today people would ask for that anyway. For me the consequence of these changes was that I included a department of sociology into my office. That was revolutionary then and not so easy for a freelance planner because then no sociologist’s services were contained in the catalogue of architect’s fees.

Meanwhile mankind has realized how fragile the base of our existence on this planet has become and therefore the new paradigm is Sustainability. Sustainability for a long time was only associated with ecological “green”, later with social and economic issues too. What is new - and I believe that is why your interest in socioculture is very up-to-date - is that lately a fourth pillar has been added to the three existing until then. I quote from a report² of the “United Cities and Local Governments (UCLG), the leading organization of the major drivers of urban development:

[2] Culture: Fourth Pillar of Sustainable Development, Barcelona 2010

“A vision of sustainable development with three dimensions was developed in the second half of the 1980s, namely: economic growth, social inclusion and environmental balance. The report *Our Common Future*, also known as the Brundtland Report (1987), enshrined these three dimensions as the pattern to be used in local, national and global strategies for development. The Rio de Janeiro Earth Summit of 1992 consolidated these three pillars as the paradigm of sustainable development.

It is generally felt, however, that these dimensions alone cannot possibly reflect the complexity of current society. Many voices, including UNESCO, the World Summit on Sustainable Development, and researchers, are calling for the inclusion of Culture in the sustainable development model, since culture ultimately shapes what we mean by development and determines how people act in the world.”

The conclusion of the UCLG “The members of United Cities and Local Governments share the vision that culture is the fourth pillar of sustainable development.” found entrance into the discussions and papers of the United Nations. We should have a close look at a policy paper by the Unit 2 “Sociocultural Urban Framework” which reflected the recommendations of the Preparatory Committee for the “HABITAT III” United Nations Conference on Housing and Sustainable Development. I take it as an encouraging fact that this committee held its conference not so far away from here - in Surabaya in July 2016.

In respect to the New Urban Agenda, which defines the priorities of the United Nations for the next 20 years this policy paper proposes the “Sociocultural Urban Framework.” I think this paper is so essential that everybody should know it, who has a stake in shaping the future of a city or aspires to do so as hopefully many of students and lecturers of this faculty do. I give you the internet address so you can download it: www.unesco.org/fileadmin/multimedia/hq/clt/pdf/policy-paper-en.pdf.

I would really like to ask you to do so because I think we will come back to this paper as a reference in the course of our further work. I do not think I can do better than this committee in formulating the essentials and also I did not come across any redundancies. But I am aware that even the best document will leave students tired when you read to them more than two pages maximum. So I will rather try to summarize, trusting that you will read the original for yourselves.

The paper establishes and explains these elements of the sociocultural urban framework:

Towards people-centred cities

The committee characterizes the following “urban sensibilities” and I would like you to consider these in respect to your city Yogyakarta or maybe - if you are from elsewhere - your home city.

- Recognition of and respect for a diversity of cultural forms, knowledge, and practices.
- Conviviality amongst people of different ethnic, social and income backgrounds.
- Diversity of the built environment and layering of the old and the new understanding of the dynamic and evolving nature of economies, societies and the fabric of towns and cities.
- Opportunities for positive human interaction – with urban forms and spaces as well as with other people.

Looking at the first I am reminded of Makassar where I only realized when they took me for a group photograph how much they identified with the Bugis part of the population and the differences to others. Note that there are four different languages spoken in Makassar. Conviviality - I realized that below the surface there still were prejudices against the Chinese - of Indonesian nationality like the other citizens - but when I criticized the urban sprawl, housing estates replacing rice-fields, I was told “because the Chinese had speculated with the land”, as if it was not the city council who decided over the masterplan. But what I very much appreciate is the conviviality among different religions in this country and I do hope that this element of Pancasila will last inspite of rising fundamentalism in other parts of the world. About diversity of the built environment and layering of the old and the new: I told you about my sadness that the vanishing old Todipulli Market, no diversity or layering but just the replacement by a new one.

Understanding of the dynamic nature of economies and societies: Yogyakarta is a place where the built urban environment still makes you aware of yesterdays feudal society, therefore do not consider the Kraton a building just of touristic interest. Opportunities for positive human interaction: I told you about my first impressions of Makassar - my

disappointment about the lack of public places and interaction spaces there. Cities can only become or remain people-centered if, quote, “the focus remains not purely on the economy and on returns on investment. The social and cultural aspects of urban life – the way in which different groups in society are able to engage with, contribute to and benefit from what towns and cities have to offer – is equally important. This ‘use value’ of towns and cities must be recognized, protected and nurtured”. Here I have to contradict to the document: The social and cultural aspects of urban life are not equally important as the economy and the returns on investment - indeed they are much more important. Unfortunately today this seems forgotten as money has replaced values and culture.

Place-based Urban Identities

In my last lecture I criticized the new housing estates at the outskirts of Makassar who were either uniform or imitating European feudal architecture like “Citraland”. These could be anywhere in the world and are sacrificing any form of identity. On top of that they are gated communities, which lead to segregation of citizens. If you know examples of newer buildings in Yogyakarta or other cities in Indonesia with place based identities I would ask you to show us in one of our next meetings.

Inclusive, Safe and Human-scale Built Environments

The way our environment is built can promote social interaction and provide opportunity for different ways of living, it can give room for culture to develop or jeopardize it. This depends on - quote - “the way in which we design”, but also “invest in and use our built environment”. So in some way or another it is up to all of whether our cities succeed or not.

Maybe the oldest reason for building cities were safety and security. In the beginning it was against enemies from outside. Today menaces from inside the city are more frequent, so a city should be designed and managed to provide safety. Police stations may be part of this but social and economic activities in its public spaces are equally essential. This was one of the central claims of Jane Jacobs : “Eyes on the street!” If people are watching - from their flats, houses, shops what is happening on the street there are fewer crimes. I must admit that times have changed from the

mid of last century to now - today there are crimes in street, on railway stations although people are watching. It is up to all of us that we are more attentive and feel more responsible - so that our eyes add to the common security.

Cities Conducive to Social Cohesion and Respect for Diversity

The examples of gated communities for the better off and ghettos for immigrants or jobless demonstrate the trend to segregation - creating aggressions and fear. The common use, social encounter of different groups on public spaces fosters a feeling of community. Markets are shared places and activities, street festivals, this is the Bremen Music Festival and La Strada Theatre Festival with free entrance so everybody can participate, regardless of social or economic status or ethnic origin brings together people of different backgrounds. In Isfahan in Iran I was fascinated to see every kind of people adopting the public space of a huge place in the city centre for having their picnicks in Germany impossible because you must not step upon the lawn! This place, the Meidan was built by Shah Abbas I 400 years ago. Forget about the battles he has won, forget about the laws he has passed - this legacy makes him immortal!

You might know that we have many migrants in Germany and their integration is crucial. In Bremen we try to celebrate the cultural wealth of the other ethnics, their music, their food, their habits in order to fight xenophobia and stigma. Making the variety visible also enriches the urban society and is a counterweight to the homogenization of environments. The migrants of last century e.g. have contributed to a very attractive gastronomy. Today there are more Italian than other restaurants in Germany and they are better! A big problem everywhere is that poorer people cannot afford high rents in the city centers and are forced to live at the periphery where ghettos are springing up. When I lived in London gentrification displaced poorer people from the central working class district Paddington to the periphery of London. Often processes like that happen and the better off people don't even realize except that they have another choice of flats in the city. But in this case they did, because all of a sudden the offices in the city lost their night cleaners. There was a simple reason: night cleaners used to work at times when public transport did not operate and the displaced people had no chance to reach these offices at night any longer.

Culture-based Urban Development

Urban governance has to respect cultural actors like artists, historians, heritage experts and cultural producers and the media and promote partnerships. Only a shortsighted city government is just oriented to financial revenues. The identification of citizens with their city, the fame of a city are more important than well filled public coffers. The cultural heritage has to be integrated in the development and it is a wrong concept if cultural heritage is only seen as a means to attract tourism. I have seen cities - world heritage sites where the population is alienated because of the impact of tourism. Venice has become nothing but a large museum where inhabitants demonstrate because they feel oppressed by the masses of tourists and where huge cruising ships exceed the scale of the historic houses. Planning should never happen without participation of the local population.

In the second part the report deals with the challenges policy has to overcome and tries to suggest solutions.

Persistent urban inequalities contribute to social and spatial fragmentation

I am confident that in your faculty everybody is fully aware of the inequality between privileged and underprivileged parts of the urban population like lower income communities, ethnic minorities, refugees and migrants - with children, women and elderly people often double disadvantaged. We have to realize that these inequalities are eternalized and aggravated by the fact that (quote)"in many instances the social structures and spatial logic of urban areas are treated in isolation of one another. To advance equity, inclusion, and safety in the city, the New Urban Agenda must address the social fabric of the city alongside its infrastructure, design and assets. Also, access to culture (libraries, heritage, creativity, new media) should be given equal consideration if sustainable transformation is to be taken seriously." A holistic approach is needed to overcome this fragmentation.

Increasing threats to urban heritage and cultural diversity undermine social cohesion and urban resilience

If we accept that culture, identity and place making are linked then we understand the importance of the cultural heritage for the built envi-

ronment. (Quote) “In many cities around the world, the built cultural heritage is threatened or neglected, and in danger of destruction. There is a lack of inventories of cultural heritage and cultural producers. Cultural heritage is very narrowly defined in policies and implementation and as a result, development projects are frequently pitted in opposition to its preservation and to creative practices.” Germany e.g. has quite clear laws about cultural heritage but in spite of that it often happens in poor cities like my home town Bremen that the city council forces the heritage office to approve a new housing project on a protected site only because a mighty investor promises to supply housing which is needed. And this happens in a country where corruption is low.

Another threat to the heritage is environmental degradation. I have just been to Iran where historic town centers are often constructed with air dried mud bricks. If their plaster is not maintained continuously they crumple away fast. But they constitute the identity of these desert towns and attract tourism. If this degradation is caused by the normal climate how much more heritage is endangered and lost by disaster. With the climate change the frequency of natural disaster will be increasing. So in disaster risk reduction our precious and rare heritage should be given a special observance.

Homogenization of urban environments threatens cultural diversity and social exclusion

When teaching architecture in Makassar I reminded my students not to design houses like I see them in Europe every day and unfortunately I see them in many places in Indonesia. As the committee states “globalization and homogenization are not only resulting in the standardization of the built environments but also in cultural identities and expressions being increasingly homogenized or being denigrated as inferior. Culture is by very nature contextual and varies from people to people and from place to place. The challenge is to strengthen diversity against tendencies to globalize or to reduce cultural expressions to marketing products. Cultural diversity, including a range of institutions, practices, world views, people, forms, experiences, languages and knowledge systems, is being eroded or deliberately erased as communities are assumed to be homogenous and monolithic.” Indonesia in

particular with its many folks, languages, habit has an incomparable variety of culture that on the whole this danger to culture does not seem to be too great. But this is different to the built environment. New housing projects are uniform, and if Starbucks, Mc Donalds and

Kentucky Fried Chicken are present in every city centre then you are not far away from a future where you can hardly distinguish city centres - in Europe often not even whether you are in England, Germany or France! There are public strategies to avoid this homogenization. I know it is difficult to find them but first of all city governments have to be open to them, have to understand the advantages of diversity.

Privatization of public space leads to social exclusion. Gated communities obviously lead to segregation, but in my city I can observe more subtle forms. Our market square is open to everybody for walking, resting, street music, skateboarding. Now I realize that an increasing lot of cafés and restaurants have occupied large parts of this square for offering outside seating, attractive for visitors but what about the people who used these parts for their activities? Nice for the better off people that they have plenty of restaurants but what about all those who used this square without being able to spend money there? City governments tend to reinforce the “public order” by displacing these groups but this does not serve the coherence of a citizenship, leave alone inclusion of refugees or migrants.

Lack of coherence between cultural and urban policies threatens urban sustainability

The committee writes: “In most cities around the world, laws and policies around the safeguarding and management of cultural heritage and creative production are separate from those focused on urban development. This divergence is detrimental to both the cultural assets and to sustainable urban development.”

This is a statement which I cannot fully agree to. It might be true that funding is easier if both spheres are combined in one department. But when working in city government I experienced that decisions were more obvious if a conflict between new projects and conservation of heritage were discussed between different departments. If a decision was made inside a department without political discussion that was in most cases at the expense of heritage.

Cultural rights remain overlooked or insufficiently respected

In this paragraph among others potential conflicts between cultural and human rights are addressed. I quote “Cultural rights are firmly embedded in the universal human rights framework. Hence, the implementation of human rights must take into consideration respect for cultural rights, even as cultural rights themselves must take into consideration respect for other universal human rights norms.” I can imagine that you ask whether this has to do anything with urban development? I will try to give you one example. Same as Indonesia Germany respects the human right to practise religion. Religion cannot be divided from culture. How should you decide if there is a building application for a synagogue just beside an existing mosque?

Communities should be strongly supported to contribute to urban planning and management

Let me just quote the full text of this paragraph because this might be an issue where students in this department might be needed later. “On this issue, a further challenge is to ensure that communities engage with and work alongside local authorities. To achieve this, people’s capacity to contribute to the planning and management of towns and cities must be enhanced through education focused on participation. Government capacity for communication must also be increased, and technical jargon removed from these processes. A core issue to be addressed is to broaden the scope of citizen participation processes. Urban dwellers must play a part in the decisions that relate to the ecological, social, economic, political and cultural environment. Currently, the most excluded from these processes are those with high levels of vulnerability, including women and children, older people and people with disabilities. This results in disregard for their needs in urban policies.”

The built environment should be designed in ways that ensure security and foster inclusion

“In sum the challenge is to overcome insecurity and violence in cities that result from social exclusion, environmental hazards, and economic, social and political inequality.” This sentence summarizes the contents of this paragraph but there is one special aspect which I will not conceal: “An additional aspect of safety and security in urban areas is related to the urban informal economy, without which large swathes of the population would be

even more vulnerable. As such, steps must be taken to enhance and embrace the livelihood practices of informal workers (Foto), rather than penalizing or criminalizing informal workers and undermining or destroying their activities. In cities around the world, street vendors have carved out space in what the Self Employed Women Association (SEWA) calls “natural markets” – near transport hubs or public institutions – to sell goods to passersby. When these natural markets are destroyed and vendors are evicted, economic diversity can also be severely affected. In the long run this can lead to greater insecurity in cities since street vendors and informal recyclers contribute to safety in public spaces.

Building local capacities and harnessing human capital is a key challenge for cities

I think this headline is self explanatory. Looking at you I feel that at least Yogyakarta can deal with this challenge!

Access to cultural and communication resources remain insufficient

The committee pleads for local media which are open to everybody. Central quote: “In taking a people-centred approach to urban development, the role of the cultural and creative industries is of crucial importance, determining not only how content is created, but how it is produced, distributed and used. All inhabitants of cities should have access to the means of expression and dissemination as guarantees of their cultural diversity.

The potential of migrations for urban development should be further recognized and enhanced

In Germany the problem of refugees and illegal migrants is one of the key issues in the upcoming election. At the peak in 2015 more than 1 million people came to Germany. (Fotos)The integration of so many people from different cultures is maybe the biggest problem German cities are confronted with. So I could suscribe every sentence in this paragraph. As I did not read much about refugees coming to Indonesia I first thought, migration would not pose a problem to this country. Meanwhile I learnt that the issue in Indonesia is not immigration but transmigration. I read about Transmigrasi but there is also the constant movement from the rural country into the cities, causing similar challenges as contained in this report.

Prioritizing Policy Options – Transformative Actions for the New Urban Agenda

The third chapter of the document names the policy actions resulting from the analysis in the preceding chapters. I recommend you to read those. Here I will restrict my lecture to just giving you the headlines of the policy recommendations as they are the logic consequence of the analysis given before and derived from them accordingly.

Key Actors For Action – Enabling Institutions

Some stakeholders for developing cities are: Central government / national authorities; Local government / authorities; Civil society; Academia; Media; International organizations; and Private sector.

- As this is a university, let us just look into what role the committee defines for the academia:
- Support the promotion of and transmission of cultural practices.
- Engage in policy design and implementation through Schools of Urban Planning, Human Geography, and Sociology, among others.
- Support evidence-based decision-making by providing analyses based on research and systematic studies/surveys of socio-cultural processes that take place in urban areas.

I am not informed to what extent the promotion and transmission of cultural practices is sustained at this university but I am convinced that the next two points describe what we are doing here. Studying human and social sciences you most certainly should be the ones who engage in civil society, so that apart from your role here in the academia I hope that you will be active in civil society as well.

Policy Design, Implementation and Monitoring

The paper proposes policy recommendations and guidelines for policy design, monitoring and evaluation. This implies a set of indicators. These indicators should aim at measuring: the management of programme and policy implementations; the identification of good

practices and shared knowledge; and transparency, accountability and innovation. Here you see an example of a table with the policies and the parameters for a monitoring process. In my eyes this is a very practical instrument for actors forcing them to go beyond non-committal political statements in election campaigns.

Conclusions

The conclusions repeat in a concentrated form what we have heard already. So I will only read the paragraph most relevant for urban planning and as final picture I give you an impression of the Hafencity in Hamburg which illustrates the social activities enabled by the provision of multi purpose urban open space:

Develop Sustainable Built Environments:

- Nurture and promote cultural diversity and creativity in identity, expressions, built environment, urban development, regeneration, and adaptive reuse
- Ensure access to basic infrastructure and affordable housing for all urban dwellers including the poor, women, youth, elderly, the disabled, marginalized and vulnerable communities such as migrants, in order to enable cultural diversity so people can be active cultural producers and consumers
- Help create mixed-used inclusive public spaces, both formally designated and designed as well as those that become informal public spaces that provide necessary opportunities for social integration and culture based activities. A variety of public places are necessary in cities to enhance livability and to leverage culture and creativity to foster social cohesion and participation in urban decision making.

Thank you very much for your patience.

**Bunga Rampai
Sosiologi Perkotaan**

Menuju Revolusi 4.0: Dinamika Digitalisasi di *Kampoeng Cyber Erte* *Tiga Enam (36) Taman* Yogyakarta

Dr. Muryanti, MA

Prodi Sosiologi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,

UIN Sunan Kalijaga

Email : newsyant@yahoo.com

Intisari

Digitalisasi yang terjadi di Kampoeng Cyber merupakan perjalanan perubahan yang terjadi dalam komunitas. Pada awalnya masyarakat di kampung tersebut dikenal karena kreatifitas seni dan peninggalan sejarah Taman Sari yang begitu melegenda. Seiring dengan perkembangan teknologi yang mengarahkan menjadi masyarakat digital, Kampung Taman pun menyambut gegap gempita dengan mentransformasi diri menjadi Kampoeng Cyber. Tujuan penulisan ini hendak menganalisis tahapan perubahan yang terjadi dalam komunitas Kampoeng Cyber menuju Revolusi 4.0. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan metode pengambilan data secara observasi dan wawancara dengan pengelola dan masyarakat. Analisis teori dengan menggunakan Perubahan Sosial karena Teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dilakukan oleh komunitas untuk sharing informasi tentang berbagai macam aktivitas dan kegiatan kolektif di Kampoeng Cyber, misalnya: kerja bakti, siskamling, arisan atau dasa wisma. Penggunaan media sosial sebagai salah satu perkembangan teknologi tidak menjadikan masyarakat semakin individualis, akan tetapi semakin terlibat aktif dalam kegiatan bersama. Artinya komunikasi secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan media sosial berjalan beriringan untuk perkembangan kolektif masyarakat. Komunitas digital seperti Kampoeng Cyber layak dikembangkan di wilayah lain sebagai basis Indonesia menuju Revolusi 4.0.

Kata Kunci: Kampoeng Cyber, Revolusi 4.0, Digitalisasi, Komunitas.

Pendahuluan

Industri 4.0 pertama kali diungkapkan di Hannover Fair pada tahun 2011¹ oleh Kanselir Jerman, Angela Merkel. Angela menekankan bahwa industri 4.0 ini memerlukan CEBIT 2015 (*Centrum für Büroautomation, Information Stechnologie und Telekomunikation*) sebagai bagian hal penting dari platform industri 4.0. Lembaga tersebut terdiri dari perusahaan besar dan menengah, serta adanya asosiasi antara sains, politik dan industri VDMA, ZVEI dan BITKOM.²

Industri 4.0 ini merupakan sebuah proyek sebagai strategi teknologi oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerasi manufaktur. Industri ini merupakan kelanjutan dari fase digitalisasi sektor manufaktur yang digerakan oleh penggunaan data dalam skala besar, penggunaan komputasi dan koneksitas, terutama jaringan dengan power yang rendah serta kemampuan dan kecerdasan bisnis, bentuk baru hubungan antara manusia dan mesin, misalnya dengan adanya sentuhan terhadap diri sendiri dan pengembangan perintah digital dalam berbagai hal, misalnya penggunaan robot dan teknik cetak 3D. Industri 4.0 merupakan sebuah industri yang harus memperhatikan: (1) keamanan IT; (2) keandalan dan stabilitas komunikasi dari mesin ke mesin; (3) integrasi proses produksi; (4) menghindari terjadinya perusakan IT; (5) mengetahui bagaimana caranya melindungi industri; (6) kurangnya keahlian yang memadai dan (7) keengganan untuk merubah dan kehilangan banyak pekerjaan untuk proses yang otomatis dan prosesnya yang dikontrol oleh IT.³

Kata kunci dari industri 4.0 yaitu pembangunan yang merubah industri tradisional secara mendasar⁴. Konsep industri 4.0 dapat dilihat dari strategi penting untuk tetap mempertahankan kompetisi di masa depan, termasuk di dalamnya design dan implementasi dari produk yang kompetitif dan pelayanan yang baik sebagaimana rapinya admin-

[1] Tae Kyung Sung, "Industry 4.0 : Korea Perspective Technological Forecasting and Social Change," *Department of MIS, Kyonggi University Republic of Korea* 132(2018) (t.t.): 40-45.

[2] Merkel (2015) dalam Frank Rennung dkk., "Service Provision in the Framework of Industry 4.0," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 221 (2016) 372-377 SIM 2015 (t.t.).

[3] Kyung Sung, "Industry 4.0 : Korea Perspective Technological Forecasting and Social Change."

[4] Manhart K (2015) dalam Rennung dkk., "Service Provision in the Framework of Industry 4.0."

istrasi serta sistem logistik dan produksi yang fleksibel⁵. Semua aktivitas manusia terkoneksi oleh sistem komunikasi (Internet of Things (IoT), Internet of Services (IoS) dan Internet of People (IoP)⁶. Sistem komunikasi dengan menggunakan internet menyebabkan manusia terkoneksi dengan mesin. Pada konteks ini kemampuan manusia dapat dibandingkan dengan mesin.

Tabel 1. Perbandingan Kemampuan Manusia dan Mesin Berdasarkan Perbedaan Kualitas dan Keterampilan

	Pem-beda	Perbe-daan	Manusia	Mesin
K A P A S I T A S	Perbe-daan Kualitas	Pekerjaan Mekanis	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan dan keragaman yang tinggi antar individu • Dapat dikembangkan melalui training dan kepuasan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat rendah • Dapat berdegradasi seumur hidup atau disebabkan oleh pemeliharaan yang kurang bagus
		Pengam-bilan Keputu-san	<ul style="list-style-type: none"> o Perbedaan dan keragaman yang tinggi antar individu yang dipengaruhi oleh kemampuan memecahkan masalah, pengalaman dan level kualitas o Ketertarikan personal, masyarakat dan kelembagaan yang dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> o Rendah atau tinggi dipengaruhi oleh kualitas data, derajat kepuasan yang dipengaruhi oleh manusia dan kompleksitas dari permasalahan di lapangan
	Kemam-puan Men-jalankan Tugas	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kompleksitas dan sensitivitas resiko dari keputusan yang dibuatnya ➢ Relativitas yang tinggi tergantung dari kapasitas individu, motivasi dan komitmen ➢ Kemungkinan yang tinggi dari kelelahan kerja dan ketidakpuasan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sangat rendah (tergantung dari usia hidup mesin tersebut, yang berhubungan dengan rata-rata kerusakan dan kualitas perbaikan) 	

Sumber : Fazel Ansari; Selim Erol; Wilfried Sihn, 2018⁷

[5] Kemf, D (2014) dalam Rennung dkk.

[6] F Zazulka dkk., "Industry 4.0 : An Introduction in The Phenomena," *IFAC-PapersOnline* 49- 25 (2016) (t.t.): 118–012.

[7] Fazel Ansari, Salim Erol, dan Wilfried Sihn, "Rethinking Human-Machine Learning in Industry 4.0: How Does the Paradigm Shift Treat the Role of Human Learning 8th Con-

Industri 4.0 ini juga mengacu pada otomatisasi dan perubahan data dalam teknologi manufaktur, termasuk di dalamnya segala hal yang berhubungan dengan internet dan komputasi cloud. Sehingga sangatlah nampak bahwa era revolusi Industri 4.0 diwarnai dengan adanya kecerdasan buatan (*artificial intelegence*), super komputer, rekayasa genetik, teknologi nano, mobil otomatis dan inovasi.⁸

Dengan menggunakan prinsip dari *design industry* 4.0: (1) koneksi, yaitu kemampuan mesin dan manusia yang masing-masing terhubung oleh internet, yang dikenal dengan istilah Internet of Things (IoT) atau the Internet of People (IoP); (2) transparansi informasi, yaitu kemampuan sistem informasi untuk menghasilkan visualisasi dari dunia nyata; (3) asistensi visual dan fisik, yaitu kemampuan sistem memvisualisasikan informasi untuk membuat keputusan informasi dan (4) sistem informasi yang terdesentralisasi dari atas ke bawah yang menggunakan mesin.⁹

Hasil studi yang dilakukan tentang industri 4.0 terhadap 661 perusahaan, diantaranya 21 perusahaan terkenal yang unggul di bidang sains, asosiasi dan perdagangan menunjukkan ada permasalahan yang relevan di masa depan, yaitu: (1) berhubungan dengan hal yang kompleks; (2) kemampuan berinovasi dan (3) fleksibilitas¹⁰. Ditambah lagi, proyek di masa depan dari Industri 4.0 dilakukan dengan memberikan dukungan pada produk individu dengan skala besar yang terintegrasi dengan pelanggan dan sesama bisnis yang lain dalam proses kreasi dan inovasinya¹¹.

Pada penjelasan yang berbeda, Sigman Gabriel menekankan ada 5 topik yang relevan sebagai implementasi industri 4.0, yaitu: (1) dimensi kebijakan industri (pembangunan bisnis model baru yang berbasis rantai nilai (value chain) tradisional; (2) dimensi politik ketenagakerjaan (pengembangan tenaga kerja yang memiliki skill yang tinggi); (3)

ference on Learning Factories 2018-," *Advanced Engineering Education and Training for Manufacturing Innovation Procedia Manufacturing* 23(2018) (t.t.): 117–22.

[8] Venti Eka Satya, "Strategi Indonesia menghadapi Industri 4.0," *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* Vol X/ No.09/I/Puslit (Mei 2018).

[9] Kyung Sung, "Industry 4.0 : Korea Perspective Technological Forecasting and Social Change."

[10] Spath D (2013) dalam Rennung dkk., "Service Provision in the Framework of Industry 4.0."

[11] BMBF (2014) dalam Rennung dkk.

dimensi keamanan data (sistem yang bisa melindungi secara aktif dari akses yang tidak dikenal); (4) dimensi kebijakan perusahaan kelas tengah (perusahaan yang mampu menjaga kreativitas dan inovasi) dan 5) dimensi kebijakan (mengatur sumber bangunan dari aplikasi yang bisa memberikan keuntungan)¹². Perkembangan industri 4.0 sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor: (1) integrasi dari teknik sederhana (sebatas relasi ekonomi) ke teknik yang kompleks dengan membentuk jaringan ekonomi yang kompleks; (2) digitalisasi produk dan penawaran layanan dan modul pasar yang baru.¹³

Bangsa Indonesia pun berupaya untuk mengikuti perkembangan industri 4.0 sebagai bagian dari masyarakat global sehingga tidak ketinggalan dalam perkembangan informasi dan teknologi. Partisipasi tersebut dilakukan dengan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalannya. Pada tanggal 30 April-4 Mei 2018, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan ke Ceko dan Jerman sebagai upaya pemerintah Indonesia menerapkan industri 4.0 dan meningkatkan investasi. Industri 4.0 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk, tetapi juga menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia karena diambil alih oleh robot. Implementasi industri 4.0 untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, terkait industri makanan-minuman, kimia, otomotif, tekstil dan elektronik. Penekanannya yaitu penggunaan teknologi untuk peningkatan daya saing. Langkah yang dilakukan Kementerian Perindustrian menghadapi industri 4.0: (1) meningkatkan keterampilan angkatan kerja; (2) memanfaatkan teknologi dan digital untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM; (3) teknologi digital untuk *big data*, *autonomous robot*, *cybersecurity* dan *cloud* dan (4) mendorong inovasi teknologi melalui pengembangan *start up*.¹⁴

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengejar ketertinggalan era Industri 4.0 ini perlu didukung oleh masyarakat secara keseluruhan, baik pada level individu atau pun komunitas. Dengan adanya gerakan yang bersifat personal atau pun kolektif yang dilakukan secara massif dapat mempercepat pergerakan industri 4.0. Tentunya dengan didukung

[12] Gabriel S (2015) dalam Rennung dkk.

[13] Zazulka dkk., "Industry 4.0 : An Introduction in The Phenomena."

[14] Eka Satya, "Strategi Indonesia menghadapi Industri 4.0."

oleh Pemerintah dalam penyediaan sarana dan infrastruktur jaringan yang mudah dan murah, baik perangkat keras atau pun lunak. Tulisan ini hendak mengkaji tentang bagaimana komunitas yang sudah melakukan proses digitalisasi dengan melakukan literasi digital dalam skala luas pada level komunitas teritorial dalam hal ini kampung. Kampung yang pada awalnya memiliki keunggulan di bidang seni dirubah menjadi kampung yang memiliki infrastruktur dan keterbukaan terhadap teknologi dalam setiap aktivitas kehidupan. Beberapa keberhasilan yang sudah diperoleh dengan adanya kemandirian masyarakat dalam mengakses, berbagi dan membangun konten-konten positif untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh komunitas, tidak menjadikan masyarakat semakin individual. Sebaliknya, kolektivitas masyarakat semakin menguat dengan kehadiran teknologi yang dipergunakan untuk sharing permasalahan di kampung. Data yang diperoleh dalam tulisan ini diperoleh melalui metode kualitatif dengan melakukan observasi ke Kampoeng Cyber, wawancara dengan perangkat serta masyarakat Kampoeng Cyber.

Apa dan Dimanakah Kampoeng Cyber?

Kampoeng Cyber Yogyakarta menjadi salah satu destinasi bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Kampung ini terletak di tengah-tengah tempat wisata Taman Sari kota Yogyakarta. Tepatnya di Taman KT I/434, Patehan, Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Persis di pintu keluar wisata Taman Sari sayap kiri. Sehingga, kampung ini sudah pasti setiap harinya dikunjungi atau setidaknya dilewati oleh wisatawan yang berkunjung ke Taman Sari. Layaknya kampung wisata, tentunya tidak berbeda jauh kondisinya dengan tempat wisata lainnya, situasinya ramai, banyak penjaul makanan dan minuman.

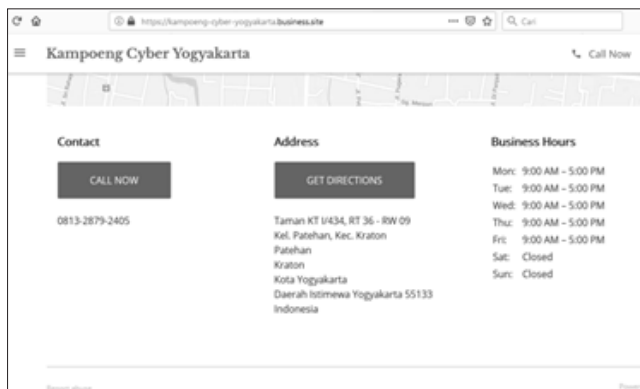
Secara tata letak, kampung ini mirip dengan perkampungan kota di Yogyakarta pada umumnya. Melewati gang kecil bahkan jalan menuju kampung ini hanya bisa dilewati oleh 2 motor. Mobil tidak bisa mengakses masuk ke gang menuju Kampoeng Cyber. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di kampung ini merupakan warga kelas menengah bawah dengan mengandalkan usaha jual jasa, seni dan pengusaha ke-

cil. Warga Kampoeng Cyber bukan lah masyarakat elit yang memiliki pendidikan dan berprestasi tinggi.¹⁵

Nama jalan yang digunakan juga menarik, diantaranya: Jalan Rudiantara yang diresmikan pada tanggal 19 September 2017 (Medekominfo sekarang) dan Jalan Zuckerberg, nama dari pendiri Facebook atau CEO Facebook, Mark Zuckerberg. Kedua nama tersebut pernah mengunjungi kampung ini. Dan sepertinya salah satu dari mereka meresmikan langsung Kampoeng Cyber, yang terlihat dari papan informasi yang ada di peta, dan terdapat foto-foto dokumentasi, salah satu dari kedua nama di pasang meresmikan secara langsung keberadaan Kampoeng Cyber.

Kampung ini dilengkapi dengan CCTV di setiap gang. Selain itu, juga terdapat mural di tembok-tembok sepanjang gang menuju Kampoeng Cyber. Nuansa yang digunakan memang nuansa media sosial dan teknologi informasi yang sedang banyak diakses hari ini. Misalnya gambar wifi, gambar akun media sosial seperti facebook, twitter atau google. Tidak hanya nansa media sosial, kampung ini juga sebenarnya menawarkan budaya-budaya lokal. Tidak terlepas dari nuansa Yogyakarta sebagai kota budaya itu sendiri, sebagaimana yang nampak di sekretariat Kampoeng Cyber, dengan sebuah tag line yang ada di banner "*Kampoeng Cyber : Kampoeng Sadar Lingkungan, Budaya dan Teknologi*". Tagline tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di kampung ini berupaya tetap mempertahankan kebudayaannya di tengah arus informasi dan teknologi yang sangat cepat. Kegiatan budaya yang ditawarkan di Kampoeng Cyber, diantaranya: membatik, sablon, alat musik tradisional dan menawarkan jasa lain seperti catering, wisata guide, alat memancing, pijat bayi atau sewa *sound system*. Semua informasi terkait dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Kampoeng cyber ini diupload melalui website resmi Kampoeng Cyber yakni <https://kampoeng-cyber-yogyakarta.business.site/>.

[15] Mohamad Final Daeng, "Membalik Kutukan Internet dan Globalisasi," *Kompas*, 29 Mei 2010, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/29/12085425/membalik.kutukan.internet.dan.globalisasi>.



Gambar :
Situs Kampoeng Cyber
Yogyakarta

Sumber:
Kampoeng-Cyber-Yogyakarta,
diakses Desember 2018

Salah satu inisiator dari Kampoeng cyber ini yaitu Pak RT, Agustinus Sasongko yang menggantikan Ketua RT sebelumnya, Heri Susanto. “Panggil aja aku Koko,” katanya. Situasi rumahnya sangat menunjukkan kelengkapan berbagai macam perangkat teknologi. Selain adanya pantauan CCTV, ruangan utama rumah Pak RT juga dipenuhi oleh beberapa piagam penghargaan. Terlihat tahun 2018, kampung ini mendapat penghargaan sebagai kampung literasi oleh kominfo. Menurut Pak RT (Mas Koko) hal ini karena dalam penggunaan literasi media. Masyarakat kampung ini memang sudah terbilang cerdas dalam menggunakan internet.¹⁶

Identitas kampung dengan istilah Kampoeng Cyber yaitu Kampung Taman RT 36 ini memang menyediakan wifi. Bahkan kabel internet terpasang ke semua KK yang ada di RT 36. Dari jumlah rumah warga sebanyak 25 rumah, 23 rumah sdah tersambung dengan kabel internet. Sedangkan 2 rumah tidak tersambung karena mereka tidak bisa mengoperasikan disebabkan usia manula.¹⁷Pada awalnya tagihan internet yang harus dibayar oleh warga sebanyak Rp 80.000 per bulan, kemudian menurun menjadi Rp 50.000 per bulan karena hampir semua warga kampung. Dengan kecepatan akses kurang lebih 1 mbps

Dilihat dari pantauan akun Facebook Taman Erte 36, beberapa aktifitas yang diposting memang seputar pengumuman tentang berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan di kampung dan mengajak partisipasi aktif warga. Misalnya pengumuman rapat, pengumuman kun-

[16] Agustinus Sasongko (Koko), *Dinamika Kehidupan di Kampung Cyber*, Februari 2019, Kampung Cyber.

[17] Daeng, “Membalik Kutukan Internet dan Globalisasi.”

juangan dan pengumuman agenda yang sudah dilakukan di Kampoeng Cyber. Kegiatan baru-baru ini yang dilakukan di Kampoeng Cyber yakni peluncuran situsweb sebagai Etalase Bisnis Bersama di Kampoeng Cyeber, yaitu www.kampoengcyberdaya.com. Situs web tersebut berisikan katalog produk dan informasi UMKM yang dimiliki masyarakat Kampoeng Cyber. Situs web tersebut merupakan kerjasama dengan Niaga Hosters adalah satu perusahaan penyedia web hosting dan Dinas Koperasi dan UMKM DIY.¹⁸

Gambar 2 : Beranda Facebook Kampoeng Taman ErTe Tiga Enam



Sumber : <https://facebook.com/TamanErteTigaEnam> (Kampoeng Cyber)

Penyebutan Kampoeng Cyber merupakan gambaran bahwa masyarakat di sini seluruhnya sudah menggunakan internet. Menurut Koko, warga masyarakat baik yang anak-anak, dewasa maupun orang tua sudah memiliki bekal yang cukup terkait dengan literasi digital. Literasi digital tersebut diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital yang disajikan melalui sumber informasi yang berbasis internet. Sepuluh tahapan proses literasi digital tersebut: mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusi,

[18] Aditya Jaya Iswara, "Geliat Kemajuan Digital di Kampoeng Cyber Yogyakarta," *Good News from Indonesia*, 14 Mei 2019, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/05/13/geliat-kemajuan-digital-di-kampoeng-cyber-yogyakarta>.

memproduksi, berpartisipasi dan berkolaborasi.¹⁹ Dengan adanya bekal literasi tersebut, penggunaan internet oleh warga tidak mengubah sifat-sifat warga, terutama kolektifitas dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang dihadapi bersama. Penggunaan teknologi merupakan salah satu pengembangan komunikasi, yang digunakan untuk sharing informasi dan pemasaran hasil karya seni. Tagline yang digunakan juga seperti yang disebut di atas, “*Kampoeng Cyber: Kampoeng Sadar Lingkungan, Budaya dan Informasi*”. Walaupun harus diakui bahwa secara langsung, penggunaan media baru ini cenderung bebas dan kesulitan untuk memantau, khususnya bagi anak-anak.

Awal Mula Kampoeng Cyber

Hal yang menjadikan Kampoeng Cyber ini menjadi salah satu kampung yang melek internet diawali dari keunikan proses menjadinya. Pada awalnya masyarakat di sini tidak begitu mengenal teknologi. Latar belakang masyarakat di sini kebanyakan wiraswasta, terutama seniman, memiliki usaha-usaha kecil, kerajinan-kerajinan batik atau kaos lukis. Akan tetapi dalam perkembangannya, mereka menyadari bahwa di masa depan, teknologi pasti akan dibutuhkan dan menentukan. Pemikirannya berkembang bukan hanya untuk individu semata, akan tetapi lebih luas bahwa teknologi dapat mempengaruhi warga untuk lebih maju karena persaingan di masa mendatang pasti akan melewati teknologi informasi.

Pada tahun 2008, awal mula pengembangan jaringan di wilayah ini supaya warga bisa mengakses informasi dengan mudah dan murah. Jika biayanya (pemasangan dan bulanan) ditanggung bersama tentu biaya tersebut bisa lebih ringan. Jadi konsep awalnya berbagi untuk kepentingan bersama. Supaya warga bisa menikmati internet. Akan tetapi proses tidak mudah untuk membiayai kepentingan bersama. Mengingat pada waktu itu internet masih belum familiar, pengetahuan terbatas dan kemampuan pembiayaan masyarakat sangat minim.

Padaahal untuk mengakses internet membutuhkan komputer sebagai alat utama. Semula mereka hanya menggunakan beberapa komputer, terutama milik Mas Koko sebagai Ketua RT yang banyak digunakan.

[19] Yanti Dwi Astuti dkk., *Muslim Milenial Ramah Digital: Mari Tabayyun dalam Berinteraksi* (Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Saat itu komputer masih belum familiar. Karena masih awal, hanya sedikit sekali ketertarikan warga pada pengembangan internet. Akhirnya berproses-berproses hingga sekitar 2 tahunan itu 80% masyarakat sudah terkoneksi dengan internet. Kurang lebih 7 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2015, 100% warga sudah menggunakan internet. Warga memiliki semangat untuk mengetahui tentang internet, belajar bersama-sama dan membiayai secara kolektif. Sebagaimana pernyataan Mas Koko:

“Dari situ mereka bisa lebih berkembang. Khususnya dari sisi usaha dan sisi informasi. Untuk biaya, juga di sini Swadaya dari awal sampai sekarang dan itu juga salah satu penguatan kita kenapa bisa bertahan hampir 11 tahun komunitas ini”.²⁰

Kemandirian dan kesadaran warga secara mandiri menjadi kunci awal pengembangan Kampung Cyber ini. Warga berpartisipasi aktif dalam bertindak untuk kepentingan masyarakat sendiri, tidak serta merta mengandalkan campur tangan pemerintah. Dimana partisipasi sendiri adalah keikutsertaan warga dalam proses formulasi, pengesahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keadilan sosial²¹. Pada saat geliat kampung sudah mulai kelihatan, Kominfo baru berkunjung ke kampung, sehingga bisa dikatakan Pemerintah tidak secara langsung mendukung pendirian Kampung Cyber ini.

“Sebenarnya Pemerintah tidak secara langsung support kepada kami, dukungan mereka ke kampung ini hanya berkunjung saja”.²²

Ide awal pembangunan Kampung Cyber ini sebenarnya sangat sederhana. Mas Koko sebagai sekretaris RT pada tahun 2008 mempunyai keinginan menyampaikan informasi yang berhubungan dengan warga dalam waktu yang cepat. Informasi tersebut bisa diterima oleh semua warga RT tanpa terkecuali. Sehingga tidak ada alasan bekerja menjadikan warga tidak peduli dengan permasalahan bersama. Apabila informasi tentang kegiatan RT bisa diterima oleh semua warga menjadikan kekompakan dan kemeriahan karena sebagian besar warga bisa terlibat. Pada awalnya, hanya saya di kampung ini yang memiliki kom-

[20] Sasongko (Koko), *Dinamika Kehidupan di Kampung Cyber*.

[21] Muryanti, “Demokrasi dan Partisipasi,” dalam *Panduan Bantuan Hukum bagi Paralegal* (LBH Yogyakarta, 2010).

[22] Sasongko (Koko), *Dinamika Kehidupan di Kampung Cyber*.

puter yang bisa digunakan secara bersama-sama. Seiring dengan berjalannya waktu, komputerisasi berjalan dengan cepat diiringi dengan pengetahuan warga yang meningkat tentang informasi dan teknologi yang tidak bisa dengan mudah dipisahkan dari komputer menyebabkan kesadaran warga meningkat untuk mewujudkan Kampoeng cyber. Pada tahun 2015, pada saat Mas Koko menjadi ketua RT yang membawahi 48 KK tersebut, gagasan Kampoeng Cyber ini perlahan namun pasti, dapat diwujudkan.

Sosialisasi tentang ide mewujudkan Kampoeng Cyber ini dilakukan secara bertahap. Pendekatan pertama dilakukan kepada bapak-bapak yang setiap malam berkumpul di pos ronda untuk jaga malam. Obrolan santai tentang perkembangan teknologi dilakukan secara intens tiap malam yang tidak terbatas waktu. Kadang bisa berjam-jam, terkadang hanya lima belas menit karena banyak permasalahan warga yang dibicarakan. Mengingat perkembangan teknologi ini harus dipraktikkan, disela-sela ronda pun ada sesi pembelajaran secara bersama bagaimana mengakses teknologi internet tersebut.

Pentingnya penggunaan internet ini disampaikan dengan menggunakan analogi sederhana yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan membandingkan penggunaan media online dan media offline. Penggunaan media online dalam membaca berita lebih unggul dibandingkan dengan membaca koran. Media online memberikan update informasi secara cepat (berita detik ini bisa disampaikan hari ini juga), tidak harus menunggu esok hari serta murah biayanya. Membaca koran yang biasa dilakukan selama ini tidak bisa mengupdate informasi secara cepat (berita hari ini ditayangkan esok hari), mahal dan tidak ramah lingkungan karena menggunakan kertas yang menghasilkan sampah. Pada intinya adalah bagaimana mengubah kebiasaan mereka yang sebelumnya menganggap internet itu sebagai sesuatu yang asing menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari. Mengingat semua kegiatan dapat dibantu dengan menggunakan internet.

Hal yang paling ditekankan kepada warga masyarakat di awal yaitu pentingnya penggunaan internet untuk berbagai macam kegiatan positif. Literasi media tersebut disampaikan sudah sejak lama pada tahun 2008 sehingga pemahaman tentang internet sehat itu sudah dimiliki oleh warga masyarakat saat ini. Penggunaan internet yang semakin

massif, tidak mempengaruhi warga masyarakat untuk memanfaatkan internet untuk berbagai macam kegiatan yang kurang bermanfaat. Namun demikian, literasi media pun tetap kita lakukan sebagai salah satu pengingat bagi warga untuk selalu menggunakan internet secara benar, mengingat penggunaan internet merupakan aktivitas yang tidak bisa dikontrol oleh siapa pun.

Konsistensi yang dilakukan oleh masyarakat di Kampong Cyber dalam kedewasaan menggunakan internet sehat ini mendapatkan penghargaan dari Kominfo. Mereka memberikan penghargaan atau award untuk kategori komunitas literasi digital pada tahun 2018. Setelah Kampong Cyber ini mendapatkan penghargaan, banyak komunitas lain yang mengikuti kampung ini dengan membuat komunitas internet. Tidak adanya konsistensi dalam pengembangan menjadikan banyak komunitas yang tidak bisa bertahan lama dan berguguran. Proses seleksi alam pun terjadi dalam pengembangan komunitas internet ini.

Kemampuan bertahan Kampong Cyber ini disebabkan oleh berbagai macam faktor pendukung. Kekompakan seluruh warga, mulai dari anak-anak, bapak-bapak, pemuda-pumda, bahkan ibu-ibu untuk terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan yang dilakukan di Kampong Cyber menjadi kunci utama bisa bertahan hidup. Tanpa adanya keaktifan dan semangat seluruh warga dalam mengelola komunitas internet pasti tidak bisa bertahan. Selain keaktifan dari semua warga, hal penting lainnya untuk bisa bertahan dengan adanya sentuhan inovasi dalam pengembangan. Hal yang sederhana, dari nama kita selalu memikirkan bagaimana pengembangan kampung ini di masa depan. Pada awalnya kampung ini terkenal dengan berbagai macam obyek wisata sejarah yang dikenal dengan Kampung Taman. Kemudian kita mengimpikan kampung ini lebih dari sektor wisata yang bisa dikembangkan, akan tetapi update dalam perkembangan teknologi. Kita memilih Kampong Cyber, layaknya Kampung Inggris yang ada di beberapa daerah lain. Mereka mengembangkan diri ke Internasional, akan tetapi tidak meninggalkan tradisional yang mengakar kuat di dalamnya. Kampong Cyber pun memiliki keinginan yang sedemikian rupa.²³

[23] Sasongko (Koko).

Penggunaan Internet di Kampoeng Cyber

Semua masyarakat di Kampoeng Cyber menggunakan internet untuk berbagai macam keperluan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Jaringan yang digunakan adalah jaringan lokal, yang menghubungkan semua rumah dengan jaringan kabel. Hal tersebut yang menyebabkan instalasi jaringan cukup panjang. Mengingat terhubung menyebabkan semua memiliki akun masing-masing yang berbeda. Jaringan server intinya berada di rumah Mas Koko, yang menjadi pusat data Kampoeng Cyber. Di beberapa titik, ada beberapa rumah yang dipasang modem yang menghubungkan 3-5 rumah. Secara otomatis, warga yang tinggalnya dekat Mas Koko akan terhubung dengan modemnya Mas Koko. Sementara itu, fasilitas wifi bisa digunakan untuk di luar ruangan.

Masyarakat menggunakan internet untuk berbagai macam keperluan. Berbagai macam kegiatan sosial, misalnya penyelenggaraan kumpulan warga, kegiatan dasawisma, arisan ibu-ibu atau bapak-bapak, kerja bakti, adanya berita lelayu atau pun berbagai macam hajatan penyampaian informasi atau undangannya dilakukan melalui media sosial. Sebagaimana familiar saat ini dengan menggunakan WA atau pun Facebook yang dimiliki oleh RT, yang dikenal warga dengan “Kampung Taman Erte 36”.

Adanya berbagai macam kegiatan warga masyarakat atau pun kumpulan warga yang masih berjalan tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial bersifat integratif. Teknologi yang masuk dalam sistem AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration and Laten pattern maintenance*) menyebabkan semua sub sistem yang berada di dalam sistem tersebut melakukan penyesuaian. Hal ini disebabkan teknologi dalam perspektif ini ditempatkan sebagai sub sistem dari luar yang mempengaruhi sistem di dalam.²⁴ Artinya komunikasi secara langsung yang selama ini sebagai sebuah sistem yang mapan, tidak serta merta hilang dengan hadirnya infrastruktur teknologi informasi. Sistem komunikasi langsung tersebut akan menyesuaikan perubahan dengan adanya sistem komunikasi online. Artinya komunikasi secara langsung (off line) dan komunikasi dengan menggunakan media sosial berjalan beriringan. Hal yang membedakan dengan kampung lain yakni penggunaan teknologi

[24] Nanang Martono, *Sosiologi perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*, 3 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 207.

internet dalam penyelenggaraan kegiatan di kampung. Faktor penyebabnya yaitu kesediaan infrastruktur di Kampung Cyber serta keterbukaan masyarakat terhadap teknologi yang diserap untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada warga dengan menggunakan sistem online. Hal yang paling sering dilakukan yaitu proses pengurusan administrasi kependudukan (KTP, pembayaran pajak atau pembayaran BPJS). Selain itu di semua jalan sudah menggunakan CCTV untuk memantau kedatangan warga lain ke Kampung cyber. Semua warga bisa mengakses CCTV, sehingga semua warga juga memantau kedatangan tamu yang datang. Semua warga juga bisa memantau. Tidak hanya saya saja, karena ini terkoneksi dengan internet di sini jadi semua warga bisa melihat.

Tabel 1. Interaksi melalui Internet dan Teknologi Informasi

No	Jenis Interaksi	Jenis Laman Internet yang Diakses
1.	Penerapan CCTV	Di setiap gang dan terkoneksi di semua rumah warga
2.	Data Administrasi Kependudukan	Website
3.	Undangan Rapat	Facebook dan Whatsaap
4.	Undangan Kegiatan	Facebook dan Whatsaap
5.	Pemasaran Produk	Facebook dan Instagram
6.	Promosi Akun Bisnis	Website

Sumber : Analisa Data Primer, 2019

Mereka yang memiliki usaha menggunakan internet untuk promosi usaha dengan menggunakan web atau media sosial (instagram atau facebook). Tentunya berbagai macam usaha yang dilakukan; jualan batik, promosi wisata, aneka cinderamata khas Jogja, aneka kuliner khas Jogja, aneka jasa atau pun menjual hasil karya seni (lukisan atau *handycraft*). Hampir separuh, kurang lebih 34 usaha yang dijalankan oleh warga menggunakan promosi melalui internet. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Tutik (40 thn), salah satu pengusaha kaos lukis. Usaha kaos lukisnya dipasarkan melalui media sosial, salah satunya Instagram dengan akun Dije_Titix @Waroeng Loekis. Penggunaan instagram dapat meningkatkan jumlah penjualan usaha.²⁵

[25] Tutik(40), Bentuk Promosi Usaha di Kampung Cyber, 10 Februari 2019, Kampung Cyber.

Perubahan di Kampoeng Cyber

Menurut penuturan Pak Hartono (79 thn), Kampung Taman dikenal sebagai kampung seniman, yang secara spesifik pada keterampilan seni lukis. Media lukis yang digunakan sangat beraneka ragam, di kain (batik dan kaos), kulit (wayang), gamelan atau pun di dinding dalam bentuk mural di tembok gang-gang yang mengelilingi kampung. Semua mural-mural merupakan hasil karya anak-anak kampung. Dari-pada mereka mencorat-coret yang merusak, media dinding bisa digunakan untuk media berkesenian yang positif. Apabila mereka bosan dengan satu gambar, akan diganti dengan lukisan yang baru. Keaktifan tersebut menunjukkan bahwa semua usia memiliki keterampilan melukis, baik anak-anak, pemuda atau pun ibu-ibu.²⁶

Bakat kesenian lukis yang digeluti oleh masyarakat di Kampung Taman yaitu melukis corak klasik. Bentuk lukisannya berupa gambar hewan dalam ukuran besar, misalnya burung garuda, banteng atau pun gajah. Gaya lukisannya disebut dengan Sabarang. Warga masih banyak yang mempraktikkan Gaya Sabarang. Sedangkan, melukis dengan corak Polan sudah jarang dipraktikkan oleh warga karena kebalikannya dengan gaya Sabarang, ukurannya lebih kecil-kecil dan detil.

Keterampilan melukis tersebut seolah diwariskan warga secara turun temurun kepada anak cucunya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Hartono sebagai seorang seniman seni lukis mendapatkan keterampilan melukis dari orang tuanya. Pada awalnya hanya diiming-imingi oleh orang tua kalau mau melukis akan mendapatkan uang, jadi rajin melukis. Kegiatan melukis yang dilakukan secara berulang-ulang dengan semangat, pada akhirnya menjadikan masyarakat di sini memiliki *skill* melukis. Keterampilan melukis diwariskannya juga kepada anak cucunya. Secara formal, diantara mereka ada yang melanjutkan pendidikan di ISI jurusan seni rupa atau pun mereka yang belajar secara otodidak dan praktik dengan trial and error. Keterampilan yang diwariskan, dilanjutkan dengan atau tanpa pendidikan formal, menjadikan warga Kampoeng Cyber terampil melukis dengan menggunakan berbagai macam media. Hasil karya seni dalam berbagai macam bentuk (kaos, batik atau pun gamelan) yang dimiliki Kampung Taman ini

[26] Hartono(79), Sejarah Kampung Cyber, 11 Februari 2019, Kampung Cyber.

bisa memikat pengunjung dari domestik atau pun luar negeri. Bahkan beberapa warga asli Kampung Taman banyak yang menikah dengan Warga Negara Asing dan tinggal Luar Negeri karena keahliannya dalam melukis.

Sejarah Kampung Taman merupakan kampung seni, walaupun berbagai macam pekerjaan selain pekerjaan seni, juga digeluti oleh masyarakat untuk bertahan hidup, misalnya: berjualan burung, berjualan di pasar dengan berbagai macam barang atau pun membuka aneka jasa. Perkembangan kampung seni menjadi Kampoeng Cyber baru lima tahun terakhir. Mengingat eranya saat ini perkembangan teknologi informasi, keberadaan Kampoeng Cyber ini menjadi sangat menarik perhatian masyarakat. Ketertarikan pengunjung sangat tinggi dengan adanya dinamika pengeloan IT yang dilakukan secara terstruktur oleh perangkat kampung yang disertai dengan partisipasi aktif dari seluruh warga desa. Pengunjung beraneka ragam, mulai dari mahasiswa yang melakukan penelitian, anak-anak SMA dari berbagai daerah di Indonesia yang tidak hanya berkunjung tetapi menginap untuk belajar IT sampai dengan masyarakat umum.

Ramainya pengunjung ke Kampoeng Cyber disebabkan perkembangan teknologi yang selalu menjanjikan perubahan, kemudahan, kemajuan, peningkatan produktivitas, ketepatan dan kecepatan dan popularitas.²⁷ Walaupun sisi yang lain, perkembangan teknologi juga memunculkan kecenderungan berpikir: (1) tumbuhnya reifikasi (pandangan teknologi yang luas seharusnya bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari); (2) manipulasi (teknologi mampu menghasilkan pencitraan yang melebih-lebihkan dari sifat aslinya); (3) fragmentasi (adanya spesialisasi dalam pembagian kerja) dan (4) individualisasi (semakin menguatnya subyektivitas yang disertai dengan melemahnya kolektivitas dalam masyarakat).²⁸ Hal tersebut mengindikasikan bahwa teknologi memiliki dua sisi mata uang yang kegunaannya dipengaruhi oleh siapa yang memakainya. Pada konteks masyarakat di Kampoeng Cyber ini, mereka memanfaatkan teknologi untuk menguatkan kolektivitas kelompok. Fakta ini menunjukkan hal yang berbeda dari kecende-

[27] Martono, *Sosiologi perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*.

[28] Munandar Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi: mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arab Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

rungan pemikiran tentang pemanfaatan teknologi yang lebih subyektif menjadi lebih obyektif.

Perkembangan teknologi bersifat kolektif apabila ide dasar pengembangan dari teknologi itu untuk menumbuhkan jiwa kolektivisme dalam masyarakat. Ide ini yang dikembangkan di Kampoeng Cyber. Implikasinya masyarakat kampung melek teknologi untuk berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari. Komunikasi untuk berbagai macam kegiatan kampung dishare melalui media sosial, sehingga masyarakat yang mengetahui dan menerima manfaat informasi sangat banyak dan beraneka ragam. Kegiatan di Kampoeng Cyber pun menjadi lebih semarak dan kerukunan warga menjadi meningkat. Teknologi hanya menjadi sarana, akan tetapi tidak merubah watak dasar masyarakat yang memiliki modal sosial kebersamaan. Bahkan modal sosial kebersamaan itu sendiri, tetap dipelihara dengan berbagai macam aktivitas yang menyatukan warga masyarakat, diantaranya: bermain olahraga bersama setiap sore, ronda setiap malam dan berbagai macam kumpulan kampung yang diselenggarakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak.

Penutup

Penggunaan internet di Kampoeng Cyber merupakan dinamika masyarakat sendiri yang menyadari pentingnya penggunaan internet dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka membangun infrastruktur secara mandiri, tanpa tergantung bantuan pemerintah. Kemandirian dan kolektivitas untuk kemajuan bersama menjadi dasar penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari tidak melunturkan kebersamaan, akan tetapi justru menguatkannya sehingga kesejahteraan kolektif bisa terwujud. Sebagaimana taglinenya "*Kampoeng Cyber: Kampoeng Sadar Lingkungan, Budaya dan Informasi*". Literasi digital untuk kepentingan komunitas menjadi pondasi penting untuk pengembangan melek teknologi pada skala nasional. Keberlangsungan penggunaan internet bisa dikontrol, membangun konten positif dan menanggung beban infrastruktur teknologi secara kolektif. Penggunaan internet di Kampoeng Cyber belum serta merta menuju proyek industri 4.0 yang saat ini menjadi mainstream di beberapa negara yang mana aktivitas manusia terkoneksi oleh sistem komunikasi (Internet of Things (IoT), Internet

of Services (IoS) dan Internet of People (IoP). Tetapi setidaknya dalam masyarakat terjadi perubahan dalam berinteraksi dengan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh internet. Perubahan yang terjadi di Kampong Cyber ini lebih menunjukkan sisi baik dari janji teknologi untuk menguatkan keberlangsungan hidup kolektif.

Masih butuh waktu negara ini untuk menuju proyek Industri 4.0, setidaknya mengkloning ide dari Kampong Cyber ini di kampung-kampung dan desa-desa yang lain. Sehingga secara nasional ide proyek Industri 4.0 bisa dinikmati oleh semua warga negara di seluruh pelosok tanah air. Satu hal yang menjadi catatan penting yaitu kecanggihan penggunaan teknologi tanpa mencederai kehidupan kolektifitas warga masyarakat. Sebaliknya, terdapat kearifan lokal yang melekat di Kampong Cyber, kolektifitas semakin dikuatkan dengan sharing informasi menggunakan teknologi.

Daftar Referensi

- Ansari, Fazel, Salim Erol, dan Wilfried Sihh. "Rethinking Human-Machine Learning in Industry 4.0: How Does the Paradigm Shift Treat the Role of Human Learning 8th Conference on Learning Factories 2018-." *Advanced Engineering Education and Training for Manufacturing Innovation Procedia Manufacturing* 23(2018) (t.t.): 117–22.
- Daeng, Mohamad Final. "Membalik Kutukan Internet dan Globalisasi." *Kompas*, 29 Mei 2010. <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/29/12085425/membalik.kutukan.internet.dan.globalisasi>.
- Dwi Astuti, Yanti, Rika Lusri Virga, Lukman Nusa, Rama Kerta Mukti, Fajar Iqbal, dan Bono Setyo. *Muslim Milenial Ramah Digital: Mari Tabayyun dalam Berinteraksi*. Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Eka Satya, Venti. "Strategi Indonesia menghadapi Industri 4.0." *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol XI No.09/I/Puslit* (Mei 2018).
- Hartono(79). *Sejarah Kampung Cyber*, 11 Februari 2019. Kampung Cyber.
- Iswara, Aditya Jaya. "Geliat Kemajuan Digital di Kampoeng Cyber Yogyakarta." *Good News from Indonesia*, 14 Mei 2019. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/05/13/geliat-kemajuan-digital-di-kampoeng-cyber-yogyakarta>.
- Kyung Sung, Tae. "Industry 4.0 : Korea Perspective Technological Forecasting and Social Change." *Department of MIS, Kyonggi University Republic of Korea* 132(2018) (t.t.): 40–45.
- Martono, Nanang. *Sosiologi perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*. 3 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muryanti. "Demokrasi dan Partisipasi." Dalam *Panduan Bantuan Hukum bagi Paralegal*. LBH Yogyakarta, 2010.
- Rennung, Frank, Caius Tudor, Luminosu, dan Anca Dragichi. "Service Provision in the Framework of Industry 4.0." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 221 (2016) 372-377 SIM 2015 (t.t.).
- Sasongko (Koko), Agustinus. *Dinamika Kehidupan di Kampung Cy-*

- ber, Februari 2019. Kampung Cyber.
- Soelaiman, Munandar. *Dinamika Masyarakat Transisi: mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Tutik(40). Bentuk Promosi Usaha di Kampung Cyber, 10 Februari 2019. Kampung Cyber.
- Zazulka, F, P Marcon, I Vasely, dan O Sajdl. “Industry 4.0 : An Introduction in The Phenomena.” *IFAC-PapersOnline* 49- 25 (2016) (t.t.): 118–012.

Demokrasi Akar Rumput Di Masyarakat Perkotaan Yogyakarta (Studi Musyawarah Pembangunan Desa Catur Tunggal, Depok, Sleman)

Mochammad Rindho Nugroho

Alumni Prodi Sosiologi, UIN Sunan Kalijaga

Ahmad-Norma Permata

Dosen Prodi Sosiologi, UIN Sunan Kalijaga

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan Musrenbang di Desa Caturtunggal. Di tengah pesatnya arus pembangunan yang ada di Desa Caturtunggal, sejauh mana pengaruh partisipasi masyarakat dalam Musrenbang mempengaruhi kebijakan pembangunan di Desa Caturtunggal. sebagai ruang publik, Musrenbang menjadi arena pertarungan antar aktor. Keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan ditentukan oleh pertarungan tersebut. Disisi lain musrenbang juga mengandung arti deliberatif. Pertarungan yang terjadi tidak hanya antar aktor saja tetapi juga pada tataran gagasan. Pertarungan gagasan tersebut dimaknai sebagai tindakan komunikatif untuk mencapai sebuah konsensus.

Kata kunci: Partisipasi , Musrenbang, Musyawarah, Pembangunan.

Pendahuluan

Indonesia menjadi kisah sukses sebuah demokrasi. Meskipun dengan berbagai tantangan dan hambatan, bangsa Indonesia mampu membangun tata politik yang mengikuti sistem demokrasi modern. Karena itulah para ahli sering menamakan Indonesia sebagai “demokrasi di tempat yang tidak semestinya” (*an unlikely democracy*).¹ Pertama, Indonesia

[1] Fred Dews, Tom Pepinsky, Molly E. Reynolds, 2019. “Indonesia, an Unlikely Democracy”, The Brookings Cafeteria Podcast March 15, 2019. <https://www.brookings.edu/podcast-episode/indonesia-an-unlikely-democracy/> [diakses 27.05.2019]

adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan di seluruh dunia hanya Indonesia negara mayoritas Muslim yang memiliki demokrasi stabil. Kedua, Indonesia membangun demokrasi setelah 32 tahun berada di bawah rezim “Sultanic authoritarianism” yang merupakan jenis otoritarianisme paling sulit untuk diubah menjadi demokrasi. Ketiga, Indonesia memiliki keragaman sosial (etnis, ekonomi, bahasa, budaya, agama) yang sangat tinggi, yang di tempat lain sering menjadi penghambat besar bagi lahirnya sistem demokrasi yang stabil. Terakhir, Indonesia sebenarnya masih termasuk negara dengan tingkat ekonomi rendah, yang biasanya akan sulit membangun demokrasi yang stabil.

Meskipun banyak diakui keberhasilannya, namun berbagai hambatan di atas telah melahirkan banyak kelemahan dan paradoks dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Penjelasan yang menarik disampaikan oleh peneliti senior Belanda Gerry van Klinken, tentang bagaimana masyarakat Indonesia sangat mendukung demokrasi dan bangga dengan capaian-capaian demokrasi yang ada, namun di saat yang sama juga bersemangat mempraktikkan budaya dan perilaku politik yang justru bertentangan dengan demokrasi itu sendiri: seperti korupsi dan nepotisme. Hal ini terjadi, menurut van Klinken, karena program demokratisasi yang dijalankan secara top down belum bisa selaras dengan nilai-nilai lokal dan kondisi sosial-ekonomi-politik kontekstual masyarakat.²

Oleh karena itu, menjadi penting untuk melacak perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia dari arah sebaliknya, yaitu di kawasan pedesaan. Karena disinilah terjadi pertemuan antara nilai-nilai demokrasi yang bersifat formal dan universal, dengan nilai-nilai budaya politik yang bersifat partikular-lokal. Kajian terhadap praktik di akar rumput akan memberikan wawasan dan pemahaman kepada kita bahwa demokrasi bukanlah benda mati, melainkan proses yang dihidupkan oleh aktor-aktor politik dengan mempertemukan berbagai faktor. Meskipun tidak selamanya upaya tersebut berhasil, namun pengalaman menjalankan praktik demokrasi menjadikan masyarakat akar

[2] Gerry van Klinken, 2016. “Democratic, Corrupt, and The Glue of The Nation: Meet The Provincial Middle Classes,” *Indonesia at Melbourne*, <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/democratic-corrupt-and-the-glue-of-the-nation-meet-the-provincial-middle-classes/> [diakses 27.05.2019]

rumpun memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses tata pemerintahan modern.³

Desa memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan sosial-politik di masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari struktur politik masyarakat, kedudukan desa sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit pada kisaran tahun 1350 M. Dinamika yang terjadi pada desa menjadikan desa menjadi objek yang menarik untuk dikaji lebih dalam dari waktu ke waktu.

Desa berkembang mengikuti arus orde penguasa. Sejak jaman kolonial hingga pasca reformasi, Desa selalu mengalami dinamika. Akhirnya, puncak dinamika desa saat ini adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Desa (UU No. 6 Th. 2014). Undang-undang ini dinilai mampu merubah wajah desa yang selama ini dianggap telah didiskriminasi oleh pemerintah pusat. Adagium yang menyatakan “Desa Tiang Negara” nyatanya hanya menjadi penghuni kasta terbawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Masalah yang dihadapi Desa selama ini adalah berkaitan tentang pembangunan. Stereotype yang muncul ketika membahas Desa adalah udik, ndeso, terbelakang dan jauh dari pembangunan. Keberadaan Stereotype tersebut merupakan hasil konstruksi dari masyarakat modern yang selalu berhadapan dengan kelompok tradisional. Konstruksi tersebut antara lain dengan cara melalui propaganda bahwa kondisi masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memiliki pembangunan pesat dan meninggalkan cara berfikir tradisional. Padahal belum tentu pembangunan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat Desa.

Tujuan dari pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Untuk mewujudkan pembangunan yang menyejahterakan, maka diperlukan berbagai macam perencanaan yang baik agar dampak pembangunan dapat dirasakan tepat sasaran. Salah satu cara untuk menciptakan pembangunan yang tepat sasaran adalah melalui proses Musrenbang Desa. Musrenbang Desa merupakan sebuah forum musyawarah yang mempertemukan stakeholder untuk merumuskan agenda pembangunan di tingkat desa. Pelaksanaan Musrenbang Desa sendiri mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan

[3] Pius S. Prasetyo, 2005. “Desentralisasi Dan Demokratisasi Di Desa: Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Kultur Lokal,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No.1.

Nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004. Selain SPPN, dikeluarkannya Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang perencanaan Desa 1 juga menjadi landasan pelaksanaan Musrenbang khususnya di tingkat Desa.⁴

Musrenbang Desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. dalam forum tersebut masyarakat diajak untuk menyusun kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RPJM disusun Pemerintah Desa bersama masyarakat dan pemangku kebijakan terkait dalam periode 5 tahun sekali. Sementara RKP disusun secara rutin setiap tahun sebagai evaluasi RPJM yang telah ada.

Di Desa Caturtunggal, Musrenbang sudah dilaksanakan sejak medio tahun 2000-an. Ini artinya Musrenbang di Desa Caturtunggal telah lebih dulu ada sebelum kebijakan mengenai Musrenbang disahkan. Pelaksanaan Musrenbang di Desa Caturtunggal sejalan dengan adanya program pemerintah yang berbasis pemberdayaan, antara lain P2KP (Proyek Pengentasan Kemiskinan Perkotaan) atau PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Sehingga bagi masyarakat yang pernah mengikuti PNPM/P2KP tidak begitu kesulitan mengikuti pelaksanaan Musrenbang, walaupun masih banyak pula masyarakat yang belum dapat menyusun program berdasar prioritas.

Kehidupan masyarakat Caturtunggal sangat dinamis. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Wilayah teritorial yang luas dan terbagi dalam 20 pedukuhan membuat Desa Caturtunggal memiliki latar belakang masyarakat yang heterogen. Heterogenitas yang terjadi juga dipengaruhi oleh latar belakang historis Desa Caturtunggal. Desa Caturtunggal merupakan gabungan dari 5 Kelurahan yang berfusi menjadi satu Desa. Kelima Kelurahan tersebut antara lain Demangan, Ambarukmo, Karangwuni, Mrican, dan Kledokan. Kini, kelima kelurahan yang menjadi penopang Desa Caturtunggal menjadi Dukuh di bawah Pemerintah Desa Caturtunggal.

Kehidupan masyarakat yang heterogen juga dipengaruhi kondisi ekonomi Desa Caturtunggal. Kehidupan ekonomi Desa caturtunggal ditopang oleh dua hal yakni pendidikan dan industri niaga dan jasa. Se-

[4] Rianingsih Djohani, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, (tidak ada kota terbit: Asia Foundation, 2008) hlm. 4

bagai pusat pendidikan, Desa Caturtunggal memiliki 3 perguruan tinggi negeri dan puluhan perguruan tinggi swasta. Keberadaan kampus yang ada di Desa Caturtunggal pun akhirnya menghadirkan mahasiswa yang datang dari penjuru negeri untuk tinggal di Desa ini. Selanjutnya ketergantungan antara mahasiswa dan masyarakat pun tidak dapat terelakan lagi. Akhirnya masyarakat membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan kelompok pendatang tersebut.

Disisi lain, kehidupan ekonomi Desa juga ditopang oleh keberadaan industri jasa dan niaga. Keberadaan hotel, restoran dan tempat hiburan menjadikan Desa Caturtunggal menjadi metropolitan di Kabupaten Sleman. Kehadiran industri – baik industri korporasi maupun industri pendidikan menghadirkan pembangunan yang begitu pesat di Desa Caturtunggal. Pembangunan yang hadir bukan hanya akibat dari kepentingan ekonomi tapi juga kepentingan politis yang ada didalamnya. Lalu sejauh manakah peran partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan di Desa Caturtunggal?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami arti dari peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap 2 orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu.⁵ Secara lebih konkrit, pendekatan ini digunakan untuk menemukan persamaan persepsi masyarakat Caturtunggal dalam konteks musrenbang desa. Lokasi penelitian ini berada di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Sementara fokus dari penelitian ini adalah meneliti partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan seberapa jauh pengaruh partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan di Desa Caturtunggal. Untuk menjawab pertanyaan tersebut data diperoleh melalui proses wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa kelompok masyarakat yakni Kepala Bagian Pembangunan sebagai representasi Pemerintah Desa Caturtunggal, Dukuh sebagai pemimpin wilayah di dalam Desa Caturtunggal dan ketua LKMD sebagai tokoh masyarakat. Untuk memperkuat data yang diperoleh juga dilakukan observasi dan penelusuran dokumen.

[5] M. Syahrani Jailani, "Ragam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Edu-Bio* vol. 4 (Jambi: Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha, 2013) hal. 42-43

Dari duapuluh pedukuhan yang ada di Desa Caturtunggal, ada lima yang dijadikan sebagai sasaran penelitian. Kelimanya dipilih karena mewakili keragaman sosial-ekonomi, sekaligus nantinya menimbulkan konsekuensi perbedaan dalam melaksanakan Musyrenbang.

Pertama, Pedukuhan Nologaten, yang terletak di Jalan Nologaten atau Jl. Wahid Hasyim. Karena lokasinya yang strategis, banyak usaha café dan rumah makan di wilayah tersebut, yang memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain keberadaan café-2 tersebut juga menimbulkan masalah sosial, karena selain buka hingga pagi (dini hari), kegiatan live music yang diadakan café mengganggu warga sekitar. Bahkan di salah satu café (yang pada akhirnya diketahui sebagai sebuah diskotik) pernah terjadi peristiwa penembakan. Akhirnya saat ini keberadaan café di wilayah tersebut mulai diperketat.

Kedua, Pedukuhan Seturan yang berada wilayah timur dari desa Caturtunggal dan dikenal sebagai kawasan “metropolitan” sebagai akibat dari pembangunannya yang pesat “dibanding” kawasan lain. Pembangunan yang terdapat di kawasan seturan sekilas -- bahkan sebetulnya, terhubung dengan daerah sekitarnya seperti Babarsari. Kondisi atau setting ekonomi dan sosial yang ada di kedua wilayah tersebut jika diperhatikan memiliki kemiripan: banyak ruko, hotel dan tempat hiburan. sehingga kesan yang muncul sebagai kawasan metropolitan adalah terdiri dari gabungan dukuh yang melintang dari dukuh Seturan di sisi utara yang terhubung dengan ringroad utara Yogyakarta hingga Babarsari di sisi selatan yang bermuara di jalan Solo. Pembangunan yang berada di dukuh Seturan membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu dampak yang muncul adalah stigma negative dukuh Seturan sebagai kawasan “merah”. Stigma tersebut didasari oleh banyaknya angka kriminalitas, peredaran narkoba dan masalah sosial lain. Selain itu masyarakat juga diresahkan oleh maraknya kos tanpa induk semang. Sebagaimana telah diketahui banyak kasus kriminalitas seperti pergaulan bebas, bunuh diri, pembuangan bayi dan tindakan kriminal lain sebagai akibat dari kost yang tidak diawasi oleh induk semang/pemilik kost. Oleh karena itu, dukuh seturan melakukan penertiban pengelolaan usaha kost di dukuh tersebut, dimana banyak pemiliknya adalah orang luar daerah Seturan sendiri.

Ketiga, Pedukuhan Karangmalang yang dikelilingi oleh 2 universitas besar yakni UNY dan UGM. Karangmalang tergolong sebagai kawasan padat penduduk. Selain dihuni oleh masyarakat asli pedukuhan Karangmalang, banyak mahasiswa yang menetap di pedukuhan tersebut. Letaknya yang berdekatan dengan kampus membuat masyarakat membuka usaha tempat kost. Tidak hanya mahasiswa, kampus sebagai sebuah institusi juga memberi dampak yang besar bagi kehidupan sekitarnya. Sebagai bagian dari masyarakat, aktivitas yang terjadi di dalam lingkungan kampus juga berimbas ke masyarakat. Pedukuhan Karangmalang tergolong sebagai padukuhan yang aktif dan memiliki inisiatif. Partisipasi yang ada dalam pembangunan di pedukuhan tidak hanya melibatkan masyarakat pedukuhan karangmalang, tetapi juga melibatkan kampus sebagai institusi yang berada di tengah-tengah lingkungan mereka dan juga masyarakat pendatang seperti mahasiswa kost. Selain hubungan antara pedukuhan, masyarakat (pendatang dan pribumi) dan kampus yang harmonis, hubungan internal yang ada dalam tubuh masyarakat Karangmalang juga terjaga dengan baik. Masih berjalannya organisasi masyarakat seperti Karang Taruna, Ketamiran masjid, pemuda islam, dan PKK mengisyaratkan bahwa masyarakat pedukuhan Karangmalang dalam kondisi yang harmonis. Kondisi tersebut juga terlihat dalam forum-forum masyarakat seperti rapat Rt. Rapat Rt merupakan forum temu warga sekaligus forum musyawarah di tingkat grassroot yang rutin dilaksanakan setiap bulan nya.

Keempat, Pedukuhan Ambarukmo, yang memiliki sejarah panjang di desa Caturtunggal. Padukuhan Ambarukmo terbelah antara utara dan selatan jalan Solo (Jl. Marsda Adisucipto) Hal yang ikonik dengan pedukuhan Ambarukmo adalah pusat perbelanjaan Ambarukmo Plaza (Amplaz) yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di D.I Yogyakarta. Masyarakat asli Ambarukmo tinggal di perkampungan di belakang pertokoan yang berada di Jalan Solo, sedangkan yang tinggal di pinggir jalan solo sebagian besar merupakan pendatang dan warga keturunan. Meskipun demikian, kehidupan antara pendatang dan penduduk Ambarukmo berjalan harmonis dan saling menghargai. kemiskinan merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh pedukuhan Ambarukmo. Kesenjangan yang sebetulnya justru terjadi dalam ranah yang berbeda yakni mengakses “kontribusi” dari korporasi yang ada di

lingkungan Ambarukmo. Sebagai bagian dari pedukuhan Ambarukmo, korporasi tersebut diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pedukuhan sebagai sarana untuk melakukan pembangunan di pedukuhan. Namun, kontribusi yang diharapkan masyarakat pedukuhan Ambarukmo justru disalurkan kepada pedukuhan lain atau otoritas yang berada di atasnya (Desa).

Kelima, Pedukuhan Janti yang berdekatan dengan jalan Solo. Pedukuhan Janti terletak di timur pedukuhan Gowok dan selatan jalan Solo., wilayah pedukuhan Janti juga terbelah oleh jalan layang (Fly over Janti). Hal ini mengakibatkan pedukuhan janti terbelah antara timur dan barat jalan layang. Ditinjau dari latar belakang masyarakat janti merupakan masyarakat pinggiran kota. Pembangunan di pedukuhan Janti tidak begitu pesat seperti pedukuhan lain. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak pedukuhan untuk melakukan pembangunan bagi kelompok masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian dukuh adalah mengenai banyaknya lembaga masyarakat yang ada di pedukuhan Janti yang belum tentu dimiliki oleh pedukuhan lain, seperti PAZIS (Pengelola Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh), TK (Taman Kanak-kanak), PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Pemakaman, GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani), KWT (Kelompok Wanita Tani), P3A (Kelompok Ternak), SPP (Simpan Pinjam Perempuan), PKK, Organisasi kesenian islam (Hadroh), Paguyuban Janti Fly over (paguyuban Pedagang Kaki Lima), JANKIS (Janti King Square) dan lain sebagainya. Kesenjangan ekonomi yang terjadi antara masyarakat tepi jalan Solo dengan masyarakat di belakang pertokoan sangat ketara, tetapi tidak mempengaruhi hubungan sosial antar masyarakat ekonomi.

Pembahasan

Musrenbang Desa

Menurut undang-undang mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 tahun 2004) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pengertian sumber daya dimaksudkan adalah potensi, kemampuan, dan kondisi lokal, termasuk anggaran, untuk dike-

lola dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶ Dalam konteks Desa upaya perencanaan pembangunan tersebut dilakukan dalam sebuah forum bernama Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Konsep “musyawarah” dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menunjukkan bahwa forum Musrenbang bersifat partisipatoris dan dialogis.⁷ Musyawarah memiliki arti yang jelas, yakni forum yang dilaksanakan untuk menyepakati sesuatu dan berakhir pada pengambilan keputusan bersama secara mufakat, dan bukan sekedar bersifat informatif. Dengan kata lain, Musrenbang Desa adalah forum dialogis antara Pemerintah Desa dengan pemangku kepentingan lainnya (masyarakat dan swasta) untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan Desa. Dalam Musrenbang Desa, Pemerintah Desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan Desanya melalui program pembangunan Desa.⁸

Untuk menyusun sebuah program pembangunan masyarakat perlu untuk menemukan masalah, potensi, kebutuhan tantangan eksternal dan strategi untuk 6 menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.⁹ Oleh karenanya dalam pelaksanaan musrenbang diperlukan masyarakat yang kritis dan partisipatif agar dapat membuat program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. selain itu, untuk membuat sebuah program pembangunan diperlukan perencanaan yang matang dari masyarakat. Kegiatan perencanaan menurut 7 Wahjudin Sumpeno meliputi tiga aspek,¹⁰ yaitu:

1. Analisis, kajian untuk mengurai suatu keadaan,
2. Kebijakan, pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai tujuan, kriteria, metode dan menelaah alternative rencana dan,
3. Rancangan atau desain, sebagai rumusan atau sajian rencana.

[6] Wahjudin Sumpeno, Perencanaan desa terpadu , (Banda Aceh: Read, 2011) hlm. 228

[7] Rianingsih Djohani, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa , (tidak ada kota terbit: Asia Foundation, 2008) hlm. 4

[8] *Ibid.*, hl. 5

[9] Wahjudin Sumpeno, Perencanaan desa terpadu , (Banda Aceh: Read, 2011) hlm. 228

[10] *Ibid.* hlm. 31-32

Dalam kondisi yang demikian, musrenbang menjadi arena pertarungan yang terbuka bagi kelompok dan kelas masyarakat dalam mengemukakan ide, gagasan, dan harapan atas desa yang lebih baik berdasarkan aspek yang tersebut diatas.

Dalam konteks Caturtunggal, dengan dinamika sosial dan potensi ekonomi yang ada musrenbang juga menjadi arena pertarungan gagasan bagi masyarakat yang ada didalamnya. Bagi Pemerintah Desa, Musrenbang merupakan kunci dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Caturtunggal. Secara konseptual, keberadaan Musrenbang selalu dikaitkan dengan upaya demokratisasi sistem pemerintahan. Pengertian demos dalam terminologi demokrasi kontemporer adalah warga negara yang aktif “menuntut” kesejahteraan.¹¹ Salah satu cara “menuntut” kesejahteraan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah melalui partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Partisipasi merupakan kunci sukses bagi pelaksanaan otonomi daerah. Karena, dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi yang tidak boleh diabaikan.¹² Dalam pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 secara tegas dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.¹³

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum, serta perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat.¹⁴ Hal ini didukung dengan adanya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 25 Tahun 2004 melembagakan Musrenbang di semua tingkatan pemerintahan.¹⁵ Pelembagaan Musrenbang juga terjadi hingga tingkat Desa yang ditegaskan melalui Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Peraturan Menteri tersebut memuat petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang Desa untuk menyu-

[11] Baca Kemitraan, *Menggagas Tata Kelola Berbasis Keterbukaan*, 2015

[12] Hendra karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: Alumni, 2001) hlm. 345

[13] *Ibid*, hlm. 344

[14] *Ibid*, hlm. 370-371

[15] *Ibid*, hlm. 371

sun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).¹⁶

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan Musrenbang diatur dalam pasal 54 tentang Musyawarah Desa dan pasal 79 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Untuk pelaksanaannya, Musrenbang Desa dijelaskan melalui PP No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Desa BAB VII mengenai Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Desa.¹⁷ Dari hasil Musyawarah tersebut kemudian dijadikan landasan dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa.¹⁸

Syarat partisipasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa lebih mengakomodasi kelompok masyarakat yang selama ini dianggap termarginalkan seperti kelompok masyarakat ekonomi lemah dan gender.¹⁹ Secara tersurat, pesan mengenai pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Undang-Undang Desa diwakili dengan frasa “melibatkan unsur masyarakat”. yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.²⁰ Sehingga dengan begitu, keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang tidak hanya dibatasi oleh kelompok elit dalam masyarakat, namun dapat mengakomodir aspirasi kelompok masyarakat yang selama ini dianggap sebagai minoritas (masyarakat miskin dan gender). Dengan demikian, Undang-Undang Desa memberi harapan yang tinggi bagi pelaksanaan demokratisasi dan pembangunan yang partisipatif bagi masyarakat Desa.

Musrenbang Desa di Caturtunggal

Penduduk desa Caturtunggal berjumlah sekitar 76.000 jiwa.²⁸ Jumlah tersebut terdiri dari 62.455 jiwa penduduk tetap dan sisanya 26 Ibid., hlm. 5. 27 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

[16] Rianingsih Djohani, *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*, (tidak ada kota terbit: Asia Foundation, 2008) hlm. 4

[17] UU No. 6 tahun 2014 pasal 114 ayat (1)

[18] *Ibid.*, pasal (115)

[19] *Ibid.*, BAB VII, paragraf (2) pasal (121)

[20] Penjelasan UU No. 6 tahun 2014 pasal (54) ayat (1)

Desa Caturtunggal 2015, diterbitkan oleh Desa Caturtunggal tahun 2014, hlm. 7. 28 Ibid., hlm. 18. 31 merupakan penduduk tidak tetap seperti anak kost. Mereka yang menjadi penduduk tidak tetap merupakan mahasiswa dan karyawan. Dengan keberadaan sekitar 25 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta serta beberapa pusat ekonomi seperti pusat perbelanjaan, hotel dan pertokoan maka keberadaan warga pendatang menjadi keniscayaan di desa Caturtunggal. Berdasarkan catatan yang ada, desa Caturtunggal memiliki 18.199 Kepala Keluarga yang terdiri dari 15.048 Kepala Keluarga laki-laki dan 3.150 Kepala Keluarga Perempuan.

Secara historis, pada mulanya desa Caturtunggal merupakan wilayah yang terdiri dari 5 kelurahan, yakni kelurahan Karangwuni (yang membawahi dukuh Manggung, Karangwuni, Karanggayam dan Kocoran), Mrican (Santren, Mrican, Karangmalang), Demangan (Blimbingsari, Samirono, Sagan, Papringan), Ambarukmo (Nologaten, Gowok, Janti, Ambarukmo) dan Kledokan (Ngentak, Tempel, Kledokan, Tambakbayan, Seturan).³² Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka lima kelurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu desa yang otonom dengan nama Desa Caturtunggal. Desa Caturtunggal secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-daerah Kelurahan.³³ Arti nama desa Caturtunggal sendiri diambil dari kata “Catur” yang bermakna Empat dan “Tunggal” yang berarti Satu. Sehingga, Caturtunggal merupakan gabungan dari beberapa kelurahan yang dijadikan menjadi satu desa.³⁴ Hingga kini, kelurahan yang membentuk Caturtunggal berubah menjadi pedukuhan dibawah pemerintah desa Caturtunggal.

Kondisi Sosial-Budaya Latar belakang sosial-budaya masyarakat caturtunggal sebagaimana disebut diawal adalah masyarakat urban. Secara mendasar, hal ini ditandai dengan aktivitas masyarakat yang bergeser dari agraris ke arah industri dan perdagangan. Berkurangnya lahan pertanian menjadi pemukiman atau pertokoan menandai pergeseran budaya tersebut. Dengan didukung akses yang memadai ke pusat pemerintahan dan ekonomi, mendorong 35 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Caturtunggal 2015, diterbitkan oleh Desa Caturtunggal tahun 2014 hlm. 15 36 masyarakat untuk meninggalkan budaya pedesaan menjadi budaya perkotaan.

Ditinjau dari struktur masyarakatnya, masyarakat Caturtunggal sangat heterogen. Heterogenitas tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Diantara faktor yang menonjol tersebut adalah keberadaan pusat pendidikan dan pusat ekonomi. Ekonomi dan pendidikan merupakan alat untuk melakukan mobilitas sosial yang mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. Sehingga keberadaan pusat ekonomi dan pusat pendidikan memicu adanya urbanisasi atau mobilisasi masyarakat yang memasuki kawasan caturtunggal. Masyarakat yang datang ke desa Caturtunggal tidak hanya berasal dari daerah sekitar D.I Yogyakarta saja. Sebagian besar masyarakat justru berasal dari berbagai tempat di Indonesia. Akhirnya masyarakat pendatang membaaur dengan masyarakat asli dan hidup bersama di lingkungan desa Caturtunggal.

Heterogenitas yang ada di desa Caturtunggal menjadikan desa tersebut dijuluki sebagai “Miniatur Indonesia”. Hal ini disebabkan oleh beragamnya latar belakang penduduk desa Caturtunggal baik dari suku, agama dan asal usul daerah. Dengan latar belakang masyarakat yang majemuk, menimbulkan dinamika tersendiri dalam masyarakat desa Caturtunggal. Secara garis besar, kehidupan masyarakat Caturtunggal sangat harmonis. Kerukunan antar masyarakat dijaga dengan baik melalui forum-forum yang ada di masyarakat seperti pertemuan warga secara 37 rutin. Selain itu, masyarakat diberdayakan melalui organisasi-organisasi yang ada di desa maupun dusun seperti: karang taruna, PKK, kelompok pengajian, kelompok budaya, kelompok tani, hingga kelompok PKL.

Di Desa Caturtunggal, proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Desa (Musrenbang Desa) sudah dimulai sejak medio tahun 2000. Disamping dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Desa, hal ini juga dipengaruhi oleh program pemerintah pusat seperti P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) atau di masa selanjutnya dikenal sebagai PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri. Ditinjau dari pendekatan yang dipakai dalam musrenbang, hal ini tentu akan menghasilkan arah pembangunan yang berbeda.²¹ Kebijakan Pemerintah Desa dilakukan dengan memberi in-

[21] Baca Abdur Rozaki, dkk, *Mempertemukan Dua Hulu*, (Yogyakarta: IR, 2011)

tervensi terhadap masyarakat. Intervensi tersebut kemudian diarahkan untuk mengelola sumber daya yang ada dilingkungan Desa Caturtunggal. Sementara PNPM Mandiri merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sehingga dalam merumuskan program pembangunan harus melalui tahap musyawarah yang berasal dari masyarakat.

Masyarakat yang terbiasa mengikuti program pemberdayaan (PNPM) tentu tidak mengalami kesulitan saat diminta merumuskan program. Sayangnya, PNPM Mandiri tidak dimiliki/diikuti oleh semua Desa maupun Dusun. Hal ini berakibat pada terbiasanya masyarakat pada pendekatan pertama, yaitu intervensi Pemerintah Desa. Dampaknya adalah masyarakat melaksanakan Musrenbang sebagai ritual tahunan yang bersifat prosedural yang “asal jadi”. Fenomena tersebut juga dialami oleh Desa Caturtunggal pada masa awal pelaksanaan Musrenbang. Bahkan sampai saat ini pun masih banyak masyarakat yang belum benar-benar mampu merumuskan program yang berdasar kebutuhan masyarakat tetapi berangkat dari dasar keinginan.

Proses pelaksanaan Musrenbang di Desa Caturtunggal terdiri dari beberapa fase. Secara garis besar, fase pelaksanaan Musrenbang di Desa Caturtunggal di bagi menjadi dua yakni fase pra-Musrenbang dan fase Musrenbang Desa. Fase pra-Musrenbang dimulai dari pelaksanaan musyawarah di tingkat akar rumput (RT/RW). Namun, fase tersebut bersifat opsional dan belum tentu terlembagakan di pedukuhan. Setelah melaksanakan musyawarah di tingkat RT/RW, hasil dari musyawarah tersebut kemudian dibawa pada forum yang lebih tinggi yakni Musrenbang Dukuh. Musrenbang Dukuh dilaksanakan untuk menyusun prioritas program yang akan diajukan ke forum Musrenbang Desa.

Pelaksanaan Musrenbang di Desa Caturtunggal diselenggarakan oleh LKMD dan didanai oleh Pemerintah Desa. Untuk pelaksanaan Musrenbang Dukuh diselenggarakan oleh KK LKMD. Selain mendanai pelaksanaan Musrenbang, Pemerintah Desa juga melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Musrenbang Dukuh. Pendampingan tersebut tidak dimaksudkan sebagai intervensi melainkan diposisikan sebagai fasilitator ketika dalam forum mengalami kebuntuan.

Artinya, Musren di tingkat RT/RW sejatinya sudah dilakukan secara alamiah melalui rapat rutin di tingkat RT/RW, sehingga dari kegiatan

rutin tersebut pun masyarakat sudah dapat menyampaikan aspirasinya kepada Dukuh melalui RT/RW. Dengan demikian, ketua RT/RW memiliki posisi yang strategis dalam penyampaian aspirasi masyarakat di tingkat bawah ke pemangku kebijakan di atasnya seperti Dukuh dan Desa. Walaupun secara umum proses pelaksanaan Musrenbang Dukuh sama, namun pada pelaksanaannya di setiap dukuh memiliki perbedaan. Sebagai contoh adalah cara masing-masing pedukuhan mengambil aspirasi dari masyarakat tingkat bawah. Sebagaimana telah disebut di awal, keberadaan Musren (Musyawarah Perencanaan) di tingkat RT/RW di sebagian Dukuh di Desa Caturtunggal belum dilembagakan dan bersifat opsional.

Misalnya di Dukuh Karangmalang, yang secara sosial didominasi oleh lingkungan kampus, proses penjarangan aspirasi Musrenbang dilakukan melalui rapat RT di mana kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dibuka seluas-luasnya untuk semua kalangan masyarakat. dalam konteks ini, Pedukuhan Karangmalang juga memberikan kesempatan kepada komunitas ibu-ibu PKK untuk ikut memberikan masukan terkait dengan pembangunan yang perlu dilakukan di tempat masing-masing. sehingga bisa dikatakan bahwa proses Penjarangan aspirasi untuk musrenbang di pedukuhan Karangmalang berjalan melalui prosedur demokrasi langsung di mana semua anggota masyarakat dapat menyampaikan pendapat melalui berbagai forum.

Sementara itu di pedukuhan Nologaten proses Penjarangan aspirasi dilakukan secara bertahap. Melalui rapat RT di mana masing-masing RT mengumpulkan aspirasi dari masyarakat setempat. selanjutnya masukan dari tingkat RT ini dibawa ke level musyawarah di tingkat RW, di mana masukan yang masih bersifat shopping list kemudian dirumuskan menjadi agenda kebijakan yang lebih sistematis terkait dengan rencana pembangunan di wilayah RW masing-masing. selanjutnya rumusan dari tingkat RW inilah yang kemudian dibawa ke tingkat musyawarah pedukuhan untuk dirangkum menjadi satu agenda pembangunan yang nantinya akan dibawa ke forum musrenbang desa.

Sedangkan di Pedukuhan Seturan yang merupakan pedukuhan paling kaya di desa Caturtunggal proses Penjarangan aspirasi untuk perencanaan pembangunan justru dilakukan secara *top down*, di mana Dukuh membentuk sebuah tim perencanaan pembangunan yang

bertugas melakukan analisis terhadap kebutuhan pembangunan di Seturan. Anggota tim ini terdiri dari perwakilan masing-masing RW. tim perencanaan pembangunan melakukan pertemuan rutin untuk mendiskusikan persoalan dan kebutuhan pembangunan di masing-masing RW. hasil musyawarah dan rumusan inilah yang nantinya akan dibawa ke forum musrenbang desa. dapat dikatakan bahwa masyarakat di pedukuhan Seturan secara praktis tidak dilibatkan secara langsung dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan. namun pihak Dukuh menganggap bahwa masyarakat tidak dilibatkan melalui rapat rapat RT yang secara rutin dilaksanakan. hasil rapat RT inilah yang sebenarnya menjadi bahan utama bagi tim perencanaan pembangunan untuk menyusun agenda kebijakan.

Terakhir di Pedukuhan Janti yang notabene merupakan pedukuhan yang secara ekonomi paling tertinggal, program-program pembangunan juga cenderung berjalan lambat. Situasi ini mengakibatkan rendahnya minat rendahnya dan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan. akibatnya masyarakat cenderung tidak banyak berharap kepada program pembangunan dari pemerintah, dan lebih fokus dengan kegiatan-kegiatan sosial berbasis swadaya masyarakat. Situasi inilah yang membuka peluang kepala Dukuh untuk mengambil inisiatif personal dengan menempatkan jaringan personalnya untuk menyampaikan aspirasi pembangunan melalui forum-forum formal di RT dan RW untuk nantinya dirumuskan di level Pedukuhan. Sehingga meskipun proses Penjaringan aspirasi pembangunan dilakukan secara bertahap dalam forum-forum formal RT dan RW, namun sebenarnya agenda pembangunan mengikuti desain yang disusun oleh pimpinan pedukuhan.

Musrenbang Dukuh dilaksanakan untuk menampung aspirasi dan menyepakati prioritas program. Prioritas program terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Program Fisik dan Program Non-Fisik. Program Fisik meliputi pembangunan infrastruktur seperti pengerasan jalan, pembangunan drainase, renovasi Balai Dukuh, dan lain sebagainya. Sementara Program Non-Fisik dialokasikan untuk program yang berkaitan dengan pembangunan manusia seperti Pendidikan, Kesehatan, PKK, Posyandu, PAUD, dan lain sebagainya. Prioritas program yang akan diajukan dibatasi jumlahnya, 3 program untuk pembangunan

fisik dan 6 program untuk pembangunan non-fisik. Pembatasan prioritas program tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa agar penerimaan bantuan serta pelaksanaan program pembangunan bisa berjalan efektif dan efisien. Sehingga dampak dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.

Prioritas program yang telah disepakati kemudian disusun kedalam sebuah proposal. Proposal tersebut kurang lebih berisi tentang gambaran program pembangunan yang akan diajukan ke Desa. Selain menyusun proposal, warga masyarakat juga mengkalkulasi alokasi anggaran pembangunan. Kalkulasi anggaran tersebut meliputi dari mana sumber dana, berapa anggaran yang perlu dikeluarkan, termasuk berapa estimasi anggaran yang akan diterima untuk melaksanakan pembangunan. Sumber dana yang digunakan untuk merealisasikan program pembangunan tidak sepenuhnya menggunakan Dana Desa. Besaran bantuan dari Desa yang diterima Pedukuhan berkisar sekitar 30% dari anggaran yang diajukan. Sisanya, Pedukuhan dapat mencari sumber pendanaan lain seperti dari pemerintah di atas Desa (Kabupaten, dan Provinsi serta Dinas yang memiliki program pembangunan) atau bekerjasama dengan pihak swasta yang ada di wilayah Pedukuhan. Selain itu sumber dana untuk pembangunan Dukuh juga berasal dari gotong royong warga Pedukuhan.

Dalam menyusun program pembangunan, masyarakat masih banyak yang merasa mudah menyusun program fisik dibanding program non-fisik. Selain karena program fisik memiliki bentuk yang konkrit dari pada program non-fisik, program fisik juga termasuk program yang membutuhkan pembiayaan yang besar. Oleh karena itu masyarakat banyak mengajukan program fisik pada saat musrenbang dari pada program non-fisik.

Pelaksanaan Musrenbang Desa biasanya dilakukan setelah semua Dukuh mengadakan Musrenbang Dukuh. Musrenbang dukuh dilaksanakan guna menjaring aspirasi masyarakat tingkat bawah. Pelaksanaan Musrenbang Dukuh juga didasarkan pada beberapa faktor. Antara lain: (1) jumlah Pedukuhan yang sangat banyak, (2) wilayah teritorial Desa yang sangat luas, (3) jumlah penduduk yang terlalu padat, (4) efisien dan efektifitas penyerapan aspirasi masyarakat. sehingga perlu bagi desa melaksanakan Musrenbang Dukuh sebelum melakukan Musrenbang Desa.

Musrenbang Desa dihadiri oleh perwakilan Dukuh, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang berada di Desa seperti Organisasi Perempuan (PKK), Organisasi Pemuda (Karang Taruna), dan lain sebagainya. Pada Musrenbang Desa yang dilakukan pada tanggal 5 november 2014 menyepakati RPJM Desa dan RKP Desa periode 2014-2019. Musrenbang tersebut dihadiri oleh 76 orang yang mewakili Padukuhan dan kelompok masyarakat.²²

Bahan yang digunakan untuk menyusun RPJM dan RKP merupakan masukan dari Dusun yang sudah direkapitulasi berdasar skala prioritas. Dari skala prioritas yang direkapitulasi oleh Dukuh nantinya akan diajukan kepada Desa. Sebelum disahkan sebagai program kerja pembangunan, Pemerintah Desa melakukan verifikasi ke Pedukuhan yang mengajukan program tersebut. Nantinya, hasil dari verifikasi tersebut menentukan apakah program tersebut layak untuk dimasukkan ke dalam RPJM atau RKP. Jika tidak memenuhi kriteria maka program yang telah diajukan tersebut terpaksa tidak dapat direalisasikan atau ditunda untuk program periode selanjutnya.

Program yang telah lolos verifikasi akan disahkan melalui kebijakan Desa berupa RPJM Des, RKP Des, dan APBDes. Proses pembukuan program, termasuk pembagian anggaran dilakukan oleh Pemerintah Desa. Sementara proses partisipasi masyarakat desa terbatas sampai pengajuan program di Musrenbang Desa. Setelah semua proses administrasi selesai, maka Desa berkewajiban menyalurkan Dana Desa yang sudah diperoleh dari Pemerintah Pusat. Dana yang diperoleh Dukuh biasanya tergantung dengan besaran program yang diajukan. Meskipun demikian dana yang diterima Dukuh tidak 100% dari jumlah bantuan yang diajukan. Sehingga dukuh perlu mencari sumber pendanaan lain agar program dapat terlaksana dengan baik.

Program yang telah dijalankan kemudian dievaluasi pada tiap periode tertentu. Program yang masuk sebagai RPJM Desa dievaluasi melalui musrenbang tahunan yang biasanya dilakukan guna menyusun RKP Desa. Indikator baik atau buruknya pelaksanaan program dapat ditinjau dari bagaimana program yang telah diajukan diselesaikan dalam periode yang ditetapkan. Untuk menghindari penyalahgunaan dan pe-

[22] Berita acara Musrenbang Desa Caturtunggal pada tanggal 5 November 2014 dalam buku RPJM Desa Caturtunggal, hlm. 118

nyelewengan proyek pembangunan, Pemerintah Desa berencana untuk mengganti bantuan dari bentuk pendanaan kedalam bentuk material. Dengan begitu, diharapkan semangat gotong royong warga untuk segera merealisasikan program pembangunan semakin meningkat dan menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan bantuan.

Musrenbang sebagai medan pertarungan dan Musyawarah

Musrenbang di Desa Caturtunggal tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan rutin tahunan untuk menyusun kebijakan desa semata. Dalam pelaksanaannya, Musrenbang juga dapat diartikan sebagai arena pertarungan antar aktor dalam menyampaikan gagasannya dalam Musrenbang. Meminjam bahasa Bourdieu, musrenbang dapat dikontekstualisasikan sebagai ruang publik bagi pemangku kebijakan di Desa Caturtunggal untuk mengaktualisasikan diri mereka. Dalam *Theory Of Field* Bourdieu menempatkan ruang publik sebagai medan pertarungan antar aktor untuk mewujudkan kepentingan dan kemampuan dalam menguasai sumberdaya. Medan tersebut digerakkan oleh hierarki yang bertarung di antara mereka. Hierarki yang dimaksud adalah kelas.

The field are dimension of a struggle for the realization of interest and acquisition of resources – they include, for example, the field of economic production, of intellectual life, of educational attainment, of art, and of political power. The field are organized hierarchically by the struggles within them. They interest and serve to reproduce one another. The register for the translation of hierarchies between fields is class.²³

Dalam konteks Musrenbang desa, yang menjadi predikat sebagai fields adalah forum musyawarah itu sendiri. Musyawarah menjadi arena pertarungan (dimension of struggle) antar aktor yang membawa kepentingan (interest) dan kemampuan sumberdaya (acquisition of resources). Pengertian kepentingan dan kemampuan sumberdaya dalam konteks ini sangatlah bersifat abstrak dan tidak dapat digeneralisasi menjadi hitam-putih. Secara definitif, kepentingan dan kemampuan dimaksud dalam pembahasan ini terbatas dalam kepentingan dan kemampuan sumberdaya untuk merealisasikan program pembangunan. Adanya kepentingan dapat mendorong aktor tersebut untuk terlibat dalam musrenbang. Namun, untuk merealisasikan kepentingannya,

[23] Malcom Waters, *Modern Sociological Theory*, New York: Sage Publication, 1998, hlm. 200

seorang aktor harus berhadapan dengan aktor lain yang tidak hanya memiliki kepentingan tapi juga memiliki kemampuan sumberdaya.

Ditinjau dari kronologinya, setiap aktor – dalam hal ini masyarakat memiliki kepentingan dalam agenda musyawarah perencanaan pembangunan. Agar dapat terealisasi, kepentingan yang dibawa oleh aktor harus melalui medan- medan yang bersifat hierarkis. Dimulai dari Musren RT, Musrenbang Dukuh, Musrenbang Desa, hingga pada akhirnya dapat disahkan dalam bentuk Peraturan Desa yang berbentuk RPJM dan RKP Desa. Forum-forum seperti Musrenbang inilah yang menjadi medan bagi seorang aktor memperjuangkan kepentingannya. Belum lagi dalam forum tersebut kepentingan (usulan) seorang aktor (masyarakat) harus berhadapan dengan kepentingan aktor lainnya.

Desa Caturtunggal memiliki kondisi yang sangat kompleks. Kompleksitas yang terjadi juga mempengaruhi “medan” yang tersedia bagi masyarakat. Ketersediaan lembaga musyawarah yang ada di satu dukuh dapat nampak berbeda dengan pedukuhan lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam forum yang tersedia selama pra-Musrenbang dukuh. Sebagian Dukuh menyediakan “ruang khusus” bagi masyarakat untuk mengajukan usulan program melalui Musren RT. Beberapa lainnya mereduksi keberadaan Musren RT karena dianggap usulan masyarakat dapat ditampung tanpa harus mengadakan forum khusus, atau malah meniadakan forum tersebut dan menggantinya dengan Tim yang dianggap representatif demi efektivitas musyawarah.

Selain keterbatasan medan, pertarungan diantara aktor dalam masyarakat juga sangat kuat. Hal ini dapat ditinjau melalui peserta Musrenbang di tingkat akar rumput. Pergolakan antara kepentingan dan penguasaan sumberdaya dimanifestasikan dalam wujud siapa yang berhak menjadi wakil masyarakat dalam Musrenbang Dukuh. Sebagaimana diungkapkan oleh Bourdieu, kemampuan sumberdaya (acquisition of resources) bersifat multidimensional. Berbeda dengan pendekatan marxis yang menekankan sumberdaya hanya pada aspek ekonomi, Bourdieu melihat bahwa sumber daya juga dapat diartikan sebagai tingkat pendidikan, kemampuan intelektual, kemampuan politik, bahkan selera seni.

Sejalan dengan pemahaman Bourdieu mengenai penguasaan sumberdaya tersebut, orang-orang yang menjadi wakil masyarakat dalam

Musrenbang Desa juga biasanya didasarkan pada kategori “tokoh masyarakat”. Tokoh masyarakat dianggap sudah mampu menjadi representasi bagi masyarakat secara umum. Dengan dasar ini, sebagian Dukuh menilai bahwa aspirasi masyarakat sudah dapat direpresentasikan melalui aspirasi wakil masyarakat. Padahal, boleh jadi hubungan antara masyarakat sebagai aktor dan wakil masyarakat sebagai aktor lain telah menciptakan medan baru. Pertarungan antara kepentingan masyarakat harus berhadapan dengan kepentingan wakilnya yang memiliki kemampuan sumberdaya untuk dapat berbicara di Musrenbang Dukuh.

Habermas memiliki pandangan tersendiri mengenai musyawarah. Musyawarah, menurut Habermas, didasarkan pada tindakan rasional. Habermas meyakini bahwa tindakan antarmanusia atau interaksi sosial di dalam sebuah masyarakat tidak terjadi secara semena-mena, melainkan pada dasarnya bersifat rasional.²⁴ Tindakan antarmanusia, lanjutnya, bersifat rasional karena tindakan itu berorientasi pada konsensus atau pencapaian kesepakatan. Tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus inilah yang disebut sebagai tindakan komunikatif.²⁵

Untuk mencapai tujuannya, tindakan komunikatif perlu didukung oleh rasio komunikatif. Rasio komunikatif lah yang akhirnya mengarahkan seluruh proses memaknai Bahasa, ungkapan-ungkapan non verbal dan pengambilalihan perspektif orang lain, sehingga antar aktor dapat mengerti satu sama lain. Saling mengerti adalah syarat untuk mencapai konsensus bebas kekerasan.²⁶ Konsensus ini dapat dianggap rasional jika para peserta dapat menyatakan pendapat dan sikapnya terhadap klaim-klaim kesahihan tersebut secara bebas dan tanpa paksaan. Masih menurut Habermas, keberhasilan komunikasi tergantung pada kemampuan pendengar untuk “menerima atau menolak” klaim-klaim kesahihan. Artinya, klaim kesahihan harus serentak benar, tepat dan jujur supaya pendengar dapat mengambil sikap. Oleh sebab itu, untuk mencapai sebuah konsensus diperlukan penerimaan serentak klaim kebenaran, ketepatan dan kejujuran.²⁷

[24] Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009) hlm. 34

[25] *Ibid.*

[26] *Ibid.*, hlm. 35

[27] *Ibid.*, hlm. 37-38

Selain mengusung tindakan komunikatif sebagai “prosedur” untuk menuju sebuah kesepakatan (konsensus), Habermas juga mengajukan konsep tindakan strategis. Jika tindakan komunikatif mengarahkan pada kesepakatan, maka konsep tindakan strategis berorientasi pada keberhasilan dalam mempengaruhi.²⁸ Meskipun memiliki karakter yang sama dengan tindakan komunikatif, namun tindakan strategis berbeda dengan tindakan komunikatif. Tindakan strategis menggunakan Bahasa tidak sebagai medium pemahaman, melainkan alat untuk memaksakan kehendak.

Dalam perspektif Habermas, upaya yang bersifat “menang-kalah” dianggap sebagai tindakan strategis, sementara upaya yang mengarahkan pada konsensus dinilai sebagai tindakan komunikatif. Musrenbang, dalam perspektif Habermas, dapat merujuk pada dua pendekatan tersebut. Musyawarah menciptakan kondisi dimana seorang aktor dapat bertukar informasi dengan aktor lainnya. Pertukaran yang terjadi diantara aktor -aktor yang ada menghasilkan penerimaan atau penolakan. Adanya penerimaan – termasuk juga penolakan, menjadi indikator terhadap keberhasilan komunikasi yang dilakukan antar aktor. Terbentuknya penerimaan bersama (konsensus) inilah yang menjadi perhatian penting dalam teori Tindakan Komunikatif.

Musrenbang merupakan alat sekaligus prosedur yang diciptakan untuk menciptakan masyarakat yang deliberatif. Secara lebih sederhana, Musrenbang juga dijadikan sebagai media untuk menciptakan sebuah konsensus. Konsensus tersebut dapat tercipta apabila pernyataan (usulan program) yang diajukan oleh aktor dalam Musrenbang dapat diterima oleh peserta yang lain. Secara lebih filosofis, Habermas menilai bahwa konsensus dapat tercipta jika klaim-klaim kesahihan dapat diterima secara serentak. Klaim kesahihan yang dimaksud oleh Habermas terdiri dari kategori yakni klaim bahwa pernyataan mereka benar (*wahr*) – objektif, tepat (*richtig*) – normatif, dan jujur (*wahrhaftig*) – subjektif. Klaim kesahihan seseorang, menurut Habermas, dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh pemahaman yang berbeda dalam memahami dunia (*welten*).²⁹

[28] *Ibid.* hlm. 35

[29] *Ibid.*, hlm. 37

Konsep penerimaan (konsensus) dalam pelaksanaan Musrenbang juga didasarkan pada pemahaman “dunia” dalam konteks Pembangunan Desa. Pertarungan antar aktor yang terjadi tidak menghadapkan antar aktor secara *vis-à-vis*. Dalam tindakan komunikatif, pertentangan tersebut diarahkan pada bagaimana aktor-aktor tersebut mendapatkan persetujuan atas apa yang menjadi gagasannya. Dengan kata lain, pendapat seorang aktor yang dapat mempengaruhi orang lain harus siap diuji oleh publik untuk disetujui dan Musrenbang merupakan wahana yang tepat untuk itu.

Implementasi dari teori ini dalam Musrenbang Dukuh hingga Desa berjalan sebagaimana idealnya. Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa untuk mencapai kesepakatan mengenai sebuah program pembangunan, Musrenbang menjadi wahana yang terbuka bagi pertarungan gagasan setiap masyarakat. Secara deliberatif pula, gagasan yang diterima akan mengalami seleksi penerimaan dan penolakan. Sebuah gagasan akan dapat diterima ketika telah memenuhi 3 kriteria tersebut diatas dalam konteks pembangunan di Desa Caturtunggal. Hal ini juga mengacu pada dinamika yang terjadi dalam Musrenbang Desa maupun Dukuh. Setiap orang dapat berpendapat di Musrenbang Desa maupun Dukuh. Akan tetapi setiap pendapat belum tentu dapat diterima oleh peserta Musrenbang. Oleh karenanya, perlu bagi masyarakat agar dapat memisahkan keinginan dan kebutuhan. Program yang dapat diakomodasi oleh Musrenbang adalah gagasan program yang berdasarkan kebutuhan. Sementara itu, gagasan yang hanya berdasar keinginan dan tidak rasional akan dieliminasi oleh forum. Gagasan yang telah diterima sebagai konsensus pada akhirnya akan didokumentasikan sebagai RPJM dan RKP Desa. Dengan ungkapan lain RPJM dan RKP Desa inilah yang dapat disebut sebagai konsensus.

Dalam konteks Musrenbang, kedua teori tersebut diatas saling berkaitan satu sama lain. Teori Medan menempatkan musyawarah sebagai medan pertarungan antar aktor secara terbuka, sementara Teori Tindakan Komunikatif memberi gambaran bagaimana agar gagasan/kepentingan aktor dapat diterima oleh publik. Kedua teori ini sangat membantu dalam menganalisis pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Caturtunggal. Musrenbang menjadi medan pertarungan kepentingan antar aktor, sementara kepentingan tersebut harus diuji oleh publik secara diskursif.

Pelibatan masyarakat (partisipasi masyarakat) dalam Musrenbang di Desa Caturtunggal terbatas hanya sampai pada tingkat akar rumput. Jumlah penduduk yang banyak, wilayah yang luas serta terbagi atas dukuh-dukuh menjadikan partisipasi masyarakat tereduksi kedalam sistem perwakilan demi efektifitas penyampaian gagasan. Pada akhirnya medan yang tercipta tidak hanya dalam forum musyawarah saja namun dapat terjadi sebelum musyawarah dilaksanakan.

Secara lebih jauh, untuk menganalisa proses partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tidak dapat ditinjau secara general dengan latar belakang Desa Caturtunggal. Desa Caturtunggal memiliki latar belakang sejarah dan sosial yang cukup panjang dalam membentuk masyarakatnya. Perbedaan historis dan sosiologis antar Dukuh berdampak pada perbedaan pola partisipasi dan pelaksanaan musyawarah. Walaupun secara prosedural pelaksanaan Musrenbang sudah diseragamkan, namun perbedaan antar Dukuh terjadi pada hal yang sangat elementer seperti bagaimana menempatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Akhirnya dinamika masyarakat yang menarik untuk dianalisa adalah dalam proses Musrenbang Dukuh.

Intensitas pergolakan antar kepentingan aktor-aktor dalam Musrenbang di Desa Caturtunggal semakin menuju tingkat yang lebih atas (Musrenbang Desa) semakin meredam. Jika di tingkat akar rumput seorang aktor yang memiliki kepentingan harus berhadapan dengan aktor yang memiliki penguasaan sumberdaya, maka di tingkat Musrenbang Desa posisi antar aktor menjadi seimbang karena telah melalui tahap eliminasi antar aktor di tingkat bawah. Dengan kata lain, posisi antar aktor yang dapat berbicara dalam Musrenbang Desa merupakan orang-orang yang menjadi “wakil” dari masyarakat di tingkat Dukuh. Dapat disimpulkan bahwa jika merujuk pada temuan diatas orang-orang yang menjadi peserta Musrenbang Desa merupakan aktor yang memiliki penguasaan sumberdaya.

Karena posisi antar aktor dalam Musrenbang Desa merupakan kelas sosial yang sama, maka untuk mencapai konsensus – dalam hal ini adalah penyusunan program pembangunan hanya dapat dilakukan melalui tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif bertujuan untuk menciptakan konsensus antar aktor. Pertukaran kepentingan yang terjadi antar aktor diuji dalam kriteria benar (objektif), tepat (normatif), dan

jujur (subjektif). Gagasan pembangunan yang dibawa oleh tiap-tiap aktor harus serentak diterima dalam tiga kriteria tersebut. Usulan yang tidak sesuai dengan tiga kriteria diatas akan dieliminasi untuk ditangguhkan realisasinya atau dihapus dalam daftar usulan program. Usulan-usulan yang telah disepakati bersama sebagai konsensus pada akhirnya dibukukan dalam bentuk RPJM dan RKP desa.

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, Musrenbang Desa bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Desa Caturtunggal. pelaksanaan musrenbang desa sudah dimulai sejak tahun 2000-an, seiring dengan adanya program P2KP/PNPM. Setiap tahunnya, pelaksanaan Musrenbang selalu diperbaiki oleh Pemerintah Desa.

Kedua, akibat dari berbagai faktor seperti faktor geografis dan teritorial yang terdiri dari 20 pedukuhan dan ratusan RT/RW, Musrenbang Desa Caturtunggal dibagi kedalam beberapa fase. Fase tersebut dimulai dari tingkatan yang paling bawah yakni tingkat RT/RW, kemudian dilanjutkan di tingkat Pedukuhan dan bermuara di Desa. Fase pertama dan kedua dilakukan guna menjangkau aspirasi masyarakat tingkat bawah yang kemudian disusun dalam prioritas program sebelum diajukan ke Musrenbang Desa. Sementara fase terakhir merupakan fase final dalam mengakomodasi aspirasi yang diperoleh dari akar rumput. Prioritas program yang telah terkumpul akhirnya dipilih dan dipilah untuk disahkan sebagai Kebijakan Desa dalam bentuk RPJM dan RKP Desa.

Ketiga, berdasarkan hasil analisa, Musrenbang Desa secara sosiologis dapat diartikan sebagai arena pertarungan sekaligus wahana untuk mengkomunikasikan gagasan masyarakat. Musrenbang menjadi arena pertarungan karena memiliki dimensi yang menghadapkan antara aktor yang memiliki kepentingan dengan aktor yang menguasai sumberdaya. Musrenbang menjadi arena yang menentukan atas pertarungan antar aktor di dalamnya. Konkritnya, proses Musrenbang akan menentukan siapa yang akan maju untuk mewakili aspirasi masyarakat secara umum. Selanjutnya, ketika aktor-aktor sudah tereliminasi melalui arena Musrenbang maka yang akan menjadi hasil dari Musrenbang itu sendiri ditentukan oleh tindakan komunikatif. Jika sebelumnya

yang dipertarungkan adalah antar aktor, maka jika aktor-aktor yang ada telah dieliminasi maka yang dapat dipertarungkan adalah gagasan. Peserta musrenbang akan menentukan gagasan mana yang dapat diterima oleh publik dan mana yang tidak dapat teruji oleh publik. Gagasan yang dapat diterima oleh publik adalah gagasan yang mampu melewati 3 kriteria yaitu benar (objektif), tepat (normatif), jujur (subjektif). Dalam sudut pandang pembangunan desa, gagasan yang diusulkan haruslah gagasan yang berasal dari kebutuhan masyarakat bukan keinginan masyarakat. gagasan yang hanya berasal dari keinginan akan dieliminasi oleh forum. Gagasan yang telah teruji inilah yang nantinya akan disahkan sebagai kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk RPJM dan RKP Desa.

Daftar Pustaka

- Djohani, Rianingsih. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. tt: The Asia Foundation.
- Dews, Fred; Tom Pepinsky, Molly E. Reynolds, 2019. "Indonesia, an Unlikely Democracy", The Brookings Cafeteria Podcast March 15, 2019. <https://www.brookings.edu/podcast-episode/indonesia-an-unlikely-democracy/> [diakses 27.05.2019]
- Jailani, M. Syahran. 2013. "Ragam Penelitian Qualitative" dalam *Jurnal Edu-Bio* vol. 4. Jambi: Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha.
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Karianga, Hendra. 2001. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Pius S., 2005. "Desentralisasi Dan Demokratisasi Di Desa: Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Kultur Lokal," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No.1.
- Rozaki, Abdur,dkk. 201. *Mempertemukan Dua Hulu*. Yogyakarta: IRE.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Tim Penulis. 2015. *Menggagas Tata Kelola Berbasis Keterbukaan*. Jakarta: Kemitraan.
- van Klinken, Gerry. 2016. "Democratic, Corrupt, and The Glue of The Nation: Meet The Provincial Middle Classes," *Indonesia at Melbourne*, <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/democratic-corrupt-and-the-glue-of-the-nation-meet-the-provincial-middle-classes/> [diakses 27.05.2019]
- Waters, Malcom. 1998. *Modern Sociological Theory*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication.

Upaya Atasi Permasalahan Kota Melalui Konsep Gc-Sep “Green City and Smart Educational Park”

Moh. Hamzah Fansuri

Hisnuddin Lubis

*Program Studi Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya
Universitas Trunojoyo Madura
hamzahfansuri268@gmail.com*

Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan di pemukiman kota dewasa ini, menunjukkan tingginya tingkat perkembangan yang dialami. Pertumbuhan tersebut sulit untuk dikontrol, hal ini ditandai dengan naiknya jumlah bonus demografi serta aktivitas disetiap harinya. Akibatnya, berdampak pada sempitnya lahan serta mulai banyaknya permasalahan mengenai area kumuh dan tercemar di beberapa tempat yang ada di kota.

Pendapat lain menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang sampai saat ini terus dirasakan pada masyarakat perkotaan yakni mengenai perbedaan kelas sosial yang semakin lama terlihat mencolok, ditandai dengan tingginya heterogenitas masyarakat kota (Sarlito, 1992:62). Di samping itu, fenomena lain pada kehidupan kota adalah adanya sifat kompetitif yang sangat bervariasi sesuai dengan jenis pekerjaannya, misalnya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya maka masyarakat perkotaan dituntut untuk mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan tersebut. Tak heran, jika emosional masyarakat perkotaan cenderung tinggi dan kurang bisa dikontrol dengan baik.

Selain bonus demografi dan permasalahan di atas yang melanda keadaan kota, permasalahan yang tak kalah urgen yakni mengenai tingkat polusi yang tinggi. Salah satunya adalah polusi di Kota Jakarta menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan bahwa Jakarta berada di posisi pertama dalam indeks kualitas udara terburuk di dunia yang mengungguli Beijing, Lahor, New Delhi dan Daka. Data

tersebut, menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan *Greenpiece* Indonesia, dari data tersebut menunjukkan kualitas udara di salah satu kota Indonesia (Jakarta) yang memasuki level tidak sehat atau berbahaya (Putri, 2018).

Isu hijau (*green issue*) dimana istilah ini sudah muncul sejak lama mengenai kesadaran dan keprihatinan yang semakin berkurang tentang ruang terbuka, taman dan aneka jenis pepohonan yang ada di tengah kota, sebagai bentuk menjaga udara supaya tetap asri dan menyehatkan. Kenyataannya saat ini, jika tanpa adanya ruang terbuka hijau (RTH) kehidupan di kota terasa sumpek, panas serta gersang dan banyak polusi. Akibatnya, berdampak pada perilaku manusia yang tambah berin-gas, tersulut emosi dan meleldak-ledak yang kerap kali ditemui dalam hiruk-pikuknya kota. Hal tersebut perlu adanya perwujudan kota hijau (*green city*) yang bekerjasama dengan PEMDA salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan penetapan suatu ruang sebagai RTH (Sundari, 2015: 2).

Nyatanya, kehidupan kota ini selalu dinamis dan mengalami perubahan dengan segala fasilitas serta nuansa gemerlap yang ada, tanpa disadari permasalahan tersebut perlu diatasi secara bijak. Hal tersebut menjadi “*pull factor*” untuk dapat menganalisis bagaimanaantisipasi bagi masyarakat kota untuk mengatasi permasalahan terkait. Guna sebagai melepas penatnya hidup di kota dengan kesibukannya masing-masing, masyarakat perlu adanya tempat khusus sebagai sarana *refreshing* diri, khususnya pada saat *weekend* tiba. Dari masalah tersebut penulis memberikan gagasan sebagai strategi menghilangkan kepenatan kota dengan program usulan “*Green City and Smart Educational Park*”. Dalam konsep ini nantinya menggambarkan suasana yang nyaman dengan memberikan nuansa taman hijau di tengah kota serta dihiasi taman pintar sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat yang ingin bersantai pada saat *weekend*.

Sekilas Pengertian Kota

Makna kota sendiri secara sosiologis didefinisikan sebagai tempat pemukiman yang relatif besar, padat penduduk dan permanen yang terdiri dari kumpulan individu yang heterogen (De Goede dalam Sarlito, 1992: 40). Jika dilihat dari segi geografisnya kota diartikan sebagai sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan

penduduk dan diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dengan bercorak materialistis (Bintaro, 1989: 34).

Namun perlu diketahui bersama, bahwa kota memiliki ciri-ciri yang spesifik diantaranya:

1. Ada perbatasan kota yang tegas.
2. Memiliki pasar.
3. Memiliki pengadilan sendiri serta memiliki undang-undang yang khusus berlaku pada kota tersebut, di samping undang-undang yang berlaku lebih umum.
4. Terdapat berbagai macam perkumpulan dalam masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan kota tersebut
5. Masyarakat memiliki otonomi tertentu yang berhak memilih walikota dan anggota dewan

Dari ungkapan tersebut, terdapat batasan yang lebih khusus bahwa kota merupakan:

1. Tempat pusat pemukiman dan kegiatan penduduk
2. Mobilisasi penduduk tinggi
3. Bonus demografi yang tinggi
4. Memiliki watak serta corak heterogen
5. Memiliki ciri khas kehidupan kota
6. Terdapat batas wilayah sesuai dengan administrasi
7. Memiliki hak otonomi

Definisi lain, menurut George E. Hardoy tentang kota yang dirumuskan sebagai berikut (Rapoport, 1985: 22):

1. Ukuran dan jumlah penduduk yang cenderung besar terhadap masa dan tempatnya
2. Bersifat permanen
3. Kepadatan minimum terhadap masa dan tempat
4. Struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan oleh jalur jalan dan ruang-ruang perkotaan yang nyata
5. Tempat masyarakat tinggal dan bekerja
6. Fungsi perkotaan minimum yang diperinci meliputi, pasar, pusat administrasi (pemerintah), pusat militer, pusat keagamaan, pusat aktivitas intelektual bersama kelembagaan yang sama
7. Heterogenitas dan perbedaan yang bersifat hierarkis pada masyarakat

8. Pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian di luar kota dan memproses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas
9. Pusat pelayanan (service) bagi daerah-daerah lingkungan setempat
10. Pusat penyebaran yang memiliki suatu falsafah hidup perkotaan pada masa dan tempat tersebut.

Kota yang sehat adalah kota yang di dalamnya terdapat ciri berlakunya dinamika keseimbangan dari berbagai fenomena. Sebuah kota yang sehat akan memiliki proporsi yang menguntungkan, jika dalam kota tersebut tidak ada proporsi maka kota tersebut kategori kota penunh ancaman (Watt, 1973).

Kota menurut *National Urban Development Strategy* (NUDS) dapat diamati melalui jumlah penduduk yang tinggal dan beraktivitas di kawasan tersebut, yang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

1. Kota Metropolitan, penduduk >1.000.000
2. Kota Besar, penduduk 500.000 – 1.000.000
3. Kota Menengah, penduduk 100.000 – 500.000
4. Kota Kecil A, penduduk 50.000 – 100.000
5. Kota Kecil B, penduduk 20.000 – 50.000

Selanjutnya, pendapat lain menjelaskan bahwa kemunduran lingkungan kota yang dikenal dengan istilah “*urban environment degradation*” yang saat ini telah meluas di berbagai kota yang ada di dunia, sedangkan di beberapa kota Indonesia sudah tampak membahayakan, salah satunya di Kota Jakarta. Kerusakan lingkungan kota dapat dibagi menjadi dua aspek, diantaranya:

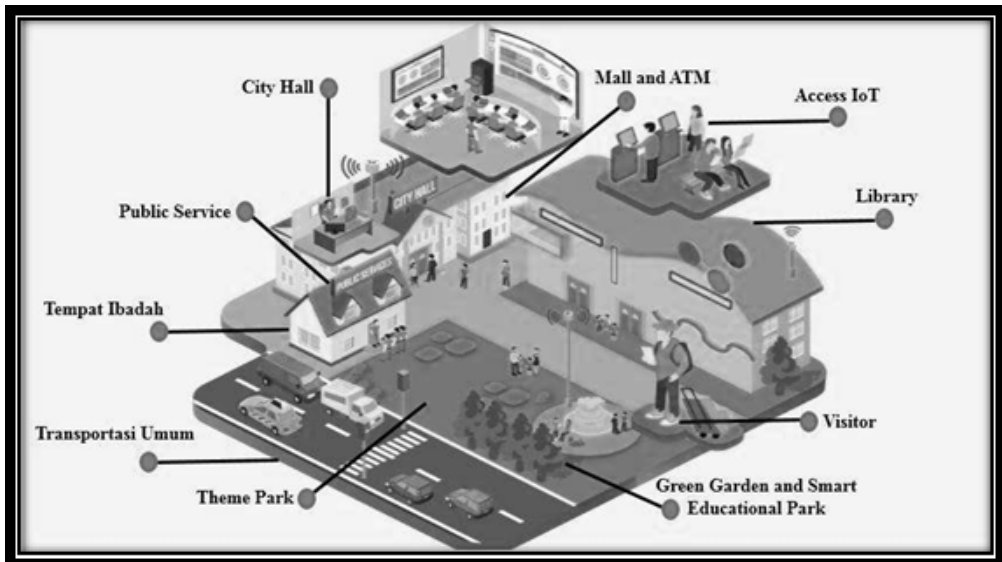
1. Aspek Fisis (*enviromental degradation of phisical nature*), dimana gangguan yang ditimbulkan pada unsur alam, misalnya: pencemaran air, udara dan seterusnya
2. Aspek Sosial-Masyarakat (*enviromental degradation of societal nature*), dimana gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri yang menimbulkan kehidupan gelisah, susah maupun tidak tenang.

Konsep *Green City and Smart Educational Park (Gc-Sep)*

Upaya dalam menjadikan kota sebagai tempat yang nyaman dan menyenangkan sebagai tujuan saat akhir pekan merupakan suatu hal didambakan disetiap kota yang ada di Indonesia. Namun beberapa kota masih mencoba mengupayakan kota menjadi tempat idaman dan bersantai dengan keluarga, teman akrab dan lainnya. Mungkin beberapa kota sudah melaksanakannya namun belum bisa berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penulis memberikan usulan program dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya *green city* serta taman terbuka yang menyediakan ruang untuk menikmati nuansa kota dengan di temani fasilitas yang lengkap dan memadai dengan jumlah pengunjung. Hal itulah yang terkadang membuat hal yang terlupakan hingga saat ini, karena tidak sempat memikirkan hal terkait baik pemerintah kota maupun masyarakat perkotaan. Berikut konsep usulan penulis yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Gambar 1.

Konsep GC-SEP “Green City and Smart Educational Park”



Ilustrasi: Moh. Hamzah Fansuri

Dari gambar tersebut, menunjukkan konsep yang strategis dalam optimalisasi kota, berikut ini penjelasannya:

1. **Theme Park** (Taman Bermain), bahwa taman tersebut tidak hanya untuk kalangan dewasa saja namun untuk semua kalangan dengan menyediakan taman bermain bagi anak kecil.
2. **Transportasi Umum**, bahwa tempat tersebut sangat mudah dijangkau karena dekat jalan raya dan mempermudah untuk akses perjalanan menuju GC-SEP baik menggunakan transportasi sepeda motor, mobil maupun transportasi umum.
3. **Tempat Ibadah**, dimana GC-SEP juga dilengkapi dengan tempat ibadah bagi pengunjung yang ingin mengunjungi tempat tersebut dengan lama-lama (santai) dan tidak perlu repot mencari tempat ibadah.
4. **Public Service**, dalam tempat tersebut juga disediakan layanan umum bagi pengunjung yang sekiranya kebingungan dengan GC-SEP ataupun jika merasa kehilangan sesuatu, bisa dengan cepat melaporkan ke bagian layanan umum.
5. **City Hall**, tempat ini di *setting* dekat dengan Balai Kota supaya dapat membantu kontrol terhadap program yang akan dijalankan . selain itu, supaya mempermudah pengunjung jika ada keperluan ke tempat tersebut dengan juga bisa menikmati GC-SEP dikesibukannya.
6. **Mall and ATM**, hal ini juga perlu disediakan untuk pengunjung yang ingin berbelanja saat pergi ke GC-SEP, jadi tidak susah repot berbelanja sambil menikmati suasana taman hijau terbuka di tengah kota.
7. **Access IoT**, penyediaan tempat *free WI-FI* pada area tertentu supaya pengunjung lebih betah berlama-lama menikmati waktu luangnya dengan keluarga sambil mengakses informasi yang dibutuhkan saat di GC-SEP.
8. **Library**, juga disediakan kepada pengunjung yang cenderung kutu buku. Untuk menarik minat pengunjung, bisa menyediakan aneka jenis buku dan selalu dilakukan pembaharuan buku.
9. **Visitor**, adalah pengunjung yang berkunjung di GC-SEP, dalam kunjungan tersebut nantinya tidak ada batas usia, karena dalam GC-SEP menyediakan untuk semua usia dan dikemas se-

cara menarik. Jika perlu bisa terapkan tiket masuk untuk menikmati tempat tersebut.

10. Green Gorden and Smart Educational Park, ini merupakan taman hijau yang dikemas ditempatkan di tengah kota dengan memberikan nuansa edukasi untuk mencerdaskan pengunjung yang datang ketempat tersebut serta memberikan pelayanan dan suguhan yang luar biasa.

Namun, dalam menjalankan program usulan tersebut perlu adanya *stakeholder* demi terselenggaranya serta terealisasinya program usulan terkait, berikut gambaran dari sinergitas dengan *stakeholder* terkait.

Gambar. 2 Sinergitas dengan beberapa Stakeholder



Gambar: Moh. Hamzah Fansuri

Dari gambar tersebut, perlunya stakeholder dalam menjalankan program usulan, berikut ini penjelasannya:

- 1. Pemerintah**, merupakan salah satu yang berperan penting dalam merealisasikan program usulan ini, dimana untuk menjalankan program GC-SEP ini memerlukan anggaran serta lahan yang cukup luas yang berada di tengah kota yang menjadi ikon kota tersebut supaya dapat dijadikan sebagai salah satu *city tour* bagi masyarakat daerah maupun luar daerah yang dikemas secara menarik.
- 2. Akademisi**, dapat berpartisipasi khususnya dalam mengelola *library* serta dapat memfilter kebutuhan buku yang layak dibaca oleh semua kalangan sesuai dengan kategorinya, selain itu, aka-

demisi sebagai pengusul program dan berharap dapat terealisasi di seluruh kota yang ada di Indonesia yang dikemas dengan bernuansa nilai-nilai corak budaya untuk menggambarkan perbedaan GC-SEP satu dengan yang lainnya.

3. **Pengunjung/Masyarakat**, dapat berpartisipasi terhadap program usulan yang nantiya saling memberikan masukan mengenai kekurangan dari program yang diusulkan oleh penulis yakni GC-SEP. Dan diberikan kotak saran kepada pengunjung mengenai pelayanan yang berlaku dalam program tersebut.
4. **Swasta**, selain dari hal diatas, perlunya untuk bekerjasama dengan pihak swasta yakni dengan memberikan tempat belanja bagi pengunjung dan memberikan kepada UMKM yang berkesempatan membuka aneka jajanan khas dari daerahnya masing-masing sesuai tempat berdirinya dari GC-SEP.

Analisis Swot

Adapun analisis SWOT terhadap bisnis yang akan dijalankan sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - a. Kekuatan (Strenght)
 - Memiliki konsep yang matang
 - Tiket masuk yang murah
 - Bisa untuk semua kalangan
 - Terdapat pusat oleh-oleh khas daerah masing-masing
 - Tersedia semua tempat dengan fasilitas yang memadai
 - b. Kelemahan (Weakness)
 - Masih belum adanya uji coba
 - Pengunjung dikhawatirkan sedikit dan ramai saat *weekend*
 - Jika hujan GC-SEP kurang maksimal karena ditempat terbuka
2. Faktor Eksternal
 - a. Peluang/Kesempatan (Opportunities)
 - Salah satu tempat liburan akhir pekan
 - Salah satu wisata green citi terbaru sesuai dengan konsep yang ada
 - Melakukan *marketing* berbasis *offline* dan *online*
 - Penempatan yang strategis

b. Kelemahan (Threats)

- Wisata yang ditawarkan kurang menarik
- Persaingan pengunjung disetiap daerah
- Dikhawatirkan pengunjung hanya dari kalangan menengah keatas

Penutup

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi untuk mengatasi polusi, suasana panas, gersang serta tempat liburan akhir pekan bagi masyarakat kota yang edukatif yakni dengan hadirnya GC-SEP “*Green City and Smart Educational Park*” dalam memberikan kenyamanan serta tidak hanya berbasis nilai estetika namun juga nilai edukatif yang dapat digunakan oleh semua kalangan. Program ini, diharapkan mampu memberikan ketenangan serta kenyamanan bagi pengunjung, karena dalam program usulan GC-SEP ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai untuk pengunjung, yang sudah tertera dalam konsep GC-SEP ini. Program ini diharapkan bisa diterapkan oleh seluruh kota yang ada di Indonesia dengan menekankan nilai edukatif dengan perpaduan suasana hijau ditengah kota. Selain itu, untuk membedakan antara GC-SEP satu dengan yang lainnya dapat menggunakan corak yang sesuai dengan ikon yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang bisa dijadikan sebagai salah satu *city tour* oleh masyarakat daerah maupun luar daerah.

Daftar Pustaka

- Bintaro. 1989. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Putri, Gloria Setyvani. 2018. *Polusi Udara, Pembunuh Senyap di Ibu Kota*. http://www.gepgle.com/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2018/05/22/203100_823/pulusi-udara-pembunuh-senyap-di-ibu-kota. Diunduh pada tanggal 14 April 2019. Pukul 19.10 WIB.
- Prawitasari. 2010. *Analisis SWOT Sebagai Dasar Perumusan Strategi Pemasaran Berdaya Saing (Studi Pada Dealer Honda Tunggal Sakti di Semarang)*. SKRIPSI: Universitas Diponegoro
- Rapoport, Amost. 1985. *Asal-Usul Budaya Pemukiman*. Bandung: Intermedia
- Sarlito. WS. 1992. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Sundari, Eva Siti. 2015. *Studi untuk Menentukan Fungsi Hutan Kota dalam Masalah Lingkungan Perkotaan*. (Jurnal: PKW UNISBA). Diunduh pada tanggal 13 April 2019. Pukul 08.36 WIB.
- Watt, K.E.F. 1973. *Principles of Environmental Science*. New York San Francisco. Toronto: Mc. Graw Hill

Car Free Day Sebagai Arena Rekolonisasi Ruang Publik (Studi Terhadap Car Free Day Di Taman Bungkul Kota Surabaya)

Mohammad Afifuddin

*Dosen Sosiologi FISIB
Universitas Trunojoyo Madura*

Abstrak

Car Free Day (CFD) awalnya digagas untuk menciptakan ruang publik bagi warga kota dalam bersosialisasi, berolahraga sembari berkumpul dengan sesama warga. Termasuk juga CFD dapat menjadi arena bagi warga kota dalam menyampaikan aspirasi, berdialog dan mengutarakan masalah-masalah kepublikan kepada negara (pemerintah). Sesaknya ruang kota membuat warga kota tidak selalu memiliki kesempatan menikmati kota. Kemacetan yang luar biasa sebagai konsekuensi dari tidak seimbangnya rasio antara luas jalan raya dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah, kehadiran pedagang di sepanjang trotoar dan fasilitas umum lainnya, serta perencanaan pemerintah yang buruk mengenai tata letak jalur pedestrian, membuat warga kota nyaris tidak punya ruang publik yang memadai. Karena itu CFD dirancang agar warga kota dapat menikmati ruang publik di kota secara leluasa tanpa gangguan kendaraan bermotor maupun pedagang kaki lima yang banyak menyerobot ruang publik dan fasilitas umum kota. Namun ternyata, arena CFD di Taman Bungkul Kota Surabaya seringkali justru dimanfaatkan oleh pasar (baca: pengusaha jual-beli kendaraan bermotor) untuk menawarkan produknya. Bahkan beberapa kali digunakan untuk atraksi motor sebagai bagian dari iklan produk yang mereka tawarkan. Pemerintah Kota Surabaya bahkan menjadikan CFD sebagai sarana bagi pegiat bisnis lokal untuk memasarkan produknya. Dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan kajian pustaka, tulisan ini ingin mendeskripsikan bahwa

telah terjadi rekolonialisasi ruang publik di ajang CFD di Taman Bungkul Kota Surabaya. Pada awalnya, masyarakat tidak punya ruang publik yang memadai dalam arti tidak punya ruang untuk kebebasan berekspresi, kebebasan pendapat di muka umum karena otoritarianisme pemerintah Orde Baru. Fenomena tersebut dinamakan kolonisasi (penjajahan) ruang publik oleh rezim tiranik Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru runtuh, warga punya kebebasan untuk menciptakan ruang publiknya sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Namun ternyata ada tantangan lain dari okupasi sektor privat (pasar) yang berupaya mengkolonisasi kembali ruang publik untuk kepentingan ekonomi-politiknya. Dengan demikian, ruang publik di perkotaan diindikasikan lepas dari cengkeraman kolonialisme negara, masuk dalam dekapan kolonialisme pasar.

Pendahuluan

Dalam Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa pengguna ruang lalu lintas jalan tidak hanya pengguna kendaraan bermotor tetapi juga pejalan kaki. Namun di kota-kota besar di Indonesia, ruang untuk pejalan kaki sangat minim. Bahkan jalur pedestrian (trotoar), sebuah ruang yang dibangun khusus untuk pejalan kaki dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem ruang lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, saat ini belum benar-benar menjadi ruang yang nyaman bagi pejalan kaki, karena seringkali harus berebut akses dengan pengendara motor yang memacu kendaraannya hingga jalur trotoar. Padahal dalam Pasal 106 ayat (2) UU 22/2009, disebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki.

Banyak pengendara motor mengabaikan norma regulasi tersebut karena merasa kondisi jalan sudah sangat macet sehingga harus mencari celah untuk keluar dari jebakan macet, termasuk memanfaatkan jalur trotoar. Hasilnya kemacetan tidak hanya terjadi di ruas jalan raya, tetapi juga di trotoar. Karena selain ada penumpukan kendaraan bermotor, di beberapa jalur trotoar di perkotaan seringkali dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berdagang. Para pedagang yang populer dikenal dengan istilah “pedagang kaki lima” tersebut tidak hanya

membawa gerobak sebagai lapak dagangannya, tetapi sebagian bahkan mendirikan bangunan semi permanen di atas trotoar untuk berjualan. Maka terjadilah penumpukan aktivitas di trotoar antara pejalan kaki, pengendara motor dan pedagang.

Ketidaktegasan aparat penegak hukum untuk menegakkan fungsi dasar dari trotoar menjadikan trotoar sebagai ruang perebutan kuasa antara pejalan kaki, pengendara motor dan pedagang. Tentu pihak yang kalah dalam konteks ini adalah pejalan kaki. Seringkali para pejalan kaki dipaksa minggir dan mengalah apabila mereka berpapasan dengan pengendara motor atau lapak para pedagang kaki lima. Kontestasi ruang jalan raya tersebut dapat terjadi karena ketidakseimbangan rasio jumlah kendaraan bermotor dibandingkan dengan luas jalan raya.

Ironis memang, mengingat trotoar sesungguhnya adalah ruang privat bagi pejalan kaki. Secara historis, trotoar dirancang sebagai jalur pribadi bagi setiap individu untuk kembali pulang ke tanah asalnya (Kostov, 1992 dalam Adianto dan Dewi, 2005). Seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, makna trotoar pun berkembang dari awalnya sebagai ruang privat akhirnya bergeser menjadi ruang publik. Trotoar menjadi arena bagi warga untuk bersosialisasi, berinteraksi dan bertransaksi secara sosial. Di Eropa, fungsi trotoar sebagai ruang publik bahkan sudah berlangsung sejak tahun 1290 (Adianto dan Dewi, 2005).

Car Free Day (selanjutnya ditulis CFD) sejatinya ditujukan sebagai salah satu cara untuk mengembalikan kedaulatan para pejalan kaki atas sistem ruang lalu lintas (jalan raya beserta jalur pedestrian/trotoar di sekelilingnya). CFD menawarkan keleluasaan ruang sosial dan ruang kepublikan bagi warga kota (Daud, dkk, 2016). Sekalipun sementara, warga kota dapat menikmati beberapa ruas jalan kota, trotoar, maupun taman kota untuk berolahraga, maupun melakukan berbagai kegiatan sosial, tanpa khawatir diganggu oleh kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan bermotor yang sebelumnya menguasai penuh ruang jalan raya tersebut, dipaksa mengalah oleh “kuasa” pejalan kaki saat masa CFD tiba.

Di Indonesia, CFD awalnya berlangsung di Jakarta pada 22 September 2002 dalam rangkaian peringatan Hari Bumi dan kampanye penghapusan penggunaan bensin bertimbel (<https://www.carfreedayindonesia.org/index.php/informasi/sejarah-car-free-day>). Setelah merasa-

kan dampak positif terhadap lingkungan, maka CFD banyak diadopsi oleh kota-kota besar lain di Indonesia. Dari awalnya satu tahun sekali, satu bulan sekali, hingga kini CFD menjadi agenda rutin pemerintah kota setiap satu minggu sekali. Salah satu kota yang melaksanakan agenda CFD adalah Kota Surabaya. CFD di Surabaya dipusatkan di sekitar kawasan Taman Bungkul dengan menutup dua ruas dari sebagian Jalan Raya Darmo Kota Surabaya, setiap hari Minggu pukul 06.00-11.00 WIB (<https://www.infocarfreeday.net/2018/09/15/setelah-dievaluasi-pemkot-surabaya-larang-kegiatan-besar-dan-politik/>).

Secara normatif, ajang CFD memang dapat ditafsirkan sebagai arena kemerdekaan warga kota untuk memanfaatkan jalan raya dan trotoar sebagai ruang publik setelah sebelumnya lebih banyak dikuasai pengendara kendaraan bermotor. Akan tetapi, dalam implementasi pelaksanaan CFD selama ini, terdapat indikasi adanya aktor-aktor yang memanfaatkan CFD untuk kepentingan non-publik yang menguntungkan mereka sendiri tanpa memberi kontribusi positif terhadap penguatan nilai-nilai *civil society* bagi warga.

Dengan memanfaatkan metode pencarian data primer melalui wawancara terhadap beberapa warga yang pernah memanfaatkan CFD, maupun penelusuran data-data sekunder yang dianggap relevan, tulisan ini ingin mendeskripsikan proses kooptasi atau komodifikasi CFD dari tujuan awalnya sebagai arena berkembangnya ruang publik bagi warga kota, menjadi arena akumulasi kapital untuk kepentingan ekonomi-politik para pemilik modal.

Konsep Ruang Publik

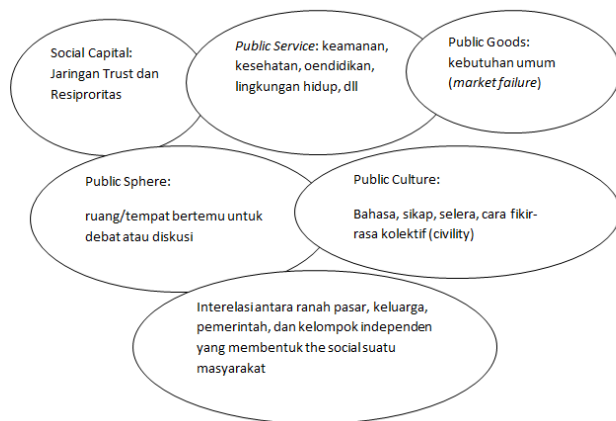
Istilah ruang publik memiliki arti normatif, yakni mengacu pada peranan masyarakat warga dalam demokrasi. Boleh dikatakan konsep kepublikan, masyarakat warga, dan ruang publik yang saling terkait dalam berbagai aspek (Hardiman, 2010). Sedangkan ruang publik bagi Hannah Arendt diartikan secara sangat spesifik politis sebagai proses deliberasi dalam legislasi konstitusi secara demokratis (Hardiman, 2010). Sedangkan Habermas (dalam Hardiman, 2010:189) menyebut tiga ciri dasar ruang publik. *Pertama*, para aktornya bukan berasal dari birokrasi negara ataupun dari kalangan bisnis yang dengan cara tertentu berkolaborasi dengan kekuasaan, melainkan “orang-orang privat”,

yaitu warga biasa yang tentu dalam konteks saat ini berasal dari kelas menengah; *kedua*, terjadi pemberdayaan diantara mereka lewat apa yang disebut Kant sebagai *public of reason*: pertimbangan-pertimbangan rasional tanpa rasa takut dinyatakan secara publik; *ketiga*, ruang publik itu sendiri menjadi mediasi antara isu-isu privat para individu di dalam kehidupan mereka. Maka dikotomi antara anggota komunitas ekonomi dan anggota komunitas politis diatasi lewat pencarian kepentingan-kepentingan publik.

Intinya, tidak ada perbedaan mendasar dalam segi normatif ruang publik rumusan Habermas itu dari praksis *polis* yang diidealkan oleh Arendt: ruang publik seharusnya otonom dari negara dan pasar (Hardiman, 2010).

Sementara itu Herry-Priyono mengutip dari Drache (2010) membuat skema untuk menjelaskan keragaman arti ruang publik seperti digambarkan berikut ini;

Gambar 1.
Keragaman Arti Ruang Publik



Sumber: Herry-Priyono (2010)

Dalam konteks tersebut, Herry-Priyono (2010) juga mengidentifikasi ruang publik sebagai “ranah” yang didiami “sosok-sosok” kekuatan yang menentukan watak dan hidup-matinya ruang publik itu sendiri. Kerap kali sosok tersebut diistilahkan sebagai *agency* ruang publik. Nah, *agency* yang berkuasa di ruang publik itu tidak bersifat tunggal (*sentral*), apalagi berpusat pada *state-centrist* (berpusat pada negara), dalam arti pemerintah memang bukan satu-satunya kekuatan penentu ruang pub-

lik. Melainkan kekuatan penentu ruang publik itu bersifat *polycentrist* (sifat jamak sentra kekuasaan) yang variasinya bisa meliputi kekuatan *bisnis, militer, agama, sains-teknologi, partai politik, media, trend global, NGOs, pemerintah*, dan sebagainya. Atau bahkan tercipta sebuah kolaborasi diantara kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga coraknya tidak tunggal, tetapi “koalisi-konspiratif.”

Dalam kasus di Indonesia, fenomena kekuatan ekonomi politik dan media yang saling berebut ruang publik untuk menghegemoni massa rakyat bisa diajdiakan studi kasus untuk melihat praktek operasionalisasi pola *polycentris* tersebut.

Kolonialisasi Ruang Publik: Belajar dari Kasus Orde Baru

Di dalam zaman rezim Soeharto negara mengintervensi ruang publik dengan dalih demi pemeliharaan stabilitas nasional. Pemerintah saat itu membenarkan politik represifitasnya dengan alasan bahwa negara sudah diperlengkapi dengan DPR/MPR untuk kanalisasi aspirasi publik, maka warga negara tidak perlu ruang penyaluran aspirasi lain. Warga negara cukup menyalurkan suara dan aspirasinya melalui lembaga perwakilan (DPR/MPR). Tentu, di kemudian hari terbukti bahwa hal itu hanyalah dalih Soeharto untuk melakukan depolitisasi warga. Sebab, seperti diutarakan Habermas, syarat negara hukum-demokratis modern justru adalah penciptaan ruang publik politis sebesar-besarnya (Hardiman, 2005).

Pasca Soeharto tumbang (orde reformasi), bangsa kita telah memasuki tahapan sejarah yang sangat penting dengan melangsungkan pemilihan presiden secara langsung. Namun ini baru awal, sangatlah prematur mengklaim sukses pemilu sebagai sukses sebuah demokratisasi. Karena esensi **demokrasi yang sesungguhnya adalah –seperti dirumuskan secara padat dalam istilah Jerman- *Regierung der Regierten* (pemerintahan dari mereka yang diperintah)**. Jika demikian menyerahkan kepercayaan begitu saja kepada para pelaku dalam sistem politik hasil pemilihan umum –eksekutif, legislatif, dan yudikatif- tidak akan memenuhi definisi itu. Jika demokrasi ingin maksimal, celah diantara dua pemilihan umum harus diisi dengan partisipasi politis warganegara dalam arti seluas-luasnya (Hardiman, 2005).

Demikian juga bila demokrasi tidak sekedar dipahami secara formalitas (prosedural-elektoral), ia harus memberi kemungkinan kepada warganegara untuk mengungkapkan opini mereka secara publik. Ruang atau –katakanlah – “panggung” tempat warganegara dapat menyatakan opini, kepentingan dan kebutuhan mereka secara diskursif dan bebas tekanan itu merupakan inti ide “ruang publik politis” (*political public sphere*). Konsep “ruang” di sini bukanlah metafor, melainkan riil, sejauh kita tidak memahaminya sebagai ruang geometris yang terukur dan berciri fisis. Ruang publik itu terbentuk lewat praksis komunikasi, yakni, seperti dikatakan Hannah Arendt, “suatu lingkup bagi suatu “Aku” untuk menyatakan ‘ke-siapa-annya’ di hadapan suatu “Kamu” sehingga suatu tindakan bersama suatu “Kita” menjadi mungkin (Hardiman, 2005).

Dengan demikian apa yang terjadi di Indonesia belum mencerminkan sepenuhnya fungsi ideal dari ruang publik politis itu. Artinya pemanfaatan ruang publik dalam konteks demokratisasi di Indonesia masih minim. Bahkan secara esensial, sesungguhnya belum pernah benar-benar ada era “ruang publik politis” atau “era polis” dalam masyarakat kita, karena Orde Baru telah melumpuhkan basis-basis kemandirian kelas menengah kita. Bahkan sekalipun ketika kita sudah masuk di era reformasi, sisa-sisa feodalisme dan “kolonialisme” ruang publik politis khas Orde Baru masih terasa kuat mencengkram.

Ketika masuk era reformasi, memang benar “ruang publik” itu tidak lagi terikat kuat oleh dominasi/hegemoni negara, tapi justru masuk ke pelukan imperatif pasar. Inilah yang kemudian disebut Herry-Priyono (2005), “*ranah publik: dari mulut pemerintah, masuk ke rahang pasar.*” Sehingga yang terbangun adalah “*minimalisme ruang publik*” (Piliang, 2005), atau yang sesungguhnya berlangsung adalah “*rekolonialisasi ruang publik*” (Sudibyo, 2009) dan “*komersialisasi ruang publik*” (Hardiman, 2010).

Sinyalemen Sudibyo maupun Herry-Priyono di atas menarik untuk digarisbawahi dengan intensi untuk membuat distingsi tentang realitas ruang publik dalam rentang waktu dua rezim politik yang berbeda. Di era Orde Baru, ibaratnya ruang publik kita tidak berdaya karena diterkam mulut buas tirani rezim (sebagaimana diistilahkan Herry-Priyono). Kebebasan pers, misalnya, hanya jadi slogan manis belaka.

Kenyataannya, independensi pers sangat dibatasi oleh Soeharto. Pembere-delan media cetak begitu marak, sementara rezim sensor juga bekerja maksimal untuk menyensor tayangan yang muncul di televisi. Intimi-dasi, teror, bahkan pembunuhan bukan barang langka bagi para aktivis yang kritis kepada pemerintah. Ringkasnya, secara banal ruang publik kita memang ada di era Orde Baru. Namun secara eksistensial, ruang publik itu sesungguhnya mati suri. Mirip seperti nasib kaum terjajah: secara fisik masih hidup tapi tidak punya daya dan kuasa untuk menen-tukan nasib dirinya. Itulah mengapa Sudibyo (2009) mengibaratkan ruang publik kita di masa itu mengalami penjajahan (kolonialisasi).

Rekolonialisasi Ruang Publik: Belajar dari Kapitalisasi Media

Lantas, bagaimana nasib ruang publik di era pasca-reformasi? Sudib-yo (2009) menyebutnya dengan istilah rekolonialisasi (penjajahan kem-bali) ruang publik, atau mengikuti tamsil Herry-Priyono di atas, ruang publik kita sekarang kembali masuk “rahang buaya” setelah lepas dari “mulut harimau”. Dalam konteks ini yang dimaksud “mulut harimau” merujuk pada represifitas rezim politik Soeharto, sedangkan “rahang buaya” menandakan kuasa besar para kapitalis dalam mengendalikan arah opini massa yang berasal dari ruang publik.

Dalam konteks Indonesia, media massa, khususnya media penyiaran semakin menjadi bagian integral dari realitas masyarakat Indonesia. Po-sisi media bukan lagi sekedar faktor pelengkap, namun telah menjadi faktor determinan dalam kehidupan. (Menonton) televisi, misalnya, ti-dak lagi dimaknai sebagai kebutuhan sekunder, tapi sudah menjadi ke-butuhan primer masyarakat. Namun liberalisasi ruang publik pasca-re-formasi yang digadang-gadang sebagai titik pijak eksistensi masyarakat untuk berkomunikasi secara bebas dan egaliter, justru kontraproduktif dengan cita-cita awalnya.

Sudibyo (2009) mengatakan, alih-alih menjadi alat publik untuk memperjuangkan kepentingannya, media berikut seluruh perangkat kerasnya justru tunduk di bawah genggamannya modal sambil secara per-lahan bergerak ke arah birokratisasi (politisasi). Dilihat dari perspektif Habermasian, kecenderungan ini tidak lain dari apa yang dinamakan refeodalisasi *public sphere* yang menggunakan komunikasi sebagai sa-

rana untuk “memelintir” kepentingan publik. Selain bertentangan dengan praktek komunikasi bebas dominasi, fenomena ini sama juga dengan penaklukan massa melalui komunikasi yang mengatasnamakan ruang publik.

Memang dalam hal ini objek studi yang dijadikan contoh oleh Sudibyo (2009) untuk analisis mengenai fenomena rekolonialisasi ruang publik di era pasca-reformasi adalah media massa. Sebagai salah satu bagian dari ruang publik, media massa di Indonesia pasca-reformasi telah kehilangan elan vitalnya untuk membela kepentingan publik. Yang terjadi justru media dijadikan sebagai alat bagi pemilik modal untuk akumulasi kapital maupun artikulasi kepentingan politik pemiliknya.

Namun kerangka analisis yang disampaikan Herry-Priyono (2005) maupun Sudibyo (2009) tersebut dapat diadopsi untuk menganalisis gejala dominasi dan hegemoni berlebih sektor privat/swasta (penguasaan kepentingan ekonomi-politik pasar) terhadap aktivitas CFD. Di mana pada hakikatnya CFD diadakan sebagai antithesis dari dominasi industri kendaraan bermotor di sistem ruang lalu lintas jalan dalam keseharian masyarakat kota. Artinya ada proses transformasi: awalnya tidak ada ruang publik semacam CFD ketika kuasa negara masih begitu kokoh mengontrol semua dimensi kehidupan masyarakat. Namun saat tirani rezim pemerintah ambruk, forum-forum untuk merepresentasikan kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat di depan umum tumbuh bak cendawan di musim hujan. Akan tetapi sayangnya forum atau mimbar publik semacam itu tidak steril dari relasi kuasa yang lain, yakni kooptasi aktivitas kepublikan oleh kuasa modal dan akumulasi kepentingan ekonomi-politik kapitalisme.

CFD Sebagai Bentuk Lain Rekolonialisasi Ruang Publik

CFD secara sederhana diadakan untuk memberikan zona bebas bagi masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan ruas jalan yang biasanya digunakan oleh kendaraan. Dengan demikian, CFD diharapkan tidak hanya mampu mengurangi emisi karbon, tetapi juga menimbulkan interaksi sosial. Seperti munculnya berbagai komunitas, serta untuk memberi ruang berbagai komunitas untuk mengekspresikan aspirasi kulturalnya.

CFD memang beberapa kali sempat menimbulkan kontroversi. Di antaranya ketika CFD di Jalan Sudirman-Thamrin-Bundaran HI Jakarta dimanfaatkan untuk kampanye politik oleh pendukung dua kubu calon Presiden 2019. CFD tanggal 29 April 2018 terjadi persaingan antara massa yang mengenakan kaos bertuliskan *#2019GantiPresiden* (merujuk pada pendukung Capres Prabowo Subianto) dan massa yang memakai kaos bertuliskan *#DiaSibukKerja* (merujuk pada pendukung Presiden Jokowi). CFD sebagai arena berkumpulnya banyak warga kota memang seringkali dijadikan arena kampanye politik, baik kampanye politik yang terselubung maupun kampanye politik secara terang-terangan. Itulah yang menjadi pertimbangan bagi Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menyebut ajang CFD telah kehilangan rohnya, yakni sebagai sarana membangun karakter masyarakat dan pemulihan kualitas udara. Hal itu terjadi karena banyaknya perusahaan atau kelompok masyarakat yang memanfaatkan car free day untuk kepentingan mereka. Terutama kepentingan yang bernuansa SARA, politik dan bisnis (<https://news.detik.com/berita/2888121/kisah-di-balik-car-free-day-yang-kini-mulai-berganti-roh>).

Tidak hanya di Jakarta, evaluasi terhadap CFD juga dilakukan di Surabaya. Penyebabnya ada beberapa peristiwa yang membuat substansi CFD menjadi berkurang atau terdistorsi dari makna aslinya. Yakni terlalu banyak unsur non-publik (terintervensi aspek politik dan bisnis) dalam kegiatan CFD tersebut (<https://www.lensaindonesia.com/2018/08/27/pemkot-surabaya-sementara-tiadakan-kegiatan-car-free-day.html>).



Dalam kegiatan CFD di Taman Bungkul Kota Surabaya memang terlalu banyak diwarnai dengan aspek bisnis. CFD yang sejatinya menjadi ruang berkumpul warga kota untuk berinteraksi, bersosialisasi maupun berolahraga telah disesaki dengan aktivitas bisnis oleh kulan-

gan yang hanya memanfaatkan berkumpulnya massa di Taman Bungkul dan sekitar Jalan Raya Darmo Kota Surabaya. Diantaranya adalah promosi dari pabrikan otomotif besar seperti Yamaha yang secara rutin memasang stand promosi atau bahkan menggelar atraksi-atraksi khusus untuk mempromosikan produknya. Berikut ini contoh selebaran promosi acara Yamaha di ajang CFD Surabaya.

Dari penuturan Fiqi (36), dirinya dan teman-temannya dari komunitas Surabaya Beat Club -SBC- (komunitas pengguna motor Honda Beat), seringkali *nongkrong* dan mengadakan acara di arena CFD. Menurutnya komunitas seperti SBC memang sering mengadakan kegiatan yang berdimensi sosial. Baik atas dasar swasembada dari iuran anggota maupun kerjasama dengan pihak Honda sebagai *brand* dasar dari nama komunitas tersebut. Fiqi tidak menampik bila komunitas yang dia ikuti seringkali diajak kerjasama oleh Honda untuk mempromosikan produk yang dipasarkan Honda. Termasuk ketika promosi tersebut dilaksanakan saat komunitas itu menggelar kegiatan di arena CFD Taman Bungkul Jalan Raya Darmo Kota Surabaya.

Sementara itu Erin (25) dan Iwin (25) mengaku sering mendatangi ke arena CFD karena memang ingin jalan-jalan dan mencari santapan pagi. Mereka mengaku tidak ada motivasi khusus untuk menikmati ruang publik yang lega kecuali iseng jalan-jalan dan mencari makanan kecil untuk cemilan pagi. Sehingga mereka merasa CFD tidak menarik kalau tidak diikuti dengan kehadiran para penjual. Mereka tidak keberatan bahwa Taman Bungkul ketika CFD dipenuhi para penjual. "Malah enak mas. Sambil jalan-jalan ada yang nawari kartu kredit, nawari kredit motor, nawari kredit perumahan, dan banyak makanan-minuman," jelasnya.

Sesaknya ajang promosi produk dari berbagai perusahaan tersebut seakan mengesankan bahwa ajang CFD tidak jauh berbeda dengan arena pasar malam atau festival jajanan lokal, di mana para pedagang berjejer di pinggir jalan dan para pejalan kaki berjalan untuk membeli dagangan yang disajikan. Padahal seharusnya CFD adalah arena bebas intervensi imperatif pasar agar warga kota dapat secara maksimal merasakan kebebasan ruang publik yang selama ini sangat didominasi oleh kuasa pengendara kendaraan bermotor.

Hal tersebut membenarkan temuan Prasetyo (2017), bahwa *Car Free Day* telah menjelma menjadi arena kontestasi produksi-konsumsi sekaligus transformasi ruang sosial-kultural kontemporer baru dalam pembentukan agensi komposit (publik) perkotaan. Adapun ruang sosial-kultural kontemporer yang dimaksud adalah terbentuknya ruang hasrat konsumeristis masyarakat kota. Sehingga nyaris tidak ada ruang kosong di kota tanpa dijejali dengan iklan dan promosi produk kapitalisme.

Hal ini ironis mengingat CFD pada awalnya dirancang sebagai ruang publik. Sedangkan ruang publik secara mendasar harus dimaknai sebagaimana dipostulatkan oleh Hannah Arendt: **ruang publik** seharusnya otonom dari negara dan pasar (Hardiman, 2010).

Penutup

Ketika rezim pemerintahan terlalu otoriter, maka mustahil membayangkan tercipta forum-forum berkumpulnya masyarakat di ruang terbuka untuk membahas isu-isu kepublikan. Setelah pemerintahan Orde Baru runtuh, warga negara Indonesia mulai merasakan kebebasan demokrasi dengan keleluasaan untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. CFD, yang pertama kali muncul di Indonesia pasca-reformasi pada awalnya dirancang sebagai ruang publik untuk merespon isu polusi udara akibat terlalu banyaknya jumlah kendaraan bermotor di jalan raya. Namun pada akhirnya CFD bertransformasi menjadi arena reproduksi konsumerisme warga kota karena arena CFD dibiarkan dikuasai oleh aktivitas bisnis, sehingga CFD justru kehilangan elan vitalnya sebagai ruang publik warga kota untuk berinteraksi, bersosialisasi dan berolahraga tanpa gangguan represifitas negara maupun imperatif pasar (kapitalisme).

Daftar Pustaka

- Adianto, Joko dan Dewi, Meydian Sartika. 2005. *Trotoar: Arena Perebutan Ruang Kehidupan Warga Kota*. Proceeding Seminar Nasional PESAT Universitas Gunadarma Jakarta 2005.
- Budi, Hardiman F. 2005. “*Ruang Publik Politis, Komunikasi Politis dalam Masyarakat Majemuk*” dalam *Republik Tanpa Ruang Publik*. Yogyakarta: IRE Press.
- , 2010. “*Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas*” dalam *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2010. “*Pendahuluan*” dalam *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.
- Daud, Firda Nurfaiza, dkk. 2016. *Car Free Day Sebagai Sarana Penunjang Kota dan Komunitas Berkelanjutan di Surakarta*. Makalah Program Studi Sosiologi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Naskah Tidak Diterbitkan.
- Herry-Priyono, B. 2010. “*Menyelamatkan Ruang Publik*” dalam *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.
- Piliang, Yasraf A. 2005. “*Minimalisme Ruang Publik: Budaya Publik di dalam Abad Informasi*” dalam *Republik tanpa Ruang Publik*. Yogyakarta: IRE Press.
- Prasetyo, Frans Ari. 2017. *Car Free Day: Transformasi Ruang dan Globalisasi Urbanisme Kontemporer di Bandung*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume No. 1, Januari 2017. Yogyakarta: Departemen Sosiologi Fisipol UGM.
- Sudibyo, Agus. 2009. “*Rekolonialisasi Ruang Publik: Anomali Dunia Penyiaran Pasca-2002*” dalam *Senjakala Kapitalisme dan Krisis Demokrasi*. Jurnal PRISMA No. 1 Vol. 28 – Juni 2009. Jakarta: LP3ES.

Perumahan Syar'i: Segregasi dan Tantangan Merawat Identitas Masyarakat Rurban

Achmad Zainal Arifin, Ph.D

*Dosen Prodi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga*

Pendahuluan

Peningkatan level keberagaman (heterogenitas) di masyarakat, khususnya di wilayah rurban¹, merupakan konsekuensi logis dari derasnya arus warga baru (pendatang) yang menghuni berbagai model perumahan yang banyak ditawarkan di daerah-daerah pinggiran kota. Para pendatang, yang berasal dari berbagai wilayah ditanah air dengan berbagai model budaya dan paham keagamaan, tentunya menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengembangan masyarakat. Budaya khas masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah Yogyakarta, yang selama ini identik dengan tingkat kebersamaan (komunalitas) dan toleransi yang cukup tinggi, dihadapkan pada berbagai nilai-nilai baru yang dihadirkan oleh warga pendatang, yang terkadang tidak sejalan, atau bahkan bertentangan. Keberhasilan dalam mengatur proses terjadinya persinggungan antar nilai yang berbeda tersebut menjadi kunci dalam membentuk ataupun melestarikan identitas sosial-keagamaan yang selama puluhan tahun difungsikan sebagai salah satu sarana pemersatu masyarakat, seperti: tradisi wiyit, mertu desa, dan kenduren.² Tanpa adanya

[1] Secara sosiologis, istilah masyarakat rurban merujuk pada model masyarakat yang memiliki karakteristik campuran antara masyarakat desa (rural) dengan masyarakat kota (urban). Model masyarakat semacam ini cukup banyak berkembang di desa-desa yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Lihat: Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1987); B. A. Simandjuntak, *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan* (Medan: Bina Media Perintis, 2008).

[2] Bagi sebagian masyarakat, istilah "*kenduren*" biasanya diidentikkan dengan selamatan untuk memperingati kematian saja, tetapi dalam penelitian ini, istilah *kenduren* mencakup berbagai bentuk selamatan dengan mengundang tetangga kiri-kanan, biasanya mereka yang berada dalam satu "lingkungan" dengan tuan rumah, baik untuk memperingati kematian, pernikahan, sunatan, maupun berbagai hajatan lain sesuai permintaan tuan rumah. Lihat: Darori Amin, *Islam Dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000); Mark R. Woodward, "The "Slametan": Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam," *History of Religions* 28, no. 1 (1988).

upaya bersama, baik dari warga lokal maupun pendatang, maka potensi konflik sosial bisa saja terjadi secara spontan dan sporadis.

Hadirnya para pengembang perumahan yang menawarkan berbagai konsep hunian baru bagi masyarakat Yogyakarta, di satu sisi tentu bisa dipandang sebagai suatu bentuk keberhasilan pembangunan, namun di sisi lain kenyataan ini juga menghadirkan beberapa permasalahan yang cukup pelik bagi masyarakat Yogyakarta. Persaingan yang cukup sengit antar pengembang perumahan menyebabkan mereka dituntut untuk mampu berkreasi untuk menghadirkan model hunian yang dipandang paling menguntungkan buat calon penghuni. Salah satu dampak yang bisa dirasakan dari kontestasi ini adalah munculnya konsep-konsep perumahan eksklusif,³ yang memiliki potensi untuk melahirkan segregasi di masyarakat. Hadirnya perumahan khusus Muslim, perumahan berdasarkan profesi penghuninya, dan sebagainya, secara sosiologis akan merubah struktur sosial yang selama ini eksis di masyarakat.

Model segregasi (pemisahan) yang biasa dihadirkan oleh berbagai bentuk perumahan diklaim oleh berbagai kalangan telah membawa dampak yang buruk bagi terwujudnya interaksi sosial yang sehat diantara warga lokal dan pendatang, sebagaimana digambarkan oleh Widhyharto:

Berdasar pengamatan langsung, komunitas berpagar biasanya ditandai dengan elemen fisik yang khas. Di antaranya adalah adanya pagar keliling (perimeter wall) entah berupa pagar masif (tembok misalnya), pagar alami, atau pagar yang sifatnya transparan (kawat atau BRC). Elemen lainnya adalah pos satpam, baik yang dijaga maupun tidak, portal, palang pintu atau pintu gerbang, serta gerbang penanda. Terdapat pula tanda-tanda yang berfungsi sebagai penanda/marking seperti “dilarang masuk” atau “tamu harap lapor.” Lokasi komunitas berpagar pun bervariasi. Ada yang berada di lingkungan kampung yang telah ada sebelumnya, di pinggir kampung, atau terpisah sama sekali yang biasanya di area pertanian. Terdapat pula kasus dimana beberapa komunitas baru terbentuk mengelompok di area pertanian.⁴

[3] Pengertian eksklusif disini tidak harus dipahami sebagai model perumahan yang hanya ditujukan untuk kalangan atas (kaya), akan tetapi juga dimaknai sebagai model pengembangan perumahan yang sifatnya tertutup dari masyarakat sekitar, khususnya perumahan yang lahan pengembangannya berada atau menyatu dengan rumah warga desa.

[4] Derajad S Widhyharto, “Komunitas Berpagar; Antara Inovasi Sosial Dan Ketegangan Sosial,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 13, no. 2 (2009).

Perbedaan nilai-nilai budaya, termasuk didalamnya perbedaan paham keagamaan, yang terjadi antara antara warga lokal dengan penghuni perumahan seringkali memunculkan ketegangan-ketegangan sosial di masyarakat. Hal ini tentu saja bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan sosial yang tinggi, rasa etnosentrisme yang masih kuat dan mengakar dalam nilai-nilai budaya yang dianut, maupun perbedaan paham keagamaan diantara mereka. khususnya terkait dengan pelaksanaan berbagai bentuk tradisi dan ritual yang, sebelum kehadiran warga perumahan, menjadi identitas sosial keagamaan yang mampu menyatukan warga masyarakat. Keengganan warga perumahan, yang umumnya memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda, untuk turut mengakui dan berpartisipasi dalam memelihara identitas sosial keagamaan menjadi fenomena umum yang saat ini banyak terjadi di berbagai tempat di wilayah DIY.

Salah satu desa yang memiliki model perumahan “eksklusif” dimana pola hubungan antara warga lokal dengan penghuni perumahan sering memunculkan ketegangan adalah Desa Sitimulyo. Desa ini merupakan salah satu kawasan di sebelah timur Kota Yogyakarta yang banyak mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Letaknya yang hanya berjarak sekitar 10 km dari pusat Kota Yogyakarta menjadikannya sebagai lokasi strategis yang banyak diincar oleh para pengembang untuk menginvestasikan dana mereka membangun kompleks-kompleks perumahan. Eksklusifitas dalam penelitian ini, selain ditinjau dari perspektif paham keagamaan, tingkat ekonomi, dan faktor sosial lain, juga menekankan model eksklusifitas dari sisi administrasi desa. Maksudnya, perumahan eksklusif tersebut, secara administratif ada yang berdiri sendiri sebagai wilayah RT tetapi ada juga yang menjadi bagian dari RT yang membaaur dengan masyarakat lokal.

Salah satu contoh dari model perumahan “eksklusif” tersebut adalah perumahan Bin Baz 2, yang dibangun hanya khusus untuk para ustadz dan keluarga wali santri yang tinggal di Pesantren Bin Baz. Kehadiran Perumahan Bin Baz 2, dimana lokasi perumahan tersebut terpisah cukup jauh dengan kompleks sekolah atau pondok pesantren, menyebabkan perumahan tersebut secara sepintas tidak berbeda dengan perumahan-perumahan lain yang cukup banyak terdapat di wilayah tersebut. Namun, aktivitas warga perumahan yang enggan terlibat dalam setiap

kegiatan sosial-keagamaan warga lokal (kampung) seringkali justru memunculkan ketegangan sosial di masyarakat. Terlebih lagi, penghuni perumahan tersebut memiliki pandangan keagamaan yang cukup berbeda dibandingkan dengan model keberagaman warga lokal. Ketegangan antara warga lokal dengan penghuni perumahan Bin Baz sendiri pernah terjadi beberapa kali, khususnya yang terjadi di Dusun Karang Ploso, yang dipicu oleh perasaan curiga dan gelisah warga dusun tersebut atas aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh ustadz dan santri di luar kompleks perumahan

Fokus kajian penelitian ini bukanlah untuk melihat pandangan keagamaan mana yang benar, akan tetapi untuk mengkaji seberapa jauh proses interaksi dan tawar-menawar (*bargaining*) dilakukan oleh warga kampung dengan penghuni perumahan sehingga potensi konflik identitas yang ada bisa lebih dikelola sedemikian rupa sehingga bisa memunculkan identitas baru yang bisa menyatukan, atau setidaknya meminimalisir munculnya ketegangan-ketegangan sosial di masyarakat.

Pandangan Masyarakat Tentang Identitas Sosial-Keagamaan

Secara umum, sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, model perumahan yang menyatu dengan perkampungan warga cenderung lebih membantu proses pembauran masyarakat melalui interaksi sosial yang intensif dengan memanfaatkan berbagai sarana pertemuan antar warga, dibandingkan dengan model perumahan yang secara administratif berdiri sendiri. Model semacam ini, ternyata tidak berlaku untuk model perumahan eksklusif yang didasarkan pada kelompok agama tertentu. Justru sebaliknya, model perumahan yang berdiri sendiri untuk warga pendatang yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan masyarakat, dalam kasus ini adalah Perumahan Bin Baz, justru cenderung lebih “aman” bila dipisah secara administratif dengan warga perkampungan.

Secara umum sebenarnya bisa dikatakan bahwa warga kampung di Desa Sitimulyo tidak menemui hambatan yang berarti dalam berinteraksi dengan warga perumahan. Hal ini disebabkan gap atau kesenjangan sosial antara kedua warga tersebut tidak begitu jauh. Bahkan, mayoritas warga perumahan disepulungan Desa Sitimulyo dihuni oleh

para pekerja pabrik, yang secara penghasilan juga bisa dibidang standar sesuai dengan upah minimal yang berlaku di daerah tersebut. Secara sosiologis, kondisi ekonomi yang selevel ini turut membantu kelancaran proses interaksi antara warga perumahan dengan warga kampung karena model dialog formal bisa diminimalisir oleh kedua belah pihak. Budaya ewuh-pekewuh yang biasanya muncul antar keduanya, khususnya bila model perumahannya sendiri sudah bersifat eksklusif, seakan-akan digantikan oleh berbagai jenis sapaan informal yang menggambarkan adanya keakraban diantara mereka.

Salah satu permasalahan yang dihadapi warga kampung terkait hadirnya warga perumahan di Desa Sitimulyo adalah perbedaan paham keagamaan antara warga kampung dengan warga di Perumahan Bin Baz 1 dan 2. Kenyataan ini menunjukkan bahwa model perumahan yang terpisah maupun menyatu dengan perkampungan warga, ketika bertemu dengan faktor perbedaan paham keagamaan menimbulkan potensi konflik di masyarakat. Terlebih lagi, apabila warga perumahan tersebut hadir di masyarakat dengan berbagai kesan eksklusif dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan tradisi dan adat yang sudah dipandang sebagai identitas sosial-keagamaan warga kampung disana. Dari sinilah mulai muncul adanya proses pemaknaan yang berbeda ditengah masyarakat terkait apa yang selama ini mereka anggap sebagai identitas yang mampu menyatukan warga dalam satu aktifitas atau kegiatan kemasyarakatan.

Sebagaimana data lapangan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, meskipun sebelum hadirnya warga perumahan Bin Baz 1 dan 2 sudah ada beberapa anggota masyarakat yang memiliki paham keagamaan yang menekankan kemurnian ajaran agama Islam yang berarti menolak berbagai model tradisi keagamaan warga seperti kenduren, wuwit, dan lainnya, yang dipandang mengandung unsur-unsur dari agama Hindu.⁵ Namun, budaya dan karakteristik masyarakat Jawa yang lebih menekankan pada pentingnya harmoni kehidupan bersama warga masyarakat, tidak serta merta membuat mereka yang memiliki pandangan

[5] Lihat: Hartono Ahmad Jaiz, *Kyai Kok Bergelimang Kemusyrikan : Kumpulan Masalah Ahmadiyah, Syi'ah, Pluralisme Agama, Syirik, Bid'ah, Kristenisasi, Dan Kemunkaran*, Cet. 1. ed. (Jakarta: Pustaka Nahi Munkar, 2008); Basyaruddin bin Nuridin Shalih Syuhaimin, *Membongkar Kesesatan : Tahليلan, Yasinan, Ruwaban, Tawassul, Istighotsah, Ziarah, Maulid Nabi Saw*, Cet. 1. ed. (Bandung: Mujahid Press, 2007).

keagamaan tersebut tidak terlibat atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan yang dijalankan warga. Setidaknya, mereka lebih mengedepankan kebersamaan dengan cara tetap menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut demi menghormati shohibul bait (tuan rumah) yang telah mengundang mereka.

Hadirnya warga pendatang, khususnya warga perumahan Bin Baz 1 dan 2, yang sebagian diantara mereka berasal dari luar Jawa dengan pemahaman keagamaan yang berbeda dari masyarakat, telah memunculkan pemaknaan yang berbeda terhadap simbol-simbol yang menjadi identitas sosial-keagamaan masyarakat. Tidak adanya budaya “ewuh-pekewuh,” yang menjadi salah satu ciri orang Jawa, menyebabkan munculnya sikap yang kaku dalam menghadapi perbedaan yang ada. Ketidakmauan mereka untuk menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah menjadi tradisi tersebut telah mengundang tanda tanya yang cukup besar bagi warga kampung yang memang notabene lebih menjalankan praktek-praktek keagamaan secara turun-temurun. Pandangan negatif warga kampung atas keengganan warga perumahan Bin Baz 1 dan 2 untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut dengan sendirinya muncul ke permukaan. Bahkan, tidak sedikit warga kampung, khususnya di Dusun Monggang, tempat perumahan Bin Baz 2 berada, menyayangkan lemahnya kepemimpinan aparat desa sehingga membiarkan perumahan tersebut berdiri.⁶

Sebenarnya dalam mensikapi perbedaan pemahaman terkait masalah tradisi, yang sudah dipandang sebagai identitas warga karena fungsi pemersatunya, relatif tidak akan memunculkan potensi konflik, jika penolakan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut bisa disampaikan tanpa harus menyatakan penilaian bahwa kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk “kesesatan” ataupun “penyimpangan” dari ajaran Islam menurut pandangan mereka. Maraknya penggunaan label “bid’ah” (sesat) dan “syirik” (mensekutukan Tuhan) yang biasa mereka lekatkan pada tradisi-tradisi yang dijalankan oleh warga kampung jelas akan memunculkan reaksi negatif dari warga kampung.

Terlebih lagi, dalam praktek keagamaan sehari-hari seperti sholat, misalnya, mereka juga menolak untuk melakukan berbagai bentuk ke-

[6] Wawancara dengan salah satu Ketua RT di Dusun Monggang, tanggal 23 Oktober 2016.

biasaan yang dilakukan masyarakat, seperti bersalaman setelah sholat ataupun dzikir dan doa bersama setelah sholat. Hal-hal kecil semacam iniustru seringkali memunculkan reaksi negatif dari masyarakat (warga kampung) atas warga perumahan Bin Baz, khususnya yang berada di Dusun Monggang dimana antar keduanya sholat beramaah di masjid yang sama. Disini jelas menunjukkan adanya pemaknaan yang berbeda akan suatu bentuk ritual keagamaan. Bagi warga kampung, berbagai kegiatan peribadatan senantiasa dipandang dan dikaitkan dengan pemupukan rasa solidaritas sosial. Dengan kata lain, dimensi sosial dalam ibadah, bagi warga kampung, sangatlah ditekankan. Sementara bagi warga perumahan Bin Baz, apapun bentuk peribadatan kalau tidak ada dasarnya, menurut mereka, tidak boleh dilaksanakan meskipun hal tersebut bisa memunculkan potensi perselisihan ataupun konflik di masyarakat.

Proses Negosiasi dalam Pelestarian Identitas Sosial-Keagamaan

Sebenarnya, kalau kita secara lebih mendalam memahami pelaksanaan dan pelestarian identitas sosial-keagamaan di masyarakat, maka akan terlihat dengan jelas berbagai bentuk kompromi atas identitas sosial-keagamaan yang ada dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. Terkadang, memang kemunculan berbagai bentuk kompromi tersebut tidak dihasilkan dari rapat-rapat formal antar warga sehingga cukup banyak juga warga yang tidak menyadari kapan sebenarnya bentuk-bentuk perubahan atas berbagai tradisi yang ada di masyarakat tersebut terjadi. Tidak arang baha kesepakatan untuk merubah waktu pelaksanaan tradisi-tradisi yang ada hanya lahir dari pendapat seorang warga yang kemudian ditularkan daroi mulut ke mulut hingga kemudian muncul kesepakatan warga dan segera dipraktikkan. Bagian ini akan menguraikan dan menjelaskan beberapa bentuk perubahan atas beberapa tradisi keagamaan yang dipraktikkan warga di Desa Sitimulyo sebagai bentuk kompromi atas situasi dan kondisi masyarakat yang berubah.

Salah satu bentuk perubahan atas tradisi yang dilaksanakan warga dan sudah umum juga dipraktikkan di tempat-tempat lain adalah tradisi kenduri terkait kematian atau yang seringkali disebut juga den-

gan tahlilan. Dari perspektif historis, pelaksanaan tahlilan bagi warga yang baru saja dikuburkan biasanya dilaksanakan selama tujuh malam berturut-turut. Meskipun praktek semacam ini masih dilaksanakan oleh beberapa warga, namun yang berlaku luas saat ini hanyalah dilaksanakan dalam waktu tiga hari berturut-turut. Tentu saja, pertimbangan yang seringkali muncul disini adalah persoalan waktu, khususnya terkait dengan semakin banyaknya warga yang beralih profesi dari petani, yang notabene memiliki waktu luang penuh di malam hari, ke profesi lain yang teradang mengharuskan mereka untuk bekerja di malam hari.

Dalam konteks ini, nampak bahwa meskipun faktor kesibukan warga menjadi alasan yang cukup dominan, namun sebenarnya perubahan ini sendiri merupakan suatu bentuk kompromi dari adanya anggapan kelompok masyarakat yang menolak keberadaan tahlilan dengan alasan tidak boleh ada pengkhususan hari atau bilangan tertentu dalam beribadah. Karenanya, perubahan aktu pelaksanaan dari tujuh hari menjadi tiga hari sebenarnya merupakan jawaban bahwa warga yang pro-tahlilan pun mayoritas berpandangan bahwa tidak ada keharusan melaksanakannya sampai tujuh hari. Bentuk kompromi semacam ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan mampu menyatukan warga yang dulunya tidak mau ikut tahlilan menjadi hadir dalam kegiatan tersebut, meskipun kebanyakan masih enggan ikut melafalkan bacaan tahlil.

Selain masalah aktu pelaksanaan, kegiatan tahlilan yang banyak dilaksanakan oleh warga kampung juga mengalami transformasi terkait berkat yang disajikan. Bagi sebagian warga yang masih memahami dan memegang teguh tradisi, berkat yang dibagikan dalam pelaksanaan tahlil biasanya menyertakan berbagai bahan makanan tertentu yang dipandang mewakili simbol-simbol tertentu dalam pemahaman keagamaan, misalnya: terdapat makanan “apem,” yang diyakini warga bermakna “afwun” (permohonan maaf).⁷ Namun, dengan semakin hilangnya pemahaman akan makna berbagai jenis hidangan yang disajikan dalam kegiatan tahlilan, khususnya dikalangan muda, maka berkat yang dibagikan kepada peserta tahlilan sekarang ini cenderung lebih

[7] Wawancara dengan Maman, 23 November 2016.

praktis, misalnya menggantinya dengan aneka macam roti atau makanan lain yang bisa dipesan di banyak tempat. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan praktis, sebagai akibat dari semakin sedikitnya jumlah warga yang ikut “rewang” atau membantu persiapan tahlilan. Dalam konteks ini, hilangnya pemaknaan simbol berbagai macam makanan dalam berkat, sebagaimana yang dipahami oleh generasi sebelumnya, berpadu dengan tuntutan untuk bersikap praktis, telah merubah cara bagaimana warga dalam menyediakan dan memberikan berkat kepada peserta tahlilan. Bentuk perubahan seperti ini tentu saja juga berpengaruh pada mereka yang sebelumnya memandang berkat sebagai bagian dari sesaji sebagaimana yang biasanya dilaksanakan oleh pemeluk agama Hindu.

Disamping beberapa bentuk perubahan yang terjadi dalam proses tahlilan sebagaimana diungkapkan di atas, tentu saja muncul juga perubahan-perubahan atas simbol pada kegiatan-kegiatan tradisi lainnya, termasuk dalam tradisi wiyat. Hal terpenting dari pengungkapan berbagai contoh disini adalah adanya berbagai upaya yang sebenarnya cenderung bersifat alami dalam mensikapi berbagai tuntutan yang ada di masyarakat terkait pelaksanaan suatu tradisi. Mekanisme ini tentu saja mensyaratkan adanya kesediaan warga masyarakat, baik yang pro maupun kontra dengan pelaksanaan tradisi yang ada, untuk melakukan pemaknaan kembali atas berbagai macam simbol keagamaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat.

Proses negosiasi semacam ini, dalam konteks teori interaksionisme simbolik memang dipandang sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk bisa mempertahankan tradisi yang ada.⁸ Pemaknaan ulang atas berbagai macam simbol yang digunakan akan mungkin terjadi hanya jika masing-masing komponen masyarakat yang ada masih memiliki kepentingan yang sama untuk melestarikan tradisi yang menjadi identitas sosial-keagamaan mereka. Penekanan pada pentingnya substansi pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan tersebut merupakan kunci untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tanpa harus menghilangkan esensi dari ritual tradisi yang dilaksanakan. Hal ini penting untuk dipahami

[8] Alan Aldridge, *Religion in the Contemporary World: A Sociological Introduction* (Cambridge; Malden, Mass.: Polity Press, 2000); Sean P. Hier, *Contemporary Sociological Thought: Themes and Theories* (Toronto: Canadian Scholars' Press, 2005).

bersama karena pada dasarnya berbagai bentuk perbedaan yang sering muncul di masyarakat biasanya terkait dengan hal-hal teknis atau bagian terluar dari sebuah tradisi sehingga akan selalu terdapat celah untuk bisa menegosiasikan perbedaan-perbedaan tersebut.

Berbeda halnya dengan kelompok masyarakat yang memang sudah menutup diri dari praktek tradisi-tradisi tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan oleh warga perumahan Bin Baz. Ketidakmauan untuk melakukan dialog terkait dengan tradisi masyarakat setempat bisa jadi karena mereka memang warga pendatang yang tidak memiliki perasaan memiliki (*belonging*) atas berbagai macam tradisi tersebut. Dalam konteks semacam ini, memang cukup sulit untuk dicarikan solusi yang bisa mengakomodir kedua belah pihak selain menanamkan sikap toleransi atas perbedaan-perbedaan yang ada sehingga potensi konflik yang ada bisa diminimalisir sedemikian rupa.

Meneguhkan Identitas Sosial-Keagamaan: Sebuah Ikhtiar

Adanya proses negosiasi yang berlangsung secara terus-menerus merupakan suatu perwujudan dari dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Proses ini tentu saja akan membantu masyarakat dalam upaya untuk melestarikan berbagai bentuk tradisi yang sudah dipandang sebagai simbol identitas sosial-keagamaan masyarakat. Proses ini, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, mensyaratkan adanya perasaan memiliki (*belonging*) atas identitas sosial-keagamaan yang ada. Tanpa adanya perasaan ini, maka jalan untuk melaksanakan proses negosiasi akan semakin terjal dan berliku. Hal ini tentu saja perlu untuk disikapi secara lebih bijaksana dan dengan mengedepankan harmonisasi masyarakat yang sudah menjadi ciri khas dari orang Jawa.⁹

Penekanan pada pentingnya kondisi yang harmoni di masyarakat bisa jadi merupakan jalan terakhir ketika proses negosiasi menemui jalan buntu. Sebagaimana kasus yang terjadi dengan warga perumahan

[9] Moh Soehadha, *Orang Jawa Memaknai Agama*, Cet. 1. ed. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008); Abdul Munir Mul Khan and Abdul Malik Hasan, *Kebatinan Dan Dakwah Kepada Orang Jawa*, Cet. 2. ed. (Yogyakarta: Percetakan Persatuan, 1984).

Bin Baz, maka diperlukan adanya keterlibatan yang lebih aktif untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi terjalinnya interaksi antara warga kampung dengan warga perumahan tersebut. Tanpa adanya kontak dan interaksi yang intensif antar keduanya, maka sulit untuk bisa mewujudkan keharmonisan di masyarakat. Karenanya, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial yang tidak mengandung aspek-aspek keagamaan, semisal kerja bakti, rapat atau pertemuan RT/RW, peringatan hari kemerdekaan, dan lain-lain, bisa dijadikan pintu masuk untuk mendialogkan hal lain yang selama ini dipandang sebagai sumber perbedaan diantara keduanya.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan berkenaan dengan proses membuka jalan dialogis. Pertama, tentunya diperlukan adanya keterbukaan dari masing-masing pihak atas berbagai perbedaan, tanpa harus ada sikap saling menyalahkan atas perbedaan tersebut. Kedua, adanya keinginan diantara kedua pihak untuk bisa mengedepankan kepentingan bersama. Terakhir, terkadang diperlukan mediator untuk bisa menjembatani berlangsungnya proses dialog dan negosiasi. Dalam hal ini, pemerintah desa dan aparat terkait bisa mengambil peran aktif sebagai mediator. Karena perbedaan yang seringkali memunculkan kecurigaan lebih banyak didasarkan pada sentimen keagamaan, maka peran elit agama dari kedua pihak seharusnya bisa dijadikan alat yang efektif bagi kampanye sikap toleransi dan saling menghormati antar arga. Terlebih lagi, model keberagaman yang ada di masyarakat masih menempatkan elit agama sebagai simbol panutan bagi kehidupan sehari-hari warga masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa model perumahan yang bersifat eksklusif tentu bisa menjadi kendala dalam mewujudkan proses dialog dan negosiasi. Keterbatasan interaksi sosial yang mempertemukan warga kampung dengan warga di perumahan yang eksklusif akan menyebabkan proses dialog dan negosiasi hanya akan menghasilkan keputusan formal yang tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Berbagai bentuk perubahan tradisi keagamaan yang sudah dianggap sebagai identitas sosial keagamaan warga kampung hanya akan menadi milik warga kampung tanpa bisa menciptakan rasa memiliki bagi warga perumahan atas identitas sosial-keagamaan tersebut.

Kesimpulan

Berbagai bentuk tradisi keagamaan dan budaya di masyarakat, seperti kenduren, mertu desa, dan wiwit, dipandang memiliki fungsi sosial sebagai faktor pemersatu antar warga masyarakat. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa kegiatan-kegiatan tersebutlah yang selama ini dijadikan sebagai sarana pertemuan warga yang cukup efektif. Intensitas interaksi sosial yang terjadi di masyarakat seringkali bisa diidentifikasi dari seberapa intens penyelenggaraan tradisi keagamaan dan budaya dilaksanakan. Hadirnya warga perumahan secara umum bukanlah merupakan menjadi kendala bagi warga kampung untuk melaksanakan kegiatan ritual-ritual tersebut. Akan tetapi, model perumahan yang eksklusif, khususnya yang dibangun hanya untuk menampung mereka yang memiliki pandangan keagamaan atau berafiliasi dengan kelompok keagamaan tertentu seringkali justru memunculkan permasalahan tersendiri terkait upaya pelestarian tradisi-tradisi tersebut. Beberapa kelompok Islam, khususnya yang bersifat trans-nasional, seperti Wahabi atau Salafi, HTI, dan lainnya, yang memang menolak berbagai bentuk tradisi lokal karena dipandang bertentangan dengan pemahaman mereka atas doktrin agama, secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang bisa memudahkan identitas sosial-keagamaan masyarakat. Berbagai bentuk perubahan dan pemaknaan kembali atas simbol-simbol yang melekat pada tradisi-tradisi yang ada sebenarnya sudah sering dilakukan masyarakat, khususnya untuk mensikapi berbagai perbedaan situasi dan kondisi yang ada.

Meskipun ada beberapa faktor yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pemaknaan ulang atas pelaksanaan tradisi yang ada di masyarakat, seperti faktor ekonomi, kepraktisan, kemajuan teknologi, dan juga kesibukan masyarakat yang semakin heterogen, namun faktor perbedaan pemahaman keagamaan nampaknya menjadi faktor yang paling sulit untuk dicarikan solusinya. Berbagai bentuk perubahan dan pemaknaan kembali berbagai tradisi yang sudah dilaksanakan memang mampu merubah sikap sebagian warga yang dulunya tidak mau berpartisipasi atau bahkan memandang berbagai bentuk tradisi yang ada di masyarakat sebagai sesuatu yang bertentangan atau menyimpang dari doktrin keagamaan yang mereka yakini. Akan

tetapi, faktor pendirian perumahan yang bersifat eksklusif, khususnya yang secara nyata-nyata memunculkan semacam segregasi di masyarakat dalam berbagai aspeknya dan perbedaan paham keagamaan, menjadikan jarak antara warga kampung dengan warga perumahan menjadi semakin lebar.

Tidak adanya interaksi sosial yang intens antara warga perumahan eksklusif dengan warga kampung, sebagai konsekuensi dari bentuk eksklusifitas yang melekat pada model perumahan tersebut, akhirnya hanya bisa disikapi dengan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan yang ada, tanpa harus menjelek-jelekkan satu sama lain. Penanaman sikap toleransi itu sendiri sebenarnya baru bisa dilaksanakan apabila komunikasi antar warga telah teralin. Karenanya, penanaman benih-benih toleransi ini harus dibarengi dengan memperbanyak sarana atau kegiatan sosial lain yang memungkinkan kedua masyarakat untuk bisa bertemu dan berkomunikasi.

Daftar Pustaka

Aldridge, Alan. *Religion in the Contemporary World : A Sociological Introduction*. Cambridge ; Malden, Mass.: Polity Press, 2000.

Amin, Darori. *Islam Dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Hier, Sean P. *Contemporary Sociological Thought : Themes and Theories*. Toronto: Canadian Scholars' Press, 2005.

Jaiz, Hartono Ahmad. *Kyai Kok Bergelimang Kemusyrikan : Kumpulan Masalah Ahmadiyah, Syi'ah, Pluralisme Agama, Syirik, Bid'ah, Kristenisasi, Dan Kemunkaran*. Cet. 1. ed. Jakarta: Pustaka Nahi Munkar, 2008.

Mulkhan, Abdul Munir and Abdul Malik Hasan. *Kebatinan Dan Dakwah Kepada Orang Jawa*. Cet. 2. ed. Yogyakarta: Percetakan Persatuan, 1984.

Simandjuntak, B. A. *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan*. Medan: Bina Media Perintis, 2008.

Soehadha, Moh. *Orang Jawa Memaknai Agama*. Cet. 1. ed. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Syuhaimin, Basyaruddin bin Nurdin Shalih. *Membongkar Kesesatan : Tahlilan, Yasinan, Ruwahan, Tawassul, Istighotsah, Ziarah, Maulid Nabi Saw*. Cet. 1. ed. Bandung: Mujahid Press, 2007.

Widhyharto, Derajad S. "Komunitas Berpagar; Antara Inovasi Sosial Dan Ketegangan Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 13, no. 2 (2009).

Woodward, Mark R. "The "Slametan": Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam." *History of Religions* 28, no. 1 (1988): 54-89.

Rona Religius Masyarakat Muslim Perkotaan: Menuju Inklusivisme Dalam Sikap Keagamaan

UI Ardaninggar Luhtitianti

Dosen Prodi Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

Abstrak

Gelombang populisme Islam sejak tahun 2016 lalu, memberi dampak signifikan pada peningkatan kesadaran beragama masyarakat Indonesia. Berkembangnya komunitas-komunitas hijrah di kawasan perkotaan, menjamurnya rumah qur'an, meningkatnya kesadaran milenial terhadap fungsi agama, membawa kita pada satu pertanyaan: mengapa dan bagaimana semangat beragama ini sedemikian kuat menggejala di berbagai level usia? Apakah implikasinya pada institusi sosial, politik dan ekonomi? Dengan menggunakan beberapa perspektif Sosiologi seperti analisis kelas sosial dari Karl Marx artikel ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas. Berdasarkan kajian literatur dan mengacu pada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik di atas, didapatkan kesimpulan bahwa alienasi dan anonimitas yang menjadi ciri khas problematika di wilayah perkotaan berpengaruh terhadap minat dan semangat kesadaran masyarakat modern terhadap agama. Mereka haus pada upaya pencarian *meanings* (makna terdalam) pada kehidupan mereka sendiri. Uniknya, kesadaran ini relative menjadi domain masyarakat menengah ke atas, yang pada tahap selanjutnya menimbulkan implikasi sosial, politik dan ekonomi. Diantaranya adalah menguatnya sentimen keagamaan dan politik identitas. Beberapa implikasi ini membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan sinergis antar berbagai stakeholder negara agar rona religious tersebut berada dalam bingkai inklusivisme sikap beragama.

Kata kunci: religiusitas, *urban middle-class muslim*, alienasi, anonimitas, inklusivisme

Pendahuluan

Sekitar satu tahun yang lalu, saya membaca portal berita mengenai Hijrah Festival di Jakarta yang dihadiri oleh ribuan anak-anak milenial yang menurut berita tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Judul berita itu terasa ‘menggigit’ dengan kalimat yang seolah ingin membantah mitos milenial sebagai segment usia remaja menuju muda yang tak peduli pada agama. Pasca moment Hijrah Fest, berbagai portal berita mengabarkan bahwa di Semarang Hanan Attaki (sosok ustad muda dan gaul) diundang dalam sebuah acara dengan *tagline* Gerakan Sholat Shubuh Berjamaah, pesertanya ribuan. Dalam portal tersebut disebutkan mengapa Hanan Attaki? Jawaban peserta sangat klise, Hanan Attaki menurutnya sosok ustad muda yang bahasanya ringan, mudah dipahami dan kekinian. Gerakan sholat shubuh berjamaah ini tak hanya di Semarang tapi di banyak kota di Indonesia. Ada banyak sosok ustad milenial lain yang hadir, seperti Muzamil Hasballah.

Muncul pertanyaan dalam benak saya, mengapa semangat kesadaran beragama itu sedemikian tinggi, hampir tak kalah dengan gegap gempitanya supporter klub sepakbola ketika jagoannya bertanding? Anak-anak milenial ini bahkan menggandrungi sosok Hanan Attaki dan Muzamil Hasballah, seperti mereka menggandrungi Su Ju, Black Pink, dan sederet artis Korea lain. Dan faktanya, fenomena ini tak hanya di kalangan anak-anak muda, sejak 2018 awal hingga 2019 ini jagad politik dan keumatan kita di Indonesia digemparkan oleh sosok Ustad Abdul Shomad (wartawan sering menyingkatnya dengan UAS) yang ceramahnya dianggap radikal. Pertengahan September lalu, masyarakat berbondong-bondong dari berbagai penjuru kota sekedar untuk mendengarkan ceramah UAS di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Ia bahkan diundang dalam ceramah Kuliah Umum sebuah perguruan tinggi Islam dengan topik Integrasi Islam dan Ilmu.

Saya kemudian teringat salah satu artikel yang ditulis oleh Azyumardi Azra di salah satu koran nasional mengenai religiusitas masyarakat urban. Ulasan singkat mengenai spirit keagamaan dan dampak modernitas pada manusia modern, yang kemudian memantik saya untuk mengembangkannya dalam tulisan ini. Masyarakat modern dalam kajian Sosiologi diidentikkan dengan kemajuan rasionalitas manusia. Gid-

dens¹ dalam tulisannya mengenai modernitas melukiskan masyarakat dengan kehidupan kolektif yang bercorak modern ibarat seperti panser raksasa yang pada suatu keadaan tertentu dia dapat lepas kendali dan hancur. Bahkan meskipun panser raksasa tersebut bergerak melalui jalan yang teratur. Ritzer² menambahkan analisisnya mengenai masyarakat modern melalui analogi restoran Mc-Donald yang menyajikan kecepatan dan efisiensi dalam penyediaan makanan. Hal tersebut menurutnya dapat dipandang sebagai upaya me-McDonald-kan kehidupan sosial dan merasionalkan secara formal masyarakat modern.

Proposisi tersebut memunculkan berbagai macam persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat. McDonaldisasi menciptakan gaya hidup serba instan, industrialisasi menciptakan alienasi manusia perkotaan, dan rasionalitas efisiensi memunculkan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang dibarengi dengan gaya hidup serba instan ini pada akhirnya memunculkan manusia modern dengan sekat-sekat individualitas, dan nilai ekonomi menjadi basis dalam tindakan sosial. Giddens menambahkan bahwa dunia modern memunculkan *sequestration of experience* dengan resiko mengesampingkan kehidupan sosial dari masalah eksistensial fundamental yang menimbulkan dilema moral utama bagi umat manusia, sekaligus membawa pada sejumlah konsekuensi, diantaranya pada persoalan keimanan. Ia menyebutkan setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebab, diantaranya yang paling utama adalah refleksifitas pengetahuan sosial, dimana pengetahuan baru terus-menerus memberangkatkan system menuju arah baru³. Sebuah gambaran masyarakat modern yang diperkuat oleh Sayyed Hosein Nasr⁴ sebagai masyarakat yang begitu meninggikan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun di sisi lain mereka meninggalkan wahyu sebagai pijakan hidup.

Situasi ini kemudian memunculkan kesadaran keagamaan dalam masyarakat modern, yang oleh Azyumardi Azra disebut sebagai upaya pencarian *meanings* (makna terdalam) dalam kehidupan spiritual manusia. Bentuknya bermacam-macam, tak hanya Gerakan Sholat Shubuh Berjamaah dan Hijrah Festival yang banyak digandrungi milenial, fenom-

[1] Ritzer, George. (2005). Teori Sosial Postmodern, Yogyakarta: Kreasi Wacana, hal. 552

[2] Ibid, hal 564

[3] Ibid 563

[4] Nasr, Seyed Hussein.1989. "Masa Depan Islam", dalam *Inovasi*, Yogyakarta, UMY

ena ini sebenarnya sudah terbaca sejak tahun 2007an ketika televisi kita marak menyiarkan program Majelis-Majelis Dzikir yang dipimpin oleh sejumlah Habaib. Belakangan lima tahun terakhir ini disusul oleh munculnya berbagai Lembaga tahsin dan tahfidz Al-Qur'an di banyak kota di Indonesia. Lembaga-lembaga ini hadir dengan nama Rumah Al Qur'an, Rumah Tahsin, dan Rumah Tahfidz. Setiap Lembaga tahsin biasanya memiliki tawaran metode belajar membaca yang berbeda-beda. Demikian juga dengan rumah tahfidz, mereka menawarkan cara menghafal Al Qur'an yang berbeda-beda satu sama lain. Peminat dari berbagai Lembaga Al Qur'an ini adalah masyarakat menengah perkotaan dan kalangan mahasiswa yang tersebar di berbagai perguruan tinggi.

Jika di era 1990an masyarakat mengenal KH Zainudin MZ, kemudian di era 2000-an ada Aa Gym, maka sekarang tipe kelompok pengajian ini sangat beragam. Komunitas hijrah contohnya, mereka menawarkan pengetahuan keIslaman yang lebih modern, sesuai dengan karakteristik masyarakat kota itu sendiri. Komunitas ini tidak lagi menggunakan mimbar dan masjid sebagai tempat menyebarkan pengetahuan Islam, tapi juga menggunakan ruang-ruang pertemuan di café. Pada level substansi mereka menawarkan konsep hijrah yang diartikan sebagai sarana perubahan individu menuju tingkat spiritualitas dan pemaknaan baru terhadap relasi dirinya dengan Islam.

Di level yang lebih besar, fenomena beragamnya ekspresi keislaman masyarakat kota muncul dalam bentuk gerakan sholat subuh berjamaah, komunitas *one day one juz*, komunitas Muslim United yang mengadakan kajian keislaman atas nama lintas gerakan. Kajian seperti ini seperti magnet yang menarik masyarakat di berbagai wilayah terutama perkotaan untuk sekedar hadir mendengarkan ceramah dari beberapa tokoh ulama.

Realitas di atas kemudian memunculkan satu pertanyaan, bagaimana agama bisa mendapatkan tempat di tengah masyarakat modern? Apa implikasinya bagi institusi lain seperti sosial, politik dan ekonomi? Dan bagaimana teori-teori modernitas dan perubahan sosial menjelaskan fenomena ini? Artikel ini bermaksud untuk mendeskripsikan berbagai bentuk ekspresi keagamaan masyarakat di perkotaan, dengan sumber data pemberitaan di media massa online dan diperkuat dengan kajian literatur. Bentuk-bentuk ekspresi keagamaan tersebut kemudian

akan dianalisis dengan menggunakan beberapa perspektif dalam kajian sosiologi kota, diantaranya adalah modernitas Giddens, dan analisis kelas menengah dari Karl Marx dan Weber. Setelah itu diperkuat dengan kajian sosiologi agama dari Joachim Wach dan Gertz.

Ragam Ekspresi Keimanan Masyarakat Perkotaan

Fenomena maraknya ekspresi keagamaan masyarakat secara tidak langsung menunjukkan kepada kita bahwa kemajuan rasionalitas manusia modern pada kenyataannya tidak kemudian menjadikan agama sebagai pranata yang terpinggirkan. Fealy and White⁵ mengatakan ekspresi keimanan umat Islam ini tidak serta merta bisa kita pandang sebagai indikasi adanya radikalisme keagamaan, namun ia menegaskan bahwa hal ini lebih karena faktor bentuk atau varian ekspresi keagamaan yang semakin beragam. Kehadiran kelompok dzikir yang diinisiasi oleh Arifin Ilham, Yusuf Mansur, dan yang lainnya, dengan banyaknya peserta yang mengikuti mereka, ternyata dapat menjadi satu tetes embun yang menyegarkan bagi manusia modern. Alienasi dalam pekerjaan, dalam diri mereka sendiri, dan dalam kehidupan bermasyarakat, nampaknya menggugah mereka untuk mencari pemaknaan baru terhadap kehidupan mereka. Melalui interaksi sosial dengan media dakwah yang baru seperti televisi dan saluran youtube, kesalahan aktif dipertontonkan oleh beberapa kelompok dzikir di atas. Doa-doa dilantunkan dan sebagian jamaah menitikkan air mata sebagai bentuk kerinduan mereka terhadap tuhan⁶. Maka tidaklah mengherankan ketika Azyumardi Azra mengatakan bahwa agama akan selalu hadir dalam diri manusia di sepanjang sejarah eksistensinya di permukaan bumi, paling tidak dari segi emosional manusia itu sendiri⁷.

Dari fenomena dzikir, geliat keagamaan ini merambah ke semangat Al Qur'an. Ketika Al-Qur'an dulu dipelajari melalui ruang-ruang formal seperti TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an) yang biasanya dise-

[5] Oki Rahadiano Sutopo, "Beragam Islam, Beragam Ekspresi: Islam Indonesia Dalam Praktik," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 15, no. 2 (2010).

[6] Martalia Ardianingrum, "RELIGIUSITAS GAYA BARU (Kajian Atas Fenomena Kebangkitan Sufisme Kelas Menengah Perkotaan Di Yogyakarta)," *Dialogia* 15, no. 2 (2017): 221.

[7] Fahrurrozi Fahrurrozi, "Ekspresi Keberagaman Masyarakat Islam Indonesia: Mozai Multikulturalisme Indonesia," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 1 (2015): 15–34, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1419>.

lenggarakan di masjid-masjid, atau di pesantren yang bertebaran di berbagai pelosok desa dan kota, sekarang banyak lembaga filantropi Islam dan Yayasan-yayasan yang menawarkan program membaca dan menghafal Al-Qur'an. Program ini mewujud dalam bentuk rumah Qur'an dan rumah tahfidz dengan berbagai macam nama. Mereka biasanya menawarkan cara membaca Al-Qur'an dengan baik, benar dan cepat. Termasuk Rumah Tahfidz, dalam berbagai promosinya mereka seakan berlomba menawarkan cara menghafal Al-Qur'an dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Para peminatnya dari berbagai kalangan, anak kecil, anak muda, hingga orang dewasa. Kelompok menengah perkotaan nampaknya banyak mendominasi. Rumah-rumah Qur'an ini kebanyakan tidak menjadikan masjid sebagai tempat penyelenggaraan program mereka, tapi biasanya mereka memiliki tempat tersendiri dalam istilah 'rumah' yang sebenarnya.

Kesadaran masyarakat akan kebutuhan terhadap Al-Qur'an seiring dengan perkembangannya menjadi sarana komodifikasi bagi media visual di Indonesia. Berbagai program tayangan kontes membaca Al Qur'an dan menghafal Al Qur'an banyak sekali diminati masyarakat, dan seakan menjadi magnet bagi masyarakat untuk berlomba-lomba mengikuti kursus-kursus Al-Qu'an. Di Yogyakarta sendiri jumlah rumah tahfidz mengalami peningkatan semenjak adanya kerjasama Kanwil Kementerian Agama DIY dengan PPPA (Program Pembibitan Penghafal Al Qur'an) Darul Qur'an Yusuf Mansur⁸. Sementara di Sulawesi Sleatan jumlah PPPA Darul Qur'an telah mencapai 100 unit, dengan perkembangan selama beberapa tahun ini terjadi peningkatan jumlah penghafal Al-Qur'an⁹.

Joachim Wach¹⁰ mengatakan, dikarenakan watak agama yang bersifat universal, dia menarik untuk ditawarkan kepada masyarakat. Baik itu dalam bentuknya sebagai system kepercayaan, sebagai system penyembahan, maupun sebagai system hubungan kemasyarakatan. Modernitas yang merupakan hasil dari kemajuan rasionalitas manusia itu pada akhirnya justru men-

[8] <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/15/02/10/njjs4-jumlah-rumah-tahfiz-alquran-di-yogyakarta-terus-meningkat> diakses 18 Oktober 2019

[9] <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3950917/jumlah-penghafal-alquran-meningkat-di-indonesia> diakses 18 Oktober 2019

[10] Fahrurrozi, "Ekspresi Keberagaman Masyarakat Islam Indonesia: Mozaik Multikulturalisme Indonesia."

jadi semacam alat ungkit bagi praktik-praktik keagamaan melalui teknologi komunikasi seperti televisi, sosial media, dan sebagainya. Kesemuanya itu bertemu dengan watak masyarakat modern yang lebih mementingkan segala sesuatu yang bersifat instan dan efisien. Sehingga praktik-praktik keagamaan yang ditampilkan di dunia maya seakan menjadi pemantik bagi pemenuhan kebutuhan spiritualitas yang lebih besar. Al Qur'an, dzikir, dan pengetahuan keIslaman selama ini dipandang sebagai wilayah teologis dan absurd bagi peradaban materialis. Ketiga aspek itu kini menjadi 'menarik' untuk ditawarkan dan ditampilkan melalui sarana modern, sehingga karakteristiknya yang absurd bagi masyarakat modern tersebut menjadi lebih nyata hadir dalam masyarakat.

Konsultasi Syariah misalnya ditampilkan dalam bentuk *online*, perubahan ini memungkinkan masyarakat muslim dapat mengakses pengetahuan keislaman secara cepat. Berbagai pilihan kajian keislaman di media online dapat mereka pilih. Tidak hanya dalam konteks materi, tapi juga pilihan pemateri (ustad, ustadzah, dan istilah-istilah lain yang sejenis dengan itu). Di level anak-anak muda misalnya, ada banyak pilihan tokoh di sosial media, seperti yang saya sebutkan di atas ada Hanan Attaki dan Muzammil Hasbalah. Dianggap memiliki hafalan Qur'an yang bagus dan banyak, dengan lantunan irama tilawah yang menggugah jiwa, mereka menjadi pilihan anak-anak muda dalam beragama. Proses penghayatan mereka terhadap tokoh agama tersebut hingga pada level identifikasi dan imitasi. Otoritas keagamaan telah bergeser ke wilayah impersonal, *new media* telah menciptakan suatu lingkungan sosial baru yang memfasilitasi ruang-ruang interaksi spiritual, dan menciptakan percepatan proses peremajaan 'ulama' ¹¹.

Jika di wilayah praktik spiritualitas kita menemukan fenomena di atas, di wilayah sosial kita akan menjumpai praktik kesalehan sosial dalam bentuk filantropi Islam. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat muslim kelas menengah di perkotaan. Melalui jalan sedekah di lembaga amal zakat tertentu, aktivitas filantropis menjadi jalan untuk memperkuat solusi atas berbagai persoalan sosial ekonomi masyarakat muslim lain yang kurang mampu. Lingkaran kemiskinan masih

[11] Mutohharun Jinan, "New Media Dan Pergeseran Otoritas Keagamaan Islam Di Indonesia," *Jurnal Lektur Keagamaan* 10, no. 1 (2012): 181–208, <https://jurnallekturkeagamaan.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/178>.

banyak mewarnai kehidupan muslim perkotaan di lapisan menengah ke bawah. Dalam praktiknya, organisasi-organisasi ini mulai memanfaatkan sarana digital sebagai strategi ‘*marketing*’ untuk meraup dana masyarakat. Mereka menonjolkan sisi-sisi kemanusiaan dengan menampilkan permasalahan sosial ekonomi masyarakat dalam berbagai sarana sosial media mereka, seperti kemiskinan, persoalan anak, persoalan pengungsi, bencana alam, dan program-program pemberdayaan masyarakat. Tidak saja dalam bentuk media visual seperti poster, ulasan-ulasan melalui video juga mereka lakukan untuk menyentuh sisi kemanusiaan masyarakat. Kondisi ini menandakan bahwa upaya pencarian solusi permasalahan sosial ekonomi mulai mengarah kepada pemecahan-pemecahan yang bersifat *transendental*¹². Tentunya juga bisa membantu berbagai perencanaan dan kebijakan sosial yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Beberapa fenomena di atas menunjukkan betapa kompleksnya ekspresi keberagaman masyarakat, baik itu dari aspek kemunculan, pertemuannya dengan teknologi, motivasi, maupun praktik-praktiknya. Ulasan menarik dari Azyumardi Azra mengenai religiusitas masyarakat urban yang termuat dalam harian *Republika* tahun 2017¹³ nampaknya bisa menjadi penjelas kompleksitas keagamaan masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah populasi masyarakat menengah ke atas di angka 152 juta mendorong pada kesadaran aktivitas sosial keagamaan yang lebih beragam. Misalnya saja kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan yang baik dan agamis sejak dini, kesadaran memenuhi kebutuhan pangan yang tidak hanya sehat dan bergizi tapi juga halal dan *thoyib*, gaya hidup dan pola komunikasi yang dianggap lebih *religious*. John Naisbitt dalam artikelnya¹⁴ menggambarkan masyarakat kita saat ini berada pada Zona Mabuk Teknologi, sehingga hal ini berimplikasi pada kebutuhan untuk mendapatkan segala sesuatu secara instan, dari gizi hingga persoalan keagamaan.

[12] Jati Raharjo Wasisto, “Wasisto Raharjo Jati Sufisme Urban : Konstruksi Keimanan Baru Kelas Menengah Muslim Wasisto Raharjo Jati Sufisme Urban : Konstruksi Keimanan Baru Kelas Menengah Muslim” 05 (2015).

[13] Azyumardi Azra (2017), *Religiusitas Masyarakat Urban* (2), Jakarta, *Republika.co.id*, 20 Juli 2017, pada lama situs: <http://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/07/19/otcf319-religiusitas-masyarakat-urban-2>

[14] Naisbitt, John. *High Tech, High Touch: Technology and Our Search for Meaning*. New York: Broadway, 1999.

Pengaruh Alienasi dan Anonimitas Perkotaan Pada Semangat Kesadaran Keagamaan Kelas Menengah Muslim

Munculnya keragaman ekspresi dalam praktik keagamaan di atas jika merujuk kepada pandangan Azyumardi Azra di atas salah satunya tidak bisa dilepaskan dari mobilitas sosial ekonomi kalangan muslim menengah ke atas. Wasisto Rahardjo Jati¹⁵ menjelaskan bahwa proses alienasi pada masyarakat kota menimbulkan sejumlah masalah sosial dan psikologis pada diri manusia modern itu sendiri. Gegap gempitanya nuansa modernitas yang mengandaikan rasionalitas sebagai pencapaian kemajuan dalam segala hal, membuat sejumlah paradoks pada masyarakat kota itu sendiri. Ketika manusia modern berhasil mencapai makna modern dalam tampilan, gaya hidup dan pikiran, pada sisi lain kesemuanya itu menimbulkan alienasi dalam dirinya maupun keberadaannya di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, manusia kemudian berusaha mencari makna lain dari keberadaan dirinya dan kehidupannya. Hal ini terlihat dari upaya masyarakat untuk menjadikan agama sebagai muara dalam proses pencarian tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Joachim Wach di atas, agama dalam konteks masyarakat modern memiliki daya tarik tersendiri. Dalam konteks ini adalah masyarakat menengah perkotaan. Mengapa kalangan menengah? Kondisi kemapanan ekonomi yang telah mereka capai berimplikasi pada upaya mereka untuk mencari hal lain yang lebih memberi mereka kepuasan dalam aspek batiniah. Sesuatu yang tidak mereka dapatkan dari aktivitas ekonomi mereka. Ada beberapa pilihan praktik keagamaan yang mereka ambil, diantaranya adalah bergabung dalam komunitas-komunitas yang kental nuansa spiritual dalam bentuk majelis dzikir, kajian-kajian keislaman, bergabung dengan rumah Qur'an untuk belajar membacanya, atau terlibat dalam aktivitas filantropi Islam.

Majelis dzikir, kajian keislaman, mempelajari al Qur'an merupakan praktik agama yang menjadi bagian dari system penyembahan dalam terminology Joachim Wach. Beberapa komunitas yang membawa

[15] Wasisto, "Sufisme Urban : Konstruksi Keimanan Baru Kelas Menengah Muslim Wasisto Raharjo Jati Sufisme Urban : Konstruksi Keimanan Baru Kelas Menengah Muslim."

'brand' ketiga hal ini menawarkan pencapaian ketenangan batiniah bagi masyarakat. Melalui lantunan doa-doa di berbagai forum yang dipimpin oleh tokoh tertentu, mereka begitu khusyuk menikmati setiap moment dalam usaha pencarian hakikat spiritulitas. M. Ardiyaningrum¹⁶ dalam penelitiannya mengenai maraknya kelompok-kelompok ini di Yogyakarta, mengkategorikan mereka sebagai kekuatan baru sufisme yang hadir di masyarakat perkotaan dengan bentuk, varian dan ekspresi yang beragam. Kelompok-kelompok ini cenderung mendapat minat dan simpati dari kalangan menengah perkotaan. Asef Bayat menyebut bentuk ritual keagamaan yang ditampilkan melalui sarana modern seperti televisi dan sosial media lain seperti youtube, sebagai bentuk kesalehan aktif. Sementara Julia D. Howell dan Arif Zamhari menyebutnya sebagai sufisme gaya baru yang ditampilkan masyarakat perkotaan dengan kebutuhan untuk mengingat dan berserah diri secara berjamaah melalui Habaib (keturunan Rasul saw) sebagai pemimpinnya¹⁷.

Bentuk-bentuk ekspresi keagamaan seperti ini cenderung cocok dengan karakter masyarakat urban yang menginginkan efisiensi dalam segala hal. Terlebih ketika teknologi komunikasi berkembang sedemikian pesat, hal ini membawa implikasi bagi persebaran arus informasi keislaman secara cepat di berbagai kalangan terutama kelas menengah ke atas sebagai 'pemilik' mayoritas teknologi *smartphone*. Merekapun dapat mengakses materi-materi keislaman. Berbagai pilihan situs menuntun mereka untuk menjelajah laman-laman keislaman sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka. Komunikasi dua arah secara langsung juga memungkinkan terjadi dalam konteks tanya jawab seputar hukum-hukum syariah. Semua lengkap tersedia beserta dengan para pakar yang disebut dengan *ustadz*. Contoh dari situs-situs ini antara lain *konsultasisyari'ah.com*, *rumaysho.com*, *ibnukatsieronline.com* dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah layanan program pelatihan membaca al Qur'an secara online. Tawaran yang kiranya sangat tepat untuk masyarakat menengah muslim yang membutuhkan kepraktisan dalam segala hal.

[16] Ardiyaningrum, "RELIGIUSITAS GAYA BARU (Kajian Atas Fenomena Kebangkitan Sufisme Kelas Menengah Perkotaan Di Yogyakarta)."

[17] Arif Zamhari dan Julia Day Howell, *Taking Sufism to the Streets; Majelis zikir and Majelis Salawat as New Venues For Popular Islamic Piety In Indonesia (Review of Indonesian and Malaysian Affairs, 2012, Vol 46, No 2), 68-72.*

Ada beberapa konsepsi berkenaan dengan kemunculan dan perkembangan kelas menengah ini yang kemudian memunculkan kesadaran akan pentingnya agama dalam berbagai sisi kehidupan. Beberapa teori-tisi sosial seperti Karl Marx dan Max Weber memberikan pemahaman kepada kita mengenai karakteristik, kemunculan dan perkembangan mereka. Meski tidak sama persis dengan yang terjadi di Indonesia, setidaknya dua konsepsi dari kedua tokoh ini bisa memberikan gambaran mendasar mengapa mereka muncul.

Bisa dikatakan Karl Marx adalah yang pertama kali memberikan penjelasan mengenai kemunculan kelas menengah. Sistem kapitalisme pada abad pencerahan membawa sejumlah dampak bagi tatanan sosial ekonomi masyarakat, diantaranya adalah memunculkan pembagian kelas antara pemodal dengan pekerja. Dimana sejumlah kecil pemodal menguasai proses produksi, produk, dan jam kerja dari orang yang bekerja untuk mereka. Sistem kapitalis inilah yang kemudian dianggap menjadi jalan munculnya kalangan menengah ke atas.

Berbeda dengan Marx yang cenderung ke perspektif ekonomi politik, Weber menekankan aspek agama melalui Etika Protestan sebagai motivasi munculnya kapitalisme. Weber mendapati bahwa penggerak ekonomi Eropa adalah calvinis. Dorongan spirit dari agama mempengaruhi etos kerja para pengikutnya sehingga membentuk kelas menengah baru. Jika Marx lebih cenderung kepada faktor ekonomi sebagai basis dalam kelas-kelas sosial, Weber lebih jauh menegaskan bahwa dimensi stratifikasi sosial lain juga penting. Seperti misalnya prestise dan kekuasaan, disini terlihat Weber lebih memperluas gagasan Marx.

Sistem kapitalisme yang digambarkan oleh Marx tersebut 'hid-up' dalam struktur masyarakat modern. Kita tau era modern ditandai dengan munculnya penemuan teknologi industry yang digunakan untuk menyokong berjalannya system kapitalisme. Sistem ini membuat batas antara individu dengan proses produksi, produk yang diproses dan dirinya sendiri. Inilah makna terdalam dari alienasi. Henslin dalam bukunya *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi* menjelaskan alienasi perkotaan adalah dimana seorang individu mengalami suatu perasaan tidak menjadi bagian apapun dan bahwa tidak satu orangpun peduli dengan apa yang terjadi pada dirinya.

Contoh untuk memahami bagaimana alienasi ini bekerja dalam individu dapat kita lihat gejalanya pada masyarakat urban yang berprofesi sebagai pekerja dalam suatu perusahaan di beberapa kota megapolitan. Mereka bangun pada dini hari, pukul 05.00 sudah keluar rumah untuk mengejar kereta pagi atau moda transportasi umum lainnya. Kendaraan pribadi bukan pilihan bagi mereka, karena di beberapa kota megapolitan kemacetan terjadi pada pagi dan sore hari. Sehari penuh mereka di dalam tempat kerja, sore mereka keluar dan jika terjebak kemacetan maka mereka baru akan sampai di rumah pada malam hari. Tidak ada quality time bersama keluarga, institusi terkecil dalam masyarakat yang paling dekat secara emosional dengan seorang individu. Berada dalam kendaraan umum dengan orang-orang yang tidak mereka kenal. Dan pagi harinya mereka harus menghadapi hal yang sama seperti hari-hari sebelumnya hingga menjadi sebuah ritme hidup. Pekerjaan sebagai hakikat bentuk kemanusiaan telah membuat manusia terasing dari lingkungannya dan keluarganya.

Kondisi ini kemudian diperparah dengan anonimitas perkotaan. Sebuah kondisi ketika individu-individu dalam suatu kumpulan massa yang banyak dan silih berganti ditemui sepanjang waktu pada kehidupan keseharian menyebabkan individu tersebut mengalami situasi dalam kumpulan massa yang anonym. Suatu keadaan dimana seseorang tidak perlu merasa tau siapapun orang-orang yang berada di sekitarnya. Hal ini semakin rumit ketika berhadapan dengan berbagai latar belakang agama, etnis, kelas sosial, pekerjaan dan daerah asal.

Sebagai contoh, ketika kita berangkat kerja dengan kendaraan umum atau berada dalam sebuah konser pertunjukan, kita tidak merasa perlu untuk saling menyapa atau bersalaman misal. Karena kita tidak mengenal mereka. Kita juga tidak perlu tau apa yang orang-orang kerjakan di sekitar kita. Dan ini hanya terjadi di kota-kota besar dengan karakteristik industry dan perekonomian yang padat. Situasi ini semakin menjadi ketika gadget hadir di tengah masyarakat. Setiap orang tidak lagi ingin saling mengenal dan menyapa bukan lagi karena kompleksnya perbedaan agama, etnis, dan daerah asal, tapi juga karena kehadiran gadget yang menyita focus perhatian masing-masing individu.

Maka tidaklah mengherankan ketika John Naissbitt mengatakan bahwa masyarakat kita saat ini berada pada zona mabuk teknologi. Implikasinya pada tatanan sosial yang sejak awal sudah ditandai dengan

gejala alienasi dan anonimitas. Kesemuanya ini kemudian membawa masyarakat pada satu kesadaran baru yang oleh Azyumardi Azra disebut sebagai pencarian *meanings* (makna) akan hakikat kehidupan. Dan ini mereka lakukan melalui jalan spiritualitas dalam praktik keagamaan. Berbagai kelompok agama pun kemudian seolah saling berlomba untuk menghadirkan alternative sarana pencapaian tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari transformasi tasawuf ke dalam kelompok-kelompok dzikir yang semakin variatif dalam metode maupun sarana. Belajar membaca Al Qur'an yang dulu dilakukan orang-orang kota dengan mengundang guru ngaji sekarang tidak perlu lagi dilakukan dengan cara konvensional tersebut. Tawaran alternatif tahsin online diambil untuk mereka yang mengalami kesibukan pekerjaan. Pun hadirnya rumah-rumah Qur'an membawa nuansa tersendiri pada gegap gempitanya orang-orang kota untuk belajar membaca dan menghafal Al Qur'an. Bahkan nampaknya sekarang hal ini telah mengalami perubahan fungsi dari proses mendalami Qur'an untuk jalan keselamatan menjadi semacam gaya hidup masyarakat modern.

Meskipun kemudian akan sangat sulit untuk mentipologikan mana cara beragama sebagai gaya hidup dan mana cara beragama yang berorientasi pencarian *meanings* itu tadi. Namun setidaknya, poin alienasi dan anonimitas ini bisa menjadi salah satu jawaban mengapa kesadaran beragama muncul pada masyarakat modern. Milton Yinger¹⁸ mengatakan bahwa agama adalah pengetahuan kultural tentang sesuatu yang bersifat supernatural yang kemudian digunakan oleh manusia untuk menghadapi berbagai masalah-masalah penting dalam hidupnya. Selaras pula dengan makna agama dalam pandangan Geertz¹⁹ sebagai *system symbol* yang memiliki fungsi psikologis, kultural, dan sosial. Maka tidaklah mengherankan jika kemudian manusia-manusia modern berbondong-bondong dari berbagai daerah sekedar untuk menikmati ceramah keislaman dari seorang tokoh agama yang mereka ketahui dari sosial media. Dengan mengikuti berbagai ceramah keislaman tersebut mereka berharap itu dapat membawa penyelesaian masalah psikologis mereka sebagai produk modernitas yang teralienasi dari modernitas itu sendiri.

[18] Fahrurrozi, "Ekspresi Keberagaman Masyarakat Islam Indonesia: Mozaik Multikulturalisme Indonesia."

[19] *ibid*

Implikasi Semangat Keagamaan dalam Kehidupan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Munculnya keragaman praktik keagamaan yang didasari oleh semangat kesadaran beragama ini tentu memiliki sejumlah implikasi pada berbagai segment kehidupan masyarakat kota. Kesadaran keagamaan ini tidak bisa dimaknai an sich sebagai sesuatu yang semata bersifat spiritual dan pencarian meanings. Kita perlu untuk kemudian secara kritis melihat bagaimana implikasi berbagai ekspresi kesadaran beragama tersebut terhadap institusi-institusi yang lain, terutama pada aspek sosial, politik, dan ekonomi. Misalnya, apakah dengan semakin bertumbuhnya jumlah penghafal al Qur'an di Indonesia memiliki dampak terhadap pola pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia? Atau apakah fenomena kesadaran umat Islam dalam spiritualitasnya memiliki pengaruh dalam kehidupan politik? Bagaimana motif ekonomi mengambil peran dan hukum-hukumnya dalam semangat keagamaan masyarakat?

Berangkat dari definisi agama dalam perspektif fungsional seperti Joachim Wach dan Gertz, agama sebagai system pengetahuan yang bersifat transendental, sekaligus sebagai system symbol yang memiliki fungsi psikologis, kultural dan sosial, maka agama dalam perannya sebagai system maupun dalam praktiknya akan selalu bersinggungan dengan berbagai aspek kehidupan. Persinggungan ini kemudian melahirkan berbagai fenomena baru lain yang menarik untuk kita cermati. Dalam tulisan ini, saya hanya akan menguraikan 3 aspek yang saya kira cukup penting dan relevan sekedar untuk melihat bagaimana perilaku (ekspresi) beragama membawa perubahan sosial dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Aspek Sosial

Kita mulai dari perilaku keagamaan milenial. Sosok Hanan Attaki dan Muzamil Hasballah nampaknya begitu lekat di kalangan anak-anak muda kita karena karakternya yang selalu tampil 'muda' dan kekinian. Ini secara sosial menandakan adanya perubahan pada aspek symbol yang melekat pada diri seorang ustadz. Peci, sorban atau sarung nampaknya sekarang tak selalu melekat pada sosok santri, tapi santri dalam ekspresi milineal saat ini muncul dalam symbol sneakers, celana jeans,

dan gaya bicara kekinian. Dengan symbol-simbol yang ‘akrab’ dengan gaya hidup anak-anak muda, sosok ustadz tidak lagi berjarak dengan obyek dakwah.

Ustadz tidak lagi berada dalam posisi sebagai orangtua yang memahami segalanya dan murid diposisikan sebagai kertas putih yang bisa diisi apapun. Dan ketika zaman bergulir, sosmed menjadi ‘teman’ keseharian mereka, anak-anak muda ini menemukan sosok yang identik dengan mereka (penampilan dan gaya bahasa gaul). Seperti daya magnet yang besar mereka masuk dalam pusaran ustad muda, gaul, dan memahami kebutuhan mereka. Ciri hubungan yang relasional di antara ustadz dan follower menjadikan doktrin agama yang begitu sulit mereka terima dari orang tua/guru menjadi begitu mudah diterima, dan terinternalisasi dalam perilaku mereka (fashion muslim dan gaya bahasa di internet).

Dalam konteks semangat keagamaan, fenomena ini bisa menjadi sesuatu yang positif. Agama tidak lagi menjadi institusi yang asing bagi anak-anak muda. Agama menjadi muara bagi proses pencarian identitas sosial mereka dalam usia psikologis yang sedang berkembang dan bergejolak. Sekali lagi, ini menegaskan peranan agama sebagai system symbol yang berfungsi tidak hanya sebagai system kepercayaan dan penyembuhan, tapi juga penyelesaian masalah sosial, kultural dan psikologis.

Perubahan pada aspek symbol juga dapat kita amati pada penyelenggaraan kajian-kajian keislaman. Jika dulu masjid adalah ruang untuk mempelajari agama, sekarang kita mendapati café, tempat-tempat pertemuan di rumah makan, wahana alam, maupun di sosial media. Perubahan pada sarana media dakwah tidak saja memudahkan masyarakat mengakses pengetahuan keislaman, namun juga semakin mendekatkan agama kepada masyarakat.

Contoh implikasi lain bisa kita lihat pada bagaimana semangat keagamaan ini mendorong kelompok-kelompok kelas menengah untuk semakin terlibat aktif dalam kegiatan filantropi Islam. Agama tidak lagi tampil sebagai institusi yang ‘melangit’ dengan segala konsep keadilan sosialnya, namun ia dapat menjadi dekat dan ‘hadir’ dalam segala permasalahan sosial masyarakat.

Misalnya, kita dapat melihat ini pada program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa lembaga zakat seperti Baznas, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan sebagainya.

Lembaga-lembaga ini tidak lagi tampil dalam bentuk penyaluran donasi, namun mereka mengelolanya dana masyarakat tersebut melalui berbagai program berkelanjutan. Meskipun fenomena ini dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk kesalehan sosial aktif yang memiliki dampak positif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat Islam, namun Wasisto²⁰ dalam artikelnya mengenai kesalehan sosial dan filantropi Islam menyebutkan, terdapat ambivalensi orientasi pada kelompok kelas menengah ini. Ambivalensi ini terlihat dalam cara-cara mereka dalam melakukan kegiatan filantropi yang cenderung bersifat material. Sehingga yang nampak kemudian bukan lagi esensi dari kesalehan sosial itu sendiri, namun lebih kepada upaya meneguhkan identitas sosial kelas menengah melalui kegiatan filantropi Islam.

Politik

Dalam konteks politik, semangat keagamaan masyarakat ini dapat mengarahkan masyarakat pada politik identitas dengan memanfaatkan semangat dan sensitifitas keagamaan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks ini tidak ada akademisi yang lebih banyak berbicara mengenai populisme Islam selain Vedi Hadiz. Oleh karenanya, dalam poin ini, saya memang akan lebih banyak mengambil pendapat Vedi Hadiz dalam menggambarkan mengapa dan bagaimana semangat beragama (Islam-red) ini muncul dari wacana populisme Islam di Indonesia.

Vedi Hadiz bertolak dari konsep Marxian dalam menjelaskan kemunculan populisme Islam di Indonesia. Ketimpangan ekonomi dan peran kekuasaan dalam menggunakan kepentingan 'umat' untuk mencapai kepentingannya menjadi penyebab munculnya populisme Islam. Populisme Islam yang dibingkai dalam suatu gerakan dengan memanfaatkan kesamaan identitas kelompok agama Islam, menurut Vedi Hadiz muncul sebagai bentuk manifestasi keresahan mereka akan ketimpangan struktur ekonomi itu tadi. Oleh karenanya, beberapa kelompok-kelompok masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui upaya kekuasaan untuk merebut sumberdaya yang ada²¹.

[20] Jati Raharjo Wasisto, "Kesalehan Sosial Sebagai Ritual Kelas Menengah Muslim," *IBDA' : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 13, no. 2 (2015): 145–157.

[21] Dian Dwi Jayanto, "Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam Di Indonesia

Beberapa kajian mengenai kesadaran keagamaan dan populisme Islam seringkali mengkaitkannya dengan Aksi 212, GPNF MUI, atau FPI. Melalui ketiga aspek tersebut, wacana identitas Islam seringkali diperebutkan oleh kelompok nasionalis dan kelompok Islam sendiri. Entah itu melalui partai politik atau organisasi keagamaan yang pada tahap selanjutnya mereka menggunakan populisme Islam sebagai jalan untuk mendapatkan sumber daya (kekuasaan atau ekonomi). Menurut Hadiz dan Robinson, hal ini tidak dapat dilepaskan dari akar historis kekuatan dominan di Indonesia. Pada titik inilah, munculnya semangat keberagaman dari umat Islam bisa menjadi sesuatu yang ambivalen dalam aspek orientasi dan strategi.

Keyakinan Islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan kebaikan dalam substansi maupun cara, menjadi terkesan negative ketika ia bersinggungan dengan kepentingan politik suatu kelompok tertentu yang tersingkir dari kekuasaan. Lebih lanjut, dapat meningkatkan sensitifitas masyarakat terhadap perbedaan, muncul *hate speech* di sosial media antar kelompok agama, antar pendukung kepentingan politik tertentu, dan bisa jadi akan memunculkan konflik dalam kehidupan antar agama. Contoh konkrit adalah polarisasi pendukung antar capres pada pemilu 2014 dan 2019 kemarin, yang seolah membagi masyarakat Indonesia menjadi kubu nasionalis dan Islamis. Mietzner misalnya²² dalam penelitiannya menemukan bahwa perilaku konservatif kelompok Islam semakin meningkat pasca mobilisasi umat Islam pada Desember 2016 di Jakarta. Mayoritas dari kelompok keagamaan ini mendukung agenda-agenda sosial politik yang dibawa oleh kelompok Islamis yang sebelumnya terpinggirkan selama satu dekade demokrasi di Indonesia.

Ekonomi

Barangkali, salah satu system yang paling terkuat di dunia ini adalah kapitalisme. Implikasi dari hal ini adalah segala aktivitas dinilai dalam kerangka material (transaksi ekonomi). Baudrillard menyebut masyara-

Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU)," *Jurnal Filsafat* 29, no. 1 (2019): 1–25.

[22] Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation," *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 479–497, <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>.

kat seperti ini sebagai masyarakat konsumsi, sebuah masyarakat yang menjadikan pasar sebagai orientasi kehidupan, termasuk di dalamnya adalah kebudayaan dan agama.

Ketika gelombang popularitas Islam yang ditandai dengan semangat kesadaran dalam berbagai praktik keagamaan ini meningkat, hal ini ternyata memunculkan berbagai peluang pasar bagi kelompok-kelompok pengusaha. Misalnya, munculnya bisnis property syariah, penginapan syariah, halal *tourism*, halal *food*, maraknya bisnis fashion muslim, dan sebagainya. Bahkan, jika Anda membuka portal-portal berita mengenai Hijrah Festival dan sejenisnya, Anda akan mendapati berbagai kegiatan ekonomi disana. Tidak hanya sekedar aktivitas ceramah. Atau semaraknya film-film bernuansa Islami dari genre anak muda hingga dewasa, dari cerita sejarah tokoh hingga cerita anak-anak muslim. Semuanya laris-maris seolah berkontestasi dengan film-film lain yang bergenre 'tidak Islami'.

Dalam kajian Sosiologi, fenomena tersebut disebut sebagai komodifikasi agama. Sebuah upaya untuk mengkomersialisasikan unsur-unsur materi dari agama dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dari sana. Hal ini tidak selalu bernilai negatif atau sepenuhnya positif. Masyarakat muslim Indonesia sebagai mayoritas adalah pangsa pasar yang potensial. Daya beli masyarakat yang stabil sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Di sisi lain, antusiasme masyarakat Islam untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam konteks mengkonsumsi maupun memproduksi dan menjual, oleh Hakim Syah²³ dilihat sebagai bentuk kerinduan terhadap produk budaya populer yang mewakili identitas kelompok umat Islam.

Beberapa contoh di atas ada satu kesamaan di antara ketiga hal di atas, bahwa nampaknya implikasi paling signifikan adalah pencarian dan pembentukan identitas bersama umat Islam. Baik itu melalui proses sosial, ekonomi maupun politik. Terdapat perubahan pada masyarakat bagaimana mereka memandang agama dan memaknai agama tidak lagi sebagai ruang privat. Ada upaya untuk menjadikan agama terlibat dalam berbagai aspek kehidupan.

[23] Hakim Syah, "DAKWAH DALAM FILM ISLAM DI INDONESIA (Antara Idealisme Dakwah Dan Komodifikasi Agama)," *Jurnal Dakwah* 14, no. 2 (2013): 263–282, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnalnakwah/article/view/283>.

Inklusifisme dalam Sikap Beragama di Indonesia

Secara normative, besarnya responsibilitas masyarakat perkotaan terhadap kesadaran beragama dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan keyakinan dan kepatuhan masyarakat terhadap ajaran agama. Namun, semangat kesadaran beragama tersebut beserta berbagai implikasinya, ketika tidak diiringi dengan sikap beragama yang tepat akan menyebabkan beberapa permasalahan sosial. Misalnya, implikasi pada aspek sosial, politik dan ekonomi yang mengarah kepada pencarian dan penegasan identitas keislaman, bisa jadi akan semakin menguatkan sensitifitas dalam beragama. Yang pada akhirnya dapat melahirkan sikap beragama yang kurang pas. Beberapa penelitian mengenai populisme Islam yang kemudian berlanjut pada tersebarnya semangat beragama pada berbagai lapisan masyarakat, menyebutkan bahwa kondisi tersebut telah meningkatkan konservatisme dalam beragama.

Luthfi Assyaukanie misalnya²⁴ menjelaskan bahwa sejak era demokrasi dibuka pada tahun 1998, meningkatkan gelombang konservatisme dalam sikap beragama. Menurutnya, hal ini terlihat dari gaya hidup sekelompok masyarakat muslim yang cenderung bercorak Islam Arab dalam symbol dan ritual keagamaan. Survey LSI pada tahun 2016 yang dikutip oleh Mietzner dan Muhtadi, menunjukkan kecenderungan sikap beragama dari masyarakat muslim di Indonesia pada rentang waktu 2017 meningkat di kisaran angka 41,7%²⁵. Angka ini merupakan penjumlahan dari kategorisasi sangat tidak toleran dan tidak toleran yang merujuk kepada sikap muslim terhadap penyelenggaraan kegiatan non muslim, pembangunan rumah ibadah non muslim, dan sikap muslim terhadap pemimpin politik non muslim.

Menariknya, ketika ditelisik kondisi sosial ekonomi responden, terjadi pergeseran episentrum sikap konservatisme dalam beragama dari kelas bawah menengah ke kelas elite²⁶ sebelum tahun 2016 dan setelah tahun 2016. Tahun ketika gelombang populism islam di Indonesia

[24] Assyaukanie, L. (2017, January). *Unholy alliance: Ultra-conservatism and political pragmatism in Indonesia*. Thinking ASEAN, 19

[25] Ibid, hal. 6

[26] Mietzner and Muhtadi, "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation."

meningkat. Konkretnya, sebelum tahun 2016, semakin rendah tingkat ekonomi dan pendidikan warga, semakin meningkat pula intoleransinya. Dan setelah 2016, situasi tersebut bergeser ke kalangan menengah ke atas dan terdidik.

Data tersebut di atas, menegaskan kepada kita mengenai analisis Vedi Hadiz yang telah disebutkan di muka, bahwa ketika kelompok-kelompok tertentu terpinggirkan dalam wilayah politik dan ekonomi, maka ada kecenderungan untuk meningkatkan upaya mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan melalui jalur kekuasaan. Bahkan, dalam beberapa kajian penelitian yang lain, kelompok menengah ke atas dan terdidik ini menjadi target bagi intelektual menengah konservatif pada upaya menerjemahkan iman Islam ke dalam aktivisme politik²⁷. Termasuk upaya untuk memanfaatkan semangat kesadaran beragama yang sedang menguat di kalangan muslim menengah.

Komarudin Hidayat²⁸ membagi sikap beragama masyarakat muslim dalam 5 tipologi, diantaranya adalah eksklusivisme, inklusivisme, pluralism, eklektivisme dan universalisme. Kelima tipologi ini didasarkan pada bagaimana manusia memaknai Islam dari teologi dasarnya. Eksklusivisme adalah ketika seseorang memaknai agamanya sebagai agama yang paling benar. Sedangkan inklusivisme adalah sikap menganggap agama lain juga memiliki sisi-sisi kebenaran, meskipun tidak sempurna atau tidak utuh. Sementara pandangan bahwa setiap agama memiliki jalan kebenarannya sendiri-sendiri merujuk kepada paradigma pluralism. Adapun eklektivisme adalah sikap memilih dan mempertemukan berbagai ajaran agama yang baik dan cocok bagi dirinya. Yang terakhir adalah universalisme yang memandang semua agama sama.

Pada konteks ini, pandangan inklusivisme lebih mudah diterima sebab seseorang masih meyakini bahwa agamanya yang paling baik dan benar, tapi pada sisi lain mereka masih memiliki sikap menghargai, cenderung membiarkan, dan bersahabat dengan yang lain. Semangat keagamaan yang muncul dalam waktu 5 tahun belakangan ini, membawa pada satu anggapan akankah itu kemudian diiringi dengan sikap keagamaan yang baik terhadap pemeluk agama lain? Mengingat, kecenderungan masyarakat menengah untuk

[27] Chaplin, C. (2016, 8 November). *Stuck in the immoderate middle*. New Mandala

[28] <https://uinsgd.ac.id/berita/tipologi-sikap-beragama/>

menjadikan makna iman Islam sebagai aktivisme politik identitas berpotensi memunculkan eksklusivisme. Contoh, kita tidak bisa menafikan bahwa pada kenyataannya dalam 5 tahun terakhir ini, ada sekitar 41,7 % masyarakat muslim yang cenderung intoleran terhadap kelompok agama yang lainnya. Meskipun, pada aspek sosial terjadi perubahan pemaknaan masyarakat terhadap symbol dan ritual keagamaan, atau misal memberi implikasi positif pada geliat ekonomi masyarakat muslim.

Dibutuhkan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan bijaksana, baik dari pemerintah, *civil society*, maupun kelompok-kelompok keagamaan. Kebijakan yang otoritatif akan semakin memperuncing gesekan batasan wilayah negara dan agama, sehingga dapat meminimalisir munculnya konflik baru. Beberapa karakter inklusifitas dalam beragama, seperti misalnya menganjurkan prinsip dialog, toleransi, dan menolak prasangka, prinsip ini tidak hanya berlaku bagi para pemeluk agama, namun saya kira juga setiap stakeholder negara. Prinsip ini menekankan dialog sebelum memutuskan apakah suatu tindakan keagamaan tertentu yang dilakukan oleh oranglain yang 'berbeda' dengan kita itu salah atau benar. Sehingga, model pendekatan yang dilakukan tidak mengarah kepada kecurigaan semata atas semangat masyarakat dalam merespon masalah-masalah keagamaan.

Soetomo²⁹ menjelaskan ada 4 model pendekatan yang bisa dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Diantaranya adalah pendekatan system. Asumsi dari pendekatan ini adalah struktur dan system sebagai penyebab dari munculnya berbagai permasalahan sosial, sehingga penanganannya mustilah berbasis struktur. Misalnya, kemiskinan adalah salah satu dari masalah sosial, jika kita menemukan sumber permasalahan ada pada relasi ekonomi yang timpang, maka kebijakan yang dilakukan adalah dengan mengurangi ketimpangan tersebut.

Dalam konteks masalah sosial keagamaan, beberapa analisis di atas, seperti misalnya pendapat Vedi Hadiz mengenai populisme Islam disebabkan karena ketidakmerataan distribusi ekonomi dan kekuasaan, kemudian diperkuat dengan data LSI yang menunjukkan bahwa se-

[29] Soetomo, *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*, Cetakan I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

mangat keagamaan masyarakat muslim di tahun 2016 ke atas ternyata justru menimbulkan potensi sikap-sikap intoleran. Dengan kata lain, politik identitas menguat dalam beberapa aspek kehidupan, maka, kebijakan yang dilakukan (jika merujuk pada model kebijakan dari Soetomo di atas) adalah dengan pendekatan ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan, akomodasi politik bagi seluruh kepentingan, dan di lingkup keagamaan diperkuat dengan upaya dialog dengan berbagai kelompok agama. Sehingga, prinsip inklusif itu tadi dapat terjadi secara timbal balik antar stakeholder, antar kelompok agama, antar kelompok intern agama dan para pemeluk agama secara umum.

Penutup

Keterasingan manusia dari pekerjaannya, masyarakatnya, bahkan dari dirinya sendiri membawa manusia modern pada satu kesadaran akan kebutuhan spiritualitas. Kesadaran spiritualitas ini seolah seperti pantulan kolektivitas keimanan yang menghasilkan rona religious pada masyarakat kota. Masyarakat dari berbagai level usia terutama dari kalangan menengah seperti menemukan mata air di tengah problem alienasi dan anonimitas perkotaan yang semakin akut. Agama telah menjadi muara bagi pencarian makna terdalam dari kehidupan manusia.

Pada titik ini, sejenak ada kekaguman menyeruak berkenaan dengan luwesnya peran dan fungsi agama di berbagai tipikal masyarakat. Durkheim pernah mengatakan bahwa sifat sacral (kudus, magis) pada agama bukan terbentuk dari sifat agama itu sendiri, melainkan dari keadaan kolektif yang bergejolak. Pada masyarakat modern ia bertransformasi ke moralitas individual yang rasional. Dengan demikian, keberadaan agama dalam berbagai tipikal masyarakat adalah fakta sosial. Ragamnya terbentuk dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sebagaimana Fealy mengemukakan di pembahasan di atas, fenomena kesadaran kolektif masyarakat untuk beragama yang semakin menguat ini tidak bisa serta merta diindikasikan ke bentuk eksklusifisme ataupun radikalisme. Untuk sampai kepada kesimpulan tersebut, membutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut. Survey LSI di atas intoleransi menguat setelah populisme Islam dimunculkan pada situasi politis, termasuk indikasi meningkatnya radikalisme pada survey

LSI di atas muncul hanya ketika agama dikaitkan dengan berbagai kepentingan politik ekonomi. Oleh karenanya, pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan dalam konteks politik perkotaan, hendaknya lebih mengarah kepada apa yang menjadi sumber penyebab, bukan pada apa yang nampak muncul ke permukaan dalam bentuk praktik dan ritual keagamaan. Semangat keagamaan tersebut justru bisa menjadi modal sosial yang besar sebagai aspek penguat integrasi masyarakat dengan tipe solidaritas organik.

Referensi

- Ardiyaningrum, Martalia. "RELIGIUSITAS GAYA BARU (Kajian Atas Fenomena Kebangkitan Sufisme Kelas Menengah Perkotaan Di Yogyakarta)." *Dialogia* 15, no. 2 (2017): 221.
- Fahrurrozi, Fahrurrozi. "Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Islam Indonesia: Mozaik Multikulturalisme Indonesia." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 1 (2015): 15–34. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1419>.
- Jayanto, Dian Dwi. "Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU)." *Jurnal Filsafat* 29, no. 1 (2019): 1–25.
- Jinan, Mutohharun. "New Media Dan Pergeseran Otoritas Keagamaan Islam Di Indonesia." *Jurnal Lektur Keagamaan* 10, no. 1 (2012): 181–208. <https://jurnallekturkeagamaan.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/178>.
- Mietzner, Marcus, and Burhanuddin Muhtadi. "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation." *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>.
- Soetomo. *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sutopo, Oki Rahadianto. "Beragam Islam, Beragam Ekspresi: Islam Indonesia Dalam Praktik." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 15, no. 2 (2010).
- Syah, Hakim. "DAKWAH DALAM FILM ISLAM DI INDONESIA (Antara Idealisme Dakwah Dan Komodifikasi Agama)." *Jurnal Dakwah* 14, no. 2 (2013): 263–282. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/283>.
- Wasisto, Jati Raharjo. "Kesalehan Sosial Sebagai Ritual Kelas Menengah Muslim." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 13, no. 2 (2015): 145–157.

———. “Wasisto Raharjo Jati Sufisme Urban : Konstruksi Keimanan Baru Kelas Menengah Muslim Wasisto Raharjo Jati Sufisme Urban : Konstruksi Keimanan Baru Kelas Menengah Muslim” 05 (2015).

Upaya Meningkatkan Daya Hidup Perkotaan Pada Komunitas *Jogja Muslimah Preneur Community* Dengan Perspektif Teori Modal Pierre Bourdieu

Irfa Rezqia

*Alumni Prodi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sisoal dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Rezqia28@gmail.com*

Abstract

The city's complexity which is the unity of its various functional focusses leads to the emergence of a characteristic heterogeneity of the city itself. The social bond that exists in the city environment is no longer based on the familial aspect or the bond of social norms and values, but has shifted to the more oriented accumulation of interests. This is also one of the background of the proliferation of urban communities formed from the perspective of needs. In this article, will be discussed about *Jogja Muslimah Preneur Community*, as an urban community with its identity which will try to be seen as one of the portraits of urban community becoming a platform in improving urban living power based on capital theory in the theoretical perspective Pierre Bourdieu.

Keywords: Community, Jogja Muslimah Preneur Community, Capital

Jogja Muslimah Preneur Community

Komunitas adalah merupakan bagian dari anatomi sebuah perkotaan. Sebagaimana penjelasan Park Dixon Goist (1971), yang mengutip dalam *Sociology, Community and Society* bahwa masyarakat perkotaan adalah merupakan mosaik dari komunitas-komunitas kecil. Hampir di setiap kota besar, terdapat pusatnya distrik bisnis, daerah perumahan, kawasan industri, kota satelit, daerah kumuh, serta koloni imigran, dan

semua ini disebut sebagai daerah alami. Maksudnya “alami” karena bukan direncanakan hasil ekologi, melainkan proses yang memengaruhi distribusi populasi dan fungsi di dalam kota atas struktur sosial dan fisik kota. Dengan banyaknya lingkungan dan area fungsional, kemudian ini merupakan konsekuensi yang tidak terduga bagi orang untuk berusaha hidup bersama secara kolektif.

Komunitas yang biasa disebut juga dengan JMP COMM ini adalah komunitas yang terbentuk pada April 2015 dengan latar belakang pada saat mulai bermunculan pengusaha-pengusaha muslimah dan calon pengusaha muslimah dengan semangat enterpreneurship yang tinggi khususnya di wilayah kota Yogyakarta, ditambah dengan masih sedikit muslimah yang faham seluk beluk dunia bisnis, mendorong industri kreatif serta inisiatif berwirausaha. Maka lahirlah komunitas ini yang digagas oleh 3 orang muslimah yaitu Afniarosa Zuchrufia, Iffah M Dewi dan Dian Septiani R (harianjogja.com). Komunitas yang terbentuk berawal dari hasil kegiatan forum diskusi dan semua anggotanya terdiri dari berbagai kalangan latar belakang, memiliki kemauan yang sama dalam mengembangkan diri dan memiliki banyak karya serta yang lebih utama memiliki keinginan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas Agama, keluarga, masyarakat dan negara.

Komunitas Jogja Muslimah Preneur Community memiliki visi¹ “terbentuknya muslimah-muslimah tangguh dalam hal agama, keluarga dan ekonominya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, negara Indonesia dan mendapatkan keridloan Allah Swt”. Visi ini pula dibarengi dengan misi yang mereka gagas di antaranya, Meningkatkan kualitas agama, keluarga dan ekonomi para pengusaha muslimah, Profesional muda Muslimah (dari berbagai profesi), Ibu rumah tangga, mahasiswa muslimah di Yogyakarta, bersatu memajukan dunia usaha dengan cara Islami di Yogyakarta, Menciptakan sinergi antara anggota komunitas, dalam rangka kemajuan bersama, Menciptakan pusat sumber daya berdasarkan teknologi serta memfasilitasi konseling atas permasalahan usaha dan pengembangan usaha kepada anggota komunitas. Dari visi

[1] Jogja Muslimah Preneur Community memiliki situs Blogger dengan nama jogjmuslimahpreneur.blogspot.co.id. sebagai media publikasi komunitas Jogja Muslimah Preneur Community dari mulai profil komunitas, aktivitas, kegiatan serta pengumuman yang terkait dengan agenda komunitas itu.

dan misi komunitas ini kita dapat dilihat spirit yang ditanamkan dan dibudayakan oleh anggota-anggota komunitas ini adalah bukan hanya terpusat pada kemampuan berdaya secara ekonomi, tetapi juga bentuk upaya mobilitas sosial, jaringan sosial serta tidak terlewat aspek psikis dan mental lewat pembelajaran spiritualitas agama.

Komunitas JPM juga adalah komunitas yang memiliki struktur kepengurusan yang disebut dengan Komite JPM COM. terdiri dari beberapa struktur jabatan kepengurusan mulai dari Presiden, Sekretaris, Bendahara, *Community Development Division* (CD), *Public relation* (PR), *Event organization* (EO), *Islamic study* (IS), *Social & charity* (SC), *Information & Technology* (IT). Dengan semua pembagian tugas atau *job description* yang juga mereka publish dalam website blog mereka.

Dalam setiap divisi bidang memiliki fungsi dan tugas masing-masing, yaitu *Community Class Development* (CDC) : adalah suatu kelas kelas kecil setiap 2 minggu sekali dengan narasumber dan tema-tema *up to date &* praktis yang dibutuhkan oleh entrepreneur dalam mengelola usaha, kemudian *Islamic Studies* (IS) : adalah kegiatan yang diadakan 2 minggu sekali, berupa pengajian khusus putri yang mengambil tema besar Kemuslimahan / Akhlaq , Fiqh Muamalat (perniagaan), Aqidah /shiroh, Manajemen keluarga sakinah , Ibadah, *Social & Charity* (SC). Kemudian program dari *Even Organizer* (EO) : Seminar / Talkshow / kegiatan berskala besar dengan tema yang menyesuaikan kebutuhan dari anggota JMP Comm dan muslimah yang bukan anggota kegiatan sosial berupa penyumbangan materi dan pelatihan *life skill* dari muslimah preneur untuk yayasan-yayasan sosial yang membutuhkan. Serta dari *Public Relation* (PR) : Menyediakan fasilitas dan kemudahan antar anggota komunitas & membantu mempererat tali silaturahmi antar anggota sehingga terjadi hubungan yang halal dan berkah.

Di samping itu, hal yang menjadi khas dalam komunitas ini adalah *branding* yang ditonjolkan dalam pelaksanaan agenda-agenda kegiatan komunitasnya atau juga bagian identitasnya adalah 'spiritualitas bisnis'. Spiritualitas bisnis adalah merupakan merupakan proses transendensi untuk membentuk lembaga bisnis melampaui pengertian bisnis sendiri seperti yang difahami. Spiritualitas bisnis tidak hanya berbicara tentang profit, transaksi akunting dan strategi, melainkan juga mempersoalkan pelayanan, pengembangan, tanggung jawab sosial, lingkungan hidup

dan keadilan. Hal ini sejalan dengan apa yang digagas oleh JPM Comm tergambar pada program atau event yang mereka selenggarakan serta visi dan misi yang mereka ciptakan (Abdul Jalil, 2013).

Jogja Muslimah Preneur Community : Potret Komunitas Kota Dalam Upaya Meningkatkan Daya Hidup di Perkotaan

Sebagaimana yang didasarkan pada bentuk struktur perkotaan baik dari faktor-faktor ataupun kriteria-kriterianya, sebagian besar berorientasi *achievement* dan *interest* (S Menno, 1992:85). Demikian juga seperti yang telah disinggung pada pembahasan di atas bahwa kota dengan heterogenitas sosialnya, implikasinya pada komunitas kota yang terbentuk dari berbagai macam kelompok baik itu kelompok profesional, kelas, agama, dan bahkan kelompok kepentingan.

Akan tetapi menurut Ari (2014), di sisi lain kehadiran komunitas menjadi sebuah fenomena yang membawa angin segar bagi masyarakat kota, terlebih dapat membuat masyarakat kota untuk lebih bergairah serta menjadi alternatif dalam membangun kembali hubungan-hubungan sosial yang berkualitas. Dengan ini pula komunitas dapat menjadi lembaga yang menggantikan keluarga, spiritualitas, pasar dan negara sebagai fokus utama bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. (Jim dan Frank, 2008:190)

Jika dalam tinjauan konsep teoritis Peierre Bourdieu, kota dapat kita sebut sebagai salah satu dari bentuk arena, yang mana arena didefinisikan olehnya dalam Ritzer (2011: 583) adalah “sebuah struktur arena yang menopang dan mengarahkan strategi yang digunakan oleh orang-orang yang menduduki posisi ini untuk berupaya, baik individu atau kolektif mengamankan posisi mereka dan menerapkan prinsip hierarkisasi yang paling cocok untuk produk mereka.” Maka pelaku yang memasuki ranah atau arena tertentu harus menguasai aturan main untuk bisa eksis di dalamnya, karena itu arena atau *field* menjadi medan perjuangan aktor dalam menempatkan dirinya di ruang sosial (Ita, 2015:496). Posisi mereka dalam ruang tersebut yang ditentukan oleh seberapa besarnya modal yang dimiliki dan komposisi keseluruhan modal. Karena suatu masyarakat jika berada pada satu arena sosial tergantung kepada jumlah modal yang dimilikinya, karena arena sosial

itu sendiri merupakan pasar kompetitif yang di dalamnya terdiri dari berbagai jenis modal, yaitu ekonomi, kultural sosial, dan simbolis.

Maka dalam hal ini komunitas Jogja Muslimah Preneur Community akan coba dilihat sebagai salah satu komunitas perkotaan yang menjalankan fungsinya dari sebuah komunitas, di antaranya dengan upaya membawa anggota komunitasnya untuk meningkatkan daya hidup dan sebagai wadah berpacu di tengah kehidupan arena sosial perkotaan yang kompetitif dengan menggunakan konsepsi Teori modal yang dibangun oleh Pierre Bourdieu yang terdiri pada 4 tempat jenis modal.

Pertama, modal ekonomi (*economic capital*) dapat berupa harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan, seperti uang yang banyak, menentukan posisinya dalam arena kehidupan sosial. Modal ekonomi adalah modal yang mudah sekali ditransformasikan menjadi modal-modal yang lain (Ita, 2015:467). Jogja Muslimah Preneur Community adalah merupakan komunitas yang notabene bergerak di bidang bisnis, baik mulai dari bisnis properti, makanan minuman (kuliner) dan juga busana (*Fashion*) yang biasanya dipromosikan dalam rangka memperkenalkan produk baik melalui kegiatan yang komunitas ini buat seperti ada *drink corner JMP*, atau juga kegiatan *fashion show* dengan memperkenalkan karya-karya *desain* dari para anggota JMP Comm. Semua itu secara otomatis akan menghasilkan akumulasi laba atau keuntungan dari setiap kegiatan usahanya. Diperkuat dengan saling mendukung antar anggota komunitas untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar dunia usaha. Anggota dari komunitas ini adalah para muslimah yang memiliki bentuk usaha atau bisnis begitu juga juga calon pengusaha muda yang memiliki minat kuat untuk bergelut dibidang bisnis dan entrepreneur, sebagaimana dijelaskan dalam blog pribadi komunitas JMP Comm. Maka dengan ini para perempuan dari anggota komunitas Jogja Muslimah Preneur dapat menjadikan aktivitas bisnisnya serta potensi berwirausahanya menjadi modal atau *capital ekonomi* bagi setiap anggota komunitas yang tergabung di dalamnya.

Kedua, modal kultural atau modal budaya (*cultural capital*) adalah modal yang berupa serangkaian kemampuan atau keahlian individu, yang di dalamnya dapat berupa pengetahuan, keterampilan, cara bersosial, dan lain-lain yang memainkan peran di dalam penentuan dan

reproduksi kedudukan-kedudukan sosial (Ita, 2015:468). Bentuk dari modal ini dapat terwujud pada pikiran yang dihargai di wilayah tertentu atau juga terwujud dalam benda budaya seperti hasil karya. Maka Jogja Muslimah Preneur Community ini dalam prosesnya juga mengaitkan kepada proses pembentukan modal budaya atau kultural baik dengan gagasan atau inovasi yang muncul dari setiap anggota untuk agenda sebuah organisasinya juga untuk mengembangkan potensi secara personal atau kelompok, seperti adanya agenda rutin *offline class* dan *online class* yang di dalamnya membahas berbagai tema baik mengenai bisnis seperti kegiatan yang baru diselenggarakan terkait tema “*Best Photo for Product Optimizing*” bagaimana membuat citra visual produk yang paling baik seta menarik, kelas *Branding* dengan pakar konsultan di bidang brandpreneurship, pelatihan keterampilan *water color* dan *hand lettering* (membuat kreasi dengan tulisan tangan). Begitu juga di samping kegiatan lainnya yang lebih kepada baik membangun kekuatan personal, seperti kegiatan kajian yang terlaksana pada bulan Februari terakhir ini, salah satunya adalah kajian dengan mengangkat tema parenting dan kajian mengenai manajemen emosi. Semakin mengembangkan potensi bisnis dengan beragam macam usaha yang tergabung dalam komunitas ini maka semakin membuka lebar penguatan modal budaya yang terbentuk. Terlebih juga hasil yang tertuang dalam kemampuannya berenterpreneur dan menjalin relasi sosial sesama enterpreneur.

Ketiga, modal sosial (*social capital*) modal ini adalah sebuah hubungan yang bernilai antar orang (Ritzer, 2011:583). Modal ini ada pada jaringan sosial yang dimilikinya yang kemudian juga berperan pada penempatan kedudukannya. Semakin banyak menjalin relasi dan semakin banyak kesamaan dalam cara pandang maka secara otomatis ini akan semakin memperkaya modal sosialnya. Modal ini yang mungkin menjadi modal yang paling kuat di antara modal lainnya bagi komunitas Jogja Muslimah Preneur. Hal ini dikarenakan bentuk relasi sosial yang terjalin dan kemudian didukung dengan adanya kesamaan cara pandang bersama. Termasuk dalam hal ini adalah Jogja Muslimah Preneur Community seperti yang dijelaskan dalam situs (harianjogja.com), bahwa komunitas ini awalnya terbentuk karena adanya interaksi sosial antara ketiga tokoh Afniarosa Zuchrufia, Iffah M Dewi dan

Dian Septiani R, yang memiliki ide gagasan yang sama yaitu untuk mendorong ilmu kewirausahaan muslimah agar dapat terasah, sehingga sampai kepada terbentuknya komunitas Jogja Muslimah Preneur pada April 2015. Banyak relasi yang dibangun oleh komunitas JMP Comm, baik lewat sponsorship yang didapat jika komunitas ini menyelenggarakan satu kegiatan, atau partnership dengan berbagai pihak. Contoh kecilnya, JMP Comm terlibat menjalin partnership dengan PPPA Daarul Quran Yogyakarta dalam berbagai kegiatan seperti Wisuda Akbar 4 PPPA, penggalangan dana untuk bencana alam baik erupsi atau banjir, kajian dan pengajian, membuat program Ramadhan bersama AdiTV, atau menjalin hubungan dengan komunitas lain seperti komunitas Hijratunna (Komunitas Hijrah to Jannah) yang juga memiliki kesamaan tujuan dalam hal dakwah dan *ukhuwah* (ikatan persaudaraan). Semua contoh ini adalah tidak lain upaya membangun relasi sosial dengan berbagai pihak, terlebih bagi suatu komunitas upaya mobilisasi adalah hal yang diperlukan. Contoh relasi-relasi yang dijalin ini dapat menjadi modal sosial untuk berdaya hidup di tengah perkotaan yang kompleks. Jogja Muslimah Preneur Community sebagai wadah yang menampung para wirausaha perempuan muslimah selain untuk tujuan utamanya berbisnis dan ber-*enterpreneur*, tetapi juga menjalin hubungan sosial antar sesama atau dalam istilah yang mereka gunakan adalah bersilaturahmi. Menjalin hubungan dan memperluas jaringan sosial anggota komunitas.

Keempat, modal simbolik (*symbolic capital*) yang tumbuh dari dalam diri sebagai harga diri atau prestise (Ritzer, 2011: 583). Modal ini tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi berkat akibat khusus suatu mobilisasi. Modal simbolik ini dapat terwujud baik secara materi berupa sesuatu yang bernilai tinggi atau juga sesuatu yang menyimbolkan status tinggi. Tidak dipungkiri bahwa komunitas ini adalah komunitas bisnis yang juga merupakan komunitas dengan anggota mayoritas pada level masyarakat kelas menengah ke atas. Kemampuan modal simbolik dalam komunitas ini dapat tersimbolkan dalam konteks ekonomi yang merepresentasikan potret kecil dari masyarakat kota kelas menengah, dan juga dalam berbagai kegiatan komunitas diselenggarakan di berb-

agai hotel yang ada di Yogyakarta, serta di samping kita dapat melihat dari citra visual yang ditampilkan dalam akun official mereka (@jogja-muslimahpreneur). Sehingga bentuk prestise pun tumbuh dan menjadi kekuatan modal simbolik baik bagi setiap personal anggota komunitas ini ataupun bagi komunitas Jogja Muslimah Preneur itu sendiri.

Kesimpulan

Jogja Muslimah Preneur Community komunitas berbasis ekonomi adalah salah satu komunitas yang berada di perkotaan dengan inisiasi awal terdidasarkan pada adanya kebutuhan serta proses yang sama dikalangan pengusaha muslimah untuk sama-sama mengembangkan potensi dan kemampuan dalam berwirausaha serta disamping adanya kebutuhan untuk mendalami seluk beluk masalah bisnis. Dengan kehadiran komunitas ini dapat menjadi arena bagi anggota komunitas serta pihak yang tergabung untuk meningkatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki guna meningkatkan daya hidup di perkotaan yang kompetitif. Upaya meningkatkan daya hidup ini di antaranya dapat diupayakan dengan penguasaan atau pemilikan modal (*capital*). Maka berangkat dengan tinjauan dari teoritis Pierre Bourdieu yang menjelaskan bahwa penguasaan arena kota juga untuk *bergaining* di perkotaan dapat dilakukan jika kita memiliki dan menguasai empat modal. Yaitu dengan modal ekonomi, modal kebudayaan, modal sosial dan modal simbolik. Semua modal ini dapat didapatkan dan diupayakan dalam komunitas Jogja Muslimah Preneur Community dengan bentuk pengupayaan sesuai dengan karakter dan usaha yang dilakukan komunitas ini bagi peningkatan kemampuan anggota komunitas. Dan inilah juga merupakan bagian potret kecil dari keberadaan sebuah komunitas kota dalam sisi fungsi dan kebermanfaatannya.

Daftar Pustaka

- Atmasari, Nina, “*Jogja Muslimah Preneur Community, Dukung Muslimah berwirausaha secara Islami*” diakses pada <http://www.harianjogja.com/baca/2016/06/27/muslimah-wirausaha-jogja-muslimah-preneur-community-dukung-muslimah-berwirausaha-secara-islami-732643>. diakses pada tanggal 23 Desember 2017.
- Dixon, Park. *City and Community: The Urban Theory of Robert Park* Published by: The Johns Hopkins University Press he Johns Hopkins University Press collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to American Quarterly, Vol. 23, No. 1 Spring, 1971.
- Jalil, Abdul. “Spiritual Entrepreneurship: Transformasi Spiritual Kewirausahaan”, Yogyakarta : LKIS Printing Cemerlang, 2013.
- Jim dan Frank, “Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Menno, S. “Antropologi Perkotaan”, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Musharofa, Ita, “Mekanisme Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu”, dalam Jurnal Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 49, No. 2, Desember 2015.
- Ritzer, George, J. Goodman, Douglas. “Teori Sosiologi, dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern”, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011.
- Wahyu, Ari. “Gerakan Komunitas Kota dan Politik Pemilu dalam Pemenangan Ridwan Kamil-Oded Danial pada Pemilihan Walikota Bandung 2013”, Bandung: Universitas Padjajaran, 2014.

Strategi Bertahan Hidup Komunitas Ledhok Timoho

Istianah

*Alumni Prodi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sisoal dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Istianah.abdulghani@gmail.com*

Abstract

The community is one of the important places for the life of urban society where its existence grows strong and always develops. Communities serve as an important place to channel hobbies, thoughts, talents, and so on. But on the other side of urban life there are communities that have a functions to get their rights of the urban poor communities. The community consist of the urban poor like scavengers, buskers, beggars, housemaids anda so on. They survive in the suburbs. The community is made very important container in order to channel the aspiration and rights they should get. For example Ledhok Timoho Yogyakarta community is one of the poor urban Yogyakarta that still exist to this day. They life on the edge of the river Gajah Wong which is still at issue until now. With all the problems that exist but they persist and work to support the family. The village is made like a community in order to support the family. The village is made like community in order to be well organized and can fulfill their rights as citizens of Indonesia.

Keywords: Urban, Community, Ledhok Timoho

Pendahuluan

Komunitas merupakan salah satu wadah yang digemari oleh masyarakat kota, mengapa tidak karena komunitas dijadikan sebagai wadah yang bisa menyalurkan bakat, hobi, cita-cita dan sebagainya. Di perkotaan keberadaan komunitas tumbuh sangat subur dan sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat kota. Keberagaman komunitas

di perkotaan menjadikan sesuatu yang tak bisa terelakan lagi karena sudah menjadikan kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Komunitas-komunitas tersebut diantaranya yaitu komunitas sepeda onthel, komunitas pecinta kucing, komunitas angklung Yogyakarta, komunitas kesenian, dan berbagai komunitas lainnya.

Terkait sisi lain dari komunitas kota yaitu terdapat komunitas yang digunakan sebagai wadah untuk bisa bertahan hidup di tengah kehidupan perkotaan yang semakin menuntut untuk materialistic. Komunitas tersebut ada karena kebutuhan dari para masyarakat pinggiran kota yang tidak dapat menikmati akses dan fasilitas yang ada di perkotaan. Komunitas tersebut bisa dikatakan sebagai komunitas miskin perkotaan. Terdiri dari orang-orang pinggiran kota, mereka mendirikan komunitas tersebut untuk memperjuangkan hak-haknya seperti mendapatkan tempat tinggal yang layak, pendidikan yang layak serta kesehatan yang murah.

Dalam penelitian Selly Yunelda dan Nurmala K. Pandjaitan (2011) menjelaskan bahwa permasalahan komunitas miskin perkotaan diantaranya rendahnya pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok yang rendah, akses dalam pendidikan, kesehatan, dan pemodalannya yang rendah serta partisipasi yang rendah dalam institusi sosial (Selly Yunelda Meyrizki, 2011:149) Permasalahan-permasalahan tersebut yang sering terjadi pada komunitas miskin kota bagaimana mereka bisa bertahan hidup untuk tetap bisa menikmati akses yang ada dipertanian. Di kota Yogyakarta sendiri memiliki 14 kecamatan, 45 kelurahan dan 144 kampung (ethnolab.kunci.or.id, 13 Desember 2017). Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat kemudian menambah keberagaman yang ada di kota Yogyakarta. Keberadaan komunitas terus mengalami perkembangan yang kompleks. Disamping itu selain fungsi komunitas sebagai wadah menyalurkan hobi, minat dan bakat juga sebagai wadah untuk mendapatkan hak-hak yang belum didapatkan oleh masyarakat kota Yogyakarta.

Hal tersebut dapat kita lihat pada salah satu komunitas pinggiran kota yang bernama komunitas "Ledhok Timoho". Komunitas tersebut berlokasi di kawasan bantaran sungai Gajah Wong. Komunitas tersebut merupakan salah satu komunitas miskin perkotaan Yogyakarta yang terdiri dari para pemulung, pengamen serta pengemis. Mereka ting-

gal didaerah yang menjadi sengketa sampai saat ini. Kampung tersebut sampai saat belum di akui oleh Pemerinta secara dejures sehingga keberadaannya masih dipermasalahkan. ketika arus migrasi semakin deras maka para pendatang yang datang di kota Yogyakarta untuk mencari pekerjaan namun rendah keterampilan sehingga mereka tidak bisa bersaing secara ekonomi kemudian mereka tidak memiliki lahan untuk bisa ditinggali lalu akhirnya mendiami kampung tersebut. Kebanyakan yang tinggal di kampung ledhok Timoho adalah para pendatang yang melakukan migrasi. Dalam penelitian ini maka peneliti akan membahas bagaimana komunitas yang dijadikan sebagai wadah untuk mengekspresikan oleh masyarakat kota dirubah oleh para masyarakat pinggiran kota untuk bisa dijadikan wadah memperjuangkan hak-hak mereka kepada Pemerintah. Komunitas Ledhok Timoho merupakan contoh komunitas miskin kota yang sampai saat ini masih tetap bertahan dan berkembang. Mereka mengorganisir system koordinasi antar warga yang berbasis kebutuhan komunitas dimana anggota-anggota komunitas Ledhok Timoho ditunjuk untuk bekerja ke dalam satu system kepengurusan bersama. Peran organisasi yang berbasis kemunitas tersebut sangat penting untuk bisa memperjuangkan hak-hak mereka.

Masyarakat Miskin Kota

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting di dalam perkotaan karena kemiskinan seperti menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan di kehidupan perkotaan. Dimana kehidupan kota maka akan selalu ada kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasurdi Suparlao, 1995: xi). Dalam definisi lain juga mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan seperti sudah menjadi budaya bagi masyarakat khususnya di Indoensia. Namun kebudayaan kemiskinan cenderung untuk tumbuh dan berkembang di masyarakat yang memeiliki kondisi-kondisi berikut:

- Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan system produksi untuk keuntungan.

- Tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil.
- Rendahnya upah buruh.
- Tidak berhasilnya golongan golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial.

Sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada system unilateral.

Beberapa hal diatas yang menyebabkan kemiskinan seperti menjadi budaya dan melekat didalam masyarakat. Namun, dalam kondisi perkotaan sendiri kemiskinan menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan. Pengangguran yang tinggi, kesehatan yang minim, pendidikan yang kurang memadai dan sebagainya. Diperkotaan antara si kaya dan si miskin hidup berdampingan seperti tidak bisa dipisahkan. Dengan segala persoalan yang kompleks di perkotaan membuat orang-orang miskin kota harus bersaing dengan maksimal agar bisa bertahan hdiup dengan kondisi tersebut.

Besarnya arus migrasi dari desa kekota membawa pada permasalahan yang baru. Orang-orang desa yang datang kekota mengadu nasib kekota kemudian kebanyakan dari mereka tidak memiliki banyak keterampilan sehingga bekerja sebagai serabutan bahkan ada juga yang pengangguran. Tingkat tuntutan hidup yang besar diperkotaan, lahan yang terbatas kemudian menambah permasalahan yang kompleks diperkotaan. Para imigran yang datang ke kota tanpa memiliki keterampilan, keadaan ekonomi terbatas kebanyakan mereka akan tinggal dengan seadanya. Lahan-lahan yang tidak layak huni dijadikan mereka sebagai tempat tinggal seperti tanah sengketa, kolong jembatan, pinggir sungai dan sebagainya. Fenomena-fenomena tersebut banyak kita jumpai dikota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan sebagainya.

Komunitas Ledhok Timoho dalam Strategi Bertahan Hidup

Dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan keberadaan komunitas Ledhok Timoho yang merupakan salah satu komunitas miskin kota yang masih eksis sampai saat ini berada di kota Yogyakarta. Alamat komunitas tersebut di Balerejo RT 50/05 Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta (Wahyuni, 2016: 41). Uniknya dari komunitas tersebut adalah

lokasinya berdampingan dengan perumahan elit disekitaran daerah tersebut. Daerah tersebut disebut juga daerah kampung namun belum diakui secara sah oleh pemerintah setempat, karena tanah yang mereka huni merupakan tanah illegal. Dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Fajar Novianto (2016) menulis tentang sejarah dari komunitas tersebut dimana kampung ini dibentuk oleh salah satu lembaga yang bernama TAABAH(Tim Advokasi Arus Bawah) yang berfungsi untuk mejaring dukungan oleh swadaya masyarakat dan untuk masyarakat. Sebagiaian besar warga Ledhok Timoho berasal dari luar kota Yogyakarta kebanyakan dari mereka rata-rata sudah lebih dari lima tahun tinggal di Yogyakarta sebelum akhirnya ke Ledhok Timoho (ethnolab kunci.or.id, 13 Desember 2017).

Dalam hal ini komunitas Ledhok Timoho menghadapi tantangan hidup di perkotaan melakukan strategi bertahan hidup. Dalam teori strategi bertahan hidup, menurut Hindi dalam Halide strategi kelangsungan hidup meruapakan subjek, manusia betindak mencapai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup mereka sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar tidak lepas dari aspek jasmani dan rohani seperti pertumbuhan atau pemeliharaan, membutuhkan tempat tinggal. Makanan, air udara dan sebagainya. (Andy Akbar, 2016: 143). Menurut Gunawan dan Sugianto strategi bertahan hidup bagi masyarakat miskin dapat diartikan dalam kemampuan menghadapi permasalahan. Kemampuan dalam menghadapi permasalahan dapat dilihat dari upaya mereka dalam mempertahankan hidup dari himpitan ekonomi (Andy Akbar, 2016:144). Dalam melakukan strategi bertahan hidup komunitas Ledhok Timoho dibantu dengan keberadaan komunitas TAABAH yang melakukan pemberdayaan terhadap komunitas tersebut. menurut Aziz tahapan pemberdayaan masyarakat diantaranya *Pertama*, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. *Kedua*, melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut secara mandiri. *Ketiga*, menentukan skala prioritas dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. *Keempat*, mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi antara lain dengan pendekatan sosio kultural dalam masyarakat. *Kelima*, melaksanakan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihipi. *Keenam*, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauhmana keberhasilan dan kegagalannya (Alfitri, 2011: 26).

Dalam teori tersebut sangat sesuai dengan yang dilakukan oleh komunitas TAABAH untuk melakukan pemberdayaan kepada komunitas ledhok timoho. Seperti dalam teori diatas pertama, komunitas TAABAH membantu komunitas Ledhok Timoho dalam menemukan masalah diantaranya masalah sengketa tanah, masalah MCK, masalah pendidikan dengan didirikan sekolah gajah wong dan sebagainya. Kedua, melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut tujuannya agar memecahkan masalah. Ketiga, menentukan prioritas masalah mana yang lebih harus diselesaikan terlebih dahulu seperti mereka harus membangun sekolah gajah wong karena sangat penting bagi warganya dan sebagainya.

Dari analisis pemberdayaan tersebut maka menghasilkan beberapa program yang dilakukan oleh komunitas tersebut diantaranya didirikannya sekolah gajah wong, adanya perbaikan rumah, perbaikan jalan, lingkungan, PAL, MCK dan sebagainya (Wahyuni, 2017:38) Menurut mba Vera ia menyatakan bahwa juga melakukan pemberdayaan seperti pendirian koperasi warga, peternakan kambing yang bermanfaat untuk warga ledhok timoho serta pemanfaatan sampah (Laporan Participatory Action Research, 2017: 41). Atas bantuan dari komunitas TAABAH tersebut komunitas Ledhok Timoho menjadi bisa bertahan hidup dengan program-program yang dijalankan. Bukan hanya melalui bantuan dari komunitas TAABAH mereka juga bekerja keras untuk menghidupi keluarga dengan profesi yang dijalankan diantaranya pedagang, pembantu rumah tangga, pengamen serta memulung barang-barang bekas untuk kemudian dipilah serta dijual kembali. Kehidupan yang mereka jalankan bisa dikatakan keras karena dengan gaji yang tidak seberapa serta permasalahan lahan di ledhok Timoho mereka berjuang untuk melanjutkan kehidupannya.

Penutup

Kota merupakan sebuah pemukiman yang permanen dengan individu-individu yang heterogen, jumlahnya relative luas dan padat serta menempati areal. Selain itu secara kondisi sosial kota memiliki masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan desa. Ikatan individu yang terjadi di perkotaan sangat kuat sehingga melahirkan yang dinamakan komunitas. Komunitas adalah kelompok yang memiliki tujuan, visi

dan misi yang sama. Atau dalam pengertian lain komunitas sebagai wadah untuk menyalurkan hobi, bakat, minat dan sebagainya. Komunitas dibagi menjadi dua diantaranya sosial institusi dan Community development. Karena perannya yang sangat penting maka komunitas tumbuh subur di perkotaan dan mengalami banyak perkembangan. Sisi lain komunitas di perkotaan adalahh keberadaan komunitas miskin kota. Komunitas tersebut terdiri dari orang-orang pinggiran kota seperti pengamen, pengemis, pemulung dan sebagainya. Mereka menggunakan komunitas tujuannya agar dapat memenuhi hak-hak mereka yang belum mereka dapatkan sebagai warga negara. Kemudian contoh dari komunitas miskin kota yaitu Komunitas Ledhok Timoho, Yogyakarta. Merupakan salah satu komunitas miskin kota di kota Yogyakarta yang masih eksis sampai saat ini. Komunitas tersebut merupakan kumpulan orang-orang pinggiran kota Yogyakarta yang kebanyakan para imigran yang datang ke kota Yogyakarta tetapi tidak memiliki lahan untuk bisa ditempati sehingga mereka mendirikan bangunan di pinggir sungai gajah wong dan lahan tersebut masih dalam sengketa sampai saat ini. Komunitas tersebut merupakan sebuah kampung tetapi tidak terdapat RT, yang ada hanya ketua komunitas. Mereka menggunakan komunitas tersebut agar dapat mempertahankan kan hak-hak mereka sebagai warga negara yang belum terpenuhi. Yang unik dari kampung tersebut adalah tidak memiliki kartu tanda penduduk karena memang status mereka masih para imigran sehingga mereka kesulitan mendapat bantuan dari Pemerintah setempat. Dengan segala keterbatasan mereka bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan bantuan komunitas TAABAH melakukan pemberdayaan sehingga mereka bisa bertahan hidup dengan program-program yang dijalankan komunitas tersebut.

Daftar Pustaka

- Selly Yunelda Meyrizki dan Nurmala K. Pandjaitan. *Representasi Sosial tentang Kota pada Komunitas Miskin di perkotaan*. (Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia; Agustus 2011 ISSN: 19784333, vol.05, No.02)
- Basundoro, Purnawan. 2012. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: penerbit ombak
- Kuliah bu Muryanti Dosen Sosiologi Perkotaan tentang komunitas, pada tanggal 27 september 2017
- Kusumastuti, AmbaR. *Peran Komunitas Terhadap Interaksi Sosial Remaja Di Komunitas Angklung Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta: 2013)
- Suparlaho, Pasurdi.1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Obor Indonesia
- Wahyuni, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota oleh Tim Advokasi Arus Bawah (TAABAH)*, (Skripsi Ilmu Pengembangan Masyarakat, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta: 2016)
- Evers, Dieter. 1979. *Sosiologi Perkotaan*. Jakarta: LP3ES
- Alfitri. 2011. *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sumber Lain:

- <https://www.brilio.net/news/asal-usul-kampung-ledhok-timoho-awalnya-hunian-korban-penggusuran-150826m.html#>, dikases 21 November 2017
- <http://ethnolab.kunci.or.id/?p=358>, di akses tanggal 13 Desember 2017

Religiusitas Instrumental: Potret Keberislaman Masyarakat Muslim Kota

Lisa Aditia Putra

Prodi Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

lisaaditiaputra@gmail.com

Abstract

The development and growth of moslem society increasingly increasing both in term of quantity and quality. However, why do the numbers of vigilantism, intolerance, conservatism and even extremism also increase?. This article finds that this condition is influenced by the model of religiosity embraced by the urban muslim society. The growing model of religiosity among the urban Muslim society is instrumental religiosity, to refer to a model of religiosity which is more concerned with aspects of formality rather than substance. There are at least two factors that helped shape this instrumental religiosity model, namely, reislamisation and modernization. Reislamisasi is a process of entry of transnational Islamic understanding in Indonesia that occurred in the range of the 1980s. Reislamization impacted the changing landscape of the city's Muslim religious community to be more rigid and conservative. Meanwhile, modernization requires the urban moslem to accommodate and modern in the same time. So then the religiosity of the urban moslem is manifested in the form of emphasis on Islamic identities in order to exist and get recognition. In the end it affects the shifting of religious values from the ethical-ideological to the aesthetic-existentialist.

Keywords: Urban Moslem Society, Reislamization, Modernization And Instrumental Religiosity.

Pendahuluan

Depolitisasi islam yang terjadi pada tahun 1970, membawa dampak yang signifikan terhadap keterlibatan masyarakat muslim Indonesia dalam dunia politik. Depolitisasi islam mendorong masyarakat muslim Indonesia untuk absen dari dunia politik. Implikasinya adalah bermunculannya gugus muslim perkotaan yang jauh dari hingar-bingar politik yang lebih fokus pada peningkatan “kesalehan pribadi”. Tidak berselang lama terjadilah proses re-islamisasi yang masif dilakukan oleh Arab Saudi melalui *Rabitah 'Alam Islami* (RAI) yang menancapkan pengaruhnya melalui Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) pada kisaran tahun 1980.

Dua faktor di atas membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kuantitas maupun kualitas masyarakat muslim perkotaan. Secara kuantitas, jumlah masyarakat muslim perkotaan semakin meningkat dari sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada kualitas masyarakat muslim perkotaan.

Pasca reformasi, masyarakat muslim perkotaan semakin menonjolkan eksistensinya. Spirit keislaman yang diusung sudah meluas tidak hanya pada ranah-ranah privat, tetapi juga memasuki ranah-ranah publik, bahkan juga masuk dalam ranah politik, yang dibuktikan dengan menjamurnya partai politik yang mengusung islam sebagai basis ideologinya. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran religiusitas masyarakat muslim kota di Indonesia.

Di sisi lain, fenomena meningkatnya kesadaran religiusitas masyarakat muslim kota di Indonesia dihadapkan pada sesuatu hal yang paradoks. Yakni menguatnya aksi-aksi vigilantisme berlatar belakang agama (baca:islam) dan sikap intoleransi di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Akhir tahun 2016 lalu, oleh banyak peneliti dianggap sebagai puncak dari aksi-aksi vigilantisme yang dilakukan oleh beberapa kelompok islam di beberapa kota besar di Indonesia.

Salah satu contoh menguatnya tren aksi vigilantisme terjadi di Yogyakarta. Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim dalam bukunya, *Krisis Keistimewaan*, memaparkan dalam 3 tahun terakhir (antara 2014-2016) telah terjadi 39 kasus vigilantisme dengan rata-rata lebih dari 12 kasus pertahunnya. Jumlah ini mengalami peningkatan yang drastis diband-

ing 3 tahun sebelumnya yang hanya terjadi 13 kasus dengan rata-rata tidak lebih dari 4 kasus pertahunnya. Isu-isu yang diangkat dalam vigilantisme adalah seputar kristenisasi, PKI/komunisme, LGBT, aliran sesat dan beberapa isu serupa. (Ahnaf and Salim 2017:6-8).

Bruinessen juga menyatakan bahwa pasca lengsernya orde-baru wajah islam di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Secara khusus ia menyebut kondisi bergesernya pendulum keberagaman masyarakat muslim Indonesia pasca lengsernya Suharto ini sebagai “*conservative turn*”, untuk merujuk pada menguatnya islam konservatif di Indonesia yang ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok islam yang menyuarakan penegakan syari’at islam dalam kehidupan publik (Bruinessen 2013:3-4).

Fenomena paradoks ini memunculkan ragam pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya. Salah satu pertanyaan paling mendasar yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah, mengapa bersamaan dengan meningkatnya kesadaran religiusitas masyarakat muslim kota di Indonesia, aksi-aksi vigilantisme, sikap intoleran, dan semangat konservatisme bahkan ekstrimisme juga semakin meningkat?.

Masyarakat muslim kota memiliki corak religiusitas yang berbeda dengan masyarakat muslim desa. Religiusitas masyarakat muslim kota cenderung menekankan pada aspek-aspek keagamaan yang bersifat eksistensial, ketimbang pada aspek-aspek keberagaman yang substansial. Dua faktor utama yang membentuk karakteristik religiusitas masyarakat muslim kota adalah modernisasi dan reislamisasi. Tulisan ini akan mengelaorasi lebih lanjut tentang proses terjadinya reislamisasi dan modernisasi dalam membentuk karakteristik religiusitas masyarakat muslim kota.

Reislamisasi, Modernisasi dan Gaya Hidup Beragama

Berbicara mengenai religiusitas masyarakat kota saat ini, tidak bisa dilepaskan saja dari dinamika sejarah yang melingkupinya. Munculnya gugus muslim kota erat kaitannya dengan perkembangan islamisasi pasca orde baru. Reislamisasi, terjadi pada kisaran tahun 1980-an. Istilah reislamisasi dalam hal ini merujuk kepada proses islamisasi yang dilakukan oleh komunitas Wahabi yang di dukung oleh Arab Saudi sebagai basis pusat pergerakannya. Arab Sudi memiliki lembaga keagamaan

yang disebut dengan *Rabitah 'Alam Islami*, lembaga inilah yang menyeruakkan proses reislamisasi yang terjadi di Indonesia. Dan di dalam negeri sendiri lembaga ini didukung oleh Dewan Dakwah Indonesia (DDII) (Wildan 2016:189)

Islamisasi yang dibawa oleh Arab Saudi memiliki corak yang berbeda dengan corak islam yang sudah berkembang terlebih dahulu di Indonesia. Formulasi islam yang dibawa oleh wahabi atau juga biasa disebut paham salafy cenderung lebih kaku dan konservatif. Salah satu bentuk ajaran yang dibawa oleh wahabi adalah mereka mengajak para pengikutnya untuk membersihkan ibadah mereka dari segala macam *bid'ah* serta memurnikan tauhid mereka dari berbagai macam kemusyrikan. Faham ini berkembang pesat pertama kali di daerah Solo dan Yogyakarta (Sholeh 2017:139; Solahudin 2011:221).

Selain Wahabi, kelompok islam serupa yang menancapkan pengaruhnya di Indonesia adalah Ikhwanul Muslimin, yang belakangan salah satu mantan pengikutnya mendirikan kelompok islam transnasional Hizbut Tahrir, atau di Indonesia dikenal sebagai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ajaran yang dibawa kurang lebih sama, yakni, berorientasi pada purifikasi keislaman (Sholeh 2017:175).

Proses reislamisasi oleh kelompok-kelompok transnasional semacam Wahabi, Ikhwanul muslimin dan Hizbut Tahrir berjalan cukup deras. Basis serangan utama mereka adalah masyarakat muslim perkotaan, yang notabene adalah muslim abangan. Ada alasan tersendiri mengapa kelompok-kelompok islam transnasional seperti yang disebutkan diatas cukup mudah untuk menancapkan pengaruhnya di kota. *Pertama*, masyarakat kota merupakan masyarakat yang dinamis dan struktur sosial masyarakatnya terbuka, sehingga memungkinkan untuk mengadaptasi kelompok-kelompok agama baru (Ali 2017:3). *Kedua*, kemungkinan muslim kota untuk menganut kelompok islam tradisional adalah sangat minim. Karena antara muslim abangan dan santri memiliki sejarah pertentangan yang cukup panjang (Ricklefs 2013:144).

Faktor lain yang turut membentuk karakteristik muslim kota adalah arus modernisasi dan globalisasi yang terjadi di kota. Reformasi, sebagai titik tolak kebebasan masyarakat Indonesia benar-benar dimanfaatkan oleh komunitas muslim kota untuk semakin menunjukkan eksistensinya. Pertumbuhan spirit islam masyarakat muslim semakin tinggi dan

menjajah wilayah-wilayah publik seperti program TV, hotel syari'ah, wisata islami sekolah islami, rumah sakit islami, sertifikasi halal di gerai-gerai fast food asing, bank syari'ah dan lain-lain (Fealy and White 2012:15-16). Fenomena tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran religiusitas masyarakat kota.

Modernisasi dan globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap pembentukan identitas muslim kota. Transformasi budaya global mengarahkan manusia untuk beragama secara eklektik bahkan *hybrid*. Ditambah memudarnya pengaruh-pengaruh islam tradisional dan menguatnya pengaruh islam transnasional, semakin menambah guncangan identitas muslim kota. Relasi antara reislamisasi, globalisasi dan modernisasi membentuk pola baru identitas keberagamaan masyarakat muslim kota dimana seseorang dapat menjadi taqwa dan modern dalam saat bersamaan (Wildan 2016).

Pertautan yang terjadi antara muslim kota yang menekankan artikulasi pada atribut-atribut keislaman dengan modernisasi menghasilkan apa yang disebut sebagai islam populer. Dalam makna politik identitas islam populer dimaksudkan sebagai konstruksi yang dilekatkan sebagai bentuk simbol komunal yang mengikat bersama. Hal ini merupakan upaya pencarian pengakuan sebagai masyarakat modern tanpa meninggalkan budaya mereka (Jati 2017:73-74).

Simbol komunal yang dimaksudkan disini tidak hanya terbatas pada simbol-simbol dalam bentuk atribut fisik. Tetapi juga berupa ritus-ritus ibadah yang dilakukan oleh masyarakat muslim kota, sampai batas-batas tertentu juga menjadi identitas bagi kelompok islam. Transformasi atribut dan ritus keagamaan menjadi identitas komunal masyarakat muslim perkotaan mengisyaratkan terjadinya pergeseran nilai dari yang semula bernilai etis-ideologis menjadi estetis-eksistensial.

Pada akhirnya akan terbentuk konstruksi sosial di masyarakat muslim bahwa identitas-identitas keislaman yang berupa simbol-simbol dan atribut-atribut tertentu adalah representasi dari islam (baca: kesalehan). Tingkat keislaman seseorang direduksi dan dikerdilkan kedalam bentuk atribut dan simbol tertentu, seperti jubah, jenggot, kerudung, cadar dan sebagainya.

Mendefinisikan Religiusitas Instrumental

Reislamisasi dan modernisasi yang terjadi di kota berdampak besar terhadap model religiusitas yang berkembang di masyarakat muslim kota. Reislamisasi menjadikan wajah muslim kota cenderung konservatif, sedangkan modernisasi mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai yang mendasari ritus-ritus keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim kota. Dua karakteristik ini membentuk model religiusitas yang berbeda dengan kebanyakan model religiusitas yang berkembang di masyarakat desa, yang dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai religiusitas instrumental.

Istilah religiusitas instrumental merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep rasionalitas instrumental yang berkembang dalam Madzhab Frankfurt. Rasio instrumental berkembang dalam tradisi empirisme, dimana rasio hanya digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya subjektif (Jauharuddin, 2003:168). Rasionalitas instrumental lebih menekankan pada pentingnya instrument dalam mencapai suatu tujuan, bahkan instrument tersebut lebih penting daripada tujuan itu sendiri (Haryatmoko, 2010:25).

Rasionalitas instrumental bermuatan subjektif. Artinya rasionalitas instrumental didasarkan pada kepentingan individu. Rasionalitas instrumental bisa digunakan oleh siapapun untuk mewujudkan kepentingan tertentu bahkan yang bertentangan dengannya sekalipun. Hal ini dikarenakan rasionalitas mengabaikan tujuan dan nilai. Berbeda dengan rasionalitas objektif yang mengamini adanya struktur rasio yang berada diluar individu yang mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan oleh individu.

Melalui proses modernisasi rasionalitas instrumental merambah dalam berbagai kehidupan manusia. Dalam bidang keagamaan rasionalitas instrumental mewujud dalam munculnya model religiusitas instrumental. Sebagaimana rasionalitas instrumental, religiusitas instrumental merupakan religiusitas yang lebih menekankan pada aspek-aspek instrumen. Instrumen yang dimaksud di sini adalah segala bentuk ritus dan atribut keagamaan. Dalam religiusitas instrumental ritus dan atribut keagamaan menjadi lebih penting daripada tujuan atau nilai-nilai substansial yang terkandung didalamnya.

Dalam konteks masyarakat muslim perkotaan. Religiusitas instrumental mengandung dua hal. *Pertama*, adanya kecenderungan pemahaman agama yang konservatif. Hal ini dikarenakan proses reislamisasi yang terjadi di perkotaan. Reislamisasi yang dibawa oleh kelompok-kelompok islam yang mengusung purifikasi islam cenderung melihat realitas melalui kaca mata hitam-putih, sehingga yang ada hanya benar dan salah. *Kedua*, adanya pegeseran nilai-nilai dalam menjalankan ritus keagamaan dari semula etis-ideologis menjadi estetis-eksistensial.

Pengamalan keagamaan yang berlandaskan pada estetis-eksistensial mengandaikan struktur subjektif individu merupakan motif utama dalam menjalankan ritus keagamaan. Dalam hal ini agama bisa menjadi alat untuk memenuhi kepentingan individu, bahkan untuk kepentingan-kepentingan yang berseberangan dengan agama itu sendiri. Sebagaimana penggunaan agama untuk melegitimasi kekerasan dan vigilantisme.

Religiusitas instrumental menempatkan islam tidak lebih dari sekedar kumpulan doktrin yang harus dijalankan oleh pemeluknya, tanpa menyadari bahwa terdapat nilai-nilai substansial dalam islam yang tersembunyi dibalik doktrin-doktrin islam. Nilai-nilai substansial inilah yang disebut sebagai struktur objektif yang berada di luar individu, yang mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang beragama. Mereka yang terbelenggu dalam religiusitas instrumental, yang senantiasa berkutat dengan hal-hal fisik dan mata tidak akan mampu mencapai dimensi ini.

Religiusitas instrumental mengkonstruksi realitas sebagai sesuatu yang hitam putih. Cara pandang religiusitas instrumental bersifat fanatik dan doktrinal. Sebagaimana yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok salafi. Oleh karena mereka yang terjebak dalam model religiusitas instrumental akan mudah terjatuh kedalam kubangan konflik. Terlebih jika berhadapan dengan kelompok yang berbeda dengan mereka. Mereka berpandangan homogen dan menolak keniscayaan pluralitas.

Religiusitas instrumental mengkonstruksi kelompok lain sebagai *liyan* atau *the other*. Konstruksi *liyan* yang dibangun dalam model religiusitas instrumental mengandaikan orang lain berada diluar, berbeda dan bukan bagian dari mereka. Mereka membangun jurang pemisah dengan berdiri di atas dikotomi antara “kami” dan “mereka” (*liyan*).

Religiusitas Instrumental dan Krisis Toleransi Di Indonesia

Lengsernya orde-baru dan meletusnya reformasi sebagai momentum perubahan struktur politik di Indonesia pada 1998 oleh banyak ahli dianggap sebagai titik tolak bangkitnya konservatisme islam di Indonesia (Al-Makin 2017; Bruinessen 2013; Yaqin 2009; Beittinger-Lee, 2009). Hal ini berdampak pada meningkatnya aksi-aksi kekerasan dan vigilantisme yang mengatasnamakan agama di Indonesia. Walaupun peningkatan yang terjadi bersifat fluktuatif.

Aksi intoleransi yang menyasar kelompok-kelompok minoritas di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil. Tetapi juga oleh aparat pemerintah dan juga otoritas-otoritas keagamaan. Otoritas keagamaan seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) seringkali menyediakan dirinya untuk dijadikan sebagai otoritas yang melegitimasi tindakan-tindakan intoleransi oleh kelompok-kelompok tertentu, melalui fatwa dan sikap keagamaan yang diambilnya.

Sebagai contoh adalah kasus persekusi yang dilakukan oleh FJI (Forum Jihad Islam) terhadap kelompok diskusi ilmiah *rausyan fikir* yang merupakan kelompok diskusi komunitas Syi'ah di Yogyakarta pada tahun 2013. Al-Makin dalam hal ini mengidentifikasi bahwa persekusi yang dilakukan oleh FJI bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan konstelasi keberagaman dalam lingkup nasional. Dalam hal ini MUI dan MIUMI (Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia) membangun konstruksi sentimen anti-syi'ah melalui fatwa dan sikap keagamaannya. Hal ini mengakibatkan FJI sebagai organ yang berada dilapangan terpengaruh dengan konstruksi sentimen anti-syi'ah yang dilakukan oleh MUI dan MIUMI (Al-Makin, 2017:5).

Selain FJI, kelompok-kelompok sipil islam lain yang vocal dalam melakukan aksi-aksi intoleransi adalah FPI (Front Pembela Islam), (FUI) (Forum Umat Islam), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia). Kelompok-kelompok ini tersebar dan saling berjejaring di beberapa kota besar di Indonesia seperti di daerah Jawa Barat, Yogyakarta dan Solo.

Maraknya aksi vigilantisme dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok muslim, aparat pemerintah maupun otoritas keagamaan di Indonesia adalah wujud dari tidak adanya sikap toleransi.

Minimnya toleransi diakibatkan tidak adanya kesadaran *acceptance* atau penerimaan terhadap *liyan*. Kesadaran penerimaan hanya akan tumbuh jika seseorang tidak terbelenggu dalam aspek-aspek doktrinal dari islam, dan untuk melepaskan diri dari belenggu doctrinal, maka harus keluar dari batas-batas religiusitas instrumental.

Dalam konstruksi berfikir religiusitas instrumental, penerimaan terhadap *liyan* sebagai pijakan dalam membangun rasa toleransi sulit untuk dikembangkan. Toleransi merupakan struktur objektif yang terkandung dalam ajaran-ajaran islam, toleransi bersifat substantif. Hanya jika seseorang melepaskan diri dari belenggu religiusitas instrumental dengan melampau batas-batas fisik dalam beragama, ia akan mampu menumbuhkan sikap toleransi dalam dirinya.

Kesimpulan

Pada dasarnya masyarakat muslim kota memiliki identitas, corak dan karakteristik tersendiri dibanding dengan masyarakat desa. Ada dua faktor besar yang turut membentuk identitas, corak dan karakteristik masyarakat muslim kota, *pertama*, adalah persoalan reislamisasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1980-an. Reislamisasi membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan lanskap keberagamaan masyarakat muslim kota. *Kedua*, adalah faktor modernisasi dan globalisasi. Konsekuensi modernisasi menuntut masyarakat muslim kota untuk ikut dalam arus besar dengan mengakulturasi budaya mereka dengan nilai-nilai modernitas. Sehingga mereka akan mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat modern.

Dua faktor diatas kemudian menjadi faktor yang membentuk pola religiusitas instrumental yang berkembang di masyarakat muslim kota. Religiusitas yang didasarkan pada instrumen-instrumen tertentu sebagai tolok ukurnya. Akhirnya, pertanyaan, mengapa meningkatnya spirit islam yang di alami masyarakat kota juga diikuti dengan meningkatnya angka vigilantisme, intoleransi, konservatisme dan bahkan ekstrimisme menemui titik temunya. Hal ini dikarenakan religiusitas yang dikembangkan dan dianut oleh masyarakat kota adalah religiusitas instrumental, sedang untuk menekan angka vigilantisme, intoleransi, konservatisme dan bahkan ekstrimisme masyarakat muslim kota harus mampu melampaui batas-batas religiusitas instrumental menuju religiusitas substansial.

Daftar Referensi

- Ahnaf, Muhammad Iqbal, and Hairus Salim. 2017. *Krisis Keistimewaan: Kekerasan Terhadap Minoritas Di Yogyakarta*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Al-Makin. 2017. "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shia Group in Yogyakarta." *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* Vol.24, No.
- Ali, Hasanuddin. 2017. *The Potraits Of Urban Moslem Indonesia*. Jakarta: ALVIRA Research Center.
- Beitinger-Lee, Verena 2009. *(Un)Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*. Routledge, London and New York
- Bruinessen, Martin Van. 2013. *Contemporary Developments In Indonesian Islam Explaining The "Conservative Turn."* Singapore: ISEAS Publishing.
- Fealy, Greg, and Sally White. 2012. *Ustadz Seleb, Bisnis Moral & Fatwa Online: Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Jati, Wasito Raharjo. 2017. *Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ricklefs, M.C. 2013. *Mengislamkan Jawa*. Jakarta: Serambi.
- Sholeh, Moh. 2017. *Khilafah Sebagai Produk Sejarah, Bukan Produk Syari'ah*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Solahudin. 2011. *NII Sampai JI: Salafy Jihadisme Di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Wildan, Muhammad. 2016. "Aksi Damai 411-212, Kesalahan Populer Dan Identitas Muslim Perkotaan." *Ma'arif Institut* 11.
- Yaqin, Haqqul. 2009. *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Elsa Press.

Ekonomi *Enclave* Pedagang Sate Madura Dalam Mempertahankan Hidup Di Perkotaan

Rohmah

Prodi Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: rohmah.zain03@gmail.com

Abstract

Ekonomi Enclave is one of the associations of various people who have businesses or occupations that have an ethnic similarity that resides in an overseas territory. One of them is Maduran ethnic, Madurese who have business or work gathered, living together in Yogyakarta city. The causes of eco-enclave are caused by economic, social, and cultural factors. The ethnic phenomenon that is in the overseas city is getting more and more visible around the overseas city especially in Yogyakarta. One of the most prominent reasons for overseas or urbanization activities by Madurese ethnic groups is the weak economic factor.

Keywords: Ekonomi Enclave, Maduran ethnic, and economic factor

Pendahuluan

Etnis Madura adalah Etnis Perantau

Kota Yogyakarta merupakan daerah provinsi yang memiliki suku terbesar di Indonesia. Suku Jawa namanaya, suku ini terdiri dari Jawa Tengah dan Jawa Timur namun tidak hanya suku itu saja ada dari Pulau Bali, Sumatra , dan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Etnis Suku Madura merupakan salah satu suku etnis yang berasal dari Jawa Timur. Selain madura masih banyak lainnya contohnya etnis Thiongkok, etnis Jawa, etnis Madura, etnis Papua, etnis China dan lain sebagainya. Identitas etnis muncul tatkala suatu kelompok etnis memiliki kontak dengan dua atau lebih kelompok, yang merupakan sesuatu yang

dibawa oleh imigran dari tempat asalnya. Etnis tidak bisa hidup (eksis) dalam isolasi. Identitas etnis Cina dan India akan muncul ketika mereka menjadi imigran di negara lain. Jika berada di negara lainnya sendiri, identitas tidak muncul akan tetapi lebih pada nasionalisme. Identitas etnis bisa muncul karena (1) migrasi atau (2) heterogenitas etnis di suatu wilayah (Muryanti, 2017 : 15).

Faktor pendorong etnis Madura melakukan proses perantauan ,yaitu adanya faktor Ekonomi.

“Saya itu dulu malah gak kepikiran mau merantau , tapi karena kebutuhan kami yang banyak, ekonomi yang masih lemah beda dengan tetangga-tetangga sebelah rumah saya” kata Cak Noto¹

Dari pernyataan penjual sate itu menunjukkan salah satu faktor dari beberapa faktor lain pendorog seseorang etnis Madura melakukan perantauan. Selain faktor ekonomi ada faktor lingkungan, yang dimaksud disini adalah lingkungan tempat menjadi tujuan para perantauan. Seperti kota Yogyakarta yang merupakan provinsi pada urutan ke 3 dari data pada tahun 1961-2005. Selain itu ada dalam diri seseorang faktor individu. Dan faktor administrasi kota tuju yang lengkap.

Hal yang tidak bisa terlepaskan dengan peran politik kota tersebut (ditetapkan sebagai kota otonom / gemeente sejak Undang-Undang Desentralisasi tahun 1930, peran ekonomi (pusat perdagangan dan industri), serta peran sosial (kota dengan penduduk yang sangat heterogen). Menurut Donald Maclaime Campbell, bahwa dilihat dari aspek-aspek sosial, terutama menyangkut kenyamanan (*gaiety*) para penghuninya, kota-kota besar memang dibangun untuk memanjakan para penghuninya yang sangat beragam latar belakang mereka (Purnawan, 2012 : 182).

Strategi Etnis Madura dalam Mempertahankan Hidup

Keberadaan etnis yang begitu luas memungkinkan seseorang akan melakukan kegiatan berdagangan subsisten yang bertujuan untuk mempertahankan kebutuhan sehari-hari. Dan karena ada banyaknya Dalam pandangan penguasa kaput marut keindahan kota tidak bisa dilepaskan dari wajah kotor dan buram dari kelompok informal ini. Secara sosiologis bisa dipahami, jika munculnya aturan yang berkaitan dengan per-

[1] Wawancara dengan penjual Sate etnis Madura Cak Noto Senin , 25 Desember 2017

encanaan kota seringkali merupakan ruang berkelindannya penguasa kota dengan penguasa kapital. *No way out* atau tidak ada jalan keluar buat pekerja informal (pedagang sate Madura) menjadikan merekapun harus melakukan siasat sedemikian rupa agar tetap bisa bertahan dan dalam batas-batas tertentu bisa bersaing memperebutkan kue ekonomi yang lebih besar lagi (Hayat, 2012 : Vol 6, No 2) . Segala upaya dipertaruhkan untuk bisa bertarung dengan para pengusaha etnis yang lain. Salah satunya adalah dengan masuk di dunia informal dalam melakukan mencari pekerjaan. Berikut beberapa strategi etnis Madura dalam mempertahankan kehidupan.

Upaya membangun Ekonomi Substansif

Menurut Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid hal tersebut disebabkan kebijakan pembangunan yang tidak diikuti oleh kesadaran untuk memberikan peluang dan suasana yang mendukung mereka yang bergerak di sektor informal sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk berpartisipasi. Lebih jauh Didik dan Hamid menambahkan bahwa proses informalisasi dari kegiatan ekonomi mereka dapat dipandang sebagai upaya untuk *survive*, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar (Hayat, 2012 : 2 , Vol 6, No 2).

Berbicara mengenai perkembangan ekonomi diperkotaan terbagai menjadi 2 yaitu Ekonomi mainstream (*grand* dan *pety* kapitalis) dikenal dengan sebutan ekonomi formal (kegiatan ekonomi dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas standar). Dan Ekonomi substantive yaitu tindakan ekonomi terjadi bukan karena pilihan atau keterbatasan sarana, tetapi bagian dari upaya melangsungkan kehidupan (Muryanti, 2017 : 2).

Salah satu pernyataan dari salah satu penjual sate Mbak Khosanah berkata :

“Saya bejualan sate dari jam 1 siang sampai dengan larut malam , kadang selesai pukul 16.00 Wib, Cuma untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kebutuhan anak 2 yang masih jadi tanggungan, begitu mbk”²²

Dari pernyataan diatas jelas menunjukkan bahwa mereka melakukan kegiatan ekonomi substansi mendapatkan hasil dengan tujuan un-

[2] Wawancara dengan penjual Sate etnis Madura Mbak Khosanah Senin , 25 Desember 2017

tuk memenuhi kriteria sehari-hari. Menurut pandangan yang terlihat bahwa dari pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa masih ada unsur substansif dan masih ada upaya dalam mempertahankan kehidupan didaerah perantauan. Jika usaha ekonomi ini tidak berjalan lancar maka kehidupan etnis Madura ini akan melemah dan tidak bisa bertahan ditanah perantauan. Salah satu faktor strategi pendorong untuk bertahan ditanah perantauan adalah melakukan kegiatan ekonomi substansif.

Membangun kearifan lokal dan solidaritas dalam kota perantauan

Kemampuan dalam mempertahankan kehidupan ditanah perantauan ada salah satunya adalah kearifan lokal yang dibawa oleh para etnis di wilayah tanah perantauan yang berkumpul bersama memiliki tujuan bersama. Enclave adalah kumpulan orang-orang yang melakukan usaha sendiri dan menjalankan usaha bersamanya dengan kelompok yang memiliki budaya dan bahasa yang sama dalam konsentrasi dalam wilayah tertentu, secara lebih khususnya adalah kelompok migran yang memiliki perbedaan dengan penduduk asli (Muryanti, 2017 : 5).

Kearifan lokal yang membuat alasan para etnis Madura berkumpul bersama saling melindungi dan menolong. Sehingga ketika ada permasalahan di tanah perantauan seseorang yang etnisnya sama pasti lebih dulu meminta pertolongan kepada etnis yang sama. Hal itu bisa dilihat dari adanya faktor keturunan yang sama dan bertempat tinggal didaerah perantauan yang sama pula. Selain itu kearifan lokal yang dimaksud disini adalah hanyalah sebatas yang bisa digali dari ungkapan verbal (parebasan) sehari-hari atau tradisi yang sedikit banyak berpengaruh pada perilaku orang Madura pada umum sehingga ketika orang Madura melakukan perantauan maka perilaku kearifan lokal masih tertanam.

Dalam bentuk peribahasa (ungkapan verbal) misalnya, antara lain bagi orang yang malas distigma dengan ungkapan sinis atonggul to'ot (memeluk lutut) dan nampah cangkem (bertopeng dagu) (Triyuwono, 2009: Imron, 1996) Karenanya ungkapan seperti itu jelas merupakan sikap yang tidak terpuji (Imron, 1996). Untuk itu agar menjadi orang terhormat hendaknya orang Madura harus bilet (ilet) dan junel (berkewirausahaan) (Rifai, 2007: baca pula Djakfat : 2009). Selain itu jika sudah berrumah tangga maka masyarakat Madura harus bekerja keras untuk menafkahi keluarganya dan kebutuhan lainnya. Selain itu

karakter dasar masyarakat Madura, ejhin, yang membawa sifat toleran, persahabatan dan tidak tergantung/mandiri (Hidayat, 2009).

Menurut Durkheim solidaritas sosial terbentuk dengan kata lain, perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagian bagian utuh, Durkheim membagi dua tipe solidaritas yaitu solidaritas mekanis dan organis. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat seperti ini karena terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Sebaliknya, masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organis bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada didalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda (Ritzer, 2014 : 91).

Menurut kajian Sosiologi sesuai dengan teori diatas bahwasannya seseorang yang memiliki etnis yang sama akan memiliki sikap solidaritas yang kuat. Solidaritas yang memiliki etnis sama solidaritas tersebut tumbuh kuat dan didalam perantauan pun jika memiliki etnis yang sama maka mereka akan kuat menghadapi apa yang menjadi tantangan di kota perantauan. Hal itu diimbangi oleh kedekatan yang disebabkan oleh lingkungan dan kearifan lokal yang tertanam dalam diri masyarakat, khususnya masyarakat Madura yang melakukan perantauan.

Contoh kearifan lokal dari Keberadaan Sate Madura di Yogyakarta selain sate Padang, sate klatak dan sate lainnya. Sate Madura diidentikkan dengan sate ayam, walaupun sering juga pedagang sate menawarkan sate kambing, sate telur buatan (telur yang dibuat dari puritan ayam), sate usus dan sate hati. Kelezatan sate Madura ini sudah tidak diragukan lagi bagi penikmat kuliner sate. Kunci kelezatannya terletak pada rempah-rempah yang dioleskan pada sate sebelum dibakar dan pada bumbu kacang yang khas Madura. Keberadaan sate Madura sebagai representasi identitas etnis Madura di Yogyakarta tidak langsung terjadi begitu saja. Namun ada proses-proses yang dilakukan sehingga ada legitimasi. Adanya penjual sate yang kurang lebih 15.000 di D.I Yogyakarta dan 5.000 penjual sate untuk Kota Madya Yogyakarta menunjukkan bahwa pekerjaan yang mayoritas dilakukan oleh orang Madura di Yogyakarta (Mufallikhah, 2015).

Orang Madura memiliki stereotipe yang disematkan kepadanya, secara sifat dikatakan kasar dan pemaarah. Dari segi kecantikan dan penampilan dikatakan berada di bawah kecantikan perempuan Jawa dan terlihat lebih tua daripada umur yang sebenarnya, sedangkan penampilannya terlihat kumal dan kotor. Namun tidak semuanya stereotip orang Madura negatif, beberapa stereotip orang Madura yang positif yaitu terkenal ulet, mau bekerja keras, setia kawan, mempunyai pertalian kekerabatan yang erat (Rifa'i, 2007). Sedangkan stereotip dari pekerjaan, 15 orang Madura saat ini dianggap sebagai penjual sate, penjual soto, tukang cukur, tukang besi dan beberapa pekerjaan informal lainnya yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Stereotip orang Madura sebagai penjual sate ini yang muncul dikalangan masyarakat Yogyakarta.

Semangat kerja yang tinggi

Semangat yang timbul dalam diri seseorang akan mampu mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut. Alam bawah sadar yang dibawa dalam diri tubuh manusia ternyata mampu memberikan efek yang baik bagi para orang-orang yang memiliki semangat tinggi. Contoh etnis Madura jika dilihat terkadang imaj negatifpun kadang ada. Namun untuk masalah ekonomi pemenuhan kebutuhan semangat orang-orang Madura itu tinggi. Contohnya seorang perempuan Madura yang berjualan sate dengan meletakkan bawa barang dagangan semua diatas kepala dan rela berjalan kaki mengelilingi kampung tetap saja kuat. Itu adalah salah satu bentuk kerja keras yang tinggi dan berani.

Teknologi dan Pemanfaatannya bagi Etnis Madura

Teknologi informasi kini semakin hari semakin bertambah dan berkembang. Ya salah satu kemajuan yang mendukung terjadinya proses globalisasi ditandai dengan munculnya informasi dan teknologi di dunia. Berbicara mengenai teknologi dan pemanfaatannya bagi masyarakat etnis Madura ternyata sudah banyak. Salah satunya pemanfaatan teknologi internet sebagai pemasaran dalam berdagang. Berikut teknologi yang digunakan dalam memperkembangkan dagangan melalui :

Tabel : Pemanfaatan teknologi untuk Perdagangan

No	Teknologi	Media yang digunakan
1.	Pemesanan Online (Aplikasi Gojek) melalui pemanfaatan internet	1. Go food , menawarkan ke konsumen yang ingin membeli melalui jasa go food. 2. Menawarkan /jualan online di facebook / WA / instgram yang digunakan sebagai media pemasaran.
2.	Teknologi Komunikasi berbasis telekomunikasi seluler	Handphone digunakan sebagai media pemesanan. Baik pemesanan kecil atau besar.
3.	Teknologi berbasis cetak	Media promosi cetak seperti di brousur-brosur makanan, tulisan-tulisan banner pada warung sate
4.	Teknologi mesin (seperti montor)	Media montor sebagai alat pembantu dalam mengelilingi kampung biasanya dilakukan oleh para laki-laki dalam menawarkan atau berjualan sate.
5.	Teknologi manusia	Melalui warga setempat, medianya orang itu sendiri mengelilingi kampung bahkan sampai kekota dalam melakukan dagang sate tersebut.

Sumber : Analisa Data Primer, 2018

Teknologi awalnya dulu belum dikenal akan tetapi pada masa ini mulai dikenal dan dimanfaatkan demi membantu dalam hal berdagang. Contohnya etnis Madura yang merantau di Yogyakarta selama dirinya tinggal di tempat perantauan ternyata saat ini sudah mengikuti zaman dimana sate yang dibuat dijual belikan ternyata didaftarkan di *go food*. Begitu cepatnya perkembangan teknologi tersebut maju. Yang berasal dari etnis merantau kini penggunaan media sosialpun tetap digunakan. Sungguh diluar sadar ternyata yang namanya etnis Madura tetep selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga mampu bertahan dan tidak tergelesan.

Sesuai dengan pernyataan wawancara:

“Saya itu jualan sate diYogjakarta dari awal sekitar 7 tahun. Disisi saya ketika awal-awalnya merantau di Yogyakarta semua kulakuakan untuk usahann memenuhi kebutuhan keluarga. Dari yang dulunya sepeda sekarang sudah menetap jualannya di dekat RS,Wirosaban, dan alahamdulialh 2 tahun ini saya sudah memasukkan sate di go food.

Alasan saya memasukkan disitu adalah mampu memanfaatkan sumber teknologi dan tidak ketinggalan zaman. Oew ya mbk boleh kok lihat di go foodnya (Sate Ayam Cak Noto jln. Pemanahan)³

Dari semua itu dapat diketahui ternyata setiap orang itu perlu mengikuti zaman dan memanfaatkan teknologi tersebut. Contohnya di etnis Madura yang tinggal di perantauan sudah memanfaatkan teknologi untuk strategi marketing dagangan sate. Sate ayam dengan bumbu yang lezat dipasang di *go food*. Perkembangan teknologi mampu mempengaruhi perekonomian etnis Jawa, selain itu kira-kira berjumlah lebih dari pada satu etnis untuk iru perlunya pemahaman dan kegunaan teknologi.

Kesimpulan

Berbicara terlibat adanya etnis, semua itu tak terlepas adanya proses urbanisasi. Proses pengkotaan dimana kota tersebut menjadi daya tarik dan faktor pendorong seseorang untuk mencari peluang. Yang namanya etnis itu bermacam-macam bahkan dalam satu wilayahpun etnis itu berjumlah lebih dari 5 berbagai macam etnik yang berada di daerah Yogyakarta. Selain itu Indonesia itu memiliki sumber daya manusia yang begitu lengkap maka diperlunya pendidikan yang tinggi dan pemahaman memanfaatkan ilmu belajar ekonomi untuk bisa bekal ketika dimasa yang akan datang, apakah akan lanjut atau meneruskan kejenjang wilayah lainnya.

Dalam melakukan proses urbanisasi di kota-kota lainnya perlunya persiapan-persiapan baik fisik, mental dan juga persiapan pemahaman tentang ekonomi. Selain itu ketika melakukan kegiatan berdagang jangan lupa memberikan sikap yang optimis dalam belajar dengan keadaan lingkungan tempat perantauan. Seseorang yang melakukan perantauan tanpa adanya modal ,maka apa yang terjadi ? Seseorang tersebut akan susah sendiri bahkan bisa juga orang tersebut akan kembali ke halaman rumahnya.

Kota-kota perantauan kini semakain bertambahnya tahun bertambah pula perkembangan baik prasarana dan juga sarana yang dapat memenuhi jalannya proses kehidupan. Selain itu etnis yang melakukan

[3] Wawancara dengan penjual Sate etnis Madura Cak Noto Senin , 25 Desember 2017 bagian 2.

proses perantauan semakin lama menambah angka etnis yang khususnya di Yogyakarta. Untuk lebih ditekankan adalah ketika ada seseorang yang ingin pergi merantau jangan lupa memperhatikan apa yang harus menjadi modal untuk pergi ke kota. Yang diartikan modal disini adalah modal dari fisik, mental, spiritual dan juga financial apalagi jika ingin melakukan pergi merantau akan tetapi tak mempunyai kedekatan dengan etnis yang sama kemungkinan besar permasalahan yang terjadi belum tentu selesai. Beda dengan orang yang sama-sama etnisnya hidup bersama punya modal diatas semua maka kehidupan untuk bertahan dikota sanagatlah besar bahkan sampai orang-orang itu tidak ada pikiran untuk kembali ke halaman dia tinggal.

Daftar Bacaan

- Giddens Anthony, *Kapitalisme Dan Teori Sosial Modern: suatu analisis terhadap karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, 1985, Jakarta, University Indonesia (UI-Press).
- Asikin Damayanti, *dkk , Kearifan Lokal Migran Madura Pada Permukiman Kotalama Malang Dkk* Mahasiswa Program Doktor Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya Malang & Dosen Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Malang.
- Basundoro Purnawan, *Pengantar Sejarah Kota*, 2012, Yogyakarta, Ombak Dua.
- Djakfar Muhammad, *Etos Bisnis Etnis Madura Perantauan Di Kota Malang: Memahami Dialektika Agama Dengan Kearifan Lokal* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Djakfar Muhammad, *Tradisi To Ron Etnis Madura : Memahami Pertautan Agama, Budaya, dan Etos* , Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jurnal el Harakah Vol.14 No.1 Tahun 2012.
- Hayat Muhammad, *Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima (PKL)* Jurnal Reflektif Volume6, Nomor 2, April 2012.
[Http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196801141992032-WILODATI/jurnal_masy_majemuk.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196801141992032-WILODATI/jurnal_masy_majemuk.pdf) diambil pada hari Selasa, 26 Desember 2017 Pukul 11.14 WIB
- [Http://download.portalgaruda.org/article.php?article=115982&val=5274](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=115982&val=5274) diambil pada hari Rabu, 11 April 2018 Pukul 13.50 WIB
- [Https://pakarkomunikasi.com/peralatan-teknologi-informasi-dan-komunikasi](https://pakarkomunikasi.com/peralatan-teknologi-informasi-dan-komunikasi) diambil pada hari Rabu, 11 April 2018 Pukul 15.30 WIB
- [Https://samartaarsitektur.unud.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/2002-15-Damayanti-Asikin.pdf](https://samartaarsitektur.unud.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/2002-15-Damayanti-Asikin.pdf) diambil pada hari Rabu, 11 April 2018 Pukul 15.48 WIB
- Muryanti , Review ppt *Dinamika Etnis di Perkotaan* Semester V Sosiologi Perkotaan , diambil pada hari Selasa 26 Desember 2017 pukul 14.40 Wib hal 11

George Ritzer , *Teori Sosiologi “ Sociological Theory “* (Bantul: Kreasi Wacana, 2014) hal 91

Hasil Wawancara

Wawancara dengan penjual Sate etnis Madura Cak Noto Senin , 25 Desember 2017

Wawancara dengan penjual Sate etnis Madura Mbak Khosanah Senin , 25 Desember 2017

Wawancara dengan penjual Sate etnis Madura Cak Noto Senin , 25 Desember 2017 bagian 2

Pendidikan Politik Fatayat dan Nasyiatul Aisyiah Dalam Pusaran Politik Perkotaan

Titik Wardiyah Amini

Prodi Sosiologi

Fakultass Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

Email: titikwardiyahamini@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan salah-satu negara yang mempunyai kesadaran tentang *affirmative action*. Hal ini ditunjukkan dengan disahkannya Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Selaras dengan hal itu Fatayat dan Nasyiatul Aisyiah merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang mewadahi aktivitas perempuan muslim. Terkait dengan berdirinya ormas Fatayat dan Nasyiatul Aisyiah yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan, sampai saat ini *Affirmative Action* kuota 30% perempuan dalam politik masih belum terpenuhi. Penelitian ini mengfokuskan pada pandangan ormas Fatayat dan Nasyiatul Aisyiah terhadap politik dan strategi pendidikan politik yang dilakukan oleh Ormas Fatayat dan Nasyiatul Aisyiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai tokoh kunci ormas Fatayat dan Nasyiatul Aisyiah di kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Fatayat dan Nasyiatul Aisyiah melakukan pendidikan politik yang bertujuan untuk peningkatan kesadaran dan pemahaman perempuan dalam politik. Pendidikan politik yang dilakukan oleh fatayat adalah dengan menyelenggarakan sekolah politik, seminar dan literasi media. Sedangkan pendidikan politik yang dilakukan oleh Nasyiatul Aisyah yaitu dengan dialog politik, sekolah parenting dan literasi media. Namun dalam pendidikan politik tersebut belum mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam clon legislatif. Hal ini dikarenakan oleh hambatan struktural dan kultural. Penyebab faktor Struktural menu-

rut fatayat adalah (1) faktor politis, aturan-aturan yang tidak ramah terhadap perempuan seperti rapat malam-malam. (2) faktor sosio religius, tafsir-tafsir ayat Al-qur'an yang konteknya pada zaman jahiliyah namun masih dibawa sampai sekarang. Dan tafsir teks Al-qur'an dan hadist yang cenderung patriarki. (3) Partisipasi semu dalam partai politik, belum ada partai politik yang mengkader perempuan secara sungguh-sungguh, jadi perempuan hanya cenderung menjadi pelengkap saja. Sedangkan penyebab faktor kultural adalah (1) Budaya Patriarki, masyarakat masih menganggap bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin laki-laki. (2) ketergantungan ekonomi, ketika sudah menikah perempuan masih memiliki ketergantungan tinggi secara ekonomi kepada suami, sehingga perempuan rentan secara ekonomi. (3) perempuan tidak percaya diri terhadap kemampuannya.

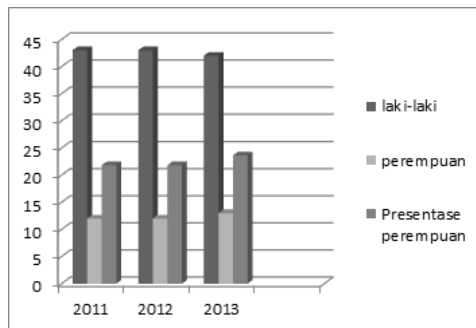
Kata kunci : Pendidikan Politik, Fatayat, Nasyyatul Aisyiah

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah-satu negara yang mempunyai kesadaran tentang *affirmative action*. Hal ini ditunjukkan dengan disahkannya Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik.¹ Substansi dari Undang-Undang tersebut dengan adanya penetapan keterwakilan perempuan minimum 30% dari seluruh anggota DPR dan DPRD. Terkait dengan hal tersebut perempuan belum sepenuhnya memenuhi kebijakan *affirmative action*, berikut komposisi DPRD provinsi berdasarkan jenis kelamin tahun 2011, 2012 dan 2013.

Tabel 1.1
Presentase Keterwakilan
Perempuan di DPRD
Provinsi

Sumber:
Statistik Politik
2016



[1] Sayuti, H. (2013). "Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)." Menara **12**.

Tabel tersebut menunjukkan belum terpenuhinya *affirmative action* 30% perempuan dalam politik. Tahun 2011 jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen 21,82 % , tahun 2012 21,82 % , dan tahun 2013 23,64 %.² Sedangkan Keterwakilan perempuan di DPR RI dari 100 anggota DPR 18 diantaranya adalah perempuan yaitu 18%. Sedangkan Anggota DPRD kota Yogyakarta adalah 39 anggota 11 diantaranya adalah perempuan, atau 27% perempuan.³

Secara kuantitas penduduk perempuan di DI Yogyakarta lebih banyak dibandingkan laki-laki. Penduduk laki-laki 1.797.168 dan penduduk perempuan 1.833.847 perempuan 50,51 % dan laki-laki 49,5 % dari semua jumlah penduduk DI Yogyakarta. Namun, jumlah penduduk perempuan di Yogyakarta belum sepenuhnya dapat memenuhi *affirmative action* kuota 30% perempuan dalam politik.

Menurut Musdah Mulia, rendahnya partisipasi perempuan dalam ranah politik disebabkan oleh sejumlah faktor penghambat di semua level, mulai dari level kultural, struktural dan bahkan dalam ajaran agama.⁴ Secara sosio-kultural masyarakat Indonesia masih kental dengan budaya patriarki dan bersifat sentralistik. Perempuan selalu tersubordinasi dengan *stereotype* masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki adalah pemimpin yang terbaik. Begitu juga dengan penafsiran teks al-qur'an dan hadist yang fundamentalis yang tidak memberi ruang terhadap kepemimpinan politik perempuan di ruang publik. Selain itu dominasi laki-laki dalam aturan-aturan politik, seperti model politik didasarkan pada ide tentang menang dan kalah, kompetisi dan konfrontasi, sedangkan budaya patriarki masih sangat kental di masyarakat sehingga kemungkinan menang dalam kompetisi masih sangat minim.

Selain itu terdapat hambatan struktural, seperti kebijakan pemerintah tentang perempuan yang menampakkan bias gender. Sebagai contoh, dalam organisasi – organisasi perempuan seperti IWAPI, PKK, Dharma Pertiwi dan Dharma Wanita yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang bias gender.⁵ Organisasi-organisasi ini meng-

[2] Keamanan, S. S. P. d. (2016). "Statistik Politik 2016." 180.

[3] Dewan Perwakilan Daerah Yogyakarta. http://dprd-jogjakota.go.id/web/data_dewan/index/3 diakses pada tanggal 10 maret 2019.

[4] Musdah Mulia. 2011."Muslimah Sejati: menempuh jalan islami meraih ridha ilahi". Marja

[5] Zaprul Khan (2015). "Rekonstruksi Peran Politik Perempuan Menurut Musdah Mulia." *Al-Tahrir* vol 15.

harapkan para anggotanya ikut berperan dalam pembangunan. Peran tersebut dirumuskan dalam Panca Dharma wanita, yang meliputi : (1) pendamping suami, (2) melahirkan, merawat dan membesarkan anak, (3) pengatur ekonomi rumah tangga (4) pencari nafkah tambahan dan (5) sebagai anggota masyarakat, terutama sebagai organisasi wanita dan badan-badan sosial.⁶ Sehingga posisi perempuan (ibu) menjadi faktor utama dibandingkan dengan berperan dalam ruang publik. Faktor penghambat yang lain yaitu, kurangnya kecakapan perempuan dalam dunia politik. Hal ini berasal dari budaya patriarki yang mengakibatkan perasaan minder dalam diri perempuan, sehingga perempuan enggan masuk dalam dunia politik dan mengakibatkan kurangnya kapasitas perempuan dalam ranah politik.

Hambatan struktural dan kultural tersebut berasal dari masih kuatnya budaya patriarki dan patron-klien di masyarakat Indonesia. Sedangkan kurangnya kuantitas dan kapabilitas perempuan untuk terjun di bidang politik disebabkan karena lemahnya pendidikan politik pada perempuan, yang tentu saja hal ini memiliki korelasi kuat budaya patriarki. Sehingga mengakibatkan lemahnya kapasitas dan kuantitas perempuan di parlemen. Oleh karena itu pendidikan politik bisa menjadi jalan progresifitas perempuan untuk mengejar ketertinggalannya. Tujuan dari pendidikan politik tersebut untuk memajukan demokrasi, mengakhiri depolitisasi perempuan dan meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Dalam konteks masyarakat sipil sebagai elemen mendasar kehidupan demokrasi, Organisasi Masyarakat (ormas) bisa menjadi bagian dari proses pendidikan politik perempuan. Hal ini terkait dengan peran ormas perempuan yang mampu mendorong kesejahteraan perempuan dan membuka keran demokrasi bagi perempuan dalam segala ruang terutama dalam bidang politik dan pendidikan. Sebagai bagian dari organisasi yang bersentuhan langsung dengan perempuan di tingkat *grassroot*, maka ormas memiliki peran strategis untuk melakukan upaya pendidikan politik. Dalam konteks ini, Fatayat dan NA menjadi fokus kajian peneliti untuk melihat dan menganalisis pemikiran dan strategi politik Fatayat dan NA di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan

[6] Ibid 315

metode kualitatif, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai tokoh kunci ormas Fatayat dan Nasyyiatul Aisyiah di kota Yogyakarta.

Sejarah Singkat, Visi Misi Nasyyiatul Aisyiah dan Fatayat

Sejarah Fatayat

Fatayat NU merupakan salah satu organisasi pemuda Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia.⁷ Fatayat merupakan sayap dari NU yang dirintis oleh 3 perempuan muda yaitu Murthasiah, Khusaimah Mansur dan Aminah. Pada waktu pendirian nama Fatayat adalah Nadhatul Ulama Muslimat (NUM) yang diresmikan pada tanggal 29 Maret 1946 pada kongres NU ke-XVI di Purwokerto. Ketua pertama terpilihnya adalah istri dari KH Ahmad Dahlan Ibu Chadijah Dahlan dari Pasuruan Jawa Timur.⁸

Visi fatayat yaitu terbentuknya pemuda atau wanita muda Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, beramal, cakap dan bertanggung jawab serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Sedangkan Misi dari Fatayat yaitu terwujudnya rasa kesetiaan terhadap asas, aqidah dan tujuan Nadhatul Ulama dalam menegakkan syariat Islam.⁹

Selaras dengan Visi Misi tersebut dalam programnya fatayat memiliki 7 bidang dan 4 lembaga, salah satu lembaga yang mewadahi pendidikan politik adalah bidang advokasi hukum dan politik.

Di lansir dari web Fatayat DIY Program bidang advokasi, hukum dan politik bergerak pada¹⁰ : (1) Peningkatan pengetahuan, kepekaan dan kesadaran Hukum dan HAM bagi aktifis Fatayat NU melalui program pengembangan jaringan dengan lembaga / LSM Hukum dan HAM di DIY; (2) pengembangan jaringan dengan lembaga atau instansi yang bergerak atau konsen dengan isu-isu perempuan; (3) pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender; (4) pendataan kader Fatayat NU di desa yang potensial dan mempunyai posisi strategis dalam bidang politik dan hukum; (5) peningkatan

[7] Safitri, A. N. (2012). "*Bangkit Dari Ketertindasan (Studi atas Pemikiran Kesetaraan Gender Fatayat NU)*." *Musawa* Vol.11: 132.

[8] Ibid 117

[9] Kongres Wanita Indonesia <https://kowani.or.id/fatayat-nu/> diakses pada tanggal 7 april 2019

[10] Fatayat DIY <https://fatayatdiy.com/program-kerja-5/> diakses pada tanggal 7 april 2019

partisipasi kader fatayat potensial pada pembangunan desa melalui Musrenbangdes atau perencanaan desa; (6) Pendidikan dan pelatihan hukum dan (7) Penyuluhan dan pendampingan terhadap anggota Fatayat atau masyarakat yang mempunyai masalah di bidang hukum.

Nasyiatul Aisyiah

Berdirinya Nasyiatul Aisyiah berawal dari pemikiran Somordirdjo, seorang guru *Standart School* Muhammadiyah, beliau mengatakan bahwasanya Muhammadiyah akan semakin maju ketika ada peningkatan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan kepadapara muridnya, baik dalam bidang spiritual, intelektual, maupun jasmaniyah.¹¹

Sehingga pada tahun 1919 Somodirjo mendirikan perkumpulan yang diberi nama Siswa Praja (SP). Anggota dari Siswa Praja (SP) tersebut adalah remaja putra – putri siswa *Standart School* Muhammadiyah. Tujuan dari dibentuknya Siswa Praja tersebut adalah menanamkan rasa persatuan, memperbaiki akhlak, dan memperdalam agama.

Pada tahun 1931 dalam Konggres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta diputuskan semua nama gerakan dalam Muhammadiyah harus memakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, karena cabang-cabang Muhammadiyah di luar Jawa sudah banyak yang didirikan (saat itu Muhammadiyah telah mempunyai cabang kurang lebih 400 buah).¹² Dengan adanya keputusan itu, maka nama Siswa Praja Wanita diganti menjadi Nasyiatul Aisyiyah (NA) yang masih di bawah koordinasi Aisyiyah.

Visi Nasyiatul Aisyiah adalah “*terbentuknya putri islam yang berarti bagi keluarga, bangsa, dan agama menuju terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya*”. Dilansir dari website Nasyiatul Aisyiah Misi Nasyiatul aisyiah adalah :

Melaksanakan dakwah islam amar ma’ruf nahi munkar dalam membina putri islam yang berarti bagi agama, bangsa dan negara menuju terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya.

Melaksanakan pencerahan dan pemberdayaan perempuan menuju masyarakat yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran islam.

[11] Sejarah Nasyiatul Aisyiah <http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/2> diakses pada tanggal 5 maret 2019

[12] Ibid 2

Menyelenggarakan amal usaha dan meningkatkan peran Nasyiatul 'Asyiah sebagai pelopor , pelangsunng dan penyempurna perjuangan Muhamadiyah.

Tabel Pendidikan Politik Nasyiah dan Fatayat

Lembaga	Makana Pendidikan Politik	Strategi Pendidikan Politik	Hasil pendidikan politik
Fatayat	Pendidikan politik sangat penting dilakukan hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada perempuan mendidik perempuan untuk mempunyai visi misi dan perspektif dalam berpolitik.	Melalui 2 metode: 1. Pendidikan langsung melalui pengalaman berorganisasi. 2. Pendidikan tidak langsung melalui pengkaderan organisasi seperti sekolah politik, seminar dan literasi media	1. Kepemimpinan perempuan semakin terakomodasi disetiap kebijakan 2. kader fatayat mampu menarik perempuan yang lain untuk bergabung bersama fatayat 3. kepercayaan diri perempuan semakin bertambah 4. terdapat 5 kader fatayat yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 5. kader menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum(KPU) 6. Kader menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Nasyiatul Aisyiah	Pendidikan politik sangat penting, hal ini dikarenakan pentingnya anggota legislatif perempuan untuk mempunyai visi misi yang peduli terhadap perempuan.	Dialog politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kader menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2. Kader terlibat dalam PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Sejahtera Indonesia), PERINDO.
-------------------	--	----------------	--

Sumber : Analisa Data Primer, 2019

Menurut Fatayat pendidikan politik sangat penting dilakukan hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada perempuan. Mendidik perempuan untuk mempunyai perspektif dan visi misi dalam berpolitik. karena ketika perempuan terjun dalam dunia politik tidak membawa perspektif dan visi misi yang jelas , perempuan hanya akan terbawa oleh arus politik kotor dan cenderung tidak paham mengenai isu sosial terutamaa isu perempuan yang harus diperjuangkan.¹³

endidikan politik yang diterapkan oleh Fatayat memiliki 2 metode yaitu pendidikan secara langsung dan tidak langsung. (1) pendidikan langsung dilaksanakan dengan dengan melakukan pengkaderan dasar, yang disebut dengan Pendidikan Kepemimpinan Perempuan. pendidikan tersebut dilakukan dengan sekolah politik, seminar dan literasi media. Materi dari pendidikan kepemimpinan perempuan adalah, pengelolaan administrasi, pemahaman tentang AD/ART, pengetahuan mengenai perspektif politik dan kesetaraan gender.

Menurut Nasyiatul Aisyiah Pendidikan politik sangat penting, hal ini dikarenakan pentingnya anggota legislatif perempuan untuk mempunyai visi misi yang peduli terhadap perempuan. Pendidikan politik yang dilakukan Nasyiatul Aisyiah yaitu dengan cara, berdialog politik. Dialog politik tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada perempuan terkait pentingnya untuk berperan dalam perpolitikan di Indonesia, mencegh golput dan menela'ah visi misi dari setiap calon legislatif ataupun eksekutif. dialog

[13] Wawancara PW (Pengurus Wilayah) Fatayat DI Yogyakarta di Kota Yogyakarta pada tanggal 15 november 2018

politik tersebut dilaksanakan setiap menjelang pemilu, seperti yang terjadi pada tahun ini Nasyiatul Aisyiah telah mengadakan dialog politik dibulan maret.

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Nasyiatul Aisyiah memberikan perubahan terhadap perempuan diantaranya adalah timbulnya kesadaran perempuan untuk terlibat dalam politik. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya beberapa kader nasyiatul Aisyiah ke KPU (Komisi Pemilihan umum), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu kader Nasyiatul Aisyiah juga terlibat dalam partai yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Sejahtera Indonesia (PSI) dan PERINDO.

Peran Fatayat dan Nasyiatul Aisyiah dalam Pusaran Politik Perkotaan

Kota tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, kekuasaan, politik, kehidupan publik, kebijakan, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik. Dalam hal kebijakan, *Affirmative action* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, minimal 30% dalam setiap partai.

Talcot Parsons memandang bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.¹⁴ Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lain. Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem dimana seluruh struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan menciptakan konsensus dan keteraturan sosial serta keseluruhan elemen akan saling beradaptasi baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat. Parsons meyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama yaitu *Adaption* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan), *Integration* (Integrasi), *Latency* (latensi) atau pemeliharaan pola. *Latency* (pemeliharaan pola) sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan pola tersebut.

[14] George Ritzer.2004."Teori Sosiologi Modern".Kencana:Jakarta

Dalam hal ini Organisasi masyarakat Fatayat dan Nasyiatul Aisyiah berfungsi sebagai *latency* dimasyarakat, yaitu melakukan pemeliharaan di internal anggota Fatayat dan Nasyiatul Aisyiah, dengan memberikan motivasi kepada anggota dan masyarakat umum terutama perempuan untuk maju dan terlibat dalam pendidikan politik. Pemeliharaan internal Fatayat dan Nasyiatul Aisyiah bertujuan untuk menjaga solidaritas perempuan Fatayat dan Nasyiatul Aisyiah memberikan penguatan terhadap norma dan nilai internal anggota. Sedangkan pemberian motivasi kepada anggota dan masyarakat umum yaitu dengan melakukan pendidikan politik, pendidikan politik tersebut dilaksanakan dengan sekolah politik dan seminar-seminar mengenai gender dan politik.

Terkait dengan peran ormas Fatayat dan Nasyiatul Aisyiah dalam memelihara pola dengan memberikan motivasi dan pengertian pada setiap kader, tentang pentingnya perempuan berpartisipasi dalam politik. Namun dalam hal ini fungsi tersebut belum dapat sepenuhnya meningkatkan kapasitas perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Menurut Musdah Mulia kurangnya partisipasi perempuan dalam politik disebabkan oleh faktor Struktural dan Kultural.¹⁵ Penyebab faktor Struktural menurut fatayat adalah (1) faktor politis, aturan-aturan yang tidak ramah terhadap perempuan seperti rapat malam-malam. (2) faktor sosio religius, tafsir-tafsir ayat Al-qur'an yang konteknya pada zaman jahiliyah namun masih dibawa sampai sekarang. Dan tafsir teks Al-qur'an dan hadist yang cenderung patriarki. (3) Partisipasi semu dalam partai politik, belum ada partai politik yang mengkader perempuan secara sungguh-sungguh, jadi perempuan hanya cenderung menjadi pelengkap saja.¹⁶ Sedangkan penyebab faktor kultural adalah (1) Budaya Patriarki, masyarakat masih menganggap bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin laki-laki. (2) ketergantungan ekonomi, ketika sudah menikah perempuan masih memiliki ketergantungan tinggi secara ekonomi kepada suami, sehingga perempuan rentan secara ekonomi. (3) perempuan tidak percaya diri terhadap kemampuannya.¹⁷

[15] Zaprukhhan (2015). "Rekonstruksi Peran Politik Perempuan Menurut Musdah Mulia." *Al-Tahrir* vol 15.

[16] Wawancara PW (Pengurus Wilayah) Fatayat DI Yogyakarta di Kota Yogyakarta pada tanggal 15 november 2018

[17] Ibid

Menurut Nasyyiatul Aisyiah faktor Struktural adalah, pengurus Nasyyiatul Aisyiah tidak diperkenankan masuk kedalam partai politik, jadi kurang ada power yang memepengaruhi kader untuk berprtisipasi dalam calon legislatif .

Namun dalam hal ini terdapat 5 calon legislatif perempuan kader fatayat yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, meskipun jumlah tersebut masih kurang dari seluruh kader fatayat. terlepas dari calon leg-
islatif kader Fatayat dan Nasyyiatul Aisyiah mampu berpartisipasi pada partai dan lembaga pemilu. Kader fatayat aktif pada partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PDIP, Golkar , KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Sedangkan partai yang diikuti oleh kader Nasyyiatul Aisyiah adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Sejahtera Indonesia) dan PERINDO, PDIP , Golkar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Penutup

Fatayat memandang bahwa pendidikan politik adalah sesuatu hal yang penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mendidik perempuan untuk mempunyai perspektif dan visi misi dalam berpolitik. Sistem pendidikan yang dilakukan fatayat melalui 2 metode yaitu pendidikan secara langsung dan tidak langsung. Pendidikan politik yang dilakukan secara tidak langsung adalah dengan melalui pengkaderan organisasi. Sedangkan pendidikan secara formalnya adalah dengan melakukan pengkaderan dasar, yang disebut dengan Pendidikan Kepemimpinan Perempuan. Materi dari pendidikan kepemimpinan perempuan adalah, pengelolaan administrasi, pemahaman tentang AD/ART, pengetahuan mengenai perspektif politik dan kesetaraan gender.

Selaras dengan hal tersebut Pendidikan politik yang dilakukan Nasyyiatul Aisyiah yaitu dengan cara, berdialog politik. Dialog politik tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada perempuan terkait pentingnya untuk berperan dalam perpolitikan di Indonesia, mencegh golput dan menela'ah visi misi dari setiap calon legislatif ataupun eksekutif. dialog politik tersebut dilaksanakan setiap menjelang pemilu.

Namun dalam hal ini fungsi tersebut belum dapat sepenuhnya meningkatkan kapasitas perempuan untuk mencalonkan diri sebagai ang-

gota legislatif. Penyebab faktor Struktural menurut fatayat adalah (1) faktor politis, aturan-aturan yang tidak ramah terhadap perempuan seperti rapat malam-malam. (2) faktor sosio religius, tafsir-tafsir ayat Al-qur'an yang konteknya pada zaman jahiliyah namun masih dibawa sampai sekarang. Dan tafsir teks Al-qur'an dan hadist yang cenderung patriarki. (3) Partisipasi semu dalam partai politik, belum ada partai politik yang mengkader perempuan secara sungguh-sungguh, jadi perempuan hanya cenderung menjadi pelengkap saja. Sedangkan penyebab faktor kultural adalah (1) Budaya Patriarki, masyarakat masih menganggap bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin laki-laki. (2) ketergantungan ekonomi, ketika sudah menikah perempuan masih memiliki ketergantungan tinggi secara ekonomi kepada suami, sehingga perempuan rentan secara ekonomi. (3) perempuan tidak percaya diri terhadap kemampuannya.

Menurut Nasyyatul Aisyiah faktor Struktural adalah, pengurus Nasyyatul Aisyiah tidak diperkenankan masuk kedalam partai politik, jadi kurang ada power yang memengaruhi kader untuk berpartisipasi dalam calon legislatif. terlepas dari calon legislatif kader Fatayat dan Nasyyatul Aisyiah mampu berpartisipasi pada partai dan lembaga pemilu. Kader fatayat aktif pada partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PDIP, Golkar, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Sedangkan partai yang diikuti oleh kader Nasyyatul Aisyiah adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Sejahtera Indonesia) dan PERINDO, PDIP, Golkar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Daftar Pustaka

- Keamanan, S. S. P. d. (2016). „Statistik Politik 2016.“ 180.
- Safitri, A. N. (2012). „*Bangkit Dari Ketertindasan (Studi atas Pemikiran Kesetaraan Gender Fatayat NU)*.“ *Musawa* **Vol.11**: 132.
- Sayuti, H. (2013). “Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan).” *Menara* **12**.
- Zaprul Khan (2015). „*Rekonstruksi Peran Politik Perempuan Menurut Musdah Mulia*.“ *Al-Tahrir* **vol 15**.
- George Ritzer.2004.”Teori Sosiologi Modern”.Kencana:Jakarta
- Keamanan, S. S. P. d. (2016). „Statistik Politik 2016.“ 180.
- Dewan Perwakilan Daerah Yogyakarta. http://dprd-jogjakota.go.id/web/data_dewan/index/3 diakses pada tanggal 10 maret 2019.
- Kongres Wanita Indonesia <https://kowani.or.id/fatayat-nu/> diakses pada tanggal 7 april 2019
- Fatayat DIY <https://fatayatdiy.com/program-kerja-5/> diakses pada tanggal 7 april 2019
- Sejarah Nasyiatul Aisyiah <http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/2> diakses pada tanggal 5 maret 2019

Wawancara

- Ketua Pengurus Wilayah (PW) Fatayat Nadhatul Ulama DI Yogyakarta
- Ketua Pengurus Wilayah (PW) Nasyiatul Aisyiah Muhammadiyah DI Yogyakarta

Masyarakat Kampung Kreatif di Dago Pojok Bandung

Tri Muryani

Prodi Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : trimulyani628@gmail.com

Abstract

The city according to Bintarto (1983: 36) is a network of human life characterized by high population density and heterogeneity (Adrianto, 2014). The complexity of urban society raises many social phenomena, one of which is the existence of urban village society. Interestingly again, the urban village community consisting of people with low incomes turned out to have the potential to support the development of the city. One example is the existence of Kampung Kreatif Dago Pojok Bandung. From the collaboration between community, government and society it self, this kampung is a hometown of Bandung in West Java that has successfully developed the potential and supports the development of the city in terms of creativity and his work.

Keyword : Potential, Community, Urban village society

Pendahuluan

Kota adalah tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Kota juga merupakan pemukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, bersifat non agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, hubungan rasional, ekonomi dan individualis (Ditjen Cipta Karya;1997). Komplexsitas masyarakat perkotaan melahirkan heterogenitas, baik dalam hal pekerjaan, budaya, pendidikan atau bahkan ke-

las sosial. Maraknya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, kota-kota tersebut menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Hal ini sering disebut dengan urbanisasi. (Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., 2013).

Megahnya kota seringkali identik dengan gedung-gedung tinggi. Menurut Bintarto dalam kajian Sosiologi perkotaannya, kota diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan meterialistis. Pemusatan penduduk yang overlapping menyebabkan kota mengalami pemekaran wilayah secara fisik. Pemekaran wilayah ini, beberapa kasus di Indonesia terjadi pada propinsi dan kota baru.

Masyarakat kota, dalam kajian tentang tindakan rasional oleh Max Weber menjelaskan bahwa dalam bertindak, masyarakat akan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain ialah eksperimental atau instrumen yakni rasionalitas untung rugi, tradisional, religius serta Nilai. Rasionalitas untung rugi inilah yang diidentikan dengan masyarakat perkotaan sebagai karakter. Masyarakat kota akan membahas mengenai rasionalitas untung rugi. Sedangkan Emile Durkheim, berbicara mengenai solidaritas individu dan kolektif yang dibicarakan. Kolektifitas berada dalam kotak yang besar dalam masyarakat perkotaan dan individu menjadi bagian di dalamnya. Masyarakat kota yang memiliki solidaritas organik dengan pembagian kerja yang pasti di bidang ekonomi.

Definisi tentang kota ini menjadi definisi klasik yang hari ini mengalami perkembangan. Kondisi perkotaan tidak bisa lagi didefinisikan hanya dengan solidaritas mekanik dan organik untuk membedakan dengan definisi kota. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kondisi wilayah perkotaan menjadi semakin kompleks. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi kota di Indonesia tentu juga menjadi kompleks. Kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta dan kota besar lainnya memiliki banyak dinamika sosial. Misalnya fenomena massa apung atau keberadaan masyarakat kampung kota.

Masyarakat kampung kota terbentuk dari banyaknya masyarakat yang ramelakukan migrasi. Terutama masyarakat dari desa ke kota den-

gan tujuan lapangan pekerjaan tetapi tidak memiliki bekal yang cukup kuat untuk bersaing dengan kapital. Berbeda dengan massa apung yang cenderung memiliki tempat tinggal yang berpindah-pindah, masyarakat kampung kota ini akan menggunakan lokasi tertentu yang terletak di pinggiran kota untuk tempat tinggalnya. Biasanya mereka akan menetap dan menjadikan lokasi yang mereka pilih sebagai sub kultur dari kota itu sendiri. Dari definisi katanya, kampung merupakan kawasan hunian masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi fisik kurang baik. (Budiharjo, 1992); Kampung merupakan kawasan permukiman kumuh dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, kerap kawasan ini disebut “*slum*” atau “*squater*” (Turner 1972) (Heryati, 2000).

Kondisi ini juga akan melahirkan dualisme ekonomi dalam kajian kelas dan perjuangan sosial. Rex dan kawan-kawan mengangkat isu akses ke sumber perumahan di kalangan *housing class*, sehingga muncul perjuangan kelas yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya (Rex dan Moor 1967). Menurut Rex, perjuangan kelas tersebut berdasarkan pada ketimpangan sosial yang muncul terkait ruang tinggal, yang tidak secara langsung dikendalikan dari proses produksi yang langsung. Penekanan oleh Rex ini, dalam perkembangannya kemudian menjadi *sociology of constraint* dari Pahl, yang mengemukakan adanya hambatan spasial dan sosial dalam proses mengakses sumber. Menurut Pahl, dengan menjelaskan pola hambatan, akan terbentuk teori politik urban yang berfokus pada alokasi sumber-sumber bersama (*collective atau shared*) di dalam wilayah kota. Pahl mengemukakan arti penting *city manager* dan *urban gate keeper*, dalam hubungannya dengan otonomi relatif dari negara (Pahl 1970) (Dwianto, 2012).

Keberadaan masyarakat kampung kota memang tidak bisa diabaikan apalagi oleh pemangku kebijakan. Karena, bagaimanapun di negara berkembang masyarakat kampung kota menjadi elemen penting dalam menopang pembangunan suatu kota. Pengelolaan tata ruang kota oleh pemerintah serta peran aktif dari masyarakat kampung kota akan mendukung pembangunan yang ada di kota. Kampung sebagai permukiman pemerintah tidak hanya memberikan arti terhadap identitas perkotaan, namun juga memberikan dampak kehidupan sosial ekonomi bagi penduduk perkotaan. Kampung tetap ada di tengah-

tengah pembangunan perkotaan menyebabkan perubahan morfologi, fungsi, dan nilai-nilai (Setioko, 2014).

Nilai-nilai yang ada dalam teori ini merupakan nilai-nilai sosial. Ada dua faktor yang menjadi penyebab mengapa kampung mampu eksis di tengah-tengah pembangunan perkotaan dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor fisik yang ada di dalamnya sedangkan faktor eksternal merupakan faktor non fisik yang terdiri dari pengaruh sosial dan ekonomi (Putra, 2013)(Setioko, 2014). Dalam kajian kali ini, penulis akan membahas secara spesifik potensi kampung kota Dago Pojok Bandung Jawa Barat dan peran aktifnya terlibat membangun kota Bandung melalui potensinya. Selain potensi, dinamika masyarakat yang heterogen dengan ekonomi rendah, kampung kota Dago Pojok Bandung juga terletak di pinggiran kota Dago Bandung yang bisa dibilang sudah disulap menjadi kota modern.

Potensi Kampung Kreatif Dago Pojok

Permasalahan kota dan perkembangannya sudah sejak dulu menjadi perhatian negara maju maupun negara-negara berkembang. Terlebih sekarang ini yang berkaitan dengan perkembangan spasial kota yang tidak terkendali. Setiap kota memiliki permasalahan yang tidak sama, karena perbedaan latar belakang historis, sosial, ekonomi, kultural, politik dan teknologi (Yunus 2011:1-2) (Adrianto, 2014). Salah satu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat kota ialah keberadaan masyarakat kampung kota. Penataan tata ruang kota serta tidak maksimalnya pengembangan potensi masyarakat kampung kota akan menjadi permasalahan tersendiri bagi pemangku kebijakan (pemerintah) terutama dalam hal tata kelola kota.

Padahal, masyarakat kampung kota yang memiliki keunikan dari segi kondisi sosial dan perjuangan kelas yang apabila dikembangkan akan menjadi potensi tersendiri bagi pembangunan kota. Tentu keberadaan masyarakat kampung kota bisa menjadi pendukung bagi pembangunan kota itu sendiri. Beberapa potensi yang bisa dikembangkan antara lain ialah budaya dan letak geografisnya. Salah satu kampung kota yang berhasil mengembangkan potensinya ialah Kampung Dago Pojok kota Bandung. Bandung merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang akhir-akhir ini memiliki peningkatan populasinya. Sebagai kota mod-

ern, Bandung menjadi salah satu kota yang menarik masyarakat untuk melakukan migrasi dan mencari lapangan pekerjaan di kota ini.

By the time of city transition as the effect of industrialization, Bandung has been faced with population issue. With capacity of 16,729 hectares, and density of 14.300 inhabitants per kilometer, Bandung city has been overcrowded for accommodating 2,7 million inhabitants (Kompas newspaper: Sep 25, 2010). Based on statistically data from Department of Demography Bandung, average rate of urban growth in 2006 – 2008 is 0,8%, and the projection estimated that inhabitants of Bandung city will reach 4,1 million on 2031 with assumption that there is no intervention. Followed by report from Department of Labor in 2001, stated that about 15.253 inhabitants of Bandung City was job-seekers, while the estimation of available job opportunities could only be occupied by 1.854 people. By 2001, 826.620 people were recorded being occupied; most of them were absorbed by trade sector (286.000 labors) and industry sector (204.000) (Djajadiningrat, 2014).

Pesatnya populasi yang terjadi di kota Bandung tidak serta merta hanya didukung oleh masyarakat kota itu sendiri. Layaknya kota besar lainnya, kota Bandung juga melahirkan banyaknya migrasi akibat dari pesatnya perkembangan kota tersebut yang akhirnya menarik masyarakat desa untuk melakukan migrasi dan mencari lapangan pekerjaan di kota ini. Masyarakat yang migrasi dan menetap di kota Bandung dengan penghasilan ekonomi rendah kemudian membentuk sub kultur sendiri dari masyarakat kota asli. Letak geografis di pinggiran kota inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat kampung kota. Salah satu masyarakat kampung kota di kota Bandung yang berhasil mengembangkan potensinya ialah masyarakat Kampung Kreatif Dago Pojok.

Dilansir dari essay Yulia Eka Sari (2017) yang membahas tentang potensi desa, kampung Dago Pojok sebagai kampung kreatif ini didirikan oleh Ahmad Jabrail pada tahun 2011 lalu. Ia mengembangkan sentra kesenian dengan berbagai bentuk kerajinan tangan di Dago Pojok. Mulai dari batik, kriya, wayang, dan lain-lain. Menurut Ahmad Jabrail yang terpenting dalam pembangunan desa adalah kepedulian dan kesadaran bersama masyarakatnya, terutama kaum muda.

Kampung Dago Pojok yang kemudian disebut sebagai kampung kreatif Dago Pojok ini merupakan salah satu kampung kota yang bisa terbilang sukses mengembangkan potensinya. Kampung ini secara geografis terletak di lingkungan RT 2 RW 3 Bandung Utara Jawa Barat.

Seni dan Kreasi menjadi karakteristik warga setempat, sehingga seringkali kampung ini menjadi destinasi wisata atau bahkan karyanya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Pada tanggal 07 Desember 2017 lalu, bahkan penulis berkesempatan untuk ikut terlibat dan menyaksikan langsung apa saja karya yang dihasilkan oleh masyarakat kampung kreatif Dago Pojok itu sendiri.

Kampung seni dago merupakan salah satu objek wisata yang mempunyai sebuah konsep dengan menggambar ditembok rumah, gang dan benteng (mural) di sepanjang ruas jalan dago pojok sampai kecurug dago kurang lebih sepanjang 2km. Dilihat dari hasil konsep kampung seni dago, Kampung seni dago sudah memenuhi sebagai salah satu objek wisata, dilihat dari berbagai aspek yang ada di kampung seni dago seperti adanya pelestarian kebudayaan sunda dan mural dimana faktor ini yang mendukung atau layak sebagai objek wisata Bandung (Fitrianti, Hidayat, Suhadi, & Tyaswara, 2013).

Hal menarik dari keberhasilan kampung kreatif Dago Pojok adalah adanya komunitas kreatif yang bertanggungjawab untuk menaungi dan membina penduduk setempat. Komunitas kreatif yang dimaksud ialah *Bandung Creative Community Forum* (BCCF) (Wardhani, Sabatini, Rachmaniatius, & Kasman, 2016). Salah satu dari gerakan komunitas ini ialah membentuk Kampung Kreatif Dago Pojok oleh Ahmad Jabrail tahun 2011 lalu. Kampung Dago yang awalnya hanya kampung di pinggiran kota Bandung dengan kompleksitas masyarakat dan ekonomi rendah, kemudian diperdayakan menjadi kampung kreatif yang diminati oleh pengunjung. Tidak hanya wisatawan dalam kota, dari luar kota bahkan wisatawan luar negeri ikut mengunjungi kampung ini untuk sekedar melihat atau ikut berkarya langsung dengan masyarakat.

Selain oleh komunitas, dalam perkembangannya, kampung wisata kreatif Dago Pojok juga didukung penuh oleh partisipasi masyarakat. Dilihat dari prasyarat partisipasi yaitu kesempatan, kemampuan dan keinginan dan jenis partisipasi yang terbagi menjadi 5 (lima) jenis antara lain pemikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang dapat terwujud dari masyarakat. Melihat dari jenis partisipasi, warga telah melaksanakan kelima jenis partisipasi tersebut.

Meskipun masih ada kekurangan dalam hal partisipasi uang, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kemampuan warga untuk memberikan partisipasi uang dan belum adanya sistem yang mengatur pendanaan program dari uang warga (Choresyo, Nulhaqim, & Wibowo, 2012).

Elemen pendukung terakhir ialah pemerintah kota itu sendiri. Keberadaan pemerintah untuk mengakui dan memfasilitasi perkembangan masyarakat kampung kota menjadi sangat penting. Karena bagaimanapun, keberadaan kampung kota apabila dikelola dengan baik sesuai dengan tata kelola kota akan mendukung pembangunan kota itu sendiri. Melihat potensi yang mencirikan karakter-karakter perdesaan yang cukup kuat dari kampung kota. Selain itu juga dari keunikan *positioning* kampung ini sebagai produk pariwisata, yakni sebagai suatu alternatif wisata budaya berbasis kegiatan masyarakat perdesaan, dengan lokasi yang mudah dijangkau di lingkungan perkotaan Bandung. Jika produk pariwisata ini diwujudkan, akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke kampung ini sehingga bisa memberikan kontribusi lebih lanjut bagi kesejahteraan warganya (Agoes, 2015).

“Tourism, city and creativity are potential asset to be collaborated in emerging creative tourism, and as the answer of balancing industrialization era that make all development become convergent to be one monotone model. With high potential of cultural and historical values, Indonesia with its diversity, can make it high competitive in emerging the kind of creative tourism. Hermanto on ‘Creative-Based Tourism’ (2011:19) explained that nowadays, the attention toward creativity becomes more attractive as it is able to encourage business opportunities for small enterprise through making souvenir, festival by local people, and others” (Djajadiningrat, 2014).

Penutup

Seiring dengan berkembangnya definisi kota dan desa, masyarakat kota tidak hanya memiliki satu definisi saja yakni masyarakat yang memiliki rasionalitas tinggi. Di tengah-tengah rasionalitas dan solidaritas organik yang tinggi, bahkan masyarakat kota memiliki sub kultur tersendiri yakni masyarakat kampung kota. Masyarakat kampung kota terdiri dari masyarakat pinggiran kota dengan penghasilan rendah (ekonomi mengengah ke bawah). Keberadaan masyarakat kampung kota memang tidak bisa diabaikan apalagi oleh pemangku kebijakan.

Karena, bagaimanapun di negara berkembang masyarakat kampung kota menjadi elemen penting dalam menopang pembangunan suatu kota. Karena, bagaimanapun keberadaan kampung kota merupakan bagian dari elemen pendukung pembangunan kota.

Dalam argumen neo-Weberian, teori politik urban yang berfokus pada alokasi sumber-sumber bersama (*collective atau shared*) di dalam wilayah kota menjadi sebuah *prototype* bagi konsep *collective consumption* dari Castells. Konsep Castells tersebut bukan hanya menekankan pada reproduksi tenaga kerja, melainkan juga fungsi akses ke sumber-sumber komunitas serta alokasinya. Selain itu, fungsi tadi menjadi sumber baru bagi ketimpangan sosial yang tidak dikurangi secara keseluruhan oleh hubungan produksi (Castells 1977) (Dwianto, 2012). Di sinilah keterlibatan masyarakat kampung kota dalam berpartisipasi melakukan pembangunan kota.

Tiga elemen penting yang mendukung berkembangnya potensi kampung kota mengembangkan kreatifitasnya dari studi kasus kampung kreatif Dago Pojok Bandung ialah *Pertama*, komunitas kota setempat. Komunitas kreatif yang ada di Bandung berhasil mengajak masyarakat melihat potensi dan mengembangkan karyanya sehingga kampung Dago diubah menjadi Kampung Kreatif Dago Pojok. Komunitas ini menjadi pihak di luar internal masyarakat yang membimbing masyarakat dalam mengembangkan potensinya. *Kedua*, kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kesadaran ini menjadi sangat penting, apalagi masyarakat perkotaan yang cenderung rasional dan individualis. Kampung Kota dengan keragaman penduduknya pada dasarnya memiliki ciri khas tersendiri, karena mereka merupakan campuran dari karakter desa dan kota sehingga melahirkan keunikan nilai dan budaya yang bisa dikembangkan.

Ketiga, peran pemerintah. Tentu menjadi penting dukungan pemerintah, selain pengadaan infrastruktur, dukungan pemerintah menjadi elemen birokrasi pendukung bagi kampung kreatif untuk tetap mempertahankan keberadaannya. Legalitas formal secara tidak langsung akan menjadi elemen yang dibutuhkan oleh masyarakat kampung kota dalam bergerak mengembangkan potensinya. Pemerintah, komunitas dan kesadaran masyarakat Kampung Kreatif Dago Pojok Bandung telah berperan dalam pengembangan karyanya. Melalui Kampung Kre-

atif ini, Kampung Kota Dago Pojok telah menjadi salah satu destinasi wisatawan yang juga menawarkan berbagai fasilitas, seperti penginapan di rumah warga setempat, hiburan wayang golek bagi wisatawan, atau bahkan keterlibatan wisatawan untuk ikut menghasilkan karya. Wisatawan, kota dan kreatifitas serta karya dari masyarakat bisa menjadi potensi pembangunan kota.

Daftar Pustaka

- Adrianto, S. dan A. (2014). *Dinamika kampung kota*.
- Agoes, A. (2015). *PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA PERDESAAN DI KAMPUNG DAGO POJOK BANDUNG*. Jurnal Manajemen Resort & Leisure, Vol. 12, N, 73–99.
- Choresyo, B., Nulhaqim, S. A., & Wibowo, H. (2012). *7 partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung wisata kreatif dago pojok*.
- Djajadiningrat, R. R. and S. T. (2014). *METHODOLOGY OF GENERATING “ CREATIVE TOURISM KAMPUNG ” AND STAKEHOLDERS ENGAGEMENT ANALYSIS IN KAMPUNG KREATIF DAGO*. JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, 3(5), 589–611.
- Dwianto, R. D. (2012). *Teori Ruang dalam Sosiologi Perkotaan : Sebuah Pendekatan Baru*. Jurnal Sosiologi Masyarakat, 17.
- Fitrianti, A., Hidayat, D., Suhadi, M., & Tyaswara, B. (2013). *Representasi kampung seni dago sebagai objek wisata kota bandung*, (1).
- Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M. S. (2013). *DAMPAK URBANISASI BAGI PERKEMBANGAN KOTA DI INDONESIA*. Jurnal Society, I(1), 35–45.
- Heryati. (2000). *Kampung kota sebagai bagian dari permukiman kota*.
- Setioko, B. (2014). *Faktor-faktor yang Menentukan Eksistensi Kampung Pekojan sebagai Kampung Kota di Kota Semarang*. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 10(1), 106–114.
- Wardhani, S. T., Sabatini, S. N., Rachmaniatius, D., & Kasman, T. M. S. (2016). *Identifikasi Kampung Kreatif sebagai Strategi Kota Tangguh*, 15–20.

Perjuangan Kelompok Marjinal Malioboro

Wahdania

Prodi Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : wahdania237@gmail.com

Abstrak

Malioboro sebagai salah satu pusat destinasi wisata perbelanjaan yang menawarkan berbagai macam jenis barang seperti oleh-oleh khas Yogyakarta, pakaian, kuliner, elektronik dan lain sebagainya menjadikannya sebagai kota yang menarik sejumlah masyarakat dari berbagai daerah untuk datang berkunjung dan membangun usaha, karena potensi yang besar dengan banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung, kelompok marginal yang berusaha dan berjuang demi pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan menjadi pedagang, buruh dan pekerjaan lainnya yang mengandalkan otot di Malioboro dan sekitarnya. Dalam kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan lika-liku perjuangan para kelompok marginal Malioboro dalam upaya mempertahankan hidup mereka di tengah persaingan kehidupan di perkotaan yang sengit. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik complete observer dan wawancara terhadap para pedagang, buruh, tukang becak di sekitar kawasan wisata perbelanjaan Malioboro. Hasil penelitian ini adalah problematika yang dihadapi oleh kelompok marginal Malioboro begitu beragam yakni dalam hal perolehan pekerjaan, keterbatasan modal, memperoleh izin bagi mereka yang ingin buka usaha disekitar daerah Malioboro serta kemampuan mereka yang minim, meski begitu mereka terus berusaha.

Kata Kunci : Kelompok Marjinal, Berjuang, Sektor Informal, Malioboro

Pendahuluan

Siapa yang tidak kenal dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, kota dengan julukan miniatur Indonesia dengan keragaman suku, budaya, agama. Hingga sekarang, Yogyakarta masih tetap daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan mancanegara. Dengan kesungguhan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang berkelanjutan, serta memelihara kemegahan candi Prambanan dan Ratu Boko, Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, Kota Tua Kota Gedhe, Makam Raja-raja Mataram Kota Gedhe, museum-museum dan Adat-istiadat serta kesenian tradisionalnya. Sampai sekarang kekayaan tersebut masih terjaga/lestari. Begitu juga dengan potensi keindahan alam Yogyakarta yang sangat mempesona, seperti kawasan Kaliurang dan gunung Merapi, kawasan Nglanggeran, Tahura Bunder, puncak Suroloyo/perbukitan Menoreh, gunung Gambar, pegunungan Karst, Gumuk Pasir, maupun keindahan pantai selatan (pantai Kukup, Baron, Krakal, Siung, Ngrehen, Sundak, Sadeng, Parangtritis, Goa Cemara, Pandansimo atau Glagah)¹.

Kawasan Malioboro sebagai salah satu kawasan wisata belanja andalan kota Yogyakarta, didukung oleh adanya pertokoan, rumah makan, pusat perbelanjaan dan tidak ketinggalan para pedagang kaki lima. Untuk pertokoan, pusat perbelanjaan dan rumah makan yang ada sebenarnya sama seperti pusat bisnis dan belanja di kota-kota besar lainnya, yang disemarakkan dengan nama-merk besar dan ada juga nama-nama lokal. Barang yang diperdagangkan dari barang import maupun lokal, dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan barang elektronika dan mebel.² Produk yang dijual berbeda dengan lainnya, sebagian besar produk yang dijual para pedagang merupakan hasil produksi Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Beraneka-ragam produk yang dijual oleh PKL yaitu: souvenir khas, pernak-pernik, kerajinan dari bambu dan anyaman, batik-batik, kaos, gantungan kunci dan aksesoris.³

[1] Tim Penyusun Dinas Pariwisata DIY, 2015 (Statistik Kepariwisataaan 2015, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta; Yogyakarta) hlm. 14

[2] Ani Wijayanti, 2010 (*Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Pedagang Kamki Lima Dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Wisatawan Di Malioboro Yogyakarta*, Khasah Ilmu, Vol. 1, No. 1; Yogyakarta) Hlm 61

[3] Ahsanul, dkk. 2014 (*Kajian Keberadaan Wisata Belanja Malioboro Terhadap Pertumbuhan Jasa Akomodasi Di Jalan Sosrowijayan Dan Jalan Dagen, Teknik PWK Vol. 1, No. 3; Yogyakarta*) hlm. 937

Kelompok Marjinal Malioboro

Malioboro memiliki keunikan sebagai ikon Yogyakarta. Dibuktikan dengan dokumen Perda Kota Yogyakarta yang menerangkan tentang peranan objek wisata di Yogyakarta. Malioboro telah berkembang menjadi tempat pertemuan aktivitas sosial dan ekonomi. Percampuran tersebut menjadikan Malioboro memfasilitasi kegiatan perdagangan dan jasa bagi para pedagang. Sepanjang 2 km disuguhkan dengan berbagai macam pedagang yang menawarkan barang dagangannya. Banyaknya wisatawan ke tempat ini membuat banyak pihak yang ingin mendirikan usaha disana.

Banyak masyarakat datang dan kemudian menetap yang berasal dari luar daerah DIY ataupun luar pulau untuk mencari pekerjaan dengan motif yang beragam, namun berorientasi pada harapan untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Namun tidak selamanya kenyataan sejalan dengan apa yang diharapkan. Terkadang banyak kendala, rintangan serta tahapan yang harus dilalui oleh para pedagang tersebut.

Malioboro sebagai sektor perekonomian formal yang berada di bawah pengawasan pemerintahan Yogyakarta tentunya memiliki aturan-aturan yang ditetapkan baik bagi para pengunjung dan para pedagang di kawasan tersebut. Adanya aturan yang tidak memperhatikan dampak dari berbagai sudut pandangan bisa menimbulkan konflik dari berbagai golongan yang merasa dirinya tidak dipandang dalam pengambilan keputusan. Hal ini seharusnya menjadikan pemerintah setempat seharusnya terlebih dahulu melihat kebijakan tersebut dari berbagai sudut pandang, sebelum menerapkannya. Terutama yang berdampak bagi para pedagang di seputar kawasan Malioboro yang lebih dikenal dengan kelompok marginal.

Pengertian marjinal sendiri berhubungan dengan batas atau tepi (berada di pinggir) dan tidak terlalu menguntungkan⁴. Kelompok marjinal adalah suatu kelompok yang jumlahnya kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera⁵. Marjinal juga identik dengan masyarakat kecil atau kelompok yang terpinggirkan. Adapun kara-

[4] Moelyadi D. Dkk, 2016 (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Jakarta): Kelas Kata. Adjektiva.

[5] Diana Y. 2013, (*Dilema kelompok marjinal*, kompasiana.com), Regional.

keristiknya ialah tidak memiliki aset atau memiliki aset yang bernilai rendah, tinggal di lokasi terpencil, jauh dari prasarana sosial dan ekonomi, memiliki jumlah tanggungan non-produktif banyak dan sumber penghasilan kecil dan berasal dari kaum minoritas.⁶ Contoh kelompok marjinal diantaranya: pengemis, pemulung, buruh, petani dan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan.

Keberadaan mereka terkadang dianggap tidak penting di dalam pandangan masyarakat secara umum dan tidak diharapkan kehadirannya. Hal tersebut mendorong dilakukannya berbagai upaya untuk menyingkirkannya dari permukaan. Seperti yang diutarakan salah seorang tukang becak motor di kawasan Malioboro. Tukang becak ini mengatakan ketika ada pelarangan keberadaan kendaraan becak motor di sekitar wilayah Malioboro dengan beralih demi mempertahankan kekhasan Yogyakarta yaitu mempertahankan becak gayung/becak ontel sebagai *icon* Yogyakarta, sebagaimana pernyataannya:

kalau masalah becak gayung sebagai icon Jogja menurut saya itu cuman kamouflage. Sejak 1996 saya sudah narik becak gayung, tetapi tidak ada sepeser pun subsidi buat becak cuman dibiarin aja. Kita cuman dijual aja. Sebenarnya kita hidup yang di pertahankan itu becaknya atau pengemudi becaknya, wong kita ini bekerja untuk mempertahankan hidup?⁷.

Dari pernyataan tersebut bisa kita lihat bahwa bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan Malioboro. Pemerintsh berupaya memberikan kebebasan serta kesetaraan hak kepada setiap masyarakat yang menggantungkan hidupnya mencari nafkah di daerah sekitar kawasan wisata Malioboro.

Banyak problematika serta dilema yang dirasakan oleh para kelompok marjinal dalam usahanya mencari sumber penghidupan mereka guna menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Mereka terus mengupayakan segala cara dengan semampu mereka untuk dapat mempertahankan hidup di kota Yogyakarta. Khususnya di kawasan Malioboro sebagai perpaduan antara ekonomi modern dan tradisional seperti yang digambarkan oleh bukan salah satu tokoh ekonomi yaitu Booke dalam teorinya tentang dualisme ekonomi, bukan hanya sebatas itu Malio-

[6] Arkatiga, 2010 (*kelompok Marjinal Dalam PNPM-Pedesaan*, ; Bandung) hlm 21

[7] (Bapak s, Wawancara, Malioboro, tanggal 5 Desember 2018)

boro juga menggambarkan situasi tentang sektor ekonomi formal dan juga informal seperti pegangan dengan tempat yang menetap dan pedagang kecil/keliling.

Implementasi kebijakan Pemkot dalam pengaturan PKL di Yogyakarta merupakan skripsi yang ditulis oleh Ahdi Fadlan Hifdillah. Menurutnya, Pemerintah Yogyakarta melakukan penataan dengan mengeluarkan Peraturan Pemkot DIY No. 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima yang selanjutnya menjadi keputusan Walikota Yogyakarta No. 88 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Yogyakarta No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Seluruh peraturan tersebut dilaksanakan dalam bentuk program pembinaan, penataan dan penertiban PKL. Realisasi tersebut dijabarkan dalam tahapan kegiatan, yang meliputi sosialisasi kebijakan, penataan, pembinaan dan penertiban. Dari hasil penelitian ini dapat diidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pengaturan kebijakan terhadap PKL kawasan Malioboro. Hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya berasal dari faktor internal yaitu masalah keterbatasan jumlah SDM serta keterbatasan jumlah sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal yaitu pelanggaran yang dilakukan PKL terhadap Perwal serta adanya pengemis dan pengamen liar.⁸

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut ketentuannya, pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP kota Yogyakarta sesuai dengan perda no. 6 tahun 2010. Dalam melaksanakan tugasnya, SATPOL PP kota Yogyakarta melakukan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah daerah, mulai dari dinas perindustrian dan perdantangan DPP, DKP, ASSET sampai wali kota. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL tidak menerima relokasi dari DPP. Kegiatan yang dilakukan Satpol PP kota Yogyakarta dalam penertiban PKL dengan cara preventif, penindakan dan progresif.⁹

[8] Ahdi Fadlan hifdillah, 2010 (*Implementasi kebijakan pemkot dalam pengaturan PKL di yogyakarta*, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik; Yogyakarta) hlm. 118

[9] Widi Astuti, 2016 (*Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja*, UIN Sunan Kalijaga; Yogyakarta) hlm. 64

Pedagang Kaki Lima dalam masa krisis ditulis Agus Joko Pitoyo. Menurutnya, keberadaan sektor informal, terutama pedagang kaki lima di Kota Madya Yogyakarta pada masa mendatang agaknya tetap mempunyai prospek yang cukup menjanjikan. Secara regional telah terjadi penambahan unit pedagang kaki lima yang cenderung akan semakin meningkat. Pemerintah pun telah memberikan beberapa bentuk peraturan dalam rangka pembinaan dan pengembangan. Fleksibilitas usaha pedagang kaki lima sangat memungkinkan berkembangnya usaha ini dari waktu ke waktu. Bagi sebagian masyarakat pedagang kaki lima mampu menyediakan barang dengan harga yang relatif murah. Segala kebijakan pembinaan dan pengembangan yang telah dirancang oleh pemerintah tidak hanya pada tataran formal tetapi perlu adanya implementasi secara riil.¹⁰

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima makanan dan minuman di Jalan Malioboro Yogyakarta. Faktor-faktor tersebut tingkat signifikansi 5%, yaitu: lama usaha, jumlah tenaga kerja, luas kapling terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan PKL. Hal ini berarti hipotesis semua faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan terbukti, sedangkan dengan tingkat signifikansi 5% waktu dagang terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan PKL¹¹.

Masih terkait dengan pendapatan, terkait dengan karakteristik finansial PKL Malioboro dengan analisis cluster ditulis oleh Dila Damayanti dan Bera Asteria. Menurutnya kluster karakteristik finansial PKL Malioboro, berdasarkan karakteristik keuangan yang dimiliki oleh PKL Malioboro di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diklasifikasikan sebanyak dua cluster PKL Malioboro. Cluster yang teridentifikasi adalah cluster keuangan lemah dan cluster keuangan kuat. Cluster PKL Malioboro dengan karakteristik keuangan lemah cenderung memiliki modal, kas, asset, asset lancar, hutang penjualan, persediaan dan laba bersih yang rendah. Sedangkan cluster PKL Malioboro dengan karakteristik keuangan kuat cenderung memiliki kondisi keuangan yang

[10] Agus Joko Pitoyo, 1999 (*Pedagang Kaki Lima Pada Masa Krisis*, Populasi, V. 10, No. 2) Hlm. 95

[11] Dwi Okta Nurani, 2010 (*Faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima makanan dan minuman di jalan Malioboro Yogyakarta*, Universitas Sebelas Maret) Hlm. 39

lebih baik atau dengan kata lain modal, kas, kas, asset, asset lancer, hutang, penjualan, persediaan dan laba bersih yang besar.¹²

Penelitian ini melihat bagaimana kelompok marjinal di kawasan Malioboro dengan berbagai keterbatasan yang mereka miliki serta hambatan yang ada, tetapi mereka tetap berusaha dan berjuang dalam mempertahankan hidup mereka, di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan yang baik demi penghidupan yang lebih baik. Tentunya tulisan ini berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih menyoroti tentang peraturan yang berlaku di Malioboro atau pun klasifikasi pendapatan pedagangnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha menjelaskan bagaimana kehidupan kelompok marjinal di Malioboro dan sekitarnya dalam upaya mempertahankan hidup. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta observasi.

Jenis-Jenis Pekerjaan Kelompok Marjinal

Kota seperti yang kita lihat merupakan pusat industri, distribusi dan konsumsi barang yang besar. Hiruk pikuk masyarakat yang tinggal di perkotaan sangat padat dan terkadang melebihi kapasitas lahan yang memadai sehingga terkadang banyak masyarakat yang tinggal di tempat tempat yang tidak semestinya, seperti: di bantaran sungai, rel jembatan atau lahan kosong. Tidak adanya kepemilikan pribadi atas tanah disebabkan faktor ekonomi karena ketidakmampuan membeli tanah. Mereka menetap di tempat yang tidak sememstinya untuk ditinggali. Sebagaimana pernyataan pedagang sate:

Jangankan ngareppin kehidupan yang lebih baik di masa depan, untuk mencari uang buat makan sehari hari aja sulit mba dan masih kurang tapi tetap saya syukuri!¹³.

Pekerjaan yang dapat mereka lakukan dengan menjadi PKL, buruh gendong, berdagang asongan, tukang becak dan berbagai pekerjaan informal lainnya di kawasan Malioboro guna mempertahankan hidup bersama keluarganya. Sebagaimana penuturan pedagang di emperan toko-toko kawasan Malioboro menyebutkan :

[12] Dila Damayanti, dkk. 2015 (*Kajian karakteristik finansial PKL Malioboro dengan analisis cluster*, Jurnal Riset Manajemen, Vol. 2, No. 2) hlm. 195

[13] Wawancara Ibu M, di Malioboro, tanggal 5 Desember 2018

Sebenarnya capek kerja kayak ginian tapi mau gimana lagi bisanya cuman ini, mau cari kerja lain tapi susah kalau pun ada pasti minta ijazah SMA padahal saya cuman lulusan SMP. Saya sih berharap kelak bisa dapat pekerjaan yang lebih baik!¹⁴

Kesulitan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan karena kurangnya lapangan kerja dan juga kurangnya kemampuannya. Implikasinya mereka melakukan migrasi ke daerah lain dalam lintas domestik maupun pulau. Mayoritas migran tersebut tidak memiliki ijazah dan keahlian khusus yang bisa dijadikan daya tarik untuk mendapatkan pekerjaan guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka hanya bisa melakukan pekerjaan yang mengandalkan otot seperti menjadi pekerja serabutan, pedagang atau kuli bangunan.

Tuntutan ekonomi menjadi alasan seorang harus bekerja untuk mempertahankan hidup di tengah persaingan hidup saat ini. Banyak yang menginginkan bekerja, namun sering kali kita melihat bahwa jumlah lapangan kerja tidak berbanding lurus dengan banyaknya jumlah tenaga kerja, terutama di era perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi di setiap sektor pekerjaan menjadi tantangan bagi para pekerja yang tidak memiliki kemampuan atau skill khusus dalam menggunakan teknologi. Hal terburuknya ialah bertambahnya jumlah pengangguran yang berujung pada kehidupan mereka tanpa penghasilan. Tentu saja tingkat kemiskinan pasti bertambah.

Hambatan mendapatkan pekerjaan

Izin Usaha

Siapa pun pasti menginginkan untuk membangun serta memulai usaha di kawasan Malioboro. Terutama disebabkan potensi pendapatan yang akan didapatkan terbilang besar dengan melihat banyaknya jumlah pengunjung. Meski begitu hal tersebut bukanlah sebuah perkara mudah karena untuk berjualan di Malioboro harus dengan mengantongi izin dari pihak pengelola yaitu UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang berwenang memberikan izin kepada pedagang kaki lima, tukang becak, buruh dan pekerja-pekerja lainnya untuk bekerja di sekitar kawasan Malioboro. Saat ini total PLK yang ada di kawasan tersebut mencapai

[14] Wawancara Mas P, di Malioboro, tanggal 5 desember 2018

2.000 orang¹⁵. Mereka yang berjualan tersebut memiliki surat izin berjualan. Aturan bahwa para pedangan kali lima hanya boleh mengantongi surat izin dari pihak pengelola sejak dibukanya UPT Malioboro berlaku sejak tahun 2009. Sebelumnya mereka hanya cukup dengan mengantongi surat izin dari kelurahan setempat.

Surat izin berjualan dari pihak unit pelaksana teknis tidak serta merta didapatkan dengan mudah. Mengingat siapa pun yang ingin berusaha dan bekerja di sekitar kawasan Malioboro harus tergabung terlebih dahulu menjadi anggota dari paguyuban-paguyuban¹⁶ yang sesuai dengan profesinya. Paguyuban yang menjadi perantara antara pedagang dengan pihak UPT untuk mendapatkan izin berdagang atau bekerja di Malioboro.

Wadah atau organisasi tersebut memiliki peran penting bagi para pedagang. Paguyuban tersebut dijadikan sebagai tempat untuk saling berkomunikasi dan mempererat tali silaturahmi. Selain itu, organisasi ini juga dijadikan sebagai media untuk saling berkomunikasi atau menyelesaikan permasalahan antar kelompok. Wadah atau organisasi tersebut dibentuk sudah sangat lama, seperti Tri Dharma misalnya, dibentuk pada awal tahun 1970.¹⁷

Paguyuban-paguyuban yang ada di Malioboro, diantaranya: Persatuan Masyarakat Madura, Persatuan Pedagang Kaki Lima dan untuk para penarik becak terdapat paguyubannya sendiri dan masih banyak lagi yang ditandai dengan warna pakaian persatuan yang berbeda-beda, sehingga para petugas SATPOL PP bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja yang mengantongi izin dan yang tidak mengantongi izin dari pihak UPT. Walau pun telah ada aturan yang mewajibkan para pedangan atau pekerja lainnya meminta surat izin kepada pihak UPT, tetapi terkadang masih ada yang nekat untuk tetap berjualan tanpa menggunakan surat izin. Terlebih lagi bagi para PKL di area sekitar Mall Malioboro.

Modal Usaha

Dalam kegiatan ekonomi, modal merupakan faktor produksi yang sangat penting, baik berupa uang atau pun barang. Apabila seseorang in-

[15] Switzzy, 2017 (*Filosofi Selasa Wage Sebagai Hari Libur PKL Malioboro*, Liputan 6, Yogyakarta): Regional

[16] Gil, 2016 (*UPT Malioboro Tegaskan PKL Di Pedestrian Malioboro Tak Kantongi Izin Resmi*, Tribun Jogja; Yogyakarta) Regional

[17] Purwanto, 2012 (*Mengelola Konflik Pemanfaatan Ruang*, Tata Loka, Vol. 14, No.3 ; Yogyakarta) hlm. 174

gin melakukan kegiatan ekonomi namun tidak memiliki modal, maka keinginannya tidak dapat tercapai. Besar kecilnya modal mempengaruhi jumlah produksi. Adapun unsur dari modal, yaitu: informasi, fasilitas fisik dan peralatan. Keberadaan modal ini menjadi penjunjang untuk terlaksananya kegiatan perekonomian seperti uang, gedung, peralatan dan perlengkapan dalam upaya memproduksi sebuah barang. Kelompok marjinal Malioboro yang menginginkan membangun usaha, banyak yang terkendala pada permasalahan kepemilikan modal. Mereka tidak mempunyai modal yang cukup untuk digunakan dalam kegiatan ekonominya.

Skil Bekerja yang Minim

Problematika lain yang sangat berpengaruh pada terhambatnya keinginan para pendatang memperoleh kehidupan lebih baik terkait keahlian atau kemampuan (SDM) mereka. Sumber daya manusia dalam hal ini kualitas tenaga kerja memiliki posisi yang utama dalam mendapatkan pekerjaan. Dalam upaya pertumbuhan ekonomi tentu memerlukan tenaga kerja yang berkualitas karena kualitas ketenagakerjaan mempengaruhi jumlah produksi dan pembangunan manusia serta pertumbuhan ekonomi. Tanpa pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak akan dapat dicapai pembangunan ekonomi yang cukup memadai.¹⁸

Ketidakmampuan dan kurangnya kualitas (inovasi dan kreativitas) yang mereka miliki membuat mereka tidak dapat terserap dalam pekerjaan yang lebih baik, sehingga demi meneruskan hidup, mereka mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas diri dan yang mereka mampu walau penghasilan yang didapatkan tidak seberapa. Permasalahan ini lah yang menyebabkan mereka beralih kepada pekerjaan yang mengandalkan otot atau pekerja kasar.

Konflik dan Rekonsiliasi Konflik dalam Menjalankan Usaha

Konflik yang terjadi di kawasan Malioboro seringkali terjadi antara pedagang dan petugas keamanan. Petugas keamanan tersebut bertugas menertibkan kawasan. Penertiban dilakukan oleh petugas SATPOL PP terhadap para PKL bandel di sekitar wilayah Malioboro. Adapun

[18] Lonn, dkk, 2013 (*Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mamasa, Pasca sarjana Unhas; Sulbar*) hlm. 3

tugas SATPOL PP tersebut membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.¹⁹ Dengan adanya SATPOL PP diharapkan dapat mengendalikan pedagang kaki lima dan pekerja-pekerja lainnya di Kota Yogyakarta dan tercipta keamanan dan kenyamanan masyarakat kota Yogyakarta. Dengan berdagang, masyarakat dapat hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa tergantung pada bantuan dari orang lain.

Kondisi Malioboro saat ini, setelah adanya renovasi trotoar bagian barat Malioboro nampak luas dan jauh lebih baik di banding yang sebelumnya yang sempit dan kondisi trotoar yang berlubang-lubang dan kotor serta becek. Perluasan ini memberikan berbagai macam dampak tergantung pada sudut pandangnya. Dilihat dari sisi pengunjung, perluasan ini memberikan dampak positif karena trotoar untuk pejalan kaki berubah menjadi luas pada saat Malioboro sedang dalam keadaan banyak pengunjung seperti pada saat-saat tertentu (hari libur nasional, hari raya atau hari lainnya). Pengunjung tidak terlalu berdesak-desakan satu sama lain dan membuat pejalan kaki lebih nyaman karena kondisi jalan sudah baik tidak ada lubang-lubang dan becek. Sedangkan, dilihat dari sudut pandang para penarik/pengemudi becak dan delman, dengan adanya revovasi tersebut, perluasan trotoar itu membawa dampak negatif bagi mereka karena jumlah lahan parkir untuk menunggu penumpang menjadi sempit, sehingga banyak yang kehilangan tempat parkir di daerah sekitar kawasan Maliboro.

Namun demikian, kesabaan, ketelatenan, ulet serta fokus terhadap niat sangat penting dalam menjaga kekonsistenan dalam mencapai impian. Terkait dengan konflik dalam berusaha yang mereka lakoni selama berjualan di Malioboro. Menurutnya: “kecil namun harus tetap di syukuri”, itulah yang menjadi semboyan bagi para kelompok marjinal di Malioboro yang terus berusaha dan bekerja keras demi memperoleh pendapatan.

[19] Astuti W. 2016, (*Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dikawasan Maliboro Ileh Satuan Polisi Pamung Praja*, Fakultas Ilmu Hukum Dan Syari'ah Uin Sunan Kalijaga; Yogyakarta) hlm. 3

Demi menjaga solidaritas dengan sesama penarik becak dan pengemudi delman, mereka secara bergantian mengisi tempat tersebut, jika satu becak dan delman pergi mengantar penumpang maka yang mengisi tempat parkir yang kosong itu ialah penarik dan pengemudi delman yang lain. Dengan upaya tersebut menjadi salah cara bagi para penarik/pengemudi becak dan delman dalam memperoleh haknya masing-masing untuk mencari nafkah di kawasan Malioboro.

Penutup

Indonesia sebagai negara berkembang, tidak terlepas dari sektor informal yang mendominasi kegiatan-kegiatan perekonomian, kegiatan ekonomi tersebut dimasyarakat merupakan kegiatan yang berskala kecil karena keterbatasan kepemilikan ataupun sumber modal yang dimiliki oleh para pengusaha tersebut, kebanyakan skala perekonomian di mulai dari usaha menengah hingga usaha kecil lainnya. Dalam hal usaha, Malioboro menjadi tujuan utama masyarakat dimana ketertarikan tersebut didorong oleh beberapa hal contoh banyaknya wisatawan yang berkunjung. Kelompok marjinal Malioboro yang telah diterangkan sebelumnya serupa dengan sector marjinal yang ciri-ciri diantara lain adalah kegiatan ekonomi skala kecil.

Kelompok marjinal ini hanya bisa menjalankan kegiatan ekonomi kecil yang penggunaan modalnya minimum atau bahkan hanya menawarkan jasa pada konsumennya seperti para buruh angkut yang mengandalkan otot mereka guna mendapatkan kesempatan kerja serta memperoleh pendapatan. Meskipun kegiatan ataupun transaksi ekonomi yang mereka lakukan hanya berskala kecil namun mereka tetap melanjutkannya karena modal yang menjadi alasan utama namun juga keterbatasan pendidikan dan keahlian yang mereka miliki, ketidakberdayaan memaksa kelompok ini menjalani dan terus berusaha walau perolehan keuntungan sangat tipis.

Daftar Pustaka

- Ahsanul, R. (2014). Kajian Keberadaan Wisata Belanja Malioboro Terhadap Pertumbuhan Jasa Akomodasi Di Jalan Sosrowijayan Dan Jalan Dagen. *Teknik PWK*, 937.
- Arkatiga, T. (2010). *Kelompok Marginal Dalam PNPM-Pedesaan*. Bandung: Arkatiga.
- Astuti, W. (2016). Pelaksanaan Penertiban pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamung Praja . *UIN Sunan Kalijaga*, 62.
- Damayanti, D., & Asteria, B. (2015). Karakteristik finansial PKL Malioboro Dengan Analisis Cluster. *Riset Majajement*, 195.
- DIY, T. P. (2015). *Statistika Kepariwisataaan*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- DIY, T. P. (2015). *Statistika Kepariwisataaan*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Fadlan, A. (2010). INplementasi Kebijakan Pemkot Dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 118.
- Gil. (2016). *UPT Malioboro Tegaskan PKL Di Pedestrian Malioboro Tak Kantongi Izin Resmi*. Yogyakarta: Tribun Jogja.
- Joko, A. (1999). Pedang Kaki Lima Pada Masa Krisis. *Populasi*, 95.
- Lonni, d. (2013). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mamasa*. Mamasa, Sulbar: Pascasarjana Unhas.
- Nuraini, D. O. (2010). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Makanan Dan Minuman Dijalan Malioboro. *Universitas Sebelas Maret*, 39.
- Purwanto. (2012). Mengelola konflik Pemanfaatan Ruang Berbasis Nilai Nilai Lokal Ruang Kota Koridor Jalan Malioboro. *Tata Loka*, 174.
- Switzky. (2017). *Filosofi Selasa Wage Sebagai Hari Libur PKL Malioboro*. Yogyakarta: Liputan 6.
- Wijayanti, A. (2010). Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Pedagang Kamki Lima Dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Wisatawan Di Malioboro Yogyakarta. *Khasana Ilmu*, 61.
- Y, D. (2013). *Dilema Kelompok Marjinal*. 2013: Kompasiana.

